

2021
Laporan Tahunan
Annual Report



MENGEJAR PERTUMBUHAN INKLUSIF

THE PURSUIT OF INCLUSIVE GROWTH



SEKAPUR SIRIH

FOREWORD



MENGEJAR PERTUMBUHAN INKLUSIF

THE PURSUIT OF INCLUSIVE GROWTH

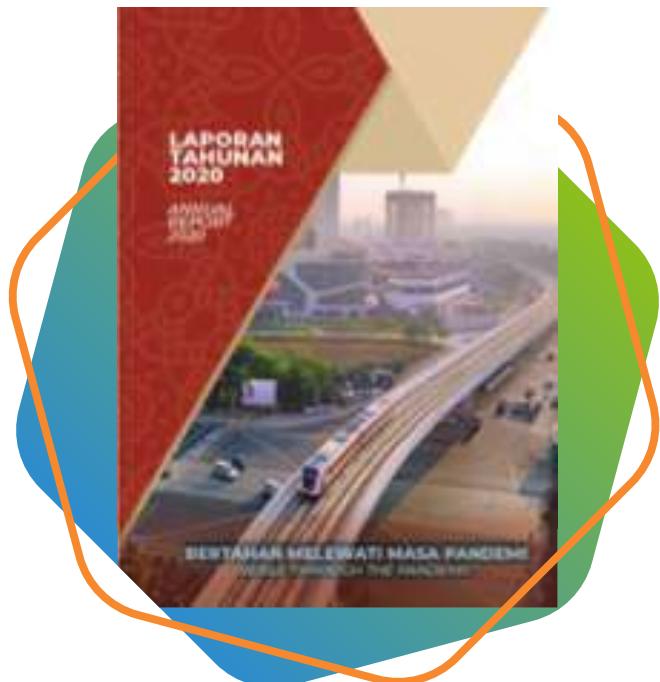
Tema ini menggambarkan upaya LRT Jakarta dalam mengejar pertumbuhan yang inklusif melalui berbagai strategi dan inovasi, di antaranya, dengan mengembangkan kawasan TOD dan jasa perawatan industri kereta api perkotaan, hingga menyiapkan sebuah transformasi untuk mengembangkan apa yang sudah dilakukan selama dua tahun terakhir sejak beroperasi secara komersial 1 Desember 2019. Gerak dinamis usaha dan persiapan yang dilakukan LRT Jakarta dalam menyediakan moda transportasi publik, digambarkan mengalami pertumbuhan dengan melibatkan berbagai komponen yang terdapat di LRT Jakarta.

This theme describes the efforts of the LRT Jakarta in pursuing inclusive growth through various strategies and innovations, among others, by developing the TOD area and urban rail industry maintenance services, and by preparing a transformation to develop what has been conducted over the last two years since operating commercially on December 1, 2019. The dynamic movement of business and preparations conducted by the LRT Jakarta in providing public transportation modes, is described as experiencing growth involving the various components within the LRT Jakarta.



KESINAMBUNGAN TEMA

THEME CONTINUITY



BERTAHAN MELEWATI MASA PANDEMI

RESILE THROUGH THE PANDEMIC



LRT JAKARTA GOES TO COMMERCIAL

TUGAS POKOK PT LRT JAKARTA

MAIN DUTIES OF PT LRT JAKARTA

Tugas pokok PT LRT Jakarta meliputi penyelenggaraan prasarana dan sarana moda transportasi LRT Jakarta, melakukan operasi dan pemeliharaan LRT Jakarta dan mengembangkan bisnis melalui usaha properti di stasiun dan kawasan sekitarnya.

The main duties of PT LRT Jakarta include the provision of infrastructure and facilities for the LRT Jakarta mode of transportation, carry out operation and maintenance of LRT Jakarta and develop business through property business in stations and surrounding areas.



Penyelenggaraan Prasarana LRT
Implementation of LRT Infrastructure



Penyelenggaraan Sarana LRT
Implementation of LRT Facilities

Pembangunan

Construction

Pengadaan

Supplying

Operasi & Perawatan

Operation and Maintenance

Operasi & Perawatan

Operation and Maintenance

Pengusahaan

Undertaking

Pembangunan

Construction

Ruang Lingkup PT Jakpro

Scope of PT Jakpro

Ruang Lingkup PT LRTJ

Scope of PT LRTJ

Perjanjian Penyelenggaraan

Operation Agreement



LRT JAKARTA

KILAS KINERJA 2021

OPERATION AGREEMENT

KINERJA OPERASIONAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS



PERAWATAN PRASARANA

INFRASTRUCTURE
MAINTENANCE

Jalur dan Bangunan
Railways and Buildings

2636 kali | times



PERAWATAN SARANA

FACILITIES
MAINTENANCE

Perawatan Kereta
Train Car Maintenance

1852 kali | times

JASA PENJUALAN TEKNIS

TECHNICAL SALES SERVICE

Rp2,77 Miliar
IDR 2,77 Billion



 **538%**





KINERJA KEUANGAN FINANCIAL PERFORMANCE



Rp319,27 Miliar
IDR 319.27 Billion



Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents

Rp87,11 Miliar
IDR 87.11 Billion



27,56%
Pendapatan usaha
Operating Revenue

Pendapatan Perseroan meningkat 27,56% menjadi Rp134,35 miliar dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp105,32 miliar

The Company's revenue increased by 27.56% to IDR 134.35 billion compared to 2020 which was IDR 105.32 billion



65,15%
Laba Komprehensif
Comprehensive Income

Pendapatan Perseroan meningkat 27,56% menjadi Rp134,35 miliar dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp105,32 miliar

Comprehensive income increased by 65.15% from IDR 1.98 billion in 2020 to IDR 3.27 billion in 2021

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Skor GCG Skor GCG

Perseroan mencatat skor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada tahun 2021 sebesar 85.2 yang termasuk dalam predikat "Baik". Nilai ini meningkat 6,22 poin dari skor penilaian tahun 2020 yang tercatat sebesar 78,98 juga dengan predikat kualifikasi "Baik".

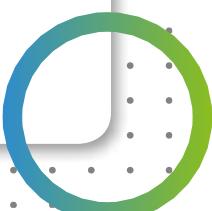
The Company recorded an assessment score of the implementation of Good Corporate Governance in 2021 of 85.2 which is included in the "Good" category. This score is an increase of 6.22 points from the 2020 assessment score which was recorded at 78.98, also within the "Good" category.

"85,2"

ISO 9001:2015

Perseroan melakukan standardisasi pada aspek kualitas produk dan jasa, LRT melalui ISO Sistem Manajemen Mutu berstandar internasional, yaitu ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu untuk masa berlaku 27 Maret 2020 hingga 26 Maret 2023.

The Company standardizes the quality aspects of LRT products and services through the ISO Quality Management System with international standards, namely ISO 9001:2015 on Quality Management System for the period from March 27, 2020 to March 26, 2023.



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

SEKAPUR SIRIH FOREWORD	2	WILAYAH OPERASI AREAS OF OPERATION	55
KESINAMBUNGAN TEMA THEME CONTINUITY	3	VISI, MISI, SIKAP DASAR DAN BUDAYA PERUSAHAAN VISION, MISSION, AND CORPORATE VALUE	56
TUGAS POKOK PT LRT JAKARTA MAIN DUTIES OF PT LRT JAKARTA	4	STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE	58
KILAS KINERJA 2021 OPERATION AGREEMENT	6	PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARDS AND CERTIFICATION	60
DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS	8	PROFIL DEWAN KOMISARIS PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS	61
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING HIGHLIGHT ON IMPORTANT FINANCIAL DATA	12	PROFIL DIREKSI PROFILE OF THE BOARD OF BOARD OF DIRECTORS	64
PERFORMA PERFORMANCE		PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICERS	67
IKHTISAR OPERASIONAL OPERATIONAL HIGHLIGHT	18	DEMOGRAFI KARYAWAN DAN SEKILAS TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI EMPLOYEE DEMOGRAPHIC AND COMPETENCY DEVELOPMENT	70
IKHTISAR SAHAM SHARE HIGHLIGHT	20	PENDIDIKAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, AUDIT INTERNAL, DAN UNIT MANAJEMEN RISIKO EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDIT AND RISK MANAGEMENT UNIT	74
INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK, ATAU OBLIGASI KONVERSI INFORMATION ABOUT BONDS, SUKUK, OR CONVERTIBLE BOND	22	KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDER COMPOSITION	78
INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN LAINNYA INFORMATION ABOUT OTHER FUNDING SOURCES	22	STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN COMPANY GROUP STRUCTURE	82
PERISTIWA PENTING IMPORTANT EVENTS	23	INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI SERTA JOINT VENTURE (JV) DAN SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV) INFORMATION ON SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, JOINT VENTURE (JV) AND SPECIAL PURPOSE VEHICLES (SPV)	83
LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT		KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING	83
LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS REPORT	28	KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE AND LISTING	83
LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' REPORT	34	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS	84
SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT LRT JAKARTA STATEMENT LETTER OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE 2021 ANNUAL REPORT OF PT LRT JAKARTA	44	INFORMASI WEBSITE PERUSAHAAN INFORMATION ON COMPANY WEBSITE	85
SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT LRT JAKARTA STATEMENT LETTER OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE 2021 ANNUAL REPORT OF PT LRT JAKARTA	45	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON COMPANY PERFORMANCE	
PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE		TINJAUAN UMUM GENERAL REVIEW	90
INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY	48	TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA OVERVIEW OF OPERATIONS PER BUSINESS SEGMENT	94
RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN BRIEF HISTORY OF THE CORPORATE	50	ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECTS	103
JEJAK LANGKAH MILESTONE	52	TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW	105
KEGIATAN DAN BIDANG USAHA CORPORATE ACTIVITIES AND LINE OF BUSINESS	53		



PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERDAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN CHANGES IN LAW AND REGULATIONS THAT IMPACT ON THE COMPANY	117	PERKARA PENTING IMPORTANT EVENTS	229
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI CHANGES IN ACCOUNTING POLICY	118	AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA	230
ASPEK PERPAJAKAN DAN KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA ASPECTS OF TAXATION AND CONTRIBUTION TO THE STATE	119	PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN CORPORATE CODE OF CONDUCT	231
INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY	120	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM	234
PROSPEK USAHA BUSINESS PROSPECT	121	KEBIJAKAN TERKAIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI POLICY REGARDING GRATIFICATION CONTROL	237
INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT OCCURED AFTER THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE	122	KEBIJAKAN TERKAIT AKTIVITAS POLITIK DAN SOSIAL ORGANISASI POLICY RELATED TO ORGANIZATIONAL POLITICAL AND SOCIAL ACTIVITIES	238
FUNGSI PENUNJANG BISNIS BUSINESS SUPPORT FUNCTIONS		LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) STATE ADMINISTRATOR WEALTH REPORT (LHKPN)	238
SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES	126	PENGADAAN BARANG DAN JASA PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES	239
TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY	139	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN VIOLATION REPORTING SYSTEM	241
TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE		PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS	242
KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY	146	TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES	243
PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE	149	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENT RESPONSIBILITY	
STRUKTUR TATA KELOLA GOVERNANCE STRUCTURE	153	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENT RESPONSIBILITY GOVERNANCE	246
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS	167	TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAK ASASI MANUSIA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN HUMAN RIGHTS	249
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	176	TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS	251
TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TRANSPARENCY OF INFORMATION REGARDING THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS	189	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE ON THE ASPECTS OF ENVIRONMENT	255
ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS	204	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN KERJA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE ON THE ASPECTS OF EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY	262
ORGAN PENDUKUNG DIREKSI SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS	210	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE ON THE ASPECTS OF COMMUNITY INVOLVEMENT AND DEVELOPMENT	269
AUDITOR EKSTERNAL EXTERNAL AUDITOR	220	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PRODUK DAN KONSUMEN/PELANGGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE ON THE ASPECTS OF PRODUCTS AND CUSTOMERS/CONSUMERS	271
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM	222	LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS	
MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT	223		
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	228		



LRT JAKARTA



2021 LAPORAN TAHUNAN
Annual Report



01

PERFORMA PERFORMANCE



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

HIGHLIGHT ON IMPORTANT FINANCIAL DATA

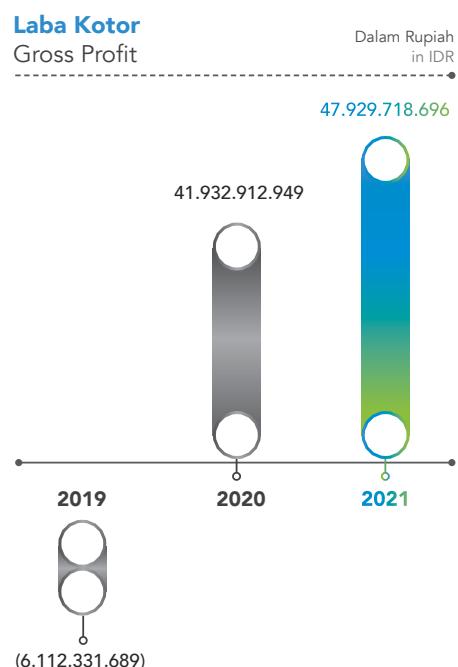
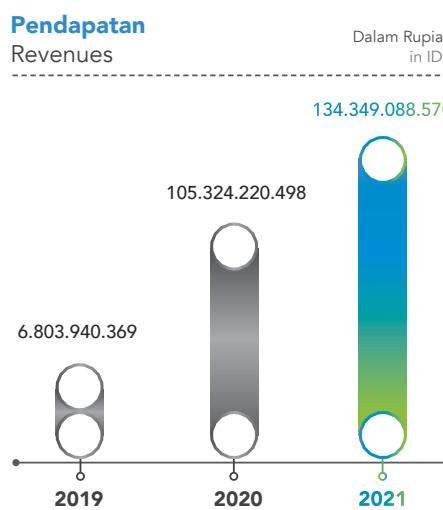
Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

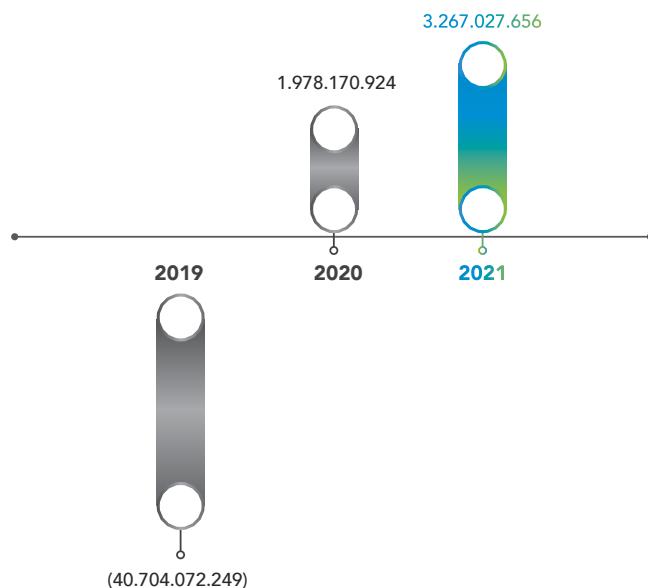
Uraian Description	2021	2020	2019	Selisih Difference 2021-2020	YoY 2020-2021 (%)
Pendapatan Revenues	134.349.088.570	105.324.220.498	6.803.940.369	29.024.868.072	27,56%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(86.419.369.875)	(63.391.307.549)	(12.916.272.058)	23.028.062.326	36,33%
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	47.929.718.696	41.932.912.949	(6.112.331.689)		14,30%
Beban Usaha Operating Expenses					
Beban Penjualan Sales Expenses	(218.009.464)	(914.398.695)	(1.096.176.610)	(696.389.231)	-76,16%
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(44.409.165.702)	(39.386.858.769)	(54.077.411.040)	5.022.306.933	12,75%
Jumlah Beban Penjualan, Beban Umum & Administrasi Total Sales Expenses and General and Administrative Expenses	(44.627.175.166)	(40.301.257.464)	(55.173.587.650)	4.325.917.702	10,73%
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	3.302.543.530	1.631.655.485	(61.285.919.339)	1.670.888.045	102,40%
Pendapatan/Beban Lainnya Other Income/Expenses					
Pendapatan Lainnya Other Income	6.733.974.683	3.030.810.595	7.308.843.195	3.703.164.088	122,18%
Beban Lainnya Other Expenses	(4.177.180.357)	(494.245.388)	(1.305.275.464)	3.682.934.969	745,16%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	5.859.337.856	4.168.220.692	(55.282.351.608)	1.691.117.164	40,57%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefit (Expense)					
Pajak Kini Current Income Tax	-	-	-	-	-
Pajak Tangguhan Deferred Tax	(2.219.899.964)	(2.723.919.394)	14.906.304.410	(504.019.430)	-18,50%
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Total Income Tax Benefit (Expense)	(2.219.899.964)	(2.723.919.394)	14.906.304.410	(504.019.430)	-18,50%
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Expense)					



Uraian Description	2021	2020	2019	Selisih Difference 2021-2020	YoY 2020-2021 (%)	
Keuntungan Aktuarial atas Imbalan Kerja Actuarial Gain on Employee Benefits	(477.449.021)	684.448.238	(437.366.735)	(1.161.897.259)	-169,76%	▼
Dampak Pajak Income Tax Impact	105.038.785	(150.578.612)	109.341.684	255.617.397	169,76%	▼
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Total Other Comprehensive Income	(372.410.236)	533.869.626	(328.025.051)	(906.279.862)	-169,76%	▼
Laba Komperehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	3.267.027.656	1.978.170.924	(40.704.072.249)	1.288.856.732	65,15%	▲



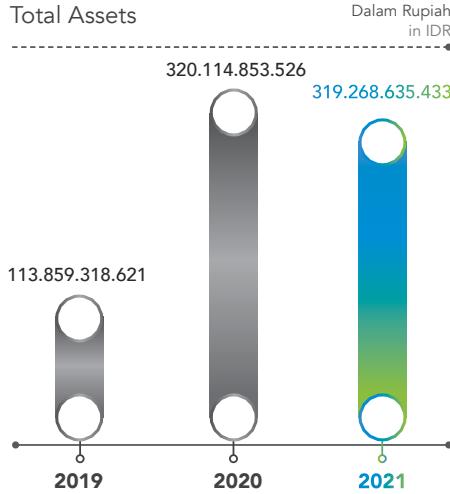
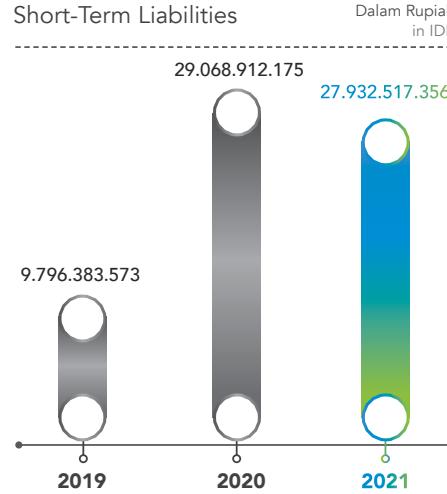
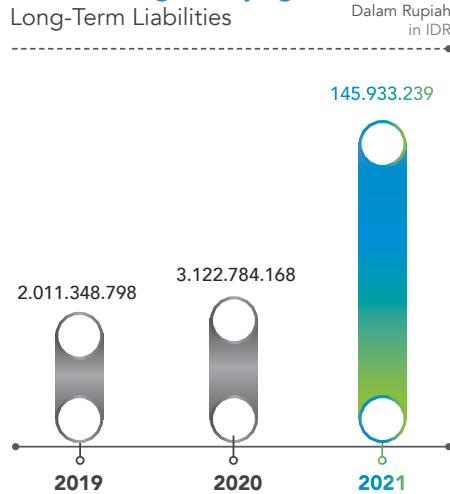
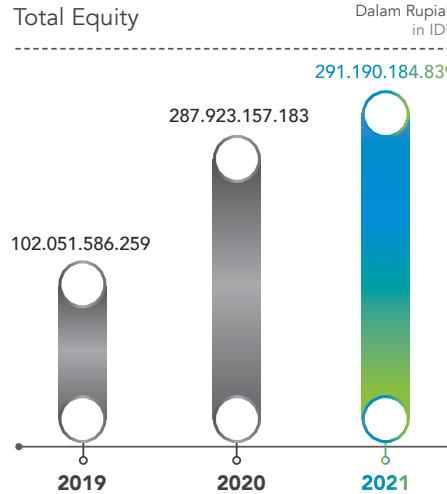

Laba Komprehensif Tahun Berjalan
 Comprehensive Income for the Year

 Dalam Rupiah
 in IDR

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

Uraian Description	2021	2020	2019	Selisih Difference 2021-2020	YoY 2020-2021 (%)
ASET ASSETS					
Aset Lancar Current Assets					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	87.114.933.482	93.155.474.994	66.624.188.751	(6.040.541.512)	-6,48%
Piutang Usaha Account Receivables					
Pihak Berelasi Affiliated Parties	13.796.629.493	1.672.000.000	6.063.883.407	12.124.629.493	725,16%
Pihak Ketiga Third Parties	795.048.906	6.286.308	4.535.698	788.762.598	12.547,31%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Accrued Revenues	3.613.539.147	1.324.936.564	356.353.976	2.288.602.583	172,73%
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	937.235.519	1.909.537.467	3.300.565.712	(972.301.948)	-50,92%
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	2.280.673.964	1.160.514.756	1.112.751.584	1.120.159.208	96,52%
Uang Muka Advance	494.028.441	125.340.293	-	368.688.148	294,15%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	109.032.088.952	99.354.090.382	77.462.279.129	9.677.998.570	9,74%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets					
Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash and Cash Equivalents	1.245.384.737	-	-	1.245.384.737	100,00%



Uraian Description	2021	2020	2019	Selisih Difference 2021-2020	YoY 2020-2021 (%)	
Aset Tetap - Bersih Net-Fixed Assets	194.415.650.032	203.669.327.410	16.174.187.184	(9.253.677.378)	-4,54%	▼
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	13.508.631.036	15.623.492.216	18.497.990.222	(2.114.861.180)	-13,54%	▼
Aset Tak Berwujud - Bersih Intangible Assets - Net	1.066.880.676	1.467.943.518	1.724.862.086	(401.062.842)	-27,32%	▼
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	210.236.546.481	220.760.763.144	36.397.039.492	(10.524.216.663)	-4,77%	▼
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	319.268.635.433	320.114.853.526	113.859.318.621	(846.218.093)	-0,26%	▼
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITY AND EQUITY						
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities						
Utang Usaha Account Payables						
Pihak Berelasi Affiliated Parties	-	13.398.257.574	-	-13.398.257.574	-100,00%	▼
Pihak Ketiga Third Parties	16.136.071.925	4.664.051.451	5.137.498.816	11.472.020.474	245,97%	▲
Utang Pajak Tax Payables	635.594.816	1.018.088.533	586.088.221	(382.493.717)	-37,57%	▼
Beban Akrual Accrued Expenses	9.783.736.800	8.912.036.684	3.662.877.225	871.700.116	9,78%	▲
Pendapatan Diterima di Muka Prepaid Income	1.178.500.000	694.833.333	0	483.666.667	69,61%	▲
Jaminan dan Uang Muka Lainnya Guarantees and Other Advances	150.050.000	126.150.000	0	23.900.000	18,95%	▲
Utang Retensi Retained Debt	21.234.551	217.060.345	248.190.707	(195.825.794)	-90,22%	▼
Utang Lain-Lain Other Payables	27.329.269	38.434.255	161.728.604	(11.104.986)	-28,89%	▼
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities	27.932.517.356	29.068.912.175	9.796.383.573	(1.136.394.819)	-3,91%	▼
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities						
Kewajiban Imbalan Pascakerja Post-Employment Benefits	145.933.239	3.122.784.168	2.011.348.798	(2.976.850.929)	-95,33%	▼
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Long-Term Liabilities	145.933.239	3.122.784.168	2.011.348.798	(2.976.850.929)	-95,33%	▼
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	28.078.450.595	32.191.696.343	11.807.732.362	(4.113.245.748)	-12,78%	▼
EKUITAS EQUITY						
Modal Saham Share Capital	333.893.400.000	333.893.400.000	150.000.00.0000	-	0,00%	-
Saldo Laba (Rugi) Profit (Loss) Balance	(42.703.215.161)	(47.948.413.741)	(47.948.413.741)	(5.245.198.580)	-10,94%	▼
Jumlah Ekuitas Total Equity	291.190.184.839	287.923.157.183	102.051.586.259	3.267.027.656	1,13%	▲
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	319.268.635.433	320.114.853.526	113.859.318.621	(846.218.093)	-0,26%	▼


Jumlah Aset
 Total Assets

Liabilitas Jangka Pendek
 Short-Term Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang
 Long-Term Liabilities

Ekuitas

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

Uraian Description	2021	2020	2019	Selisih Difference 2021-2020	YoY 2020-2021 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	(2.307.520.316)	31.017.571.485	(56.964.966.037)	(33.325.091.801)	-107,44%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities	(3.733.021.195)	(4.486.285.242)	(16.201.802.028)	(753.264.047)	-16,79%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Funding Activities	-	-	2.521.229.340	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(6.040.541.511)	26.531.286.243	(70.645.538.725)	(32.571.827.754)	-122,77%
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash Balance and Cash Equivalents at Beginning of the Year	93.155.474.994	66.624.188.751	137.269.727.476	26.531.286.243	39,82%
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash Balance and Cash Equivalents at End of the Year	87.114.933.482	93.155.474.994	66.624.188.751	(6.040.541.512)	-6,48%



Rasio-Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya

Financial Ratios and Other Important Ratios

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	2019
PROFITABILITAS PROFITABILITY				
Rasio Pengembalian atas Aset (ROA) Return on Assets Ratio (ROA)				
	%	1,14%	0,45%	-35,46%
Rasio Pengembalian atas Ekuitas (ROE) Return on Equity Ratio (ROE)	%	1,25%	0,50%	-39,56%
Imbal Hasil Investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	%	1,14%	0,45%	-35,46%
LIKUIDITAS LIQUIDITY				
Rasio Lancar Current Ratio	%	390%	341,79%	790,72%
Rasio Kas Cash Ratio	%	312%	320,46%	680,09%
Rasio Cepat Quick Ratio	%	312%	341,79%	790,72%
AKTIVITAS ACTIVITIES				
Perputaran Piatung Accounts Receivable Turnover	kali times	16,51	27,19	1,12
Perputaran Aset Asset Turnover	kali times	0,42	0,49	0,05
STRUKTUR MODAL KERJA VENTURE CAPITAL STRUCTURE				
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liability to Equity Ratio	%	9,64%	11,18%	11,57%
Rasio Liabilitas terhadap Aset Liability to Assets Ratio	%	8,79%	10,06%	10,37%
Rasio Modal Sendiri terhadap Aset Equity to Asset Ratio	%	91,21%	89,94%	89,63%
MARJIN MARGIN				
Marjin Laba Kotor Gross Profit Margin	%	35,68%	39,81%	-89,84%
Marjin Laba Usaha Operating Profit Margin	%	2,46%	1,55%	-900,74%
Marjin Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit for the Year Margin	%	2,43%	1,88%	-598,24%
PERTUMBUHAN GROWTH				
Pendapatan Bersih Net Income	%	27,56%	1447,99%	N/A
Laba Usaha Operating Profit	%	102,40%	N/A	N/A
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit for the Year	%	65,15%	N/A	N/A
Ekuitas Equity	%	1,13%	182,13%	-28,51%
Aset Assets	%	-0,26%	181,15%	-22,37%



IKHTISAR OPERASIONAL

OPERATIONAL HIGHLIGHT

Kinerja Segmen Bisnis & Strategi

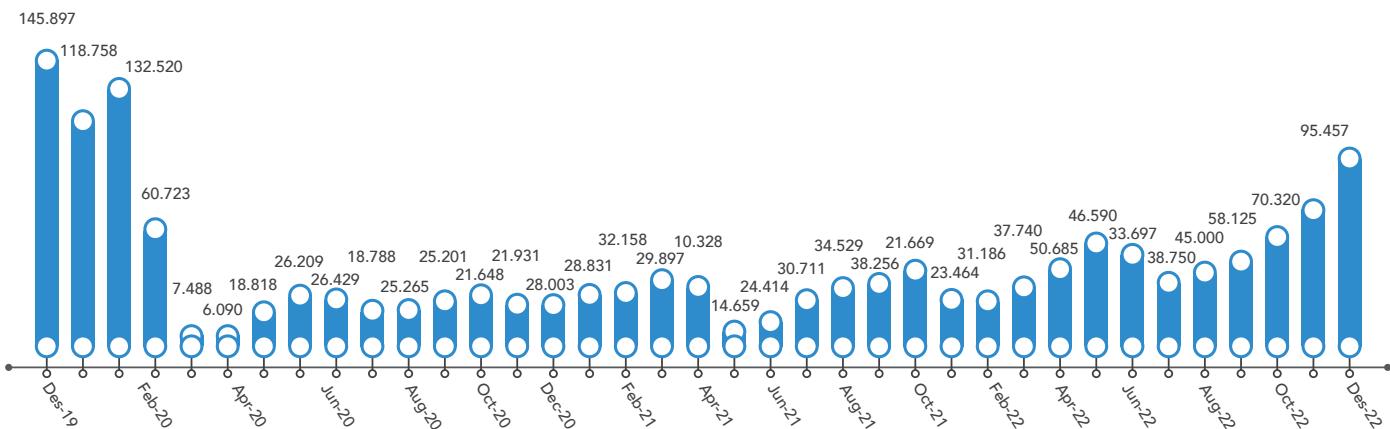
Business Segment Performance & Strategy

Uraian Description	2021 (Rp) (IDR)	2020 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) Nominal (IDR)	Percentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Sewa Menyewa Lease Income	1.433.386.884	1.054.455.265	378.931.618	36%
Periklanan/Advertising Advertising	1.519.620.580	2.240.477.504	720.856.924	-32%
Jasa Penjualan Teknis Technical Sales Service	2.773.847.503	435.000.000	2.338.847.503	538%
Jumlah Total	5.726.854.967	3.729.932.769	1.996.922.197	54%

Kinerja Operasi Segmen Operation & Services

Operational Performance of Operation & Services Segment

Total Jumlah Pelanggan Setiap Bulan Periode 2019-2022
Total Number of Customers Each Month for the 2019-2022 Period





Kinerja Perawatan Prasarana

Infrastructure Maintenance Performance

Bentuk Pekerjaan Pemeliharaan Form of Maintenance Work	Volume Pekerjaan Work Volume		
	Target	Realisasi Realizations	Percentase Percentage
Jalur dan Bangunan Railroads and Buildings	2.636	2.636	100,00%
Persinyalan, Telekomunikasi & Fasilitas Pertiketan Signaling, Telecommunication & Ticketing Facilities	1.095	1.095	100,00%
Traksi & Daya Listrik Traction & Electric Power	1.095	1.095	100,00%

Kinerja Operasi Segmen Sarana

Operational Performance of Facility Segment

Bentuk Pekerjaan Pemeliharaan Form of Maintenance Work	Volume Pekerjaan Work Volume		
	Target	Realisasi Realizations	Percentase Percentage
Perawatan Kereta Car Maintenance	1.852	1.856	100,22%
Pemeriksaan Pengendalian Mutu Sarana Inspection of Facility QC	392	396	101,02%
Cuci Kereta Car Wash	1.862	1.694	90,98%
Program dan Realisasi Perawatan Fasilitas Depo Depot Facility Maintenance Program and Realization	1.825	1.825	100,00%



IKHTISAR SAHAM

SHARE HIGHLIGHT

Komposisi dan Pergerakan Jumlah Saham

Sebagai bentuk pemenuhan *compliance* atas terbitnya Izin Operasi Sarana Nomor 1540 Tahun 2019 yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT LRT Jakarta, maka pada tahun 2020 dilakukan telah dilakukan inbreng sebanyak 3 (tiga) trainset LRV dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda), sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 75 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor A HU-AH.01.03-0408252 tanggal 17 November 2020.

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah), bertambah sebesar 25% sebesar Rp150.000.000.000,- menjadi 55% atau sejumlah Rp333.893.400.000,- masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Dari Modal Dasar tersebut, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh oleh Para Pemegang Saham adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 3.323.934 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat lembar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp333.893.400.000 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga ratus empat ratus ribu rupiah). Berikut komposisi saham PT LRT Jakarta dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sebagaimana yang terlampir pada tabel di bawah ini.

Composition and Trend of Total Shares

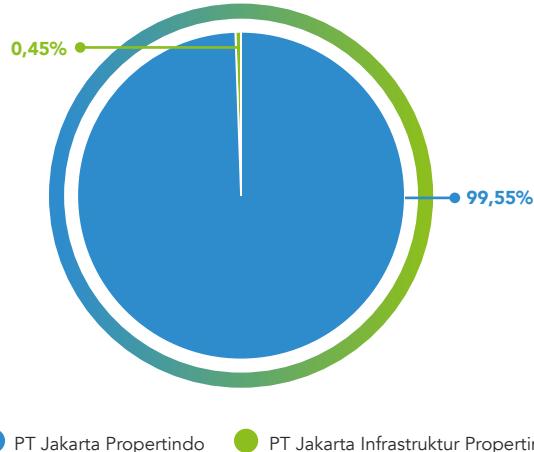
As a form of compliance with the issuance of the Facility Operating Permit Number 1540 of 2019 which has been given by the DKI Jakarta Provincial Government to PT LRT Jakarta, in 2020, 3 (three) LRV trainsets have been carried out from PT Jakarta Propertindo (Perseroda), as stated in the Deed of Declaration of Shareholders' Resolution Number 75 dated October 26, 2020, made by Wiwik Condro, S.H., Notary in Jakarta, which has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number A HU-AH.01.03-0408252 dated November 17, 2020.

Based on the Deed of Establishment of the Company, the Company's Authorized Capital is IDR 600,000,000,000 (six hundred billion rupiah), an increase of 25%, or by IDR 150,000,000,000,- to 55% or a total of IDR 333,893,400,000,- each share with a nominal value of IDR 100,000 (one hundred thousand rupiah).

From the Authorized Capital, the Issued and Fully Paid-up Capital by the Shareholders is 25% (twenty five percent) or a total of 3,323,934 (three million three hundred twenty three thousand nine hundred and thirty four shares) with a total nominal value amounting to IDR 333,893,400,000 (three hundred and thirty-three billion eight hundred ninety-three million four hundred thousand rupiah). The following is the composition of PT LRT Jakarta's shares in the last 3 (three) years, as attached in the table below.

Komposisi dan Pergerakan Jumlah Saham PT LRT Jakarta 2019-2021
 Composition and Trend of Total Shares of PT LRT Jakarta 2019-2021

Pemegang Saham Shareholders	31 Desember 2021 December 31, 2021		31 Desember 2020 December 31, 2020		31 Desember 2019 December 31, 2019	
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (sheet)	Kepemilikan Ownership (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (sheet)	Kepemilikan Ownership (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (sheet)	Kepemilikan Ownership (%)
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	3.323.934	99,55%	3.323.934	99,55%	3.323.934	99,55%
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	15.000	0,45%	15.000	0,45%	15.000	0,45%
Jumlah Total	3.338.934	100,00%	3.338.934	100,00%	3.338.934	100,00%



Informasi tentang Perdagangan Saham dan Kepemilikan Saham oleh Publik

Hingga 31 Desember 2021, LRT tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) sehingga saham Perusahaan tidak diperdagangkan kepada publik melalui Bursa Efek. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

Informasi tentang Aksi Korporasi

sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi, dengan demikian informasi terkait hal tersebut tidak dapat disampaikan.

Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Sanksi Perdagangan Saham (*Delisting*)

Per 31 Desember 2021, Perusahaan tidak pernah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek, sehingga tidak terdapat aksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau sanksi penghapusan perdagangan saham (*delisting*) yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Dividen Saham

Hingga akhir tahun 2021 Perusahaan belum membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta keputusan pemegang saham.

Information on Stock Trading and Public Ownership

As of December 31, 2021, LRT has never conducted an Initial Public Offering (IPO) so that the Company's shares are not traded to the public through the Stock Exchange. Therefore, there is no stock trading information containing market capitalization based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed; the highest, lowest, and closing share prices based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed; trading volume of shares on the Stock Exchange in which the shares are listed; and information in the form of a graph containing at least the closing price based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed and the trading volume of the shares on the Stock Exchange in which the shares are listed for each quarter in the last 2 (two) fiscal years.

Information about Corporate Action

Throughout 2021, the Company did not take any corporate actions, thus information regarding this matter cannot be conveyed.

Information on the Temporary Suspension of Stock Trading (*Suspension*) and/or Stock Trading Sanctions (*Delisting*)

As of December 31, 2021, the Company has never listed its shares on the Stock Exchange, so that there is no temporary suspension of stock trading and/or delisting sanctions that can be presented in this Annual Report.

Stock Dividend

Until the end of 2021 the Company has not distributed dividends to shareholders. This is in accordance with the provisions in the Articles of Association as well as shareholder decisions.

INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK, ATAU OBLIGASI KONVERSI

INFORMATION ABOUT BONDS, SUKUK, OR CONVERTIBLE BOND

Perusahaan tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang jumlah obligasi, sukuk, maupun obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, serta peringkat obligasi/sukuk.

The Company does not issue bonds, sukuk or convertible bonds, or other securities. Therefore, there is no information on the number of outstanding bonds, sukuk, or convertible bonds, interest rates/yields, maturity dates, and ratings of bonds/sukuk.

INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION ABOUT OTHER FUNDING SOURCES

Sumber pendanaan proyek LRT Jakarta 100% didapatkan dari dana APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui skema Penanaman Modal Daerah (PMD) yang disalurkan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemanfaatan dana PMD tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo sehingga tidak tercermin di dalam Laporan Keuangan Perusahaan.

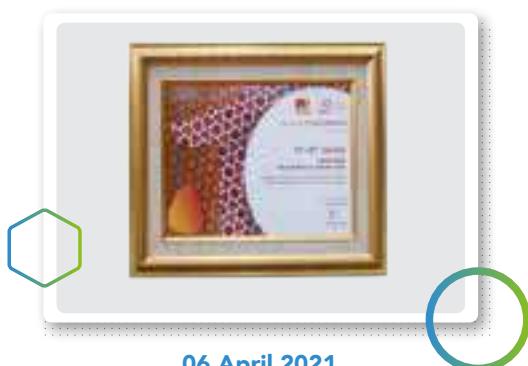
Sedangkan sumber pendanaan bagi operasional LRT Jakarta sebagian besar ($\pm 90\%$) berasal dari subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

The source of funding for the Jakarta LRT project is 100% obtained from the DKI Jakarta Provincial Government Regional Budget (APBD) funds, through the Regional Investment Scheme (PMD) which is channeled to PT Jakarta Propertindo (Perseroda) as a Regional Owned Enterprise (BUMD) of the DKI Jakarta Provincial Government. The utilization of PMD funds is fully implemented by PT Jakarta Propertindo so that it is not reflected in the Company's Financial Statements.

Meanwhile, the main source of funding for the operation of LRT Jakarta ($+90\%$) comes from subsidies paid by the DKI Jakarta Provincial Government.



PERISTIWA PENTING IMPORTANT EVENTS



PT LRT Jakarta meraih penghargaan PR Indonesia 2021 untuk kategori terpopuler di Media Cetak 2020 Sub Kategori BUMD dan Perusahaan Daerah.

PT LRT Jakarta won the PR Indonesia 2021 award for the most popular category in Print Media 2020 Sub-category Regional-Owned Enterprises (BUMD) and Regional Companies.



LRT Jakarta mendapatkan penghargaan sebagai operator transportasi publik berbasis rel dalam *virtual* event Kampanye Jalan Hijau Tahun 2021 "Bersama Jabodetabek Bergerak" dari Balai Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada Selasa, 20 April 2021. PT LRT Jakarta dinilai sebagai operator publik yang aman, nyaman dan ramah lingkungan.

LRT Jakarta won an award as a rail-based public transportation operator in the 2021 Green Road Campaign virtual event with the theme "Moving Together with Greater Jakarta" from the Jabodetabek Transportation Management Center (BPTJ) on Tuesday, April 20, 2021. PT LRT Jakarta is considered as a safe, comfortable and environmentally friendly public operator.



PT LRT Jakarta dan KALBIS Institute telah melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait "Komitmen Bersama dalam Membangun dan Mencerdaskan Bangsa" pada Selasa, 27 April 2021 di Gedung KALBIS Institute, Pulomas, Jakarta Timur. Diharapkan dengan adanya penandatanganan ini dapat mempererat sinergi antara LRT Jakarta dan KALBIS Institute dalam mendukung semangat kreativitas para generasi milenial dan mampu menciptakan budaya cinta transportasi umum sebagai akses mobilitas yang aman dan nyaman.

PT LRT Jakarta and KALBIS Institute have carried out signing of a Memorandum of Understanding (MoU) related to "Joint Commitment in Developing and Educating the Nation" on Tuesday, 27 April 2021 at the KALBIS Institute Building, Pulomas, East Jakarta.

The signing was represented by Mr. Wijanarko as President Director of PT LRT Jakarta and Mr. Naik Enokh Parmentas, S.H., M.M as Chancellor of KALBIS Institute. It is hoped that this signing will strengthen the synergy between the LRT Jakarta and the KALBIS Institute in supporting the creative spirit of the millennial generation and being able to create a culture of love for public transportation as access to safe and comfortable mobility.



LRT Jakarta bekerja sama dengan ISS Indonesia menggelar Aksi Kolaborasi Bersih, Aman, dan Ramah (LRTJ AKBAR) di area sekitar stasiun LRT Jakarta pada tanggal 28 dan 29 April 2021. Aksi ini terdiri dari kegiatan pembersihan dan pengembunan disinfektan atau misting untuk rumah-rumah ibadah yang berada di sepanjang jalur stasiun LRT Jakarta.

in collaboration with ISS Indonesia, held a Clean, Safe and Friendly Collaborative Action (LRTJ AKBAR) in the area around the LRT Jakarta station on April 28 and 29, 2021. This action consists of the act of cleaning and condensing disinfectant or misting for houses of worship located along the lines of the LRT Jakarta station.



21 Juni 2021

June 21, 2021

Penandatangan Addendum Dishub - Jakpro - LRT Jakarta.
There was a Signing of Subsidy Agreement between DKI Jakarta Transportation Agency - Jakpro - Jakarta LRT.



05 Agustus 2021

August 05, 2021

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 terutama dalam mengurangi beban fasilitas kesehatan, PT LRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo Perseroda berkolaborasi dengan Jakarta Sigap Senusa serta Palang Merah Indonesia melakukan peresmian "Ruang Swapulih PT LRT Jakarta Untuk Isolasi Mandiri Pasien COVID-19" pada kamis 05 Agustus 2021. Ruangan Swapulih ini memanfaatkan gedung di area kantor dan Depo LRT Jakarta demi keperluan isolasi mandiri masyarakat di sepanjang rute Stasiun LRT Jakarta. Ruang swapulih ini diperuntukkan bagi pasien covid tidak bergejala atau bergejala ringan. In support of the government's efforts to deal with COVID-19, especially in reducing the burden on health facilities, PT LRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo Perseroda collaborated with Jakarta Sigap Senusa and the Indonesian Red Cross to inaugurate the "PT LRT Jakarta Swapulih (Self-Heal) Room for Independent Isolation of COVID 19 Patients. This Swapulih room made use of the building in the office area and the LRT Jakarta Depot for the purpose of self-isolation for the community along the route of the LRT Jakarta Station. This swap space is intended for asymptomatic or mildly symptomatic COVID-19 patients.



15 September 2021

September 15, 2021

LRTJ Hadirkan Sentra Vaksinasi COVID-19 yang berlokasi di Stasiun Pegangsaan Dua (PGD), Kelapa Gading. Sentra vaksinasi merupakan kolaborasi antara PT LRT Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Puskesmas Kelapa Gading @pkc_kelpagading. Beroperasi hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 - 14.00 WIB dan ditargetkan sebanyak 500 peserta vaksin per hari.

LRTJ Presents COVID-19 Vaccination Center. The Vaccination Center at LRTJ started on Wednesday (15/09) located at Pegangsaan Dua Station (PGD), Kelapa Gading. The vaccination center is a collaboration between PT LRT Jakarta with PT Jakarta Propertindo (Perseroda) and Kelapa Gading Health Center @pkc_kelpagading. It operates from Monday to Friday, from 08.00 - 14.00 Western Indonesia Time and is targeted at 500 vaccine participants per day



15 Desember 2021

December 15, 2021

Penandatangan Addendum Dishub - Jakpro - LRT Jakarta.
there was a signing of Addendum between Department of Transportation - Jakpro - LRT Jakarta.



LRT JAKARTA





02

LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT



Dewan Komisaris senantiasa mendukung agar Perusahaan dapat terus tumbuh melalui berbagai produk dan layanan yang inovatif.

The Board of Commissioners always supports all efforts to make the Company continue to grow, through various innovative products and services.

Mohamad Aprindy
Komisaris Utama
President Commissioner



PARA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT LRT Jakarta senantiasa berkomitmen menghadirkan layanan transportasi urban berkualitas dengan penuh integritas sebagai koridor dan batasan sekaligus pendorong bagi Insan Perusahaan untuk melakukannya dengan penuh integritas. Hal tersebut selaras dengan upaya mewujudkan visinya untuk menjadi solusi mobilitas publik terbaik di Indonesia. Laporan Tahunan tahun buku 2021 ini merupakan cerminan komprehensif tentang kinerja Perusahaan di sepanjang tahun 2021. Melalui buku laporan ini, Perusahaan merangkum dan mendokumentasikan perjalanan dan pencapaian di tahun 2021 yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan mewujudkan target-target usaha.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Tahun 2021 menjadi tantangan tersendiri bagi Perusahaan, di mana iklim usaha di tahun 2021 masih dipenuhi dengan ketidakpastian akibat dampak pandemi COVID-19 yang masih berlanjut. Dewan Komisaris dapat memahami tantangan yang dihadapi Perusahaan tersebut. Namun, Dewan Komisaris cukup mengapresiasi berbagai inisiatif strategis yang diambil Direksi, dengan pencapaian kinerja yang dibukukan Perusahaan di tahun 2021.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Dewan Komisaris menjalankan peran strategis dalam mengawasi jalannya kepengurusan Perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Direksi. Dewan Komisaris mengapresiasi kerja keras dan dedikasi Direksi dalam menetapkan serta mengimplementasikan beberapa kebijakan strategis demi meraih pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang.

Penilaian atas kinerja Direksi yang dilakukan Dewan Komisaris juga didasarkan pada arahan pemegang saham yang tertuang melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan pencapaian yang berhasil dibukukan Perusahaan di tahun 2021, Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan dengan baik, mengingat situasi tahun 2021 yang penuh ketidakpastian di tengah pandemi COVID-19.

DEAR RESPECTED SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

As part of a Regional Owned Enterprise (BUMD), PT LRT Jakarta is always committed to providing quality urban transportation services with full integrity. This is in line with the realization of its vision to be the Best Public Mobility Solution in Indonesia. This 2021 Annual Report is a comprehensive reflection of the Company's performance throughout 2021. Through this report book, the Company summarizes and records the journey and achievements in 2021 which always strives to increase productivity and realize business targets.

Assessment of the Performance of the Board of Directors

The year 2021 was a challenging year for the Company, in which the business climate in 2021 was still filled with uncertainty due to the impact of the ongoing Covid-19 pandemic. The Board of Commissioners could understand the challenges faced by the Company. However, the Board of Commissioners is quite appreciative toward the various strategic initiatives taken by the Board of Directors, resulting in the Company's recorded performance achievements in 2021.

In accordance with the Company's Articles of Association and the Limited Liability Company Law (UUPT), the Board of Commissioners performs a strategic role in supervising the management of the Company and providing recommendations for improvement to the Board of Directors. The Board of Commissioners appreciates the hard work and dedication of the Board of Directors in establishing and implementing several strategic policies in order to achieve better performance in 2021 and the years to come.

The evaluation of the Board of Directors' performance, conducted by the Board of Commissioners, is also based on the guidance of the shareholders as stated in the General Meeting of Shareholders (GMS) forum, based on the achievement of the performance targets that have been determined previously. Based on the achievements recorded by the Company in 2021, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has carried out their duties and responsibilities in managing the Company well, especially, considering the situation in 2021 which was full of uncertainty in the midst of the Covid-19 pandemic.



Dewan Komisaris senantiasa mendukung agar Perusahaan dapat terus tumbuh melalui berbagai produk dan layanan yang inovatif. Sesuai dengan perannya, Dewan Komisaris akan terus memberikan motivasi, arahan dan masukan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan di masa depan.

Mekanisme dan Frekuensi Pemberian Nasihat kepada Direksi

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, keberadaan Dewan Komisaris memperkuat fungsi pengawasan bagi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Untuk itu, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dibangun melalui kesamaan pandangan untuk mencapai Visi Perusahaan.

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan penerapan Good Corporate Governance.

Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris dilakukan secara konstruktif dan kolaboratif agar Direksi dapat secara cepat dan tepat menyelesaikan kendala yang muncul. Selain rapat internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, yang membuat komunikasi Dewan Komisaris dan Direksi terjalin dengan baik. Di sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali rapat internal dan 10 kali rapat gabungan dengan mengundang Direksi. Rapat-rapat maupun kunjungan tersebut menjadi forum bagi Dewan Komisaris untuk memantau kinerja dan pencapaian Perusahaan maupun grup sepanjang tahun 2021.

Dalam rapat gabungan, juga membahas hasil pengawasan Dewan Komisaris yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung Dewan Komisaris maupun informasi dari Komite Audit maupun sumber lain sekaligus memberikan nasihat kepada Direksi untuk hal-hal yang terkait dengan kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern, kebijakan manajemen risiko perusahaan, kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya, kebijakan pengelolaan SDM, kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya, kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakannya, efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal.

Rapat Gabungan juga melakukan pembahasan khusus berkenaan dengan aspek-aspek penting dan mendesak yang dilaksanakan perusahaan (persiapan RUPS, RKAP, Tutup Buku) maupun

The Board of Commissioners always supports all efforts to make the Company continue to grow, through various innovative products and services. In accordance with its role, the Board of Commissioners will continue to provide motivation, guidance, and input as part of efforts to encourage sustainable growth in the future.

Mechanism and Frequency of Giving Advice to the Board of Directors

In accordance with prevailing laws and regulations, the existence of the Board of Commissioners in strengthening the supervisory function for the management of the Company conducted by the Board of Directors. To that end, the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is built through a common view to achieve the Company's Vision.

The Board of Commissioners always carries out its duties and responsibilities professionally and independently based on Good Corporate Governance. The Board of Commissioners is committed to being proactive in performing the Company's supervisory function, both in the process of formulating the Company's strategic plan, preparing and implementing business plans, monitoring performance, as well as implementing risk management and implementing Good Corporate Governance.

The supervision carried out by the Board of Commissioners is conducted constructively and collaboratively with the expectation that the Board of Directors can quickly and precisely resolve obstacles that arise. In addition to internal meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, which makes communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors well established, throughout 2021, the Board of Commissioners held 1 (one) internal meeting and 10 joint meetings inviting the Board of Directors. These meetings and visits became a forum for the Board of Commissioners to monitor the performance and achievements of the Company and the group throughout 2021.

In the joint meeting, there was also a discussion on the results of the supervision of the Board of Commissioners obtained from the direct observation of the Board of Commissioners and information gathered from the Audit Committee and other sources, as well as providing advice to the Board of Directors on matters related to the policy/design of the internal control system, Company risk management policies, Company information technology system policies and their implementation, HR management policies, policies on accounting and preparation of financial reports, policies for procurement of goods and services and their implementation, policies on quality and service and its implementation, as well as the effectiveness of external audits and internal audits.

The Joint Meeting also held special discussions regarding important and urgent aspects carried out by the Company (such as preparing for the GMS, RKAP, Book Closure), as well



substansi penting lainnya. Hasil Rapat Gabungan dituangkan dalam notulen rapat, atau secara tertulis dituangkan dalam surat khusus kepada Direksi atau Keputusan Dewan Komisaris, untuk memperoleh tindak lanjut, baik berupa laporan kepada Pemegang saham maupun tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Dewan Komisaris memandang bahwa tahun 2022 masih menjadi tahun yang penuh tantangan terutama iklim ketidakpastian sebagai dampak pandemi COVID-19. Namun, Dewan Komisaris berkeyakinan tantangan ini akan mampu dilalui dengan penuh rasa optimisme. Program vaksin nasional yang telah dimulai pada awal Januari 2021 dan disiplin yang tetap dibarengi dengan penerapan protokol COVID-19 diharapkan dapat mendukung proses pemulihian ekonomi domestik.

Direksi telah menyusun RKAP 2021 dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, di mana Direksi tetap memastikan kegiatan operasional Perusahaan dijalankan dengan menjaga protokol kesehatan. Secara garis besar, Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja Perusahaan untuk tahun 2021, sudah cukup baik dan selaras dengan arah serta tujuan Perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan Komisaris menilai prospek usaha yang disusun Direksi, telah mempertimbangkan asumsi-asumsi dalam makroekonomi global dan nasional pada masa mendatang. Dalam pandangan Dewan Komisaris, target-target dan langkah strategis yang ditetapkan Direksi pada RKAP 2021 merupakan target yang realistik dan sangat mungkin untuk direalisasikan. Demikian juga dengan strategi yang akan dijalankan, telah sejalan dengan rencana jangka menengah dan panjang Perusahaan.

Dewan Komisaris berharap agar segenap Insan Perusahaan senantiasa bersinergi untuk mencapai tujuan yang terbaik dan berkomitmen untuk terus membangun nilai usaha serta proses bisnis yang sehat dan transformasi usaha berkelanjutan. Hal ini selaras dengan semangat Perusahaan dalam melakukan ekspansi dan senantiasa agresif di semua lini usaha melalui berbagai inovasi berbasis digital. Dengan semangat baru yang ditumbuhkan dalam tubuh LRT Jakarta, Dewan Komisaris yakin bahwa Perusahaan akan terus melaju dalam rangka menuju ke arah masa depan yang lebih cerah.

Peran Dewan Komisaris dalam Implementasi Whistleblowing System (WBS)

Perusahaan memiliki ketentuan mengenai pengaduan pelanggaran yakni Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS). Dalam ketentuan ini diatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran. Selain itu, diatur

as other important matters. The results of the Joint Meeting are stated in the minutes of the meeting, or written in a special letter to the Board of Directors or the Decree of the Board of Commissioners, to obtain follow-up actions, either in the form of reports to shareholders or follow-up actions to be conducted by the Board of Directors in managing the Company.

Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

The Board of Commissioners observes that 2022 will still be a year full of challenges, especially related to the uncertainty as a result of the Covid-19 pandemic. However, the Board of Commissioners believes that this challenge will be overcome with a sense of optimism. The national vaccine program, which has started in early January 2021, and the disciplinary actions that continues to be accompanied by the implementation of the Covid-19 protocol, is expected to support the domestic economic recovery process.

The Board of Directors has prepared the 2021 Company Work Plan and Budget (RKAP) and has received approval from the Board of Commissioners, in which the Board of Directors continues to ensure that the Company's operational activities are conducted by maintaining health protocols. In general, the Board of Commissioners observes that the business prospects which have been prepared by the Board of Directors as stated in the Company's work plan for 2021, are quite good and are in line with the guidance and both the short and long term objectives of the Company. The Board of Commissioners assesses that the business prospects prepared by the Board of Directors have taken into account the assumptions in the global and national macroeconomics in the future. In the view of the Board of Commissioners, the targets and strategic steps set by the Board of Directors in the 2021 RKAP are realistic and are very feasible. Likewise, the strategy to be implemented is in line with the Company's medium and long term plans.

The Board of Commissioners hopes that all Company personnel will always work together to achieve the best goals and are committed to continuing to build business values as well as healthy business processes and sustainable business transformation. This is in line with the Company's spirit of expanding and being aggressive in all lines of business through various digital-based innovations. With the new spirit instilled in LRT Jakarta, the Board of Commissioners is confident that the Company will continue to advance towards a brighter future.

The Role of the Board of Commissioners in the Implementation of the Whistleblowing System (WBS)

The Company is equipped with the provisions regarding complaints of violations, namely the Whistleblowing System (WBS). This provision regulates the mechanism for reporting violations. In addition, it also regulates the stage of receiving



juga mengenai tahap penerimaan laporan, tahap penyelidikan sampai kepada tahap pemberian keputusan dan sanksi yang akan diberikan apabila pelanggaran yang dilaporkan terbukti.

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas proses pelaporan dan proses pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di lingkup Perusahaan. Dewan Komisaris menilai penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan telah dijalankan dengan cukup baik, hal tersebut tercermin dengan tidak terdapatnya laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perusahaan yang disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System*.

Sementara itu, sosialisasi WBS di internal Perusahaan disampaikan melalui media internal Perusahaan dan presentasi langsung kepada unit kerja terkait, sedangkan untuk pihak eksternal media yang digunakan untuk sosialisasi antara lain melalui website, email, dan kegiatan-kegiatan Perusahaan yang bersifat eksternal.

Informasi Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Di sepanjang tahun 2021 terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dengan kronologis sebagai berikut:

1. Bapak M. Taufiqurrachman berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama Perusahaan per 12 Juli 2021
2. Mohamad Aprindy resmi menjabat sebagai Komisaris Utama Perusahaan per 12 Juli 2021
3. Bapak Romy Bareno resmi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan per 16 April 2021
4. Ibu Tatak Ujiyati resmi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2021

the report, the stage of investigation, and the stage of giving a decision and sanctions that will be given if the reported violation is proven to be truthful.

The Board of Commissioners always conducts its supervisory responsibility for the reporting process and the process of monitoring compliance with prevailing laws and regulations within the Company. The Board of Commissioners considers that the implementation of the Violation Reporting System in the Company has been carried out quite well, this is reflected in the absence of reports of alleged violations committed by the Company's Personnel submitted through the Whistleblowing System mechanism.

Meanwhile, internal WBS socialization was delivered through the Company's internal media and direct presentations to related work units. For external parties, the media used for dissemination was through the website, email, and external Company activities.

Information on Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2021, there were changes to the composition of the Board of Commissioners with the following chronology:

1. Mr. M. Taufiqurrachman stopped serving as the Company's President Commissioner as of July 12, 2021
2. Mohamad Aprindy officially serves as the Company's President Commissioner as of July 12, 2021
3. Mr. Romy Bareno officially serves as Commissioner of the Company as of April 16, 2021
4. Mrs. Tatak Ujiyati officially serves as Commissioner of the Company as of December 31, 2021



Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris PT LRT Jakarta per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of the Board of Commissioners of PT LRT Jakarta as of December 31, 2021 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Mohamad Aprindy	Komisaris Utama	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT LRT Jakarta No. 001/KPPS/VII/2021 Shareholders' Resolution outside the General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 001/KPPS/VII/2021	Pertama 1st
Romy Bareno	Komisaris	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham 001/KPPS/IV/2021 Resolution outside the General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 001/KPPS/IV/2021	Pertama 1st
Tatak Ujiyati	Komisaris	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham 002/KPPS/XII/2021 Resolution outside the General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 002/KPPS/XII/2021	Pertama 1st

Apresiasi

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi yang telah mengelola Perusahaan dalam memperkuat stabilitas dan kinerja Perusahaan serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris melalui Laporan ini juga menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terimakasih kepada segenap Insan Perusahaan atas kerja keras, dedikasi dan komitmennya di sepanjang tahun 2021, sehingga Perusahaan mampu melewati tahun 2021 yang penuh tantangan ini dengan baik.

Appreciation

The Board of Commissioners appreciates the efforts made by the Board of Directors who have managed the Company in strengthening the stability and performance of the Company as well as maintaining the trust of stakeholders. Through this report, the Board of Commissioners would also like to express its highest appreciation and gratitude to all Company's Personnel for their hard work, dedication and commitment throughout 2021, which enabled the Company to pass this challenging year 2021.

Jakarta, 22 April 2022

Jakarta, April 22, 2022

Mohamad Aprindy

Komisaris Utama
President Commissioner



LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' REPORT



Manajemen LRT Jakarta berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi melalui konsolidasi yang solid, proaktif, dan dinamis demi membangun kinerja usaha hingga ke level yang optimal.

The Management of LRT Jakarta is committed to continuing to optimize through solid, proactive and dynamic consolidation in order to build business performance to an optimum level.

Hendri Saputra

Direktur Utama
President Director



PARA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Sebagai bentuk komitmen keberlanjutan PT LRT Jakarta dalam mewujudkan visinya untuk menjadi solusi mobilitas publik terbaik di Indonesia, Perusahaan terus mengoptimalkan kapasitas dan perannya dalam meraih pencapaian kerja yang lebih baik di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan. Upaya tersebut dilandasi oleh pemahaman dan keyakinan Perusahaan yang memaknai kinerja dan kerja keras sebagai wujud tanggung jawab terhadap loyalitas dan kepercayaan yang diberikan oleh segenap pemangku kepentingan Perusahaan.

Perspektif Makro Ekonomi

Ekonomi Makro Regional

Seperti dikutip dari "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta" yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa perekonomian DKI Jakarta terus membaik dan tumbuh lebih tinggi. Pada triwulan IV 2021, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tercatat sebesar 3,64% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (2,43%, yoy). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan pelonggaran status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga ke level 1, serta momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pada periode pelonggaran tersebut, berbagai sektor ekonomi telah dibuka kembali dengan tingkat maksimum kapasitas yang lebih longgar, namun dengan penerapan prokes yang tetap ketat, yaitu menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga (RT) memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan laporan dengan tumbuh sebesar 3,65% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun kinerja pertumbuhan Konsumsi RT yang positif sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik seiring dengan optimisme masyarakat yang semakin tinggi di tengah kasus COVID-19 yang terkendali dan vaksinasi dosis 1 yang telah melampaui target DKI Jakarta. Investasi menjadi kontributor kedua terbesar seiring dengan terus berjalannya proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) dan optimisme investasi korporasi yang meningkat. Pertumbuhan positif juga terjadi pada Eksport dan Impor seiring dengan masih berlanjutnya permintaan domestik dan global. Sebaliknya, Konsumsi Pemerintah tercatat mengalami kontraksi terutama berasal dari peningkatan pendapatan daerah yang menjadi faktor

DEAR RESPECTED SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

As a form of PT LRT Jakarta's commitment to sustainability in realizing its vision to be the Best Public Mobility Solution in Indonesia, the Company continues to optimize its capacity and role in achieving better work outcomes in the midst of challenging global economic conditions. These efforts are based on the understanding and belief of the Company which defines performance and hard work as a form of responsibility for the loyalty and trust given by all stakeholders of the Company.

Macroeconomic Perspective

Regional Macroeconomics

As quoted from the "DKI Jakarta Provincial Economic Report" which was released by Bank Indonesia, stating that the DKI Jakarta economy continued to improve and grew higher, in the fourth quarter of 2021, DKI Jakarta's economic growth was recorded at 3.64% (yoy), higher than the previous quarter growth (2.43%, yoy). The increase was influenced by increasing community mobility along with the loosening of the status of restrictions on community activities (PPKM) to Level 1, and the moment of the National Religious Day (HBKN) of Christmas and New Year (Nataru). In said period, various economic sectors have been reopened with a less strict maximum level capacity, yet still with the implementation of fixed health protocol, namely the implementation of the PeduliLindungi application.

In terms of expenditure, household consumption (RT) contributed the largest on the economy of DKI Jakarta in the quarterly report, with a growth of 3.65% (yoy), a slow down compared to the previous quarter. The performance of household (RT) consumption growth is positive, and is in line with the increasing domestic demand along with the higher optimism of the community in the midst of a controlled Covid-19 case and vaccination dose 1 which has exceeded the DKI Jakarta's target. Investment became the second largest contributor along with the continued National Strategic Project (PSN) and increased corporate investment optimism. Positive growth also occurs in exports and imports along with continued domestic and global demand. Conversely, the government's consumption was recorded to have contracted mainly from an increase in regional income which became a deduction factor of performance, amid the growth of the



pengurang kinerja, di tengah adanya pertumbuhan realisasi belanja dari belanja K/L APBN dan APBD DKI Jakarta.

Dari sisi LU, hampir seluruh LU mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan IV 2021 yang terjadi seiring dengan peningkatan permintaan domestik dan mobilitas masyarakat. Adapun LU dengan pangsa terbesar seperti LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi mencatatkan pertumbuhan yang positif, kecuali LU Jasa Keuangan yang mengalami kontraksi pada triwulan IV 2021. Akselerasi pertumbuhan juga terjadi di berbagai LU lainnya di DKI Jakarta yaitu LU Akomodasi dan mamin dan LU Transportasi dan Pergudangan seiring dengan pelonggaran status PPKM. Selanjutnya, LU yang terimbas positif sepanjang pandemi COVID-19 seperti LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan LU Informasi dan Komunikasi (Infokom) masih terus melanjutkan kinerja pertumbuhan yang positif seiring dengan masih berlangsungnya kegiatan penanganan terkait COVID-19 dan vaksinasi, serta berlanjutnya kegiatan Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH).

Secara keseluruhan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tercatat tumbuh sebesar 3,56% (yoy), berbalik arah dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi (-2,39%, yoy). Kinerja pertumbuhan yang positif sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut sejalan dengan perekonomian nasional. Namun demikian, pertumbuhan DKI Jakarta pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (3,69%, yoy).

Keuangan Pemerintah

Pada triwulan IV 2021, kinerja Pendapatan Daerah di DKI Jakarta mencatatkan pertumbuhan positif, didorong oleh peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Dari sisi Belanja Daerah, realisasi pada triwulan laporan juga mengalami pertumbuhan yang positif didorong oleh kenaikan Belanja Operasi dan Belanja Modal, di tengah penurunan realisasi Belanja Transfer. Pada Pembiayaan Daerah, realisasi pada triwulan laporan tumbuh positif baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Sementara itu, kinerja penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di DKI Jakarta pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh positif seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi. Pada triwulan IV 2021, pertumbuhan realisasi Belanja K/L di DKI Jakarta terakselerasi, seiring dengan peningkatan realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos), di tengah penurunan realisasi Belanja Modal. Adapun secara keseluruhan tahun 2021 capaian realisasi pagu maupun nominal realisasi total belanja K/L di DKI Jakarta mencatatkan peningkatan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

realization of spending from the expenditure of the K/L of the State Budget (APBN) and the DKI Jakarta's Regional Budget (APBD).

In terms of Business Field (LU), almost all of LU experienced growth acceleration in the fourth quarter of 2021 which occurred along with the increase in domestic demand and community mobility. LU with the largest share are Big and Retail Trade LU, Cars and Motorcycles Repairs LU, Processing Industry LU, and Construction LU, which recorded positive growth, except for Financial Services LU that was contracted in the fourth quarter of 2021. Growth acceleration also occurred in various LU in DKI Jakarta, namely Accommodation and F&B LU, as well as Transportation and Warehousing LU, which grew along with the loosening of PPKM level. Furthermore, LU which was positively affected by the Covid-19 pandemic, such as Health Services and Social Activities LU, and Information and Communications (Infokom) LU, still continued to show the positive growth performance along with the continued handling activity of Covid-19 and vaccination handling, and continued activities of Work From Home (WFH) and School from Home (SFH).

Overall, in 2021, DKI Jakarta's economic growth was recorded at 3.56% (yoy), which is in contradiction to the previous year which was contracted by -2.39% (yoy). Positive growth performance is in line with the economic recovery that continues to be in line with the national economy. However, DKI Jakarta's growth in 2021 was lower than national economic growth (3.69%, yoy).

Government Finance

In the fourth quarter of 2021, the performance of the regional income in DKI Jakarta recorded positive growth, driven by an increase in the realization of Regional Original Revenue (PAD) and Transfer Revenue. In terms of Regional Expenditure, the realization in the quarterly report also experienced positive growth, driven by an increase in Operating Expenditure and Capital Expenditure, amid a decline in the realization of Transfer Expenditure. In Regional Financing, the realization in the quarterly report positively grew, both in terms of financing revenue and expenses. Meanwhile, the performance of Tax Revenue and Non-tax State Revenue (PNBP) in DKI Jakarta in the Fourth Quarter of 2021 recorded a positive growth along with improving economic activity. In the fourth quarter of 2021, the growth of the realization of K/L spending in DKI Jakarta was accelerated, along with the increase in the realization of Employee Expenditure, as well as Goods and Social Assistance Expenditure (Bansos), amid a decline in the realization of Capital Expenditure. Overall, in 2021, the realization of the limit and nominal realization of the total K/L expenditure in DKI Jakarta recorded an increase compared to the same period the previous year.



Inflasi

Seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi, Inflasi IHK Provinsi DKI Jakarta pada triwulan IV 2021 melanjutkan peningkatan, meskipun masih rendah. Pada periode ini, inflasi Provinsi DKI Jakarta tercatat rendah sebesar 1,53% (yoY), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 1,14% (yoY). Peningkatan harga pada periode laporan terutama didorong oleh kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan peningkatan harga CPO global yang masih berlangsung. Untuk keseluruhan tahun 2021, tekanan inflasi di Provinsi DKI Jakarta sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi IHK DKI Jakarta pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,53% (yoY), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2020 sebesar 1,59% (yoY). Adapun sama seperti tahun 2020, tekanan inflasi tersebut berada di bawah sasaran inflasi nasional sebesar $3,0\% \pm 1\%$. Adapun inflasi yang tetap rendah didukung terkendalinya harga-harga komoditas yang diatur pemerintah atau administered price (AP), seperti tarif energi, semakin efektifnya program pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta, serta konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter.

Pembiayaan Daerah

Secara umum, intermediasi perbankan pada triwulan IV 2021 melanjutkan pertumbuhan yang positif, namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit perbankan tumbuh positif sebesar 1,63% (yoY) pada triwulan laporan, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (2,40%, yoY). Melambatnya penyaluran kredit tersebut dipengaruhi oleh demand kredit investasi yang belum tumbuh tinggi terutama dari sektor korporasi. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mengalami peningkatan, terutama didorong oleh peningkatan giro dan deposito. Meskipun demikian, kondisi stabilitas keuangan di DKI Jakarta tetap terjaga yang antara lain ditunjukkan oleh penurunan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) berdasarkan lokasi proyek sebesar 1,97% turun dibandingkan posisi triwulan sebelumnya (2,19%). Sejalan dengan itu, rasio NPL berdasarkan lokasi bank juga menurun dari 3,06% pada triwulan III 2021 menjadi 2,93% pada triwulan IV 2021.

Sistem Pembayaran

Perkembangan transaksi sistem pembayaran tunai dan nontunai mengonfirmasi berlanjutnya pemulihan ekonomi di triwulan IV 2021. Pada periode laporan, arus kas tercatat net outflow dengan posisi yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan permintaan uang kartal di tengah mobilitas masyarakat yang meningkat akibat pelonggaran PPKM dan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru. Transaksi nontunai juga mengalami peningkatan baik pada Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) maupun sektor ritel seperti transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

Inflation

Along with the continued economic recovery, the DKI Jakarta Provincial CPI inflation in the fourth quarter of 2021 continued to increase, even though it was still low. In this period, DKI Jakarta Provincial Inflation was recorded at 1.53% (yoY), higher than the previous quarter of 1.14% (yoY). The price increase in the reporting period was mainly driven by the increase in cooking oil prices. This was in line with the increase in global CPO prices which were still ongoing. Overall, in 2021, inflationary pressures in DKI Jakarta Province were slightly lower than the previous year. DKI Jakarta CPI inflation in 2021 was recorded at 1.53% (yoY), slightly lower than inflation by 2020 of 1.59% (yoY). Similar to 2020, the inflationary pressure was under the national inflation target of $3.0\% \pm 1\%$. The inflation which remains low was supported by the controlled commodity prices regulated by the government, by administered price (AP), such as energy tariffs, by a more effective inflation control program by the DKI Jakarta Regional Inflation Control Team (TPID), and by the consistency of Bank Indonesia's policy in maintaining monetary stability.

Regional Financing

In general, banking intermediation in the fourth quarter of 2021 continued to show positive growth, but slowed down compared to the previous quarter. Banking credit grew positively by 1.63% (yoY) in the quarterly report, a slow down if compared to the previous year's (2.40, yoY). The slowdown in lending was influenced by the demand of investment credit that have not grown significantly, especially from the corporate sector. Meanwhile, the growth of third party funds (DPK) has increased, mainly driven by the increase in demand deposits and time deposits. Nevertheless, the condition of financial stability in DKI Jakarta was maintained, indicated, among others, by a decrease in the ratio of Non-performing Loans (NPLs) based on the project location of 1.97%, which is a decrease compared to the previous quarterly position (2.19%). In line with that, the NPL ratio based on the location of the bank also decreased from 3.06% in the third quarter of 2021 to 2.93% in the fourth quarter of 2021.

Payment System

The development of Cash and Non-cash payment system transactions confirmed the continued economic recovery in the fourth quarter of 2021. In the reporting period, the cash flow was recorded by the net outflow with a higher position than the previous quarter, which was in line with the increase in demand for currency amid increasing people's mobility due to loosening of PPKM's level and National Religious Holiday of Christmas and New Year. Non-cash transactions also experienced a good increase in the Bank Indonesia's National Clearing System (SKNBI) and the retail sector such as Card-based Payment Instrument (APMK).



Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Seriring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, tingkat kesejahteraan di DKI Jakarta berdasarkan indikator-indikator terkini yang tersedia menunjukkan perbaikan. Jumlah tenaga kerja menunjukkan peningkatan dan jumlah pengangguran mengalami penurunan pada periode pencatatan Agustus 2021. Peningkatan tenaga kerja bersumber dari penyerapan di sektor formal maupun informal. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), beberapa LU utama seperti LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, serta LU Transportasi dan Pergudangan menunjukkan kinerja penyerapan tenaga kerja yang positif. Pada periode pencatatan September 2021, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Namun demikian, angka Garis Kemiskinan (GK) tumbuh meningkat sejalan dengan peningkatan inflasi pada April sampai dengan September 2021. Di tengah penurunan kemiskinan, ketimpangan di DKI Jakarta pada periode September 2021 mengalami peningkatan, tercermin dari peningkatan indeks rasio gini. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menggencarkan berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan.

Inisiasi Peran Direksi dalam Kebijakan Strategis Perusahaan

Perekonomian dunia di tahun 2021 masih dihadapkan dengan berbagai tantangan di semua sektor imbas dari pandemi COVID-19. Namun demikian, PT LRT Jakarta tetap memberikan kinerja secara optimal kendati iklim usaha masih berada dalam bayang-bayang pandemi yang memporak-porandakan seluruh sektor usaha. Iklim ketidakpastian yang terjadi di sepanjang tahun 2021 tak menyurutkan semangat Perusahaan untuk terus berkiprah dalam rangka mencapai hasil yang optimal. Tahun 2021 juga menjadi babak baru bagi Perusahaan untuk melakukan transformasi dan senantiasa agresif di semua lini usaha melalui berbagai inovasi berbasis digital.

Semenjak dimulainya secara resmi operasi komersial, rata-rata jumlah penumpang LRT Jakarta mencapai 4500 penumpang per hari yang diperkirakan akan terus meningkat guna mencapai 7000 orang/hari sesuai target dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun demikian, adanya pandemi COVID-19 sejak tahun lalu cukup mempengaruhi capaian jumlah penumpang per hari yaitu hanya berada di kisaran 800 – 900 orang. Hal ini karena operasional LRT Jakarta harus dibatasi untuk jam operasional dan pengaturan jumlah keberangkatan kereta seiring dengan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, belum pulihnya aktivitas penggerak ekonomi masyarakat di wilayah Jakarta Utara dan sepanjang jalur LRT Jakarta, serta berubahnya pola pergerakan warga dalam rangka menjaga protokol kesehatan, diperkirakan juga menjadi salah

Employment and Welfare

In line with continuing economic growth, the level of welfare in DKI Jakarta, based on the available latest indicators, shows an improvement. The number of workers showed an increase and the number of unemployed declined in the recording period of August 2021. Increased labor originated from absorption of workforce in the formal and informal sectors. In terms of business fields (LU), some major LUs, such as Processing Industry LU, Trade LU, and Transportation and Warehousing LU, showed a positive workforce absorption performance. In the recording period of September 2021, the poverty rate at DKI Jakarta has decreased compared to the same period of the previous year. However, the number of poverty lines (GK) grew, in line with the increase in inflation, in April to September 2021. In the midst of a decline in poverty, the inequality occurred in DKI Jakarta in the period of September 2021 caused an increase, reflected in the increase in the Gini ratio index. The Central Government and the Provincial Government (Pemprov) of DKI Jakarta continues to intensify various social protection programs to maintain the welfare of the community in the middle of a pandemic. In addition, the DKI Jakarta Human Development Index (HDI) in 2021 also increased.

Initiating the Role of the Board of Directors in the Company's Strategic Policy

The world economy in 2021 was still riddled with various challenges in all sectors as a result of the Covid-19 pandemic. However, PT LRT Jakarta continues to provide optimal performance even though the business climate is still in the shadow of a pandemic that has devastated the entire business sector. The climate of uncertainty that occurred throughout 2021 did not dampen the Company's enthusiasm to continue to take part in achieving optimal results. The year 2021 was also a new chapter for the Company to transform and be aggressive in all lines of business through various digital-based innovations.

Since the official start of commercial operations, the average number of passengers on the LRT Jakarta has reached 4500 passengers per day, which is expected to continue to increase to reach 7000 people per day, in accordance to the target of the DKI Jakarta Provincial Government.

However, the Covid-19 pandemic, which has taken effect since last year, has quite affected the achievement of the number of passengers per day, which was only in the range of 800-900 people. This is because the operation of the LRT Jakarta was limited by operating hours and the number of train departures, which was in line with the implementation of restrictions on community activities in the DKI Jakarta area. In addition, the unrecovred economic activity of the people in the North Jakarta area and along the LRT Jakarta route, as well as changes in the pattern of movement of residents in order to maintain health



satu faktor penyebab turunnya pengguna transportasi LRT Jakarta. Penurunan okupansi penumpang juga dirasakan oleh penyelenggara transportasi publik lainnya.

Namun demikian, PT LRT Jakarta senantiasa mendukung segala upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi sejalan dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta. Segenap Insan Perusahaan senantiasa bersinergi untuk mencapai tujuan yang terbaik dan berkomitmen untuk terus membangun nilai usaha serta proses bisnis yang sehat melalui transformasi digital berkelanjutan. Manajemen LRT Jakarta berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi melalui konsolidasi yang solid, proaktif, dan dinamis demi membangun kinerja usaha hingga ke level yang optimal.

Kinerja Usaha dan Pemenuhan Target RKAP

Terlepas dari berbagai tantangan dan kekhawatiran terkait pandemi COVID-19, Perusahaan berhasil membukukan kinerja yang optimal dan tetap sehat. Dalam penetapan RKAP, LRT Jakarta senantiasa memperkuat fondasi bisnis melalui kebijakan strategis yang tepat sasaran. Di tahun 2021, Perusahaan merencanakan perolehan dari beberapa komponen substansial sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Perusahaan. Perbandingan antara rencana dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Laba Usaha

Pencapaian Laba Usaha pada 2021 adalah sebesar 3,30 miliar yaitu 22,87% dari RKAP Perusahaan sebesar Rp14,44 miliar. Angka tersebut meningkat sebesar 102,40% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,63 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh realisasi belanja yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan pendapatan subsidi meningkat signifikan.

2. Penjualan Tiket

Selama tahun 2021, LRT Jakarta mencatatkan pendapatan dari penjualan tiket sebesar Rp1,57 miliar, menurun sebesar Rp0,97 miliar (38,34%) dari jumlah nilai penjualan tiket tahun lalu sebesar Rp2,54 miliar.

Penurunan tersebut disebabkan oleh belum berakhirnya pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2021. Hal ini berdampak secara langsung terhadap penurunan jumlah penumpang sepanjang 2021.

3. Total Aset

Jumlah Aset Perusahaan pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp319,27 miliar, menurun bila dibandingkan dengan akhir tahun 2020 yaitu sebesar Rp320,11 miliar, atau menurun sebesar Rp0,85 miliar atau 0,26%. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat pelunasan utang yang lebih tinggi dibanding tahun 2021 sehingga terjadi penurunan pada sisi aset dan liabilitas.

protocols, were also considered to be one of the factors causing the decline in LRT Jakarta transportation users. The decline in passenger occupancy was also experienced by other public transportation providers.

However, PT LRT Jakarta always supports all efforts to suppress the spread of Covid-19 launched by the provincial government, in line with the decree of the Governor of DKI Jakarta. All Company personnel always work together to achieve the best goals and are committed to continuing to build business values and healthy business processes through sustainable digital transformation. The LRT Jakarta's management is committed to continuing to optimize business through solid, proactive and dynamic consolidation in order to optimize business performance.

Business Performance and Fulfillment of RKAP Target

Despite the various challenges and concerns related to the Covid-19 pandemic, the Company managed to record optimal performance and remain sound. In stipulating the RKAP, LRT Jakarta continues to strengthen the business foundation through strategic policies that are target-appropriate. In 2021, the Company planned to acquire several substantial components as a benchmark in assessing the Company's performance. The comparison between the workplan and realization is as follows:

1. Operating Profit

The achievement of Operating Profit in 2021 was IDR 3.30 billion, which is 22.87% of the Company's RKAP of IDR 14.44 billion. This figure reflects an increase by 102.40% compared to the previous year which was IDR 1.63 billion. The increase was due to higher expenditure realization compared to the previous year, which resulted in a significant increase in subsidized income.

2. Ticket Sales

Throughout 2021, the Jakarta LRT recorded revenue from ticket sales of IDR 1.57 billion, a decrease of IDR 0.97 billion (38.34%) from the total value of ticket sales last year of IDR 2.54 billion.

This decrease was due to the fact that the Covid-19 pandemic had not yet ended throughout 2021. This had a direct impact on the decline in the number of passengers throughout 2021.

3. Total Assets

The Company's total assets at the end of 2021 were IDR 319.27 billion, a decrease when compared to the end of 2020 which was IDR 320.11 billion, or a decrease of IDR 0.85 billion, or 0.26%. This was mainly due to the higher debt repayment rate compared to 2021, resulting in a decline in assets and liabilities.



4. Total Liabilitas

Secara keseluruhan, jumlah liabilitas Perusahaan sebesar Rp28,08 miliar pada akhir tahun 2021, nilai ini mengalami penurunan dibandingkan dengan akhir tahun lalu yakni sebesar Rp32,19 miliar atau menurun sebesar Rp4,11 miliar atau sebesar 12,78%. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat pelunasan utang yang lebih tinggi dibanding tahun 2021 sehingga terjadi penurunan pada sisi aset dan liabilitas.

5. Total Ekuitas

Pada akhir tahun 2021 dan 2020, jumlah Ekuitas Perusahaan masing-masing sebesar Rp291,19 miliar dan Rp287,92 miliar, terjadi peningkatan nilai ekuitas sebesar Rp3,27 miliar atau naik 1,13% pada tahun 2021 dibandingkan dengan akhir tahun 2020. Hal ini disebabkan karena Perusahaan membukukan laba pada tahun 2021 sehingga meningkatkan saldo ekuitas di akhir tahun 2021.

Prospek Usaha Tahun 2022

Sebagaimana dikutip dari "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta" yang dirilis Bank Indonesia pada Februari 2022 menyatakan bahwa, perekonomian DKI Jakarta diprakirakan melanjutkan pemulihan yang lebih tinggi pada triwulan I 2022. Selain karena faktor base effect pada tahun sebelumnya yang masih mencatatkan kontraksi, pertumbuhan ekonomi secara tahunan juga didukung oleh lebih longgarnya kebijakan PPKM level 3 yang berlaku sejak 8 Februari 2021 dibandingkan PPKM Makro-Mikro yang berlaku pada triwulan I 2021. Adapun peningkatan status PPKM sudah mulai terjadi di awal tahun 2022, yaitu melalui peningkatan status ke level 2 yang berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022 sebagai respons dari Pemerintah untuk menahan lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron yang mulai meningkat di awal tahun 2022.

Dengan perkembangan tersebut, perekonomian dari sisi pengeluaran masih akan ditopang oleh Konsumsi RT dan pertumbuhan yang positif dari seluruh komponen. Dari sisi LU, seluruh LU utama diperkirakan akan tumbuh positif seiring dengan masih cukup tingginya aktivitas ekonomi masyarakat pada saat pelonggaran aktivitas. Secara triwulan, kinerja perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2022 diprakirakan akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2021, seiring dengan optimisme masyarakat yang masih tinggi di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang lebih terkendali.

Pada triwulan II 2022, perekonomian DKI Jakarta diproyeksikan masih akan terus melanjutkan pemulihan sejalan dengan prakiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi global dan domestik serta meningkatnya harga komoditas dan volume perdagangan dunia. Perbaikan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan II 2022 juga akan didorong oleh beberapa faktor yaitu relatif terkendalinya kasus COVID-19 sehingga diperkirakan akan berdampak pada pelonggaran level PPKM, akselerasi program vaksinasi ketiga (booster) di DKI Jakarta, serta pelaksanaan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri. Dari sisi pengeluaran, motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada triwulan II 2022 masih bersumber dari konsumsi rumah tangga.

4. Total Liability

Overall, the Company's total liabilities amounted to IDR 28.08 billion at the end of 2021, this was a decrease compared to the end of last year which was IDR 32.19 billion or decreased by IDR 4.11 billion or 12.78%. This was mainly due to the higher debt repayment rate compared to 2021, resulting in a decline in assets and liabilities.

5. Total Equity

At the end of 2021 and 2020, the Company's total Equity amounted to IDR 291.19 billion and IDR 287.92 billion respectively, an increase in the value of equity of IDR 3.27 billion, or an increase of 1.13% in 2021 compared to the end of 2020. This was due to the Company posted a profit in 2021, thereby increasing the balance of equity at the end of 2021.

Business Prospect in 2022

As quoted from the "DKI Jakarta Provincial Economic Report" which was released by Bank Indonesia in February 2022, it is stated that the DKI Jakarta economy was predicted to continue the higher recovery in the first quarter of 2022. In addition to the Base Effect factor in the previous year, which still recorded contractions, annual economic growth is also supported by further loosening of Level 3 PPKM policies applied since February 8, 2021, if compared to macro-micro PPKM which was applied in the first quarter of 2021. The increase in the level of the PPKM has begun in early 2022, which is through an increase in status to level 2, since January 4, 2022. This is a response from the government to hold a surge in the case of Covid-19 Omicron variants which began to increase in early 2022.

With these developments, in terms of expenditure, the economy will still be supported by household (RT) consumption and positive growth of all components. In terms of LU, all major LU is expected to grow positively, along with the economic activity of the community during the loosening period, which was still high. Quarterly, the performance of the DKI Jakarta's economy on the first quarter of 2022 is predicted to be slightly higher than the fourth quarter of 2021, in line with the optimism of society which remains high in the midst of a more controlled Covid-19 case surge.

In the second quarter of 2022, the DKI Jakarta economy is projected to continue recovery, in line with the forecast of improving global and domestic economic growth and increasing commodity prices and world trade volume. DKI Jakarta's economic improvement in the second quarter of 2022 will also be driven by several factors, namely the relatively controlled by Covid-19 cases which is expected to have an impact on the loosening of PPKM's level, the acceleration of the Third Vaccination Program (Booster) in DKI Jakarta, and the Religious Holy Month of Ramadhan and Eid al-Fitr. In terms of expenditure, the main driving force of economic growth in DKI Jakarta in the second quarter of 2022 is still originated from household consumption.



Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II 2022 masih akan ditopang oleh pertumbuhan beberapa LU utama yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran dan reparasi kendaraan bermotor, konstruksi, serta informasi dan komunikasi. Berdasarkan perkembangan tersebut, perekonomian Jakarta pada tahun 2022 diprakirakan tumbuh lebih tinggi yaitu pada kisaran 5,3-6,1% (yoY) dibandingkan tahun 2021.

Dari sisi harga, inflasi diprakirakan masih rendah, meski melanjutkan peningkatan pada triwulan I 2022. Inflasi yang meningkat seiring dengan berlanjutnya aktivitas dan konsumsi masyarakat, serta adanya kenaikan beberapa tarif yang diatur pemerintah seperti harga gas elpiji dan cukai rokok. Meskipun demikian, meningkatnya kasus COVID-19 dan adanya peningkatan status PPKM hingga ke level 3 di triwulan berjalan, berpotensi menahan konsumsi masyarakat. Dari sisi komoditas makanan, adanya panen besar di bulan Februari – April 2022 berdampak terhadap peningkatan pasokan bahan pangan sehingga turut menjaga inflasi tetap rendah.

Inflasi pada triwulan II 2022 diprakirakan masih akan tetap terjaga di kisaran target inflasi nasional yaitu $3 \pm 1\%$ (yoY) meskipun akan sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi utamanya bersumber dari meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan Ramadhan dan HBKN. Disamping itu, tekanan inflasi juga bersumber dari kenaikan harga komoditas global, kondisi cuaca serta peningkatan tensi geopolitik. Pada 2022, inflasi Jakarta diprakirakan lebih tinggi didorong oleh pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat, namun masih terkendali di kisaran $3,0 \pm 1,0\%$ (yoY).

Berdasarkan ulasan tersebut, LRT Jakarta telah merancang kebijakan strategis dalam rangka menggapai kinerja yang berkelanjutan di masa mendatang, diantaranya dengan melakukan peningkatan Bisnis & Operation Excellence. Hal tersebut diwujudkan melalui penyesuaian operasional dan layanan serta pengembangan potensi bisnis non-farebox dengan memanfaatkan asset dan kapabilitas yang dimiliki. LRT Jakarta juga melakukan Optimalisasi Aspek Finansial, yaitu optimalisasi penggunaan anggaran terkait operasi & perawatan LRT Jakarta fase 1 serta alternatif pendanaan pembangunan lrt jakarta fase 2 dan 3 beserta seluruh perizinannya. Di sisi lain, Perusahaan juga mencanangkan Program Integrasi dan Sinergi, yaitu Integrasi dengan Moda Transportasi lain serta program sinergi dengan BUMD/BUMN/ Pemerintahan dalam proses pengembangan bisnis.

Meanwhile, in terms of Business Field (LU), DKI Jakarta's economy in the second quarter of 2022 will still be supported by the growth of several major LU, namely the Processing Industry, Big and Retail Trade, Repairs of Motor Vehicles, Construction, and Information and Communication. Based on these developments, the Jakarta economy in 2022 is predicted to grow higher, which is in the range of 5.3-6.1% (yoY) compared to 2021.

In terms of price, inflation is predicted to be low, despite continuing an increase in the first quarter of 2022. Inflation increases along with the continuing activities and consumption of the community, as well as an increase in several government regulations such as in LPG and Cigarette Excise prices. Nevertheless, the increase in Covid-19 cases and the increase in the status of PPKM to Level 3 in the current quarter, has the potential to hold the consumption of society. In terms of food commodities, a large harvest in February to April 2022 has an impact on the increase in food supply which is expected to also maintain inflation to remain low.

Inflation in the second quarter of 2022 is predicted to remain within the national inflation target range of $3\% \pm 1\%$ (yoY), although it will be slightly higher than the previous quarter. The main source of inflationary pressure is the increase in public demand during the month of Ramadan and HBKN. In addition, inflationary pressures also came from rising global commodity prices, weather conditions and rising geopolitical tensions. In 2022, Jakarta's inflation is predicted to be higher, driven by the economic recovery and increasing purchasing power of the people, but remains under control in the range of $3.0\% \pm 1.0\%$ (yoY).

Based on this review, LRT Jakarta has designed strategic policies in order to achieve sustainable performance in the future, including by improving Business & Operation Excellence. This is realized through operational and service adjustments as well as the development of non-farebox business potential by utilizing its assets and capabilities. LRT Jakarta also optimizes the Financial Aspects, namely optimizing the use of budget related to the operation & maintenance of the LRT Jakarta phase 1, as well as alternative funding for the construction of the LRT Jakarta phase 2 and 3, along with all permits. On the other hand, the Company has also launched an Integration and Synergy Program, namely Integration with other Transportation Modes, as well as a synergy program with Regional-Owned Enterprise/State-Owned Enterprise/Government in its business development process.



Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Direksi senantiasa memonitor perkembangan penerapan tata kelola perusahaan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG) di lingkup Perusahaan telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan penerapan GCG di LRT Jakarta. Sebagai entitas usaha, Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin dinamis. Untuk itulah, penerapan GCG menjadi bagian dari rencana strategis Perusahaan untuk mewujudkan kinerja yang transparan, efisien dan bertanggung jawab dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Manajemen Perusahaan senantiasa mengoptimalkan penerapan GCG secara berkesinambungan dengan terus melakukan penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik terbaik, pengujian keandalan, serta penyesuaian sistem dan prosedur sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi atau ketentuan yang berlaku. GCG menjadi penting karena pada dasarnya didesain untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham (Shareholders) maupun para Pemangku Kepentingan lainnya (Stakeholders).

Perusahaan memandang bahwa penerapan GCG merupakan sebuah pilar kuat untuk memajukan pertumbuhan. Oleh sebab itu, Perusahaan berupaya untuk senantiasa menerapkan GCG terhadap seluruh pemangku kepentingan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kualitas dari penerapan praktik terbaik GCG dengan secara terus menerus dilakukan, melakukan pemutakhiran berbagai kebijakan, standar, pedoman, prosedur yang disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keadaan lingkungan bisnis, dan juga perkembangan usaha dan kinerja Perusahaan.

Perubahan Komposisi Direksi di Tahun 2021

Komposisi Direksi ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Di sepanjang tahun 2021, terdapat perubahan komposisi dan susunan keanggotaan Direksi. Perubahan komposisi tersebut sebagai bentuk penyegaran pengurus Perusahaan. Kronologi perubahan komposisi dan susunan keanggotaan Direksi adalah sebagai berikut:

Development of Corporate Governance Implementation

The Board of Directors continuously monitors the progress of the implementation of corporate governance to ensure that the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) within the Company has been implemented in accordance with the objectives of implementing GCG in the LRT Jakarta. As a business entity, the Company has a high commitment to implementing GCG principles with the aim of maintaining sustainable business growth in facing increasingly dynamic business competition. For this reason, the implementation of GCG is part of the Company's strategic plan to realize transparent, efficient and responsible performance by improving the principles of openness, accountability, responsibility, independence, and fairness.

The Company's management continues to optimize the implementation of GCG on an ongoing basis by continuously strengthening infrastructure to achieve best practices, reliability testing, as well as adjustments to systems and procedures in accordance with business developments and prevailing regulations or provisions. GCG is important because it is basically designed to protect the interests of shareholders and other stakeholders.

The Company views the implementation of GCG as a strong pillar to promote growth. Therefore, the Company strives to always implement GCG for all stakeholders by complying with the applicable laws and regulations. Improvement of the quality of the implementation of GCG best practices is conducted by continuously updating various policies, standards, guidelines, procedures adapted to changes in prevailing laws and regulations, the state of the business environment, as well as business development and Company performance.

Changes in the Composition of the Board of Directors in 2021

The composition of the Board of Directors is determined in such a way as to enable effective, precise and fast decision making, as well as being able to act independently. Throughout 2021, there were changes in the composition and structure of the Board of Directors. Changes in the composition is a form of revitalization for the Company's management. The chronology of changes in the composition and structure of the Board of Directors is as follows:



Jabatan Position	Pejabat Sebelumnya Previous Position Holder	Pejabat yang Menggantikan Current Position Holder
Direktur Utama President Director	Wijanarko	Hendri Saputra
Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Director of Finance and Business Development	Rudy Hartono	Adrian Rusmana
Direktur Operasi dan Perawatan Director of Operations and Maintenance	G. Indarto Wibisono	Aditia Kesuma Negara

Dengan demikian, komposisi Direksi PT LRT Jakarta per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

With the changes, the composition of the Board of Directors of PT LRT Jakarta as of December 31, 2021 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Hendri Saputra	Direktur Utama President Director	KPPS No.001/KPPS/XII/2021	Pertama 1 st
Adrian Rusmana	Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Director of Finance and Business Development	KPPS No.001/KPPS/XII/2021	Pertama 1 st
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan Perawatan Director of Operations and Maintenance	KPPS No.001/KPPS/XII/2021	Pertama 1 st

Kami mengapresiasi kebijakan Perusahaan yang telah percaya terhadap dedikasi Direksi dalam mengembangkan Perusahaan untuk lebih maju lagi. Segenap jajaran Direksi berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk kepentingan Para Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya.

We appreciate the Company's policy of believing in the dedication of the Board of Directors in developing the Company to be even more advanced. The entire Board of Directors is committed to conducting this mandate by always prioritizing the principles of good corporate governance for the benefit of the Shareholders and Stakeholders.

Apresiasi

Atas pencapaian yang ditorehkan di tahun 2021, izinkan Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang saham, Insan Perusahaan, regulator, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha, atas kerjasama yang telah tercipta. Kami berharap agar LRT Jakarta dapat terus berkprah, berkontribusi, dan senantiasa berinovasi demi hasil yang optimal. Semoga pencapaian ini akan menginspirasi seluruh pihak untuk dapat terus memaksimalkan kemampuannya dan menjadi fondasi bagi Perusahaan untuk dapat tumbuh di masa yang akan datang.

Appreciation

For the achievements made in 2021, allow us, the Board of Directors of pt LRT Jakarta, to express our utmost respect and gratitude to the Board of Commissioners, shareholders, Company personnel, regulators, customers, suppliers, and business partners, for their cooperation. We hope that LRT Jakarta can always continue to take part, contribute, and innovate for optimal results. Hopefully this achievement will inspire all parties to be able to continue in maximizing their abilities and become the foundation for the Company to be able to grow in the future.

Jakarta, 22 April 2022
Jakarta, April 22, 2022

Hendri Saputra

Direktur Utama
President Director



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT LRT JAKARTA

STATEMENT LETTER OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
2021 ANNUAL REPORT OF PT LRT JAKARTA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT LRT Jakarta tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Februari 2022

We, the undersigned, declare that all information in the 2021 Annual Report of PT LRT Jakarta has been presented in its entirety, and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, February 25, 2022

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Mohamad Aprindy

Komisaris Utama
President Commissioner



Romy Bareno

Komisaris
Commissioner



Tatak Ujiyanti

Komisaris
Commissioner



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT LRT JAKARTA

STATEMENT LETTER OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE 2021
ANNUAL REPORT OF PT LRT JAKARTA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT LRT Jakarta tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Februari 2022

We, the undersigned, declare that all information in the 2021 Annual Report of PT LRT Jakarta has been presented in its entirety, and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report and Financial Statement.

Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, February 25, 2022

Direksi
Board of Directors

Hendri Saputra

Direktur Utama
President Director



Aditia Kesuma Negara

Direktur Operasi dan Perawatan
Director of Operations and Maintenance



Adrian Rusmana

Direktur Keuangan & Pengembangan Bisnis
Director of Finance & Business Development



2021 LAPORAN TAHUNAN
Annual Report



03

PROFIL PERSEROAN

CORPORATE PROFILE



INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY





Nama Perusahaan Corporate Name	:	PT LRT Jakarta
Penyebutan Lain Other Mention	:	LRT
Tanggal Pendirian dan Beroperasi Date of Establishment	:	18 April 2018 April 18, 2018
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	:	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2017 Pasal 39 ayat (4) Regulation of the Governor of DKI Jakarta Number 154 of 2017 Article 39 paragraph (4)
Status Status	:	Perseroan Terbatas (PT) Limited Liability Company
Bidang Usaha Line of Business	:	Pembangunan (Real Estate) dan Jasa Konsultasi Bidang Perencanaan dan Pembangunan serta di Bidang Usaha Kawasan Pariwisata (Rekreasi), Perhotelan dan Sarana Olahraga melalui Anak Usaha Development (Real Estate) and Consulting Services in the Planning and Development Sector as well as in the Business Sector of Tourism (Recreation), Hospitality and Sports Facilities through Subsidiaries
Kepemilikan Ownership	:	PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 99,55% PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 0,45%
Modal Dasar Authorized Capital	:	Rp600.000.000.000 IDR 600,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital	:	Rp333.893.400.000
Jumlah Karyawan Number of Employees	:	253 pegawai (2021) 253 employees (2021)
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	:	Gedung MCC - Depo LRT Jakarta Jl. Raya Kelapa Nias, RW025, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 14250
Telepon Telephone	:	+62 21 8061 7490
Email E-Mail	:	carla@lrtjakarta.co.id
Situs Web Website	:	www.lrtjakarta.co.id
Media Sosial Social Media	:	Facebook : LRT Jakarta Twitter : @lrtjkt Instagram : @lrtjkt
Kontak Perusahaan Corporate Contact Person	:	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary E-mail : sekretaris.perusahaan@lrtjakarta.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY OF THE CORPORATE



Sejarah Perusahaan

PT LRT Jakarta berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda), berdiri pada tanggal 16 April 2018, yang salah satu usahanya bergerak di bidang pengoperasian dan perawatan sarana serta prasarana perkeretaapian.

PT Jakarta Propertindo sebagai Perusahaan Daerah Provinsi DKI Jakarta terpanggil untuk turut serta membantu Pemerintah untuk segera merealisasikan program dengan membangun proyek LRT Jakarta.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2017 Pasal 39 ayat (4) yang merupakan tonggak awal didirikannya anak perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu agar prasarana dan sarana LRT dapat dioperasikan, dirawat dan/atau diusahakan secara efisien, efektif dan sesuai tata kelola yang baik.

Sejak berdirinya pada 16 April 2018, Perusahaan tidak pernah melakukan pergantian nama, yaitu LRT Jakarta. Tahun 2019 merupakan tahun yang bersejarah bagi Perusahaan, di mana pada tanggal 1 Desember 2019, Perusahaan mulai mengoperasikan LRT Jakarta secara komersial.

Corporate History

PT LRT Jakarta is a Limited Liability Company which is owned in majority by PT Jakarta Propertindo (Perseroda), established on April 16 2018. One of its business is in the operation and maintenance of railway facilities and infrastructure.

PT Jakarta Propertindo as a Regional Company of DKI Jakarta Province wants to contribute in assisting the Government to realize the program of building the Jakarta LRT project.

After going through a long process, finally, the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Number 154 of 2017 Article 39 paragraph (4) was stipulated and this becomes the initial milestone for the establishment of a subsidiary to carry out certain tasks so that LRT infrastructure and facilities can be operated, maintained and/or managed efficiently , effective and in accordance with good governance.

Since its establishment on April 16 2018, the Company has never changed its name, namely LRT Jakarta. The year 2019 was a historic year for the Company because on December 1, 2019, the Company started commercially operating the Jakarta LRT.



Makna Logo Perusahaan

Bagi LRT Jakarta, *brand* bukanlah hanya sekadar logo, namun juga aset visual yang berperan sebagai medium penyampaian persepsi pembentuk citra sebuah merek. Konsistensi tampilan visual juga akan membuat sebuah brand mudah dikenal.

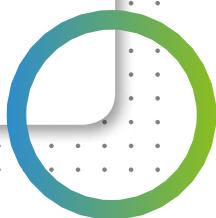
The Meaning of Corporate Logo

For Jakarta LRT, the brand is not just a logo; it is also a visual asset that acts as a medium for conveying perceptions that form the image of a brand. Consistency of visual appearance will also make a brand easily recognizable.



Filosofi Logo | Logo Philosophy

1. Elemen logo membentuk 3 garis yang secara keseluruhan merupakan representasi bentuk kereta api menggambarkan LRT Jakarta yang bergerak maju dan progresif di bidang perkeretaapian.
2. Warna merah terinspirasi oleh Perusahaan Holding Jakpro dengan warna Dominan Merah sebagai *corporate color*-nya dan mencerminkan keuletan, ketegasan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan.
3. Warna emas menunjukkan prestasi, kesuksesan, kemewahan, kemenangan dan kemakmuran.
1. LRT Jakarta logo depicts an image of a complete circle forming 3 lines which as a whole represent the form of the Jakarta LRT train which is moving forward and progressively in the railroad sector
2. The red color is inspired by the Jakpro Holding Company, with the dominant red color as its corporate color represents tenacity, firmness and courage in facing various kinds of difficulties.
3. The gold color represents achievement, success, luxury, victory and prosperity.





JEJAK LANGKAH

MILESTONE

April 2018
April 2018

Pendirian PT LRT Jakarta
Establishment of PT LRT Jakarta

Juli 2018
July 2018

Sertifikasi Personel Pengoperasiaoan &
Pemeliharaaan Aset Perkeretaapian
Certification of Railway Assets Operation
& Maintenance Personnel

Agustus 2018
August 2018

Operasi Terbatas I Asian Games
Limited Operation I Asian Games

Maret 2019
March 2019

Operasi Terbatas II
Limited Operations II

Desember 2019
December 2019

Operasi Komersial LRT Jakarta
Jakarta LRT Commercial Operation

Maret 2020
March 2020

Implementasi Digital Maintenance
Management System
Implementation of Digital Maintenance
Management System





KEGIATAN DAN BIDANG USAHA

CORPORATE ACTIVITIES AND LINE OF BUSINESS



Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, yang dikukuhkan dengan Akta No. 61 tanggal 16 September 2019 maksud dan tujuan Perusahaan untuk menjalankan usaha di bidang:

1. Konstruksi bangunan sipil;
2. Konstruksi khusus;
3. Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa;
4. Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analisis dan uji teknis;
5. Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan;
6. Telekomunikasi;
7. Real estat;
8. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen;
9. Periklanan dan penelitian pasar;
10. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi;
11. Pendidikan.

Corporate Activities Based on Articles of Association and Corporate Activities Conducted

In accordance with the Company's Articles of Association, which was confirmed by Deed No. 61 dated September 16, 2019 the purposes and objectives of the Company to conduct business in the fields of:

1. Civil building construction;
2. Special construction;
3. Land transportation and transportation through pipelines;
4. Architectural and engineering activities; technical analysis and test;
5. Warehousing and transportation support activities;
6. Telecommunications;
7. Real estate;
8. Head office activities and management consulting;
9. Advertising and market research;
10. Renting and leasing activities without option rights;
11. Education.



Pengembangan Produk dan Jasa

Product and Service Development

Rencana Pengembangan Bisnis Business Development Plan

Periklanan Advertising	Bisnis Retail Retail Business	Telekomunikasi Telecommunication	Aktivitas Pemasaran Marketing Activities	Layanan Operasi dan Perawatan Operation and Maintenance Service
<p>LRTJ mengelola bisnis berbasis digital melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wi-fi connection • Website • Mobile apps • Sosial media <p>LRTJ manages digital-based business through:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wi-fi connection • Website • Mobile apps • Sosial media 	<p>Unit based</p> <p>Usaha kecil dan menengah Small and medium enterprises</p> <p>Unit based</p> <p>Kegiatan usaha peritel berskala besar Large-scale retail business activities</p> 	<p>Penyewaan akses FO (fiber optic) FO access rental (fiber optic)</p> <p>Ducting Space</p> <p>Penyewaan lokasi untuk microcell signal tower Location rental for microcell signal tower</p> 	<p>Penyelenggara acara berskala besar & kecil Organizing large & small scale events</p> <p>Shooting iklan Ad shooting</p> 	<p>Automatic Fare Collection</p> <ul style="list-style-type: none"> • QR System • Kartu Uang Eletronik • Electronic Money Card <p>Penyelenggaraan Layanan Operator dan Perawatan Sarana Operator Services and Facility Maintenance</p> 



WILAYAH OPERASI

AREAS OF OPERATION

JALUR OPERASI LRT JAKARTA

JAKARTA LRT OPERATION LINE





VISI, MISI, SIKAP DASAR DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION, AND CORPORATE VALUE



VISI | VISION

Menjadi Solusi Mobilitas Publik Terbaik di Indonesia

To be the best public mobility solution in Indonesia



MISI | MISION

- Menyediakan layanan transportasi publik warga Jakarta yang aman dan nyaman
 - Mengembangkan jaringan transportasi publik yang modern dan terintegrasi
 - Membangun reputasi perusahaan dengan pengembangan sumber daya manusia yang LRTJ
-
- Providing safe and comfortable public transportation services for Jakarta residents,
 - Developing a modern and integrated public transportation network, and
 - Build the Company's reputation by developing LRTJ human resources





Review Visi dan Misi Perusahaan oleh Manajemen Kunci

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian atas visi dan misi Perusahaan, baik dalam periodik jangka pendek Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2021 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Nilai Perusahaan

Perusahaan dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) mewajibkan seluruh karyawannya untuk senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Perusahaan yakni LRTJ. Nilai-Perusahaan ini memiliki arti penting dalam merealisasikan visi dan misi Perusahaan sehingga nantinya diharapkan dapat menuntun kinerja perusahaan lebih berjalan optimal dan terarah ke depannya. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

Lincah
Competent, Innovative, Modern, Passion, Emotional Inteligence (EQ)

Ramah Service
Alert, Simple, Sincere, Hospitable

Terpercaya
Reliability
Committed, Supportive

Jujur
Integrity
Compliance, Trusted

Sosialisasi dan Internalisasi Tata Nilai Perusahaan

Perusahaan senantiasa melaksanakan program sosialisasi dan internalisasi nilai Perusahaan dalam rangka memberikan pengetahuan dan mananamkan serta meningkatkan pemahaman kepada seluruh Insan Perusahaan mengenai nilai Perusahaan.

Agar nilai Perusahaan dapat menyatu dengan perilaku Insan Perusahaan dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka Perusahaan melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai Perusahaan dengan melakukan induksi kepada karyawan baru, refreshment melalui meeting internal/townhall.

Review of Company Vision and Mission by Key Management

The Board of Commissioners and the Board of Directors have reviewed the Company's vision and mission in the short-term period of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the year 2021 which has been approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Corporate Values

In managing its Human Resources (HR), the Company requires all of its employees to always implement the Company's corporate values, namely LRTJ. These corporate values have an important meaning in realizing the Company's vision and mission so that later it is expected to guide the Company's performance to operate business more optimally and be directed in the future. The description of the values are as follow:

Dissemination and Internalization of Corporate Values

The Company continues to carry out programs of dissemination and internalization of the Company's values in order to provide knowledge and instill and increase understanding to all Company personnel regarding the Company's corporate values.

In order that the Company's corporate values can be integrated with the behavior of the Company's Personnel in daily business activities, the Company conducts dissemination and internalization of the Company's corporate values by conducting induction to new employees, and refreshment through internal meetings/townhall.

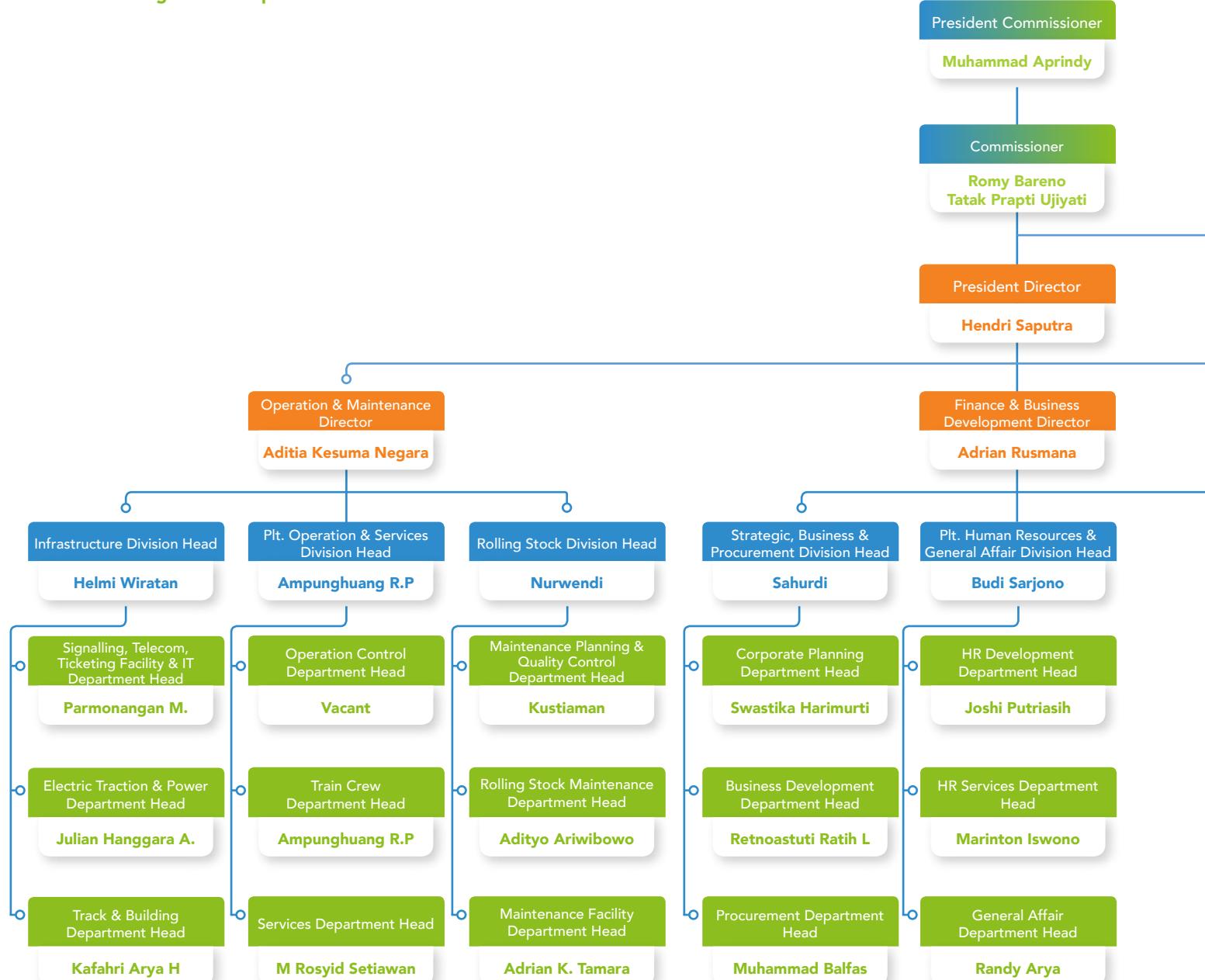


STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Sejalan dengan dinamika bisnis yang terus berkembang dan berubah, Perusahaan terus melakukan penguatan struktur organisasi demi mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 001/SDM/111/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT LRT Jakarta. Berikut struktur organisasi PT LRT Jakarta per 31 Desember 2021.

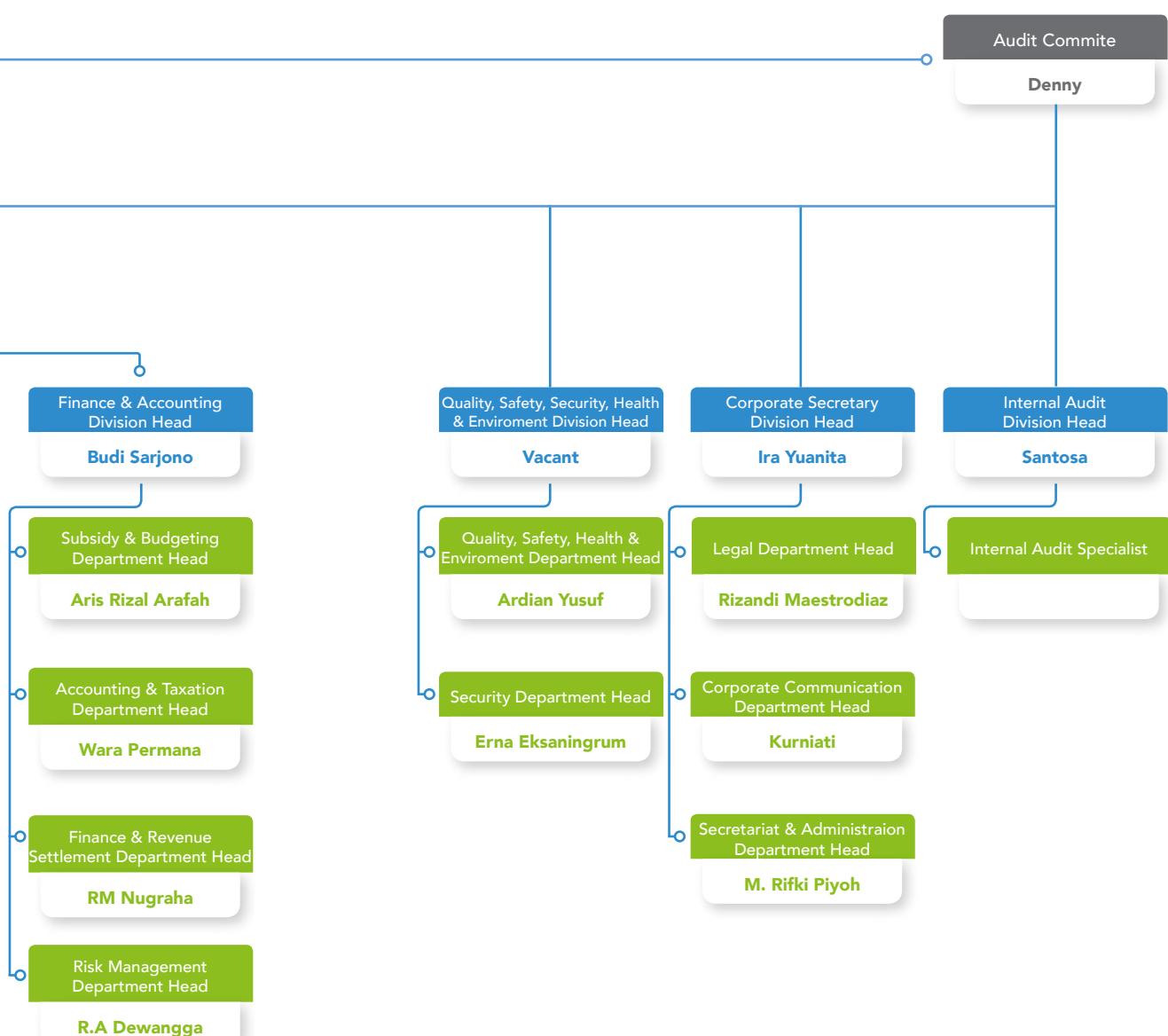
Struktur Organisasi LRT per 31 Desember 2021





In line with business dynamics that continue to develop and change, the Company continues to strengthen the organizational structure in order to achieve common goals. The Company's organizational structure has been approved by the Decree of the Board of Directors No. 001/SDM/111/X/2021 dated October 1, 2021 regarding changes in the Organizational Structure of PT LRT Jakarta. The following is the organizational structure of PT LRT Jakarta as of December 31, 2021.

LRT Organizational Structure as of December 31, 2021





PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATION

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan belum memiliki dan/atau menerima penghargaan dalam bentuk apapun. Kendati demikian, LRT Jakarta senantiasa menghadirkan layanan yang optimal dan kinerja operasional secara maksimal.

Throughout 2021, the Company has not had and/or did not receive any kind of award. Nevertheless, the Jakarta LRT always provides optimum service and maximum operational performance.



Sertifikasi yang Masih Berlaku Hingga Tahun 2021

Valid Certification in 2021

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date of Certification Issued	Jenis Sertifikat Certificate Type	Dikeluarkan oleh Issued by	Masa Berlaku Hingga Validity Period Until
27 Maret 2020 March, 27 2020	SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems-Requirement	Sucofindo International Certification Services	2023



PROFIL DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

MOHAMAD APRINDY

Komisaris Utama

President Commissioner

Periode Jabatan: 12 Juli 2021 - RUPS Tahun 2026, Periode ke-1

Term of Office: July 12, 2021 - 2026 GMS, 1st Period

Data Pribadi

Personal Data

Warga Negara Indonesia

Indonesian

Usia 55 tahun per 31 Desember 2021

55 years old as of December 31, 2021

Kelahiran 12 April 1966

Born on April 12, 1966

Domisili

Domicile

Depok, Jawa Barat, Indonesia

Depok, West Java, Indonesia



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik dari Universitas Sriwijaya, Palembang (1989);
- Magister (S2) Teknik dari Universitas Tarumanegara, Jakarta (2004).

Education

- Bachelor Degree (S1) in Engineering from Sriwijaya University, Palembang (1989);
- Master (S2) of Engineering from Tarumanegara University, Jakarta (2004).

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT LRT Jakarta No. 001/KPPS/VII/2021

History and Legal Basis of Appointment

Decision of the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 001/KPPS/VII/2021

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris PT Widodo Makmur Unggas Tbk (2020-2021);
- Direktur Strategi Korporasi & Human Capital Management PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (2019-2020);
- Direktur Pemasaran PT PP (2016);
- Direktur Gedung PT PP (2017);
- Director of Strategic Planning and Development PT PP (2018);
- Komisaris Utama PT PP Urban (2017-2019);
- Komisaris Utama PT PP Energi (2019-2020).

Work Experience

- Commissioner of PT Widodo Makmur Unggas Tbk (2020-2021);
- Director of Corporate Strategy & Human Capital Management; PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (2019-2020);
- Director of Marketing, PT PP (2016);
- Director of Building, PT PP Building (2017);
- Director of Strategic Planning and Development, PT PP (2018);
- President Commissioner of PT PP Urban (2017-2019);
- President Commissioner of PT PP Energi (2019-2020).

Rangkap Jabatan

Direktur Pengelolaan Aset PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

Concurrent Position

Director of Asset Management, PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliations

Has no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders.



ROMY BARENO

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan: 16 April 2021 - RUPS Tahun 2026, Periode ke-1

Term of Office: April 16, 2021 – 2026 GMS, 1st Period

Data Pribadi

Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 39 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Jakarta, 16 Juli 1982

Indonesian
39 years old as of December 31, 2021
Born in Jakarta, July 16, 1982

Domisili

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

DKI Jakarta, Indonesia

Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Bachelor Degree in Political Science di Ohio State University, Columbus, Ohio, United States of America (2005);
- Magister (S2) Master of Arts Degree in Media Management di University of Westminster di London (2009).

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham 001/KPPS/IV/2021

Riwayat Pekerjaan

Romy memiliki pengalaman bekerja di media di Indonesia, antara lain sebagai Reporter di MetroTV pada tahun 2005 – 2007, sebagai Associate Producer pada 2007 – 2011 dan Producer pada 2011 – 2014 di tvOne. Selain itu, Romy juga mempunyai pengalaman sebagai Konsultan di Media Crisis Communication Consultant yang menangani beberapa perusahaan besar seperti Djarum Group, Agung Podomoro Group, dan Sinarmas Group. Saat ini, Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Gasindo Makmur Energy sejak 2020 lalu.

Rangkap Jabatan

Personal Advisor to the Host of Indonesian Lawyers Club, Karni Ilyas
President Director of PT Bareno Tiga Bersaudara, 2012 – sekarang
Independent Commissioner at PT Gasindo Makmur Energy, 2020 – sekarang

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

Education

- Bachelor Degree (S1) in Political Science at Ohio State University, Columbus, Ohio, United States of America (2005);
- Master (S2) of Arts in Media Management at the University of Westminster in London (2009).

History and Legal Basis of Appointment

Decision of the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders 001/KPPS/IV/2021

Work Experience

Romy has the experience of working in the media in Indonesia, among others as a Reporter at MetroTV in 2005 – 2007, as an Associate Producer in 2007 – 2011 and a Producer in 2011 – 2014 at tvOne. In addition, Romy also has the experience as a Consultant at Media Crisis Communication Consultant which handles several large companies such as Djarum Group, Agung Podomoro Group, and Sinarmas Group. Currently, he also serves as an Independent Commissioner at PT Gasindo Makmur Energy since 2020.

Concurrent Position

Personal Advisor to the Host of Indonesian Lawyers Club, Karni Ilyas
President Director of PT Bareno Tiga Bersaudara, 2012 – present
Independent Commissioner at PT Gasindo Makmur Energy, 2020 – present

Affiliations

Has no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders.



TATAK PRAPTI UJIYATI

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan: 31 Desember 2021 – saat ini Periode ke-1

Term of Office: December 31, 2021 – present day, 1st Period

Data Pribadi

Personal Data

Warga Negara Indonesia	Indonesian
Usia 51 tahun per 31 Desember 2021	51 years old as of 31 December 2021
Kelahiran 27 September 1970	Born on September 27, 1970

Domisili

Domicile

Banten, Indonesia	Banten, Indonesia
-------------------	-------------------



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Gadjah Mada (1998);
- Magister (S2) Social Development Study, Department of Sociology and Anthropology, Ateneo de Manila University, The Philippines (2002).

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham
002/KPPS/XII/2021

Riwayat Pekerjaan

- Member of Jakarta Governor's Team for Corruption Prevention Committee (2018-sekarang);
- Co-founder and Director of Research at Indonesian Institute for Research and Political Consultancy LKPI-Starpol (2011-sekarang);
- Advocacy and Campaign Director Save the Children (2014-2016);
- Civil Society Specialist/Demand Side Coordinator, Australia Indonesia Partnership on Decentralisation/AIPD (2013-2014);
- Change Lead for Governance (Policy and Campaign Team). Bangkok Based, Oxfam Great Britain, Asia Region (2010-2013);
- Governance Specialist Asian Development Bank (2009-2010);
- Program Manager Decentralized Governance/Knowledge and Research Manager Partnership for Governance Reform in Indonesia (2006-2009).

Rangkap Jabatan

- Member of Jakarta Governor's Team for Corruption Prevention Committee
- Co-founder and Director of Research at Indonesian Institute for Research and Political Consultancy LKPI-Starpol

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Education

- Bachelor Degree (S1) of Law from Gadjah Mada University (1998);
- Master (S2) of Social Development Study, Department of Sociology and Anthropology, Ateneo de Manila University, The Philippines (2002).

History and Legal Basis of Appointment

Decision of the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders
002/KPPS/XII/2021

Work Experience

- Member of Governor of DKI Jakarta's Team for Corruption Prevention Committee (2018-present);
- Co-founder and Director of Research at Indonesian Institute for Research and Political Consultancy LKPI-Starpol (2011-present);
- Advocacy and Campaign Director, Save the Children (2014-2016);
- Civil Society Specialist/Demand Side Coordinator, Australia Indonesia Partnership on Decentralization/AIPD (2013-2014);
- Change Lead for Governance (Policy and Campaign Team). Bangkok Based, Oxfam Great Britain, Asia Region (2010-2013);
- Governance Specialist Asian Development Bank (2009-2010);
- Program Manager for Decentralized Governance/Knowledge and Research Manager Partnership for Governance Reform in Indonesia (2006-2009).

Concurrent Position

- Member of Governor of DKI Jakarta's Team for Corruption Prevention Committee
- Co-founder and Director of Research at Indonesian Institute for Research and Political Consultancy LKPI-Starpol

Affiliations

Has no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders.



PROFIL DIREKSI

PROFILE OF THE BOARD OF BOARD OF DIRECTORS



HENDRI SAPUTRA

Direktur Utama

President Director

Periode Jabatan: 3 November 2021 - Sekarang, Periode ke-1

Term of Office: November 3, 2021 - Present, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 51 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran 13 Juni 1970

Personal Data

Indonesian
51 years old as of December 31, 2021
Born in June 13, 1970

Domisili

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Domicile

Bogor, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Jurusan Fisika, Prodi Geofisika dari Universitas Indonesia (1995)

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

KPPS No.001/KPPS/XII/2021

Riwayat Pekerjaan

- Project Management Office Division Head (Senior Manager), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (2019-sekarang);
- Business Process Improvement Manager/ System Implementation Head, PT Tripatra Engineers and Constructors (Member of Indika Energy Group) (2012-2019);
- Head of Management System (MBOS), Procurement Improvement & Analysis Strategic Procurement Division, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2008-2012);
- Business Process & System Improvement Manager, HQ Purchasing/ Corporate Procurement, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2005-2008);
- Business Process Manager, Technocenter Division, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2002-2005);
- Business Process Specialist, PT Dunamis Intra Mitra (Franklin Covey Indonesia) (2001-2002);
- Total Optimization of Processes (TOPs) Manager, Automation Segment Indonesia, PT ABB Sakti Industri (ABB Group) (1999-2001);
- Quality Coordinator, PT ABB Sakti Industri (ABB Group) (1995-1999).

Rangkap Jabatan

Project Management Office Division Head (Senior Manager), PT. Jakarta Propertindo (Perseroda)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Education

Bachelor Degree (S1) majoring in Physics, Geophysics Study Program from the University of Indonesia (1995)

History and Legal Basis of Appointment

KPPS No.001/KPPS/XII/2021

Work Experience

- Project Management Office Division Head (Senior Manager), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (2019-present);
- Business Process Improvement Manager/ System Implementation Head, PT Tripatra Engineers and Constructors (Member of Indika Energy Group) (2012-2019);
- Head of Management System (MBOS), Procurement Improvement & Analysis Strategic Procurement Division, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2008-2012);
- Business Process & System Improvement Manager, HQ Purchasing/ Corporate Procurement, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2005-2008);
- Business Process Manager, Technocenter Division, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2002-2005);
- Business Process Specialist, PT Dunamis Intra Mitra (Franklin Covey Indonesia) (2001-2002);
- Total Optimization of Processes (TOPs) Manager, Automation Segment Indonesia, PT ABB Sakti Industri (ABB Group) (1999-2001);
- Quality Coordinator, PT ABB Sakti Industri (ABB Group) (1995-1999).

Concurrent Position

Project Management Office Division Head (Senior Manager), PT. Jakarta Propertindo (Perseroda)

Affiliations

Has no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders.



ADRIAN RUSMANA

Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis

Director of Finance and Business Development

Periode Jabatan: 26 Agustus 2021 - sekarang Periode ke-1

Term of Office: August 26, 2021 - Present, First Period

Data Pribadi

Personal Data

Warga Negara Indonesia	Indonesian
Usia 52 tahun per 31 Desember 2021	52 years old as of December 31, 2021
Kelahiran 1 Agustus 1969	Born in August 1, 1969

Domisili

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

DKI Jakarta, Indonesia



Riwayat Penunjukan

KPPS No.001/KPPS/XII/2021

Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Bachelors of Business Administration in Finance - University of Kentucky, Lexington, KY, USA (1992);
- Magister (S2) Master of Business Administration in Finance - Cleveland State University, Cleveland, OH, USA (1994).

Riwayat Pekerjaan

- Expert Staff, PT Jakarta Propertindo (JAKPRO) (2021-sekarang);
- Faculty Member, Prasetya Mulya Business School (2012-sekarang);
- President Director, Dana Pensiun Pertamina (2016-2020);
- Commissioner, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) (2016-2020);
- Director of Operations, PT Indonesian Air & Marine Supply (PT Airin, Wholly Owned Subsidiary of PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari) (2015-2016);
- Expert Staff for Financial Sector to President Director, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2015);
- Analyst and Founder, PT Rokatenda Independen Riset (2014-2016);
- Director of Equity Capital Market and Research, PT Trimegah Securities Tbk (2011-2013);
- Director of Equity and Research, PT Sucorinvest Central Gani (2009-2011);
- Director, PT HD Capital (2008-2009);
- Investment Market Analyst/Consultant, Asian Development Bank (2008).

Informasi Rangkap Jabatan

- Expert Staff, PT Jakarta Propertindo (JAKPRO)
- Faculty Member, Prasetya Mulya Business School

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

History and Legal Basis of Appointment

KPPS No.001/KPPS/XII/2021

Education

- Bachelors Degree (S1), Bachelors of Business Administration in Finance - University of Kentucky, Lexington, KY, USA (1992)
- Master Degree (S2), Master of Business Administration in Finance - Cleveland State University, Cleveland, OH, USA (1994).

Work Experience

- Expert Staff, PT Jakarta Propertindo (JAKPRO) (2021-present);
- Faculty Member, Prasetya Mulya Business School (2012-present);
- President Director, Pertamina Pension Fund (2016-2020);
- Commissioner, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) (2016-2020);
- Director of Operations, PT Indonesian Air & Marine Supply (PT Airin, Wholly Owned Subsidiary of PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari) (2015-2016);
- Expert Staff for Financial Sector to the President Director, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2015);
- Analyst and Founder, PT Rokatenda Independen Riset (2014-2016);
- Director of Equity Capital Market and Research, PT Trimegah Securities Tbk (2011-2013);
- Director of Equity and Research, PT Sucorinvest Central Gani (2009-2011);
- Director, PT HD Capital (2008-2009);
- Investment Market Analyst/Consultant, Asian Development Bank (2008).

Information on Concurrent Position

- Expert Staff, PT Jakarta Propertindo (JAKPRO)
- Faculty Member, Prasetya Mulya Business School

Affiliations

Has no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders.



ADITIA KESUMA NEGARA

Direktur Operasi dan Perawatan

Director of Operations and Maintenance

Periode Jabatan: 3 November 2021 – Sekarang Periode ke-1

Term of Office: November 3, 2021 - Present, First Period

Data Pribadi

Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 36 tahun per 31 Desember 2021
Kelahiran Medan, 20 Agustus 1985

Indonesian
36 years old as of December 31, 2021
Born in Medan, August 20, 1985

Domisili

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

DKI Jakarta, Indonesia

Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

KPPS No.001/KPPS/XII/2021

Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik Sipil dan Lingkungan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, (2009);
- Magister (S2) Program Master Sistem & Teknik Transportasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, (2011);
- Research Student di Kyushu University, Jepang, (2011);
- Doctoral Degree Program in Economic Business, Universitas Padjajaran (2020-sekarang).

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

History and Legal Basis of Appointment

KPPS No.001/KPPS/XII/2021

Education

- Bachelor Degree (S1) in Civil and Environmental Engineering from Gadjah Mada University (UGM) Yogyakarta, (2009);
- Master Degree (S2) from Master Program in Transportation Systems & Engineering from Gadjah Mada University (UGM) Yogyakarta, (2011);
- Research Student at Kyushu University, Japan, (2011);
- Doctoral Degree Program in Economic Business, Padjadjaran University (2020-present).

Riwayat Pekerjaan

- General Manager of Operation and Services LRT Jakarta (2018-2021);
- Lecturer at Civil Engineering of Mercubuana University (2018-sekarang);
- PMO Manager & Acting Project Manager Rolling Stock for LRT Jakarta PT. Jakarta Propertindo (2016-2018);
- Chief Civil Expert Assistant, Jakarta MRT Construction Management Consultant (2014-2016);
- Co-Team Leader, Management Consultant of North Line Double Track Project (2012-2014);
- Transport Associate, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) (2011-2012).

Work Experience

- General Manager of Operation and Services LRT Jakarta (2018-2021);
- Lecturer of Civil Engineering at Mercubuana University (2018-present);
- PMO Manager & Acting Project Manager Rolling Stock for LRT Jakarta PT. Jakarta Propertindo (2016-2018);
- Chief Civil Expert Assistant, Jakarta MRT Construction Management Consultant (2014-2016);
- Co-Team Leader, Management Consultant of North Line Double Track Project (2012-2014);
- Transport Associate, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) (2011-2012).

Informasi Rangkap Jabatan

Tidak ada rangkap jabatan

Information on Concurrent Position

There are no concurrent positions

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Affiliations

Has no affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders.



PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE OFFICERS

SAHURDI

Kepala Divisi Strategi, Bisnis, dan Pengadaan
Head of Strategy, Business and Procurement Division
Menjabat sejak | Held the position since: 02/05/2018

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Usia Age	49 tahun per 31 Desember 2021 49 years old as of December 31, 2021
Domisili Domicile	Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	2 Mei 2018 On May 2, 2018
Riwayat Pendidikan Education	Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Andalas tahun 1996 Bachelor of Civil Engineering from Andalas University in 1996
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none">Vice President Procurement & Facility Management, PT Penjaminan Infrastruktur IndonesiaPlt Vice President Corporate Secretary, PT Penjaminan Infrastruktur IndonesiaVice President Procurement & Facility Management, PT Penjaminan Infrastruktur IndonesiaActing Vice President Corporate Secretary, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No.270/SDM/106/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 Board of Directors Decree No.270/SDM/106/X/2019 dated October 1, 2019



SANTOSA

Kepala Divisi Internal Audit
Head of Internal Audit Division
Menjabat sejak | Held the position since: 21/10/2019

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Usia Age	52 tahun per 31 Desember 2021 52 years old as of December 31, 2021
Domisili Domicile	Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	21 Oktober 2019 On October 21, 2019
Riwayat Pendidikan Education	Magister Manajemen dari IPB, Bogor (2020) Master in Management from IPB, Bogor (2020)
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none">Kepala Divisi Internal Audit PT Jamkrindo SyariahKepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT Jamkrindo SyariahAuditor BPCKPAuditor BPPNHead of Internal Audit Division of PT Jamkrindo SyariahHead of the Planning and Development Division of PT Jamkrindo SyariahBPCKP AuditorIBRA Auditor
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 272/SDM/106/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 Decree of the Board of Directors No. 272/SDM/106/X/2019 dated October 21, 2019





NURWENDI

Kepala Divisi Sarana

Head of Facilities Division

Menjabat sejak | Held the position since: 01/12/2019

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Usia Age	50 tahun per 31 Desember 2021 50 years old as of December 31, 2021
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	1 Desember 2019 On December 1, 2019
Riwayat Pendidikan Education	German Dual System pendidikan Teknik Mesin Siemens di Cilegon dan Industriekaufmann dari Yayasan Bina Eksekutif Jakarta (1995) German Dual System, Siemens Mechanical Engineering Education in Cilegon and Industriekaufmann from the Jakarta Executive Development Foundation (1995)
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Project Controlling Team Metal Industry di Siemens, Erlangen Germany • Head of Commercial & Business Administration Divisi Automation & Control di Siemens • Divisi Telekomunikasi Siemens • Head of Customer Team Finance & Control di Nokia • Project Controlling Team Metal Industry in Siemens, Erlangen Germany • Head of Commercial & Business Administration Automation & Control Division at Siemens • Siemens Telecommunications Division • Head of Customer Team Finance & Control at Nokia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No:004/SDM/106/V/2020 tanggal 02 Juni 2020 Board of Directors Decree No: 004/SDM/106/V/2020 dated June 2, 2020



HELMI WIRATRAN

Kepala Divisi Prasarana

Head of Infrastructure Division

Menjabat sejak | Held the position since: 16/07/2018

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Usia Age	35 tahun per 31 Desember 2021 35 years old as of December 31, 2021
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	16 Juli 2018 On July 16, 2018
Riwayat Pendidikan Education	Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Novermber (ITS) Surabaya (2008) Bachelor of Electrical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Novermber (ITS) Surabaya (2008)
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Divisi Maintenance (Site Kideco jaya Agung) di PT Pama Persada Nusantara • Daewoo Ship Building and Marine Engineering (DSME) • Railway System and Integration Coordinator di PT Mott Macdonald Indonesia • Maintenance Division (Site Kideco Jaya Agung) at PT Pama Persada Nusantara • Daewoo Ship Building and Marine Engineering (DSME) • Railway System and Integration Coordinator at PT Mott Macdonald Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 204/SDM/106/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 Decree of the Board of Directors No. 204/SDM/106/X/2019 dated October 1, 2019



IRA YUANITA

Kepala Divisi Corporate Secretary

Menjabat sejak | Held the position since: 05/04/21

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Usia Age	41 tahun per 31 Desember 2021 41 years old as of December 31, 2021
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	5 April 2021 On April 5, 2021
Riwayat Pendidikan Education	Manajemen Komunikasi dari Universitas Padjajaran (2003) Communication Management from Padjajaran University (2003)
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none">• Head of Government & Regulatory Affairs at MNC Group• Expert Assistant at the Central Indonesian Broadcasting Commission 2005-2007• Researcher at the Institute for Mass Communication Research and Development (LPPKM) 2003-2005• Reporter Majalah GAMMA 2001-2003• Head of Government & Regulatory Affairs at MNC Group• Expert Assistant at the Central Indonesian Broadcasting Commission 2005-2007• Researcher at the Institute for Mass Communication Research and Development (LPPKM) 2003-2005• GAMMA Magazine Reporter 2001-2003
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 005/SDM/106/IV/2021 tanggal 5 April 2021 Decree of the Board of Directors No. 005/SDM/106/IV/2021 April 5, 2021



BUDI SARJONO

Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi

Head of Finance & Accounting Division

Menjabat sejak | Held the position since: 01/02/21

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Usia Age	49 tahun per 31 Desember 2021 49 years old as of December 31, 2021
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	1 Februari 2021 On February 1, 2021
Riwayat Pendidikan Education	Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen IMMI (2012) Master of Management, IMMI College of Management (2012)
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none">• Finance and Administration Manager at PT Wijaya Karya 2015-2021• Assistant Accounting Manager PT Adhimix Precast 2006-2015• Financial and Personnel Staff at PT Wijaya Karya Beton 1994-2005• Finance and Administration Manager at PT Wijaya Karya 2015-2021• Assistant Accounting Manager, PT Adhimix Precast 2006-2015• Financial and Personnel Staff at PT Wijaya Karya Beton 1994-2005
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 001/SDM/106/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 Decree of the Board of Directors No. 001/SDM/106/II/2021 dated February 1, 2021



DEMOSGRAFI KARYAWAN DAN SEKILAS TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI

EMPLOYEE DEMOGRAPHIC AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Dalam menjalankan pengelolaan karyawan, Perusahaan menerapkan prinsip non diskriminasi yang ketat dan konsisten bagi setiap karyawan dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Perusahaan juga memiliki kebijakan untuk penerimaan, penilaian kinerja, remunerasi dan pengembangan karier tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Per 31 Desember 2021, jumlah karyawan Perusahaan mencapai 253 orang, mengalami peningkatan sebesar 3,27% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2020 yang sebanyak 245 orang. Adanya peningkatan ini disebabkan oleh pengoptimalan rencana pemenuhan Sumber Daya Manusia yang sudah ditetapkan sebelumnya.

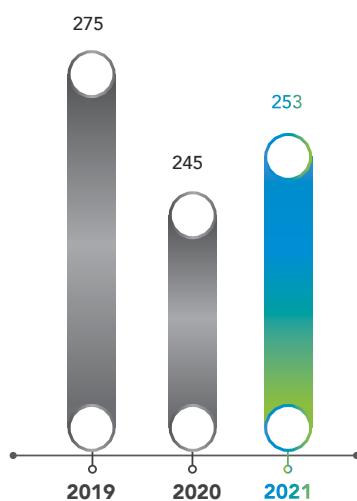
In carrying out employee management, the Company applies the principle of non-discrimination that is strict and consistent for every employee with various different backgrounds. The Company also has policies for acceptance, performance appraisal, remuneration and career development without distinction of ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition.

As of December 31, 2021, the number of employees of the Company reached 253 people, which is an increase of 3.27% when compared to the number of employees as of December 31, 2020, which was 245 people. This increase was due to the optimization of the Human Resources fulfillment plan that had been previously determined.

Pergerakan Jumlah Karyawan 2019-2021 (orang)
Trend in Total Number of Employees 2019-2021 (person)

Tahun Year	Jumlah Karyawan (orang) Total Number of Employees
2019	275
2020	245
2021	253

Pergerakan Jumlah Karyawan
Trend in Total Number of Employees





Demografi Karyawan berdasarkan Level Organisasi/Jabatan (orang) Employee Demographics by Organizational/Positional Level (person)

Level Organisasi/ Jabatan Organizational/ Positional Level	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L/M	P/F	Jumlah Total	Komposisi Composition	L/M	P/F	Jumlah Total	Komposisi Composition	Selisih Difference	Percentase Percentage	
Komisaris Commissioners	2	0	2	0,8%	1		1	0,4%	1	0,41%	▲
Direksi Directors	3	0	3	1,2%	3		3	1,2%	0	0,00%	
GM General Managers	5	1	6	2,4%	6		6	2,4%	0	0,00%	
Manajer Managers	17	3	20	7,9%	15	3	18	7,3%	2	0,82%	▲
Ass Manajer Assistant Managers	15	4	19	7,5%	18	2	20	8,2%	-1	-0,41%	▼
Supervisor Supervisors	21	5	26	10,3%	14	4	18	7,3%	8	3,27%	▲
Officer Officers	40	10	50	19,8%	38	8	46	18,8%	4	1,63%	▲
Staff Staffs	86	41	127	50,2%	81	52	133	54,3%	-6	-2,45%	▼
Jumlah Total	189	64	253	100%	176	69	245	100%	8	3,27%	▲

L = Laki-laki/P = Perempuan | M = Male/F = Female

Demografi Karyawan berdasarkan Status Karyawan (orang) Employee Demographics by Employee Status (person)

Status Status	2021			2020			
	L/M	P/F	Jumlah Total	L/M	P/F	Jumlah Total	
Karyawan Tetap Full-time Employees	159	57	216	136	43	179	▲
Karyawan Tidak Tetap Contract Employees	29	8	37	40	26	66	▼
Jumlah Total	188	65	253	176	69	245	▲

L = Laki-laki/P = Perempuan | M = Male/F = Female

Demografi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang) Employee Demographics by Education (person)

Tingkat Pendidikan Education	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L/M	P/F	Jumlah Total	Komposisi Composition	L/M	P/F	Jumlah Total	Komposisi Composition	Selisih Difference	Percentase Percentage	
SMA Highschool	22	1	23	9,1%	26	12	38	15,5%	-15	-6,12%	▼
D.III Diploma 3 three years	75	32	107	42,3%	64	33	97	39,6%	10	4,08%	▲
S1/D.IV Bachelor Degree/ Diploma 4 years	69	31	100	39,5%	66	24	90	36,7%	10	4,08%	▲


Demografi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
 Employee Demographics by Education (person)

Tingkat Pendidikan Education	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L/M	P/F	Jumlah Total	Komposisi Composition	L/M	P/F	Jumlah Total	Komposisi Composition	Selisih Difference	Percentase Percentage	
S2 Master	22	1	23	9,1%	20	0	20	8,2%	3	1,22%	▲
Jumlah Total	188	65	253	100%	176	69	245	100%	8	3,27%	▲

L = Laki-laki/P = Perempuan | M = Male/F = Female

Demografi Karyawan berdasarkan Usia (orang)
 Employee Demographics by Age (person)

Rentang Usia Age Range	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L/M	P/F	Jumlah Total	Komposisi Composition	L/M	P/F	Jumlah Total	Komposisi Composition	Selisih Difference	Percentase Percentage	
18 - 30 Tahun 18-30 years old (yo)	127	56	183	72,3%	114	62	176	71,8%	7	2,86%	▲
31 - 40 Tahun 31-40 years old (yo)	38	6	44	17,4%	37	5	42	17,1%	2	0,82%	▲
41 - 50 Tahun 41-50 years old (yo)	18	3	21	8,3%	17	2	19	7,8%	2	0,82%	▲
> 51 Tahun > 51 years old (yo)	5	0	5	2,0%	8	0	8	3,3%	-3	-1,22%	▼
Jumlah Total	188	65	253	100%	176	69	245	100%	8	3,27%	▲

L = Laki-laki/P = Perempuan | M = Male/F = Female

Demografi Karyawan berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)
 Employee Demographics by Gender (person)

Gender	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition	Selisih Difference	Percentase Percentage	
Laki-Laki Male	188	74,3%	176	71,8%	12	4,90%	▲
Perempuan Female	65	25,7%	69	28,2%	-4	-1,63%	▼
Jumlah Total	253	100%	245	100%	8	3,27%	▲

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Sebagai wujud upaya menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan profesional dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis, Perusahaan melaksanakan sejumlah program peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan secara berkala baik dalam bentuk pelatihan maupun pengembangan bagi jajaran manajemen dan karyawan. Pengembangan kompetensi karyawan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan pengembangan bisnis Perusahaan maupun kebutuhan masing-masing divisi agar senantiasa mampu mengoptimalkan kompetensinya untuk kemajuan Perusahaan.

Employee Competency Development

As an effort to create superior and professional Human Resources (HR) in facing increasingly dynamic business challenges, the Company carries out a number of HR competency development programs which are held regularly in the form of training and development for management and employees. Employee competency development is carried out by taking into account the needs of the Company's business development as well as the needs of each division so that they are always able to optimize their competencies for the progress of the Company.



Berikut tabel jumlah pendidikan dan pelatihan karyawan Perusahaan berdasarkan level jabatan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi di sepanjang tahun 2021.

The following table shows the number of education and training for the Company's employees by positional level which reflects the opportunities for each level of the organization throughout 2021.

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2021
Competency Development Based on Organizational/Positional Level in 2021

Level Jabatan Positional Level	Jenis dan Tujuan Pelatihan Training Types and Objectives	Akademi Academy	Komposisi Peserta Participant Composition				
			Laki-Laki Male	Percentase Percentage	Perempuan Female	Percentase Percentage	Jumlah Total
Direksi Board of Directors	Softskill	LRTJ	3	1%	0	0%	3
GM General Managers	Softskill & Hardskill	LRTJ	5	2%	1	0%	6
Manager Managers	Softskill & Hardskill	LRTJ	18	7%	4	2%	22
Asst. Manager Assistant Managers	Softskill & Hardskill	LRTJ	12	5%	4	2%	16
Supervisor Supervisors	Softskill & Hardskill	LRTJ	20	8%	5	2%	25
Officer Officers	Softskill & Hardskill	LRTJ	40	16%	9	4%	49
Staff Staffs	Softskill & Hardskill	LRTJ	85	34%	40	16%	125

Biaya Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Perusahaan memiliki komitmen yang besar untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya Insani yang dimilikinya. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan penyediaan anggaran investasi pada program pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. Realisasi biaya pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp1.473.063.737, mengalami peningkatan 69% atau setara dengan Rp1.015.103.637 dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp457.960.100 ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan rencana training tertunda.

Costs for Employee Training and Development

The Company is strongly committed to continuously improve the capacity and quality of its human resources. One of these commitments is realized by providing an investment budget for employee competency development programs on an ongoing basis. The realization of employee competency development costs in 2021 was recorded at IDR 1,473,063,737, which was an increase of 69% or equivalent to IDR 1,015,103,637 when compared to 2020's amount of IDR 457,960,100. The low number in 2020 was due to the COVID-19 pandemic which caused the training plan to be delayed.

	2021 (Rp) (IDR)	2020 (Rp) (IDR)	Perbandingan Realisasi 2021 dan 2020 Comparison of Costs Realization in 2021 and 2020		
			Selisih (Rp) (IDR)	Percentase (%)	
Pendidikan dan Pelatihan Training and Education	1.473.063.737	457.960.100	1.015.103.637	69%	



PENDIDIKAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, AUDIT INTERNAL, DAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDIT AND RISK MANAGEMENT UNIT

Berikut informasi tentang program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Unit Manajemen Risiko, di sepanjang tahun 2021.

The following is information about the competency development program for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Internal Audit, and Risk Management Unit throughout 2021.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Comissioners				
Mohammad Aprindy	Hardskill	Anti Korupsi dan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Berbasis ISO 37001:2016 Anti-Corruption and Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) Based on ISO 37001:2016	21 Oktober 2021/Jakarta October 21, 2021/Jakarta	Bp Angga - Risk Manager LRTJ Mr. Angga - LRTJ Risk Manager
	Hardskill	HR For Non HR (Batch 1)	22 September 2021/Jakarta September 22, 2021/Jakarta	MSCO Consultant
	Softskill	Leader As A Coach (Batch 1)	23 -24 Agustus 2021/Jakarta August 23-24, 2021/Jakarta	JAKPRO & AU
Romy Barenco	Softskill	Komisaris Profesional - Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab Professional Commissioner - Become a Competent and Responsible Commissioner	2-3 Juni 2021/Jakarta June 2-3, 2021/Jakarta	Intipsesan
Direksi Board of Directors				
Hendri Saputra	Softskill	Meaning of Work : Leader as Meaning Maker	30 November 2021/Jakarta November 30, 2021/Jakarta	ESQ Leadership Center



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Adrian Rusmana	Softskill	Meaning of Work : Leader as Meaning Maker	30 November 2021/Jakarta November 30, 2021/Jakarta	ESQ Leadership Center
	Hardskill	Mastering Project Finance & Public Private Partnership	8-9&15-16 November 2021/ Jakarta November 8-9 & 15-16, 2021/Jakarta	Fidelitas
Aditia Kesuma N.D	Hardskill	Anti Korupsi dan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Berbasis ISO 37001:2016 Anti-Corruption and Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) Based on ISO 37001:2016	24 Juni 2021/Jakarta June 24, 2021/Jakarta	LRTJ
	Softskill	Leader As A Coach	20-21 September 2021/ Jakarta September 20-21, 2021/ Jakarta	JAKPRO
	Hardskill	Pelatihan Finance for Non Finance Finance for Non-Finance Training	12-14 Oktober 2021/Jakarta October 12-14, 2021/ Jakarta	IAI
	Softskill	Meaning of Work : Leader as Meaning Maker	30 November 2021/Jakarta November 30, 2021/Jakarta	ESQ Leadership Center
Komite Audit Audit Committee				
Ira Yuanita	Hardskill	Induction Company Profile, PP, QSHE & Lingkup Kerja Company Profile, PP, QSHE & Scope of Work	05 April 2021 April 05, 2021	SDMGA - LRTJ HRGA - LRTJ
	Softskill	Kelas Jurnalistik - Creative Writing Journalism Class - Creative Writing	20 Mei 2021 May 20, 2021	PT LRTJ - CORSEC
	Softskill	LRTJ Culture (Leadership, Respect & Trust)	03 Mei 2021 May 03, 2021	Bp Bintang - SDMGA Mr. Bintang - HRGA
	Hardskill	Anti Korupsi dan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Berbasis ISO 37001:2016 Anti-Corruption and Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) Based on ISO 37001:2016	24 Juni 2021 June 24, 2021	Bp Santosa dan Bp Angga - LRTJ Mr. Angga and Mr. Santosa - LRTJ
	Softskill	Time Management - A Life Hack to be More Productive	17 Juni 2021 June 17, 2021	Ruangguru & LRTJ Ruangguru online education app and LRTJ



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
	Softskill	Teknik Menyelesaikan Konflik dengan Siapapun Techniques for Resolving Conflicts with Anyone	17 Juni 2021 June 17, 2021	Ruangguru & LRTJ Ruangguru online education app and LRTJ
	Softskill	Teknik Mengelola Stress Agar Kerja Tetap Produktif Techniques for Managing Stress to Stay Productive	17 Juni 2021 June 17, 2021	Ruangguru & LRTJ Ruangguru online education app and LRTJ
	Softskill	Leader As A Coach	08-09 September 2021 September 8-9, 2021	JAKPRO & AU
	Hardskill	Pelatihan Finance for Non Finance Finance for Non-Finance Training	12-14 Oktober 2021 October 12-14, 2021	IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Institute of Indonesia Chartered Accountants
	Softskill	Meaning of Work : Leader as Meaning Maker	30 November 2021 November 30, 2021	ESQ Leadership Center
Audit Internal Internal Audit				
Santosa	Softskill	LRTJ Culture (Leadership, Respect & Trust)	03 Mei 2021 May 03, 2021	LRTJ
	Hardskill	Anti Korupsi dan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Berbasis ISO 37001:2016 Anti-Corruption and Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) Based on ISO 37001:2016	24 Juni 2021 June 24, 2021	Bp Santosa and Bp Angga - LRTJ Mr. Angga and Mr. Santosa - LRTJ
	Softskill	Time Management - A Life Hack to be More Productive	17 Juni 2021 June 17, 2021	Ruangguru & LRTJ Ruangguru online education app and LRTJ
	Softskill	Teknik Mengelola Stress Agar Kerja Tetap Produktif Techniques for Managing Stress to Stay Productive	17 Juni 2021 June 17, 2021	Ruangguru & LRTJ Ruangguru online education app and LRTJ
	Softskill	Leader As A Coach	20-21 September 2021 September 20-21, 2021	JAKPRO & AU
	Hardskill	Pelatihan Finance for Non-Finance Finance for Non-Finance Training	12-14 Oktober 2021 October 12-14, 2021	IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Institute of Indonesia Chartered Accountants
	Softskill	Meaning of Work : Leader as Meaning Maker	30 November 2021 November 30, 2021	ESQ Leadership Center
	Softskill	Time Management & Delegation Skill	24 November 2021 November 24, 2021	PT Proxis Solusi Bisnis
	Hardskill	Certified Risk Governance Professional - CRGP	14-19 November 2021 November 14-19, 2021	PT RAP Indonesia



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Unit Manajemen Risiko Risk Management Unit				
R Ananditya Dewangga SE, MBA	<i>Hardskill</i>	Anti Korupsi dan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Berbasis ISO 37001:2016 Anti-Corruption and Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) Based on ISO 37001:2016	24 Juni 2021 June 24, 2021	Bp Santosa dan Bp Angga - LRTJ Mr. Angga and Mr. Santosa - LRTJ
	<i>Hardskill</i>	ISO 37001 Anti Bribery with Certification by PECB	19-20 Agustus 2021 August 19-20, 2021	CRMS
	<i>Softskill</i>	Leader As A Coach	06-07 September 2021 September 6-7, 2021	JAKPRO & AU
	<i>Hardskill</i>	Pelatihan Finance for Non Finance Finance for Non-Finance Training	12-14 Oktober 2021 October 12-14, 2021	IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Institute of Indonesia Chartered Accountants
	<i>Hardskill</i>	Mastering Project Finance & Public Private Partnership	8,9,15 & 16 November 2021 November 8,9,15 & 16, 2021	Fidelitas
	<i>Softskill</i>	Time Management & Delegation Skill	24 November 2021 November 24, 2021	PT Proxis Solusi Bisnis
	<i>Softskill</i>	Meaning of Work : Leader as Meaning Maker	30 November 2021 November 30, 2021	ESQ Leadership Center
	<i>Hardskill</i>	Internal Audit ISO 9001:2015	12-14 Oktober 2021 October 12-14, 2021	ECHO Services

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDER COMPOSITION

Komposisi Tentang Kepemilikan Saham Perusahaan

Informasi Tentang Kepemilikan Saham Perusahaan

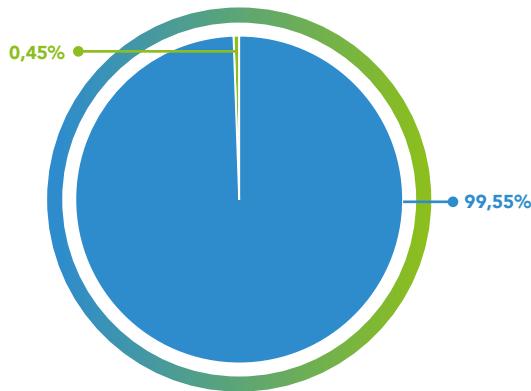
Composition About Company Share Ownership

Information About Company Share Ownership

Kepemilikan Saham Perusahaan per 31 Desember 2021
Company Share Ownership as of December 31, 2021

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (per share)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully paid Capital (Rp/IDR)	Percentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	3.323.934	332.393.400.000	99,55%
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	15.000	1.500.000.000	0,45%
Jumlah Total	3.338.934	333.893.400.000	100,00%

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2021
Company Shareholder Composition as of December 31, 2021



● PT Jakarta Propertindo ● PT Jakarta Infrastruktur Propertindo

Sebagai bentuk pemenuhan compliance atas terbitnya Izin Operasi Sarana Nomor 1540 Tahun 2019 yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT LRT Jakarta, maka pada tahun 2020 dilakukan telah dilakukan inbreng sebanyak 3 (tiga) trainset LRV dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda), sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 75 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh Wiwik Condro SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor A HU-AH.01.03-0408252 tanggal 17 November 2020.

As a form of compliance with the issuance of the Facility Operation Permit Number 1540 of 2019 which has been given by the DKI Jakarta Provincial Government to PT LRT Jakarta, in 2020, 3 (three) LRV trainsets have been carried out from PT Jakarta Propertindo (Perseroda), as stated in the Deed of Declaration of Shareholders' Decision number 75 dated October 26, 2020 made by Wiwik Condro SH, Notary in Jakarta, which has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number A HU-AH.01.03-0408252 dated November 17, 2020.



Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah), bertambah sebesar 25% sebesar Rp150.000.000.000,- menjadi 55% atau sejumlah Rp333.893.400.000,-, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Dari Modal Dasar tersebut, Modal Ditempatkan dan Disetor penuh oleh Para Pemegang Saham adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 3.323.934 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh empat lembar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp333.893.400.000 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Informasi Tentang Kepemilikan Saham Perusahaan Oleh Manajemen Kunci

Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan tidak menerbitkan saham kepada publik maupun terdapat penawaran kepemilikan saham oleh manajemen serta karyawan.

Based on the Company's Deed of Establishment, the Company's Authorized Capital is IDR 600,000,000,000 (six hundred billion rupiah), an increase of 25% by IDR 150,000,000,000,- to 55% or a total of IDR 333,893,400,000,-, with each share nominal value of IDR 100,000 (one hundred thousand rupiah).

From the authorized capital, the issued and fully paid up capital by the shareholders is 25% (twenty five percent) or a total of 3,323,934 (three million three hundred twenty three thousand nine hundred thirty four shares) with a total nominal value in the amount of IDR 333,893,400,000 (three hundred and thirty-three billion eight hundred ninety-three million four hundred thousand rupiah).

Information on the Company Share Ownership By Management

Until the end of 2021, the Company did not issue shares to the public nor were there any share ownership offers by management and employees.

Nama dan Jabatan Name and Position	2021		2020	
	Jumlah Saham (lembar) Total Amount of Shares (per share)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Total Amount of Shares (per share)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Mohamad Aprindy (Komisaris Utama) Mohamad Aprindy (President Commissioner)	Nihil None		Nihil None	
Romy Bareno (Komisaris) Romy Bareno (Commissioner)				
Direksi Board of Directors				
Hendri Saputra (Direktur Utama) Hendri Saputra (President Director)	Nihil None		Nihil None	
Adrian Rusmana (Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis) Adrian Rusmana (Director of Finance and Business Development)				
Aditia Kesuma Negara (Direktur Operasi dan Perawatan) Aditia Kesuma Negara (Director of Operations and Maintenance)				
Jumlah Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi Total Share Ownership by the Board of Commissioners and the Board of Directors	Nihil None		Nihil None	



Informasi Tentang Pemegang Saham Utama Dan/Atau Pemegang Saham Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir



PT Jakarta Propertindo (Perseroda) merupakan pemegang saham utama/pengendali LRT Jakarta dengan kepemilikan langsung sebesar 99,55%, dan kepemilikan tidak langsung melalui PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebesar 0,45%.

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Is The Main Shareholder / Control of LRT Jakarta With Direct Ownership Of 99.55%, And Indirect Ownership Through Pt Jakarta Infrastructure Propertindo of 0.45%."

PT Jakarta Propertindo

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) merupakan perusahaan Properti, Infrastruktur, Utilitas dan Teknologi Informasi Komunikasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang awalnya merupakan sebuah Badan Pengelola Lingkungan (BPL) yang didirikan pada tahun 1985 dengan tanggung jawab mengelola kawasan Pluit. Selanjutnya pada September 1997 PT Pembangunan Pluit Jaya dengan limpahan aset dari eks BPL Pluit merger dengan PT Pembangunan Pantai Utara Jakarta. Pada tanggal 15 Desember 2000, kedua perusahaan merger ini berubah menjadi PT Jakarta Propertindo. Dan tahun 2018, Perusahaan menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perusahaan Daerah) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang properti, infrastruktur, utilitas dan teknologi informasi komunikasi milik Pemerintah DKI Jakarta.

Sejak saat itu, Perusahaan tidak hanya membidangi sektor properti, tetapi juga mulai merambah ke sektor infrastruktur. Proyek-proyek ini kemudian meluas pada pembangunan jalan tol, waduk, dan prasarana infrastruktur lain. Pada tahun 2014, Perusahaan kemudian membagi perusahaannya menjadi 3 anak usaha yakni properti, infrastruktur, dan utilitas.

Dengan pengalaman dan aset yang dimiliki, serta didukung oleh manajemen dan sumber daya yang kompeten, Perusahaan terus bereksplansi dan mengukuhkan diri bukan hanya untuk menghasilkan profit, tetapi juga menjadi agen pembangunan yang berkontribusi terhadap pembangunan yang berdampak secara langsung untuk masyarakat DKI Jakarta.

Information on Ultimate Shareholders and/or Controlling Shareholders to The Name of Ultimate Owners

PT Jakarta Propertindo

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) is a company operating in the field of Property, Infrastructure, Utilities and Information Communication Technology, and is owned by the DKI Jakarta Provincial Government. It was originally an Environmental Management Agency (BPL) which was established in 1985 with the responsibility of managing the Pluit area. Then, in September 1997, PT Pembangunan Pluit Jaya with assets from former BPL Pluit merged with PT Pembangunan Pantai Utara Jakarta. On December 15, 2000, the two merged companies became PT Jakarta Propertindo. In 2018, the Company became a Jakarta Propertindo Limited Liability Company (Regional Company), a Regional Owned Enterprises engaged in property, infrastructure, utilities and information communication technology owned by the DKI Jakarta Provincial Government.

Since then, the Company has not only been operating in the property sector, but has also begun to expand into the infrastructure sector. These projects then expanded to the construction of toll roads, reservoirs, and other infrastructures. In 2014, the Company then divided the organization into 3 subsidiaries, namely property, infrastructure, and utilities.

With the experience and assets owned, and supported by competent management and resources, the Company continues to expand and establish itself not only to generate profit, but also to become a development agent that contributes to development that has a direct impact on the people of DKI Jakarta.



Manajemen Kunci PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2021
Key Management of PT Jakarta Propertindo as of December 31, 2021

Dewan Komisaris Board of Comissioners	Direksi Board of Directors		
Komisaris Utama President Comissioner	Hamdan Zoelva	Direktur Utama President Director	Widi Amanasto
Komisaris Comissioner	Muhammad Hudori	Direktur Pengelolaan Aset Director of Asset Management	Gunung Kartiko
Komisaris Comissioner	Yusmada Faizal	Direktur Keuangan Director of Finance	Yuliantina Wangsawiguna
Komisaris Comissioner	Nurmansjah Lubis	Direktur SDM dan Umum Director of HR and GA	Muhammad Taufiqurrachman
		Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development	Mohamad Aprindy

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) yang awalnya merupakan PT Jakarta Komunikasi didirikan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2006 berdasarkan Akta No.06 dari Notaris Sutjipto SH. Sebagai perusahaan penerus, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo yang berdomisili di Gedung Thamrin City Lantai 1, Jl. Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Jakarta Pusat juga ditunjuk sebagai *sub holding* bidang infrastruktur yang bergerak dalam berbagai bidang.

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo

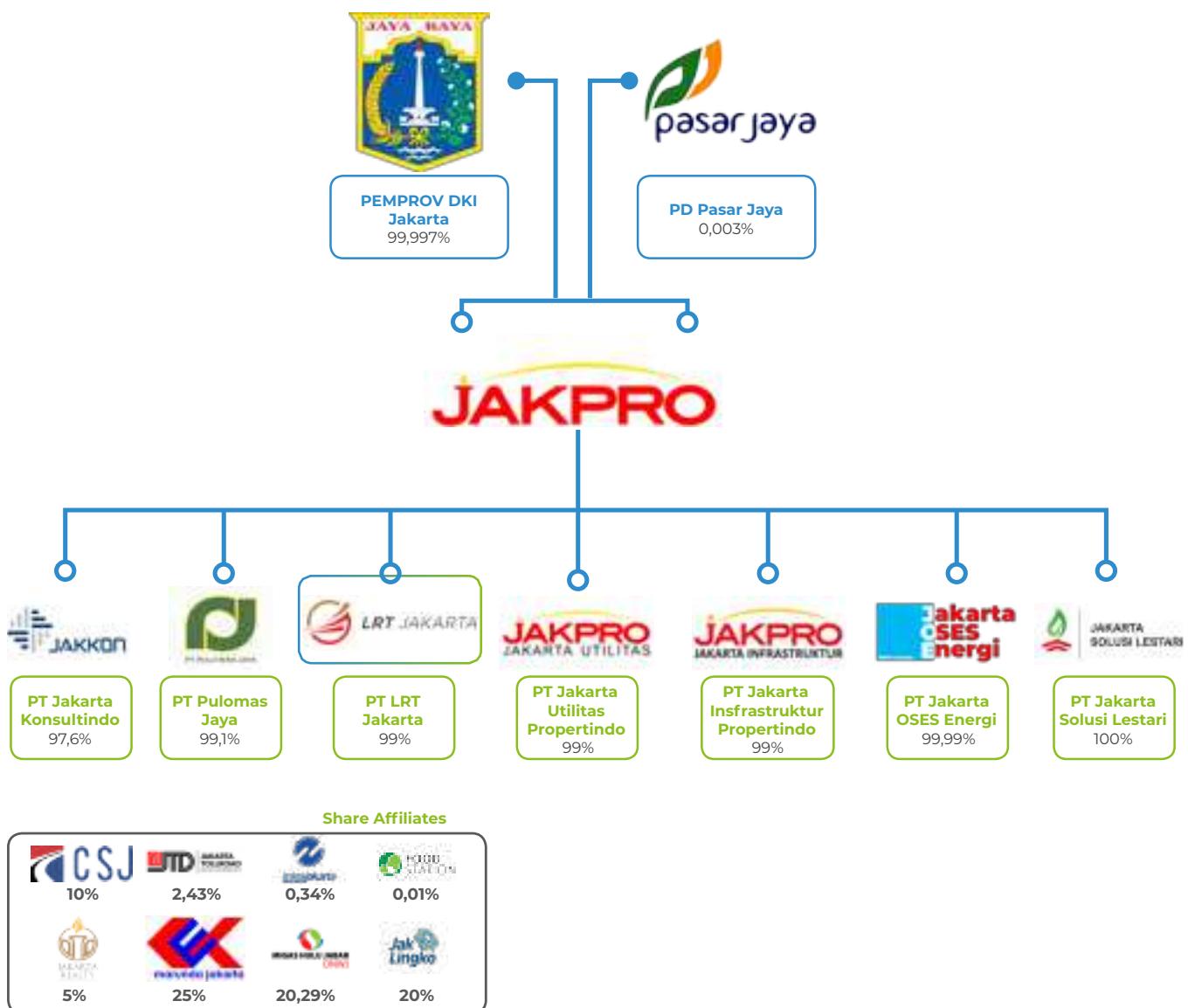
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP), which was originally PT Jakarta Communication, was established in Jakarta on October 2, 2006 based on Deed No.06 of Notary Sutjipto SH. As the successor company, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, which is domiciled at Thamrin City Building, 1st Floor, Jl. Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Central Jakarta, was also appointed as a sub-holding in the infrastructure sector engaged in various fields.

Dewan Komisaris Board of Comissioners	Direksi Board of Directors		
Komisaris Utama President Comissioner	Gunung Kartiko	Direktur Director	Solihin Djaelani



STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

COMPANY GROUP STRUCTURE





INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI SERTA JOINT VENTURE (JV) DAN SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

INFORMATION ON SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, JOINT VENTURE (JV) AND SPECIAL PURPOSE VEHICLES (SPV)

Hingga akhir tahun 2021, LRT tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Joint Venture (JV) ataupun Special Purpose Vehicle (SPV), sehingga tidak terdapat informasi terkait nama entitas anak dan/atau asosiasi; persentase kepemilikan saham; keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

As of the end of 2021, LRT does not have any Subsidiaries, Associated Entities, Joint Ventures (JV) or Special Purpose Vehicles (SPV), so there is no information regarding the names of subsidiaries and/or associations; percentage of share ownership; information on the business fields of the subsidiaries and/or associated entities; and a description of the operating status of subsidiaries and/or associates (whether they are already operating or not yet operating).

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING

Hingga 31 Desember 2021, LRT tidak melakukan penerbitan saham kepada publik, tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham mana pun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

As of December 31, 2021, LRT did not issue shares to the public, conduct an Initial Public Offering, or trade its shares on any stock exchange. Therefore, there is no information regarding the year of share issuance, number of shares, nominal value of shares, share offering price for each corporate action, number of shares listed after each corporate action, and the name of the stock exchange in which the Company's shares are listed.

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE AND LISTING

Hingga tanggal 31 Desember 2021 LRT tidak menerbitkan penerbitan dan pencatatan efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi terkait penerbitan dan pencatatan efek lainnya dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2021, LRT has not issued any other securities issuance and listing, so, there is no information related to the issuance and listing of other securities in this Annual Report.



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

Nama dan Alamat Name and Address	Jenis dan Bentuk Jasa Types and Forms of Service	Biaya Costs	Periode Penugasan Assignment Period
Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Professions			
Akuntan Publik Public Accountant	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono Head Office The Royal Palace Jl. Prof.Dr.Soepomo No.178A - C29 Jakarta 12810 Indonesia Telp : 62-21-831386 Fax : 62-21-8313871 Email : central.mail@kanaka.co.id	Jasa audit laporan keuangan periode 2021 Financial statement audit services for the 2021 period	Rp124.960.000 2021
Konsultan Hukum Law Consultant	MAA Law Firm Mega Plaza, 2 nd Floor, Jalan. HR Rasuna Said, Kav. C-3, Jakarta Selatan Telp : 0215212966 Email: info@maa-law.co.id	Jasa Konsultan Hukum Legal Consulting Services	Rp27.500.000,- Oktober-Desember October-December
Notaris Notary	Kantor Notaris & PPAT Pratiwi Handayani, SH Alamat: Gedung Jaya Lantai 2 Jl. MH Thamrin No. 12 Jakarta 10340 Telp : (021)31908335 Fax : (021)31927378 Email: notaris@pratiwihandayani.com	Jasa Notaris Notary Service	Rp21.756.500,- November-Desember November-December



INFORMASI WEBSITE PERUSAHAAN

INFORMATION ON COMPANY WEBSITE

Jadi Pahlawan Pandemi
Jaga diri, Keluarga dan Kolega
Ayo Giatkan 5M

- Mencuci Tangan
- Memakai Masker
- Menjaga jarak
- Menjauhi Kerumunan
- Mengurangi Mobilitas

#LRTBisa #CintaLRT #GenjekanPeduliSehat
#SukseksanVaksinasi #KampanyeVaksinasiLRT

PT LRT Jakarta senantiasa menyediakan informasi terkait Perusahaan kepada stakeholders yang salah satunya dapat diakses melalui situs web yang beralamat www.lrtjakarta.co.id. Perusahaan terus berupaya memberikan informasi yang terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan. Situs resmi Perusahaan menyajikan informasi dalam dua Bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan telah memenuhi informasi yang wajib dimuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2015, seperti:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi Bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan;
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

PT LRT Jakarta always provides information regarding the Company to stakeholders, one of which can be accessed through the website at www.lrtjakarta.co.id. The Company continues to make the effort to provide open information to the public and stakeholders. The Company's official website presents information in two languages, namely Indonesian and English and has complied with the standards on the information that must be published, which is in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.4/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies, that have been stipulated on June 25, 2015, which include the followings:

1. General Information of Issuers or Public Companies;
2. Information for Investors;
3. Information on Corporate Governance;
4. Information on Corporate Social Responsibility.



Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Details
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; Shareholder information up to individual ultimate owners;	x	Belum tersedia di website Perusahaan It is not yet available on the Company's website
Isi Kode Etik Content of the Code of Ethics	✓	Informasi mengenai Kode Etik Perusahaan yang dapat diakses di situs web Perusahaan. It contains information regarding the Company's Code of Conduct, which can be accessed on the Company's website.
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information on the General Meeting of Shareholders, (GMS) which at least includes material on the agenda discussed in the GMS, a summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely the date of the announcement of the GMS, the date of the summon to the GMS, the date of the GMS, the date on which the summary of the minutes of the GMS is announced.	x	Belum tersedia di website Perusahaan It is not yet available on the Company's website
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir) Annual financial statement (of the last 5 years)	x	Belum tersedia di website Perusahaan It is not yet available on the Company's website
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	Informasi mengenai Profil Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang dapat diakses di situs web Perusahaan. It contains information regarding the Profile of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, which can be accessed on the Company's website.
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	✓	Informasi mengenai Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Audit Internal Perusahaan yang dapat diakses di situs web Perusahaan. It contains information regarding the Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and the Company's Internal Audit, which can be accessed on the Company's website.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility	x	Belum tersedia di website Perusahaan It is not yet available on the Company's website
Informasi Umum Perusahaan General Information on the Company	✓	Informasi mengenai Informasi Umum Perusahaan yang dapat diakses di situs web Perusahaan. It contains General Information on the Company, which can be accessed on the Company's website.



LRT JAKARTA



LRT JAKARTA



2021 LAPORAN TAHUNAN
Annual Report



04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON COMPANY PERFORMANCE



TINJAUAN UMUM

GENERAL REVIEW



Ekonomi Makro Regional

Seperti dikutip dari "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta" yang dirlis oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa perekonomian DKI Jakarta terus membaik dan tumbuh lebih tinggi. Pada triwulan IV 2021, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tercatat sebesar 3,64% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (2,43%, yoy). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan pelonggaran status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga ke level 1, serta momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pada periode pelonggaran tersebut, berbagai sektor ekonomi telah dibuka kembali dengan tingkat maksimum kapasitas yang lebih longgar, namun dengan penerapan prokes yang tetap ketat, yaitu menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga (RT) memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan laporan dengan tumbuh sebesar 3,65% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun kinerja pertumbuhan Konsumsi RT yang positif sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik seiring dengan optimisme masyarakat yang semakin tinggi di tengah kasus COVID-19 yang terkendali dan vaksinasi dosis 1 yang telah melampaui target DKI Jakarta.

Regional Macroeconomics

As quoted from the "DKI Jakarta Provincial Economic Report" which was released by Bank Indonesia, stating that the DKI Jakarta economy continued to improve and grew higher. In the fourth quarter of 2021, DKI Jakarta's economic growth was recorded at 3.64% (yoy), higher than the previous quarter growth (2.43%, yoy). The increase was influenced by increasing community mobility along with the loosening of the status of restrictions on community activities (PPKM) to Level 1, and the moment of the National Religious Day (HBKN) of Christmas and New Year (Nataru). In said period, various economic sectors have been reopened with a less strict maximum level capacity, yet still with the implementation of fixed health protocol, namely the implementation of the PeduliLindungi application.

In terms of expenditure, household consumption (RT) contributed the largest on the economy of DKI Jakarta in the quarterly report, with a growth of 3.65% (yoy), a slow down compared to the previous quarter. The performance of RT consumption growth is positive, and is in line with the increasing domestic demand along with the higher optimism of the community in the midst of a controlled COVID-19 case and vaccination dose 1 which has exceeded the DKI Jakarta's target. Investment became the



Investasi menjadi kontributor kedua terbesar seiring dengan terus berjalannya proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) dan optimisme investasi korporasi yang meningkat. Pertumbuhan positif juga terjadi pada Ekspor dan Impor seiring dengan masih berlanjutnya permintaan domestik dan global. Sebaliknya, Konsumsi Pemerintah tercatat mengalami kontraksi terutama berasal dari peningkatan pendapatan daerah yang menjadi faktor pengurang kinerja, di tengah adanya pertumbuhan realisasi belanja dari belanja K/L APBN dan APBD DKI Jakarta.

Dari sisi LU, hampir seluruh LU mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan IV 2021 yang terjadi seiring dengan peningkatan permintaan domestik dan mobilitas masyarakat. Adapun LU dengan pangsa terbesar seperti LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi mencatatkan pertumbuhan yang positif, kecuali LU Jasa Keuangan yang mengalami kontraksi pada triwulan IV 2021. Akselerasi pertumbuhan juga terjadi di berbagai LU lainnya di DKI Jakarta yaitu LU Akomodasi dan mamin dan LU Transportasi dan Pergudangan seiring dengan pelonggaran status PPKM. Selanjutnya, LU yang terimbas positif sepanjang pandemi COVID-19 seperti LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan LU Informasi dan Komunikasi (Infokom) masih terus melanjutkan kinerja pertumbuhan yang positif seiring dengan masih berlangsungnya kegiatan penanganan terkait COVID-19 dan vaksinasi, serta berlanjutnya kegiatan Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH).

Secara keseluruhan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tercatat tumbuh sebesar 3,56% (yoY), berbalik arah dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi (-2,39%, yoY). Kinerja pertumbuhan yang positif sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut sejalan dengan perekonomian nasional. Namun demikian, pertumbuhan DKI Jakarta pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (3,69%, yoY).

Keuangan Pemerintah

Pada triwulan IV 2021, kinerja Pendapatan Daerah di DKI Jakarta mencatatkan pertumbuhan positif, didorong oleh peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Dari sisi Belanja Daerah, realisasi pada triwulan laporan juga mengalami pertumbuhan yang positif didorong oleh kenaikan Belanja Operasi dan Belanja Modal, di tengah penurunan realisasi Belanja Transfer. Pada Pembentukan Daerah, realisasi pada triwulan laporan tumbuh positif baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Sementara itu, kinerja

second largest contributor along with the continued National Strategic Project (PSN) and increased corporate investment optimism. Positive growth also occurs in exports and imports along with continued domestic and global demand. Conversely, the government's consumption was recorded to have contracted mainly from an increase in regional income which became a deduction factor of performance, amid the growth of the realization of spending from the expenditure of the K/L of the State Budget (APBN) and the DKI Jakarta's Regional Budget (APBD).

In terms of Business Field (LU), almost all of LU experienced growth acceleration in the fourth quarter of 2021 which occurred along with the increase in domestic demand and community mobility. LU with the largest share are Big and Retail Trade LU, Cars and Motorcycles Repairs LU, Processing Industry LU, and Construction LU, which listed positive growth, except for Financial Services LU that was contracted in the fourth quarter of 2021. Growth acceleration also occurred in various LU in DKI Jakarta, namely Accommodation and F&B LU, as well as Transportation and Warehousing LU, which grew along with the loosening of PPKM level. Furthermore, LU which was positively affected by the COVID-19 pandemic, such as Health Services and Social Activities LU, and Information and Communications (Infokom) LU, still continued to show the positive growth performance along with the continued handling activity of COVID-19 and vaccination handling, and continued activities of Work From Home (WFH) and School from Home (SFH).

Overall, in 2021, DKI Jakarta's economic growth was recorded at 3.56% (yoY), which is in contradiction to the previous year which was contracted by -2.39% (yoY). Positive growth performance is in line with the economic recovery that continues to be in line with the national economy. However, DKI Jakarta's growth in 2021 was lower than national economic growth (3.69%, yoY).

Government Finance

In the fourth quarter of 2021, the performance of the regional income in DKI Jakarta posed positive growth, driven by an increase in the realization of Regional Original Revenue (PAD) and Transfer Revenue. In terms of Regional Expenditure, the realization in the quarterly report also experienced positive growth, driven by an increase in Operating Expenditure and Capital Expenditure, amid a decline in the realization of Transfer Expenditure. In Regional Financing, the realization in the quarterly report positively grew, both in terms of financing revenue and



penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di DKI Jakarta pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh positif seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi. Pada triwulan IV 2021, pertumbuhan realisasi Belanja K/L di DKI Jakarta terakselerasi, seiring dengan peningkatan realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos), di tengah penurunan realisasi Belanja Modal. Adapun secara keseluruhan tahun 2021 capaian realisasi pagu maupun nominal realisasi total belanja K/L di DKI Jakarta mencatatkan peningkatan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Inflasi

Seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi, Inflasi IHK Provinsi DKI Jakarta pada triwulan IV 2021 melanjutkan peningkatan, meskipun masih rendah. Pada periode ini, inflasi Provinsi DKI Jakarta tercatat rendah sebesar 1,53% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 1,14% (yoy). Peningkatan harga pada periode laporan terutama didorong oleh kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan peningkatan harga CPO global yang masih berlangsung. Untuk keseluruhan tahun 2021, tekanan inflasi di Provinsi DKI Jakarta sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi IHK DKI Jakarta pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,53% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2020 sebesar 1,59% (yoy).

Adapun sama seperti tahun 2020, tekanan inflasi tersebut berada di bawah sasaran inflasi nasional sebesar $3,0\% \pm 1\%$. Adapun inflasi yang tetap rendah didukung terkendalinya harga-harga komoditas yang diatur pemerintah atau administered price (AP), seperti tarif energi, semakin efektifnya program pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta, serta konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter.

Pembiayaan Daerah

Secara umum, intermediasi perbankan pada triwulan IV 2021 melanjutkan pertumbuhan yang positif, namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit perbankan tumbuh positif sebesar 1,63% (yoy) pada triwulan laporan, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (2,40%, yoy). Melambatnya penyaluran kredit tersebut dipengaruhi oleh demand kredit investasi yang belum tumbuh tinggi terutama dari sektor korporasi. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mengalami peningkatan, terutama didorong oleh peningkatan giro dan deposito. Meskipun demikian, kondisi stabilitas keuangan di DKI Jakarta tetap terjaga yang antara lain ditunjukkan oleh penurunan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) berdasarkan lokasi proyek sebesar 1,97% turun dibandingkan posisi triwulan sebelumnya (2,19%). Sejalan dengan itu, rasio NPL berdasarkan lokasi bank juga menurun dari 3,06% pada triwulan III 2021 menjadi 2,93% pada triwulan IV 2021.

expenses. Meanwhile, the performance of Tax Revenue and Non-tax State Revenue (PNBP) in DKI Jakarta in the Fourth Quarter of 2021 recorded a positive growth along with improving economic activity. In the fourth quarter of 2021, the growth of the realization of K/L spending in DKI Jakarta was accelerated, along with the increase in the realization of Employee Expenditure, as well as Goods and Social Assistance Expenditure (Bansos), amid a decline in the realization of Capital Expenditure. Overall, in 2021, the realization of the limit and nominal realization of the total K/L expenditure in DKI Jakarta recorded an increase compared to the same period the previous year.

Inflation

Along with the continued economic recovery, the DKI Jakarta Provincial CPI inflation in the fourth quarter of 2021 continued to increase, even though it was still low. In this period, DKI Jakarta Provincial Inflation was recorded at 1.53% (yoy), higher than the previous quarter of 1.14% (yoy). The price increase in the reporting period was mainly driven by the increase in cooking oil prices. This was in line with the increase in global CPO prices which were still ongoing. Overall, in 2021, inflationary pressures in DKI Jakarta Province were slightly lower than the previous year. DKI Jakarta CPI inflation in 2021 was recorded at 1.53% (yoy), slightly lower than inflation in 2020 of 1.59% (yoy).

Similar to 2020, the inflationary pressure was under the national inflation target of $3.0\% \pm 1\%$. The inflation which remains low was supported by the controlled commodity prices regulated by the government, by administered price (AP), such as energy tariffs, by a more effective inflation control program by the DKI Jakarta Regional Inflation Control Team (TPID), as well as by the consistency of Bank Indonesia's policy in maintaining monetary stability.

Regional Financing

In general, banking intermediation in the fourth quarter of 2021 continued to show a positive growth, but slowed down compared to the previous quarter. Banking credit grew positively by 1.63% (yoy) in the quarterly report, a slow down if compared to the previous year's (2.40, yoy). The slowdown in lending was influenced by the demand of investment credit that have not grown significantly, especially from the corporate sector. Meanwhile, the growth of third party funds (DPK) has increased, mainly driven by the increase in demand deposits and time deposits. Nevertheless, the condition of financial stability in DKI Jakarta was maintained, indicated, among others, by a decrease in the ratio of Non-performing Loans (NPLs) based on the project location of 1.97%, which is a decrease compared to the previous quarterly position (2.19%). In line with that, the NPL ratio based on the location of the bank also decreased from 3.06% in the third quarter of 2021 to 2.93% in the fourth quarter of 2021.



Sistem Pembayaran

Perkembangan transaksi sistem pembayaran tunai dan nontunai mengonfirmasi berlanjutnya pemulihan ekonomi di triwulan IV 2021. Pada periode laporan, arus kas tercatat net outflow dengan posisi yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan permintaan uang kartal di tengah mobilitas masyarakat yang meningkat akibat pelonggaran PPKM dan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru. Transaksi nontunai juga mengalami peningkatan baik pada Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) maupun sektor ritel seperti transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, tingkat kesejahteraan di DKI Jakarta berdasarkan indikator-indikator terkini yang tersedia menunjukkan perbaikan. Jumlah tenaga kerja menunjukkan peningkatan dan jumlah pengangguran mengalami penurunan pada periode pencatatan Agustus 2021. Peningkatan tenaga kerja bersumber dari penyerapan di sektor formal maupun informal. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), beberapa LU utama seperti LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, serta LU Transportasi dan Pergudangan menunjukkan kinerja penyerapan tenaga kerja yang positif. Pada periode pencatatan September 2021, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Namun demikian, angka Garis Kemiskinan (GK) tumbuh meningkat sejalan dengan peningkatan inflasi pada April sampai dengan September 2021. Di tengah penurunan kemiskinan, ketimpangan di DKI Jakarta pada periode September 2021 mengalami peningkatan, tercermin dari peningkatan indeks rasio gini. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menggencarkan berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan.

Payment System

The development of Cash and Non-cash payment system transactions confirmed the continued economic recovery in the fourth quarter of 2021. In the reporting period, the cash flow was recorded by the net outflow with a higher position than the previous quarter, which was in line with the increase in demand for currency amid increasing people's mobility due to loosening of PPKM's level and National Religious Holiday of Christmas and New Year. Non-cash transactions also experienced a good increase in the Bank Indonesia's National Clearing System (SKNBI) and the retail sector such as Card-based Payment Instrument (APMK).

Employment and Welfare

In line with continuing economic growth, the level of welfare in DKI Jakarta, based on the available latest indicators, show improvement. The number of workers showed an increase and the number of unemployed declined in the recording period of August 2021. Increased labor originated from absorption of workforce in the formal and informal sectors. In terms of business fields (LU), some major LUs, such as Processing Industry LU, Trade LU, and Transportation and Warehousing LU, showed a positive workforce absorption performance. In the recording period of September 2021, the poverty rate at DKI Jakarta has decreased compared to the same period of the previous year.

However, the number of poverty lines (GK) grew, in line with the increase in inflation, in April to September 2021. In the midst of a decline in poverty, the inequality occurred in DKI Jakarta in the period September 2021 caused an increase, reflected in the increase in the Gini ratio index. The Central Government and the Provincial Government (Pemprov) of DKI Jakarta continues to intensify various social protection programs to maintain the welfare of the community in the middle of a pandemic. In addition, the DKI Jakarta Human Development Index (HDI) in 2021 also increased.



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OVERVIEW OF OPERATIONS PER BUSINESS SEGMENT



SEGMENT BISNIS & STRATEGI (SBU)

Kegiatan Operasi dan Usaha Segmen Bisnis & Strategi

1. Kegiatan pengembangan usaha diluar pendapatan tiket (*non-farebox*) yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional dan pemeliharaan LRT Jakarta yang dilakukan pada tahun 2021 telah berjalan sesuai bidang usaha yang sudah dituangkan dalam rencana kerja seperti periklanan, ritel, telekomunikasi dan jasa konsultasi dan perawatan. Proses bisnis yang berlangsung yakni melakukan *direct approach* atau *direct selling* kepada potensial klien, melakukan inisiasi *meeting offline* maupun *online* dengan menjelaskan *market sounding* dan *company profile* LRT Jakarta, *Document Collection* dan mengirimkan LOO (Letter of Offering) kepada calon klien yang telah terinfo mengenai *product brief* dari LRT Jakarta, negosiasi mengenai teknis dan harga sesuai dengan SK Direksi untuk mencapai kesepakatan, dan yang terakhir adalah membuat kesepakatan kerja sama yang tertuang dalam perjanjian kerja sama berdasarkan jangka waktu *mid term* dan *long term*.

BUSINESS & STRATEGY SEGMENTS (SBUS)

Operations and Business Activities Business Segments & Strategy

1. Business development activities outside of ticket revenues (*non-farebox*) which aim to support the operational and maintenance costs of the LRT Jakarta carried out in 2021 have been operating according to the business fields that have been stated in the work plan, such as advertising, retail, telecommunications and consulting, and maintenance services. The ongoing business processes are direct approach or direct selling to potential clients, initiating offline and online meetings by explaining the market sounding and company profile of LRT Jakarta, Document Collection and sending LOO (Letter of Offering) to prospective clients who have been informed about the product brief from LRT Jakarta, negotiations regarding technical aspects and price in accordance with the Decree of the Board of Directors to reach an agreement, and make a cooperation agreement as stated in the cooperation agreement based on the mid-term and long-term terms.



2. Produk dan Jasa atas pengusahaan pengembangan bisnis Non-farebox yang dimiliki meliputi area Depo LRT Jakarta khususnya R7 sebagai pemanfaatan area untuk kegiatan bisnis gerai pusat pengiriman kebutuhan harian digital, 6 (enam) Stasiun LRT Jakarta sebagai area penempatan vending machine dan kegiatan *brand activation* dari mitra usaha , dan juga pemanfaatan dalam bidang jasa konsultansi dan perawatan di mana PT LRT Jakarta dapat menjadi *partner* operasi, perawatan dan konsultansi untuk mitra yang bergerak di bidang transportasi.
2. Products and services for the development of the Non-farebox business include the LRT Jakarta Depo area, especially R7 as area utilization for business activities for digital daily necessities delivery center outlets, 6 (six) LRT Jakarta Stations as a vending machine placement area and brand activation activities from business partners, as well as utilization in the field of consulting and maintenance services in which PT LRT Jakarta can be a partner in operation, maintenance, and consulting for partners engaged in the transportation sector.

Strategi Pengembangan Bisnis Segmen Bisnis & Strategi

PT LRT Jakarta melakukan kegiatan bisnis secara *direct selling* kepada calon mitra. Kegiatan bisnis yang dilakukan akan disesuaikan terlebih dahulu antara kegiatan dan calon mitra yang terkait. Kegiatan bisnis meliputi bisnis Non-Farebox PT LRT Jakarta yang akan dimulai dengan *market sounding* pada setiap calon mitra. Kondisi pandemi COVID-19 cukup memberikan efek besar bagi keberjalanannya bisnis non-farebox oleh karena itu fokus bisnis yang dijalankan ditahun 2021 adalah optimalisasi asset pada bisnis *non-human presence*, yang artinya bukan bertumpu pada *crowd* dan *traffic* kunjungan customer, melainkan berfokus pada bisnis *online*

Kinerja Operasi dan Bisnis Segmen Bisnis & Strategi

Kegiatan bisnis dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian kerja sama. Produk LRTJ yang ditawarkan bersifat *adjustable* disesuaikan dengan kondisi pasar dan permintaan customer namun tetap berazaskan nilai-nilai LRTJ. Team pengembangan bisnis senantiasa menggali, menyesuaikan dan *maintaining networking* akan idea bisnis yang sedang berkembang pesat ditengah tengah kebutuhan customer.

Business Development Strategy Business Segment & Strategy

PT LRT Jakarta conducts business activities by direct selling to potential partners. The business activities conducted will be adjusted in advance between the related activities and potential partners. Business activities include PT LRT Jakarta's Non-Farebox business, which will begin with market sounding for each potential partner. The COVID-19 pandemic condition has had quite a big effect on the running of the non-farebox business. Therefore, the focus of the business being carried out in 2021 was optimizing assets in the non-human presence business, which means not relying on crowds and customer visit traffic, but focusing on online business.

Operational and Business Performance Business Segments & Strategy

Business activities are conducted based on the agreement of both parties as stated in the cooperation agreement. The LRTJ products offered are adjustable according to market conditions and customer demands but are still based on LRTJ values. The business development team is constantly exploring, adjusting, and maintaining networking for business ideas that are growing rapidly amid customer needs.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Bisnis & Strategi
Business and Strategy Segments Profitability and Income

Uraian Description	2021 (Rp) (IDR)	2020 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Sewa Menyewa Lease Income	1,433,386,884	1,054,455,265	378,931,618	36%
Periklanan Advertising	1,519,620,580	2,240,477,504	720,856,924	-32%
Jasa Penjualan Teknis Technical Sales Service	2,773,847,503	435,000,000	2,338,847,503	538%
Jumlah Total	5,726,854,967	3,729,932,769	1,996,922,197	54%



- Pendapatan sewa menyewa mendapat kenaikan sebesar 36% terhadap *Fiscal Year 2020*, adapun kenaikan ini di support oleh bisnis-bisnis yang muncul saat pandemi berlangsung seperti (Posko Aman Gojek, Grab daily Mart, dan Sentra Vaksinasi di lingkungan stasiun LRT Jakarta).
- Periklanan/advertising mengalami penurunan sebesar 32% terhadap *Fiscal Year 2020* karena sejak pandemi yang melanda dan pembatasan mobilisasi yang dilakukan pemerintah, membuat pihak advertiser lebih memilih produk *digital advertising* daripada iklan luar ruang.
- Jasa Penjualan Teknis mendapat kenaikan sebesar 538% terhadap *Fiscal Year 2020* karena *support* untuk bisnis pemeliharaan dan perawatan kereta layang bandara soekarno-hatta milik angkasa pura 2. Adapun kereta tersebut masih membutuhkan perawatan dan pemeliharaan Dikarenakan kereta layang tersebut harus selalu dirawat dan laik jalan walau pengoperasian kereta itu sendiri diberhentikan sejak pandemi berlangsung.

Oleh karena itu dalam tahun buku pendapatan 2021 departemen pengembangan bisnis menunjukkan kenaikan terhadap pendapatan tahun buku pendapatan 2020 sebesar 54% (Lima puluh empat persen).

SEGMENT OPERATION & SERVICES

Kegiatan Operasi dan Usaha Segmen Operation & Services

Dalam memberikan layanan kepada seluruh penumpang LRT Jakarta, Divisi Operasi dan Pelayanan memiliki kewajiban untuk menjalankan operasional,pelayanan, melakukan kontrol, monitoring (pengawasan) dan koordinasi secara langsung dengan seluruh Divisi terkait atas aktivitas operasional LRT Jakarta. Divisi Operasi dan Pelayanan berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada seluruh pelanggan agar terciptanya tingkat kepuasan yang baik.

Kegiatan Divisi Operasi dan Pelayanan terdiri dari:

1. Departemen ASP untuk mengoperasikan sarana sesuai dengan ketentuan baik dari Perusahaan maupun Kementerian Perhubungan secara selamat, aman, nyaman dan tepat waktu.
2. Departemen Pengendali Operasi untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan koordinasi terkait dengan operasional perjalanan KA. Maka, mulai tanggal 1 Desember 2019, LRT Jakarta telah menjalankan Operasi Komersil dari Stasiun Pegangsaan Dua (PGD) sampai Stasiun Velodrome (VLD).
3. Departemen Pelayanan untuk mengoperasikan dan memberikan pelayanan di Stasiun LRT Jakarta sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan pemerintah dan sesuai dengan SOP serta nilai-nilai LRT Jakarta.

- Lease income increased 36% against 2020 fiscal year. This increase was supported by business emerging during the pandemic, such as Posko Aman Gojek, Grab Daily Mart, and Vaccination Centers around the LRT Jakarta stations.
- Advertising decreased by 32% against 2020 fiscal year. This was due to the pandemic which made the government enforce limitation of mobility, which triggered the advertiser to conduct digital advertising over outdoor advertising.
- Technical Sales Service increased by 538% against 2020 fiscal year. This was due to support for the business of maintenance and care of Soekarno-Hatta skytrain of Angkasa Pura 2. The skytrains still need maintenance and care since they must always be maintained and roadworthy even though its operation has been halted since the pandemic.

Therefore, in the 2021 fiscal year, the business development department showed an increase in revenue towards the 2020 fiscal year by 54% (fifty four percent).

OPERATIONS & SERVICES SEGMENT

Business Activities and Operations of Operations & Services Segment

In providing services to all LRT Jakarta passengers, the Operations and Services Division has the obligation to carry out operations, services, control, monitoring (supervision) and direct coordination with all relevant Divisions of LRT Jakarta operational activities. The Operations and Services Division is committed to always providing excellent service to all customers in order to create a good level of satisfaction.

The Operations and Services Division's activities consist of:

1. The operation of facilities in a safe, secure, comfortable and timely manner by the ASP department, in accordance with the provisions of both the Company and the Ministry of Transportation.
2. The control, supervision and coordination related to train travel operations by the Operations Control Department. So, starting on December 1, 2019, LRT Jakarta has begun Commercial Operations with the route from Pegangsaan Dua Station (PGD) to Velodrome Station (VLD).
3. The operation and provision of services at the LRT Jakarta Station by Service Department, in accordance with the Minimum Service Standards (SPM) that have been set by the government and in accordance with SOPs and LRT Jakarta values.



Kinerja Operasi Segmen Operation & Services

Pada tahun 2021, pencapaian ketepatan waktu tempuh per lintas diluar kelambatan KA pada range waktu 1-5 menit (toleransi kelambatan berdasarkan SPM) adalah sebesar 99,72%. Selama periode pelaporan, Perseroan mampu mempertahankan ketepatan waktu kedatangan antar stasiun, ketepatan waktu berhenti di stasiun dan ketepatan waktu tempuh kereta perlintas.

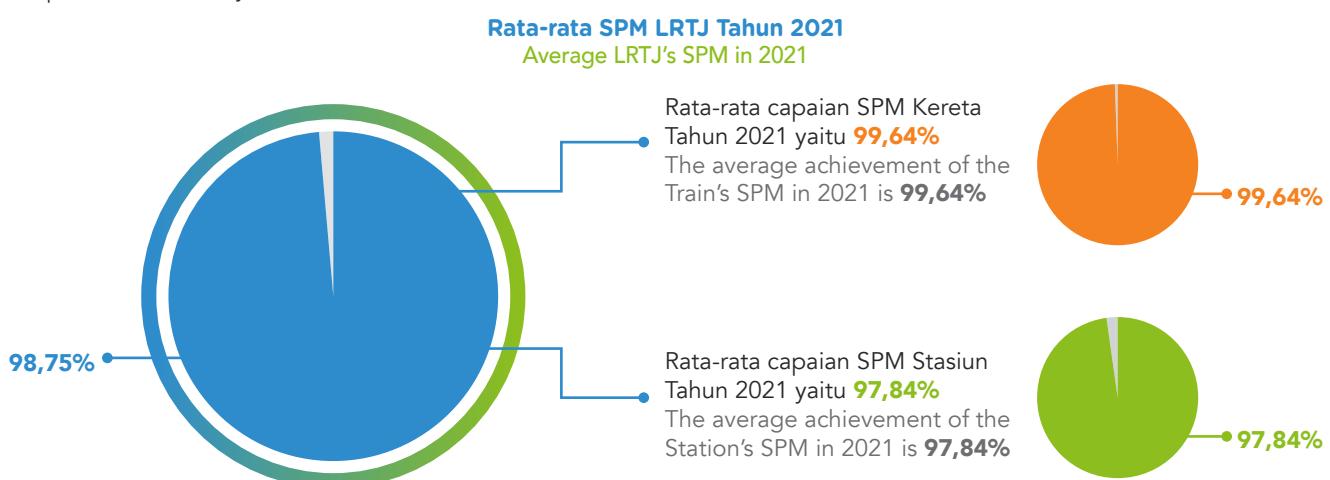
Operational Performance of Operation & Services Segment

In 2021, the achievement of on-time travel per route, not including train delays in the time range of 1-5 minutes (tolerance for delays based on SPM), was 99.72%. During the reporting period, the Company was able to maintain the punctuality of arrivals between stations, the punctuality of stopping at stations, and the punctuality of train travel time per route.

Bulan Month	Percentase Ketepatan On-time Percentage
Januari 2021 January 2021	99,84%
Februari 2021 February 2021	99,78%
Maret 2021 March 2021	99,06%
April 2021 April 2021	99,66%
Mei 2021 May 2021	99,85%
Juni 2021 June 2021	99,60%
Juli 2021 July 2021	99,73%
Agustus 2021 August 2021	99,55%
September 2021 September 2021	99,72%
Oktober 2021 October 2021	99,60%
November 2021 November 2021	99,56%
Desember 2021 December 2021	99,75%
Grand Total	99,72%

Sedangkan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimum rata-rata pada tahun 2021 yaitu sebesar 98,75% dengan rincian rata-rata capaian SPM Kereta yaitu sebesar 99,64% dan rata-rata capaian SPM Stasiun yaitu sebesar 97,86%.

Meanwhile, in achieving the Minimum Service Standards (SPM), the average in 2021 is 98.75% with details of the average achievement of the Train's SPM of 99.64%, and the average achievement of the Station's SPM of 97.86%.



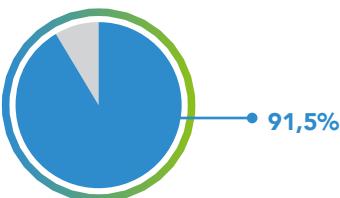
Survey Kepuasan Pelanggan di tahun 2021 mengalami fluktuasi dikarenakan pandemi serta menurunnya daya tarik masyarakat untuk menggunakan transportasi publik akibat pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengurangi mobilisasi.

The Customer Satisfaction Survey in 2021 fluctuated due to the pandemic and decreased public interest to use public transportation due to restrictions on community activities to reduce mobilization.

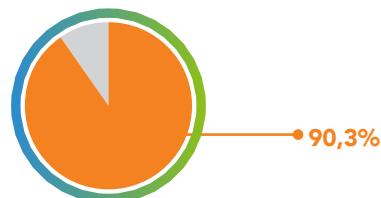


Survey Kepuasan Pelanggan

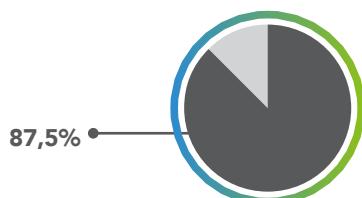
The Customer Satisfaction Survey



Triwulan I Penggunaan Skala 1-5
Quarter I Use of 1-5 Scale



Triwulan II Penggunaan Skala 1-10
Quarter II Use 1-10 Scale



Triwulan III Penggunaan Skala 1-10
Quarter III Use 1-10 Scale



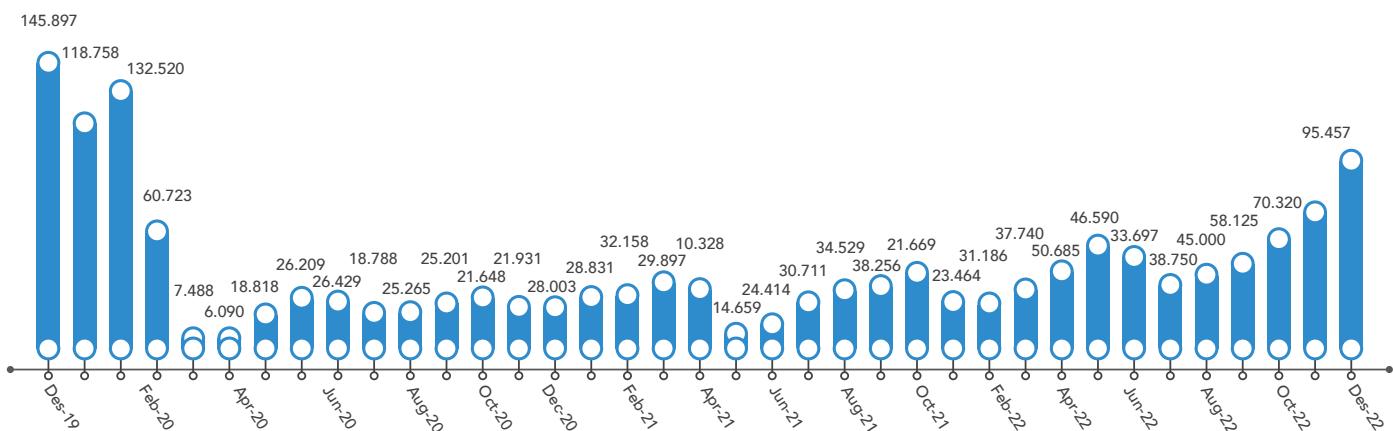
Triwulan IV Penggunaan Skala 1-10
Quarter IV Use 1-10 Scale

Dalam aspek jumlah penumpang, 3 bulan saat awal beroperasi merupakan jumlah tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun. Pandemi COVID-19 sangat memberikan dampak kepada LRT Jakarta di mana jumlah penumpang masih jauh dari proyeksi awal namun perlahan menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jika didukung dengan penambahan panjang jalur tentunya minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi lebih bergairah dan membentuk kebiasaan modern untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Proyeksi 2022 melanjutkan kondisi pada akhir 2021 dengan mengikuti trend selama 2021 di mana terjadi *growth* sampai Mei 2022 dan menurun akibat gelombang libur lebaran dan *growth* diperkirakan kembali sampai Desember 2022.

In terms of the number of passengers, the first 3 months of operation is the highest number in 3 years. The COVID-19 pandemic has greatly impacted the Jakarta LRT in which the number of passengers is still far from the initial projection but slowly shows changes for the better. If supported by the addition of the length of the route, obviously, the public's interest in using this mode of transportation will be more passionate and form modern habits to reduce the use of private vehicles. The 2022 projection will continue the conditions at the end of 2021 by following the trend during 2021 in which growth occurs until May 2022 and decreases due to the wave of Eid holidays, and growth is expected to return until December 2022.

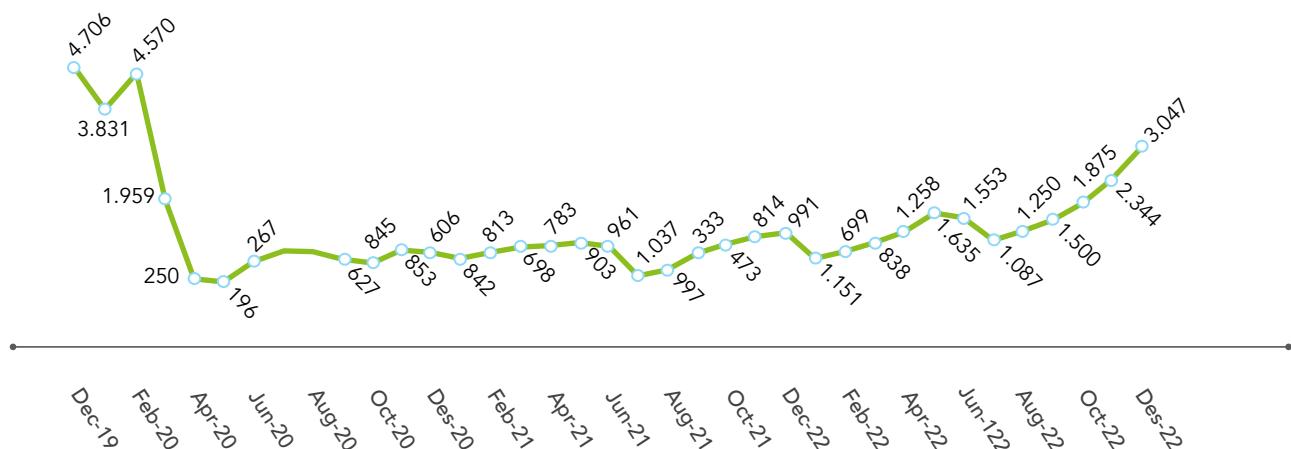
Total Jumlah Pelanggan Setiap Bulan Periode 2019-2022

Total Number of Customers Every Month for the 2019-2022 Period





Rata-rata Jumlah Pelanggan Setiap Bulan Periode 2020-2022 Average Number of Customers Every Month for the 2020-2022 Period



SEGMENT PERAWATAN INFRASTRUKTUR/PRASARANA

Kegiatan Operasi Segmen Perawatan Infrastruktur/Prasarana

Kinerja Perawatan Prasarana

Selama periode pelaporan, Perseroan juga melakukan pekerjaan perawatan dan pemeriksaan prasarana. Secara keseluruhan, realisasi pelaksanaan pekerjaan perawatan telah dapat memenuhi target yang ditetapkan untuk perawatan jalur dan bangunan, traksi daya listrik serta sinyal, telekomunikasi dan sistem tiket.

Divisi Prasarana selama periode tahun 2021 telah melakukan pemeriksaan dan perawatan Prasarana LRT Jakarta yang meliputi Area Perkantoran Depo, Depo Workshop, Stasiun Pegangsaan Dua, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian, dan Stasiun Velodrome sesuai target yang ditetapkan.

INFRASTRUCTURE MAINTENANCE SEGMENT

Operational Activities of the Infrastructure Maintenance Segment

Infrastructure Maintenance Performance

During the reporting period, the Company also carried out maintenance work and inspection of infrastructure. Overall, the implementation of maintenance work has met the targets set for railroads and building maintenance, electric power traction and signaling, telecommunications and ticketing systems.

The Infrastructure Division in the 2021 period has carried out inspections and maintenance of the LRT Jakarta's Infrastructure which includes the Depo Office Area, Workshop Depot, Pegangsaan Dua Station, North Boulevard Station, South Boulevard Station, Pulomas Station, Equestrian Station, and Velodrome Station according to the set targets.

Tabel Target dan Realisasi
Tabel Target dan Realisasi

Bentuk Pekerjaan Pemeliharaan Form of Maintenance Work	Volume Pekerjaan Work Volume		
	Target Target	Realisasi Realizations	Percentase Percentage
Jalur dan Bangunan Railroads and Buildings	2636	2636	100%
Persinyalan, Telekomunikasi & Fasilitas Pertiketan Signaling, Telecommunication & Ticketing Facilities	1095	1095	100%
Traksi & Daya Listrik Traction & Electric Power	1095	1095	100%

Pelaksanaan pekerjaan perawatan prasarana dilakukan oleh karyawan dengan dukungan kompetensi kecakapan dan sertifikasi. Perseroan merencanakan pelaksanaan diklat dan

The implementation of infrastructure maintenance work is carried out by employees with competent skills and certification. The Company plans the implementation of training and certification



sertifikasi tenaga pemeriksaan dan perawatan sehingga setiap aspek dapat menunjang kinerja menuju arah yang lebih baik.

for inspection and maintenance personnel so that every aspect can support performance towards a better direction.

Daftar Sertifikasi SDM Prasarana
Daftar Sertifikasi SDM Prasarana

Jenis Sertifikasi Types of Certification	Penerbit Sertifikat Issuer of Certificate	Jumlah Karyawan Tersertifikasi Number of Certified Employees
Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fasilitas Operasi Operational Facility Railway Infrastructure Maintenance	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	16
Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian Fasilitas Operasi Operations Facility Railway Inspector	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	20
Operator K3 Elevator & Eskalator Elevator & Escalator Health and Safety Operators	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	4
Teknisi K3 Listrik Certified Electrical Safety Technician	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	3
Operator K3 Motor Diesel Kelas: II (Dua) Health and Safety of Diesel Motor Operator Class: II (Two) Certificate	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	3
Perawatan Prasarana Perkeretaapian Jalur dan Bangunan Certificate in Maintenance of Railway Infrastructure and Buildings	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	10
Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian Jalur dan Bangunan Certificate in Inspection of Railway Infrastructure and Buildings	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	9
Ahli K3 Listrik Experts of Occupational Safety and Health in Electrical Engineering	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	1

Selama Periode tahun 2021 Divisi Perawatan Prasarana telah melakukan inovasi-inovasi pengembangan prasarana LRT Jakarta dalam rangka mendukung kegiatan pengoperasian LRT Jakarta.

Throughout the 2021 Period, the Infrastructure Maintenance Division has made innovations in developing the LRT Jakarta infrastructure in order to support the operation of the LRT Jakarta.

Inovasi Innovations	Tujuan Objectives	Dokumentasi Documentation
Visitor Management System (VMS) Gedung MCC LRT Jakarta Visitor Management System (VMS) LRT Jakarta's MCC Building	Memonitor dan mengawasi pengunjung dan karyawan yang masuk ke area perkantoran Gedung MCC LRT Jakarta To monitor and supervise visitors and employees who enter the office area of the LRT Jakarta's MCC Building	 



Inovasi Innovations	Tujuan Objectives	Dokumentasi Documentation
Pengamanan Ruangan Kepala Stasiun LRT Jakarta Security for the Head of the LRT Jakarta Station	Untuk membatasi akses masuk keruangan Kepala Stasiun dan mengamankan Dokumen dan Perangkat di dalam ruangan KS To limit access to the Head of Station's room and secure documents and equipment in the Head of Station's room	 
Security Command Center (SCC)	Pemantauan terpusat seluruh area operasional dan kegiatan harian di lingkungan LRTJ oleh Tim Security Centralized monitoring of all operational areas and daily activities in the LRTJ environment by the Security Team	 

SEGMENT ROLLING STOCK (SAR)

Kegiatan Operasi Segmen Rolling Stock

Secara umum kinerja perawatan sarana LRT Jakarta Fase 1 selama tahun 2021 berjalan dengan baik. Perseroan melakukan pemeriksaan & perawatan kereta LRV setiap hari dan tidak ada penghentian perawatan kereta LRT. Meskipun pada waktu tertentu, Perseroan melakukan penyesuaian operasi karena pemberlakuan PPKM. Penyesuaian meliputi grafik perjalanan kereta (Gapeka), jumlah trip, jarak antar kereta (*headway*) dan jumlah kereta namun tidak mempengaruhi jadwal perawatan kereta.

ROLLING STOCK SEGMENT (SAR)

Rolling Stock Segment's Operational Activities

In general, the maintenance performance of the LRT Jakarta's Phase facilities in 2021 went well. The Company carried out inspections & maintenance of LRV trains every day and there was no stoppage of LRT train maintenance. At certain times, the Company makes adjustments to its operations due to the implementation of PPKM. These adjustments include the train journey graph (Gapeka), the number of trips, the distance between trains (*headway*) and the number of trains but does not affect the train maintenance schedule.



Selain itu, dalam memastikan kondisi sarana aman, nyaman, bersih serta mendukung kebijakan PPKM yang diatur oleh pemerintah, LRT Jakarta telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Melakukan pembatasan jumlah dan pengaturan posisi pengguna jasa di dalam kereta dengan melakukan pemasangan stiker, baik untuk lokasi duduk dan juga lokasi berdiri.
2. Melakukan pencucian harian kereta menggunakan ATWP (Automatic Train Washing Plant) dan pencucian mingguan secara rutin dengan menggunakan cairan disinfektan untuk seluruh bagian dalam kereta.
3. Penggunaan lampu Ultraviolet pada saat perawatan kereta mingguan.

Kinerja Operasi Segmen Sarana

Perawatan kereta LRT dilakukan di Depo. Pekerjaan perawatan sarana meliputi pemeriksaan dan perawatan kereta LRV setiap hari dan perawatan bulanan. Perawatan dilakukan untuk memastikan keamanan operasional kereta dan kenyamanan selama perjalanan. Selama periode pelaporan, kinerja perawatan kereta berjalan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

In addition, in ensuring the conditions of the facilities are safe, comfortable, clean and support the PPKM policies regulated by the government, the LRT Jakarta has taken several actions, including:

1. Limiting the number and positioning of service users on the train by installing stickers, both for the sitting location and also for the standing location.
2. Carrying out daily washing of trains using ATWP (Automatic Train Washing Plant) and conduct weekly washing using disinfectant liquid for all parts of the train.
3. Using Ultraviolet lamps during weekly car maintenance.

Operational Performance of Facility Segment

LRT train maintenance is carried out at the depot. Facility maintenance work includes daily inspection and maintenance, as well as monthly maintenance of LRV trains. Care is taken to ensure the safety of train operations and comfort during the trip. During the reporting period, the train maintenance performance went well and met the set targets.

Tabel Target dan Realisasi
Target and Realization Table

Bentuk Pekerjaan Pemeliharaan Form of Maintenance Work	Volume Pekerjaan Work Volume		
	Target	Realisasi Realizations	Persentase Percentage
Perawatan Kereta Train Car Maintenance	1852	1856	100.22%
Pemeriksaan Pengendalian Mutu Sarana Quality Control Inspection of the Facility	392	396	101.02%
Cuci Kereta Train Car Wash	1862	1694	90.98%
Program Dan Realisasi Perawatan Fasilitas Depo Depot Facility Maintenance Program And Realization	1825	1825	100%

Daftar Sertifikasi SDM Sarana
List of Certification of the Facility's HR

Jenis Sertifikasi Types of Certification	Penerbit Sertifikat Issuer of Certificate	Jumlah Karyawan Tersertifikasi Number of Certified Employees
Pemeriksa Sarana Facility Inspection	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	14
Perawat Sarana Facility Maintenance	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	23
ASP Peralatan Khusus ASP Special Equipment	Kemenaker & Kemenhub Ministry of Manpower and Ministry of Transportation	5
Operator Mesin Bubut Lathe Operator	Kemenaker Ministry of Manpower	8
Operator Forklift Forklift Operator	Kemenaker Ministry of Manpower	7
Operator Lifting Jack Lifting Jack Operator	Kemenaker Ministry of Manpower	8
Operator Mobile Crane Mobile Crane Operator	Kemenaker	8



ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECTS

Rute sepanjang 5,8 km yang terbentang dari stasiun pertama yaitu Pegangsaan Dua dan berakhir di stasiun akhir yaitu stasiun velodrome. Pada area service LRT Jakarta, kami memetakan beberapa produk andalan LRT Jakarta yang dapat menarik perhatian mitra sebagai solusi pendukung bisnis tiap mitra usaha. Pengejawantahan ke dalam aspek pemasaran PT LRT Jakarta, terdiri atas:

Product

Dimulai dari area stasiun awal yaitu stasiun Pegangsaan Dua yang sekaligus menjadi area perkantoran karyawan PT LRT Jakarta. Area seluas 12 hektar ini dapat dimanfaatkan oleh banyak mitra, adapun beberapa mitra yang sudah kami sasar adalah mitra F&B, mitra transportasi, dan mitra *retail*. Dilanjutkan dengan, kelima stasiun berikutnya;

1. Stasiun Boulevard Utara;
2. Stasiun Boulevard Selatan;
3. Stasiun Pulomas;
4. Stasiun Equestrian;
5. Stasiun Velodrome.

Kelima Stasiun berikut memiliki keunikan tersendiri sehingga dapat menjadi solusi bagi tiap mitra yang ingin menjalankan bisnis di area stasiun LRT Jakarta. Adapun bisnis yang saat ini dijalankan di area stasiun LRT Jakarta adalah;

1. Retail Lease

Menyewakan area *retail* dan concourse kepada mitra *retail* dan F&B dan tidak menutup kemungkinan untuk mitra lain untuk membuat aktivasi di area stasiun dan penggunaan untuk videoshoot dan photoshoot.

2. E-payment System

Dengan bertumbuhnya bisnis di bidang e-wallet dan financial technology, oleh karena itu kami membuka kerja sama kepada mitra financial technology sebagai alat pembayaran penumpang dan dapat memberikan benefit lebih kepada para penumpang.

3. Telecommunication

Area LRT Jakarta di kelilingi oleh perumahan padat penduduk baik *low rise* dan *high rise* oleh karena itu mitra provider telekomunikasi dapat bekerja sama dengan LRT Jakarta untuk peletakan tower penunjang signal.

4. Wifi-Advertising

Penetrasi internet bertumbuh pesat beriringan dengan pertumbuhan traffic LRT Jakarta, sehingga produk wifi-advertising pada stasiun sangat diminati dan dapat dijadikan solusi pemasaran digital.

The 3.7-mile-long route stretches from the first station, namely at Pegangsaan Dua, and ends at the final station, namely the Velodrome station. In the LRT Jakarta service area, we mapped some of the LRT Jakarta mainstay products that could attract the attention of partners as business support solutions for each business partner. The embodiment into the marketing aspects of PT LRT Jakarta, consists of:

Product

It starts from the initial station area, the Pegangsaan Dua station, which is also the office area for PT LRT Jakarta employees. This 12-hectare area can be used by many partners, while some of the partners that have targeted are F&B partners, transportation partners, and retail partners. Followed by, the next five stations;

1. North Boulevard Station;
2. South Boulevard Station;
3. Pulomas Station;
4. Equestrian Station;
5. Velodrome Station.

These five stations have their own uniqueness so that they can be a solution for each partner who wants to operate a business in the LRT Jakarta station area. The businesses currently operating in the LRT Jakarta station areas are;

1. Retail Lease

Leases out retail and concourse areas to retail and F&B partners and do not rule out the possibility for other partners to make activations in the station area and use them for videoshoots and photoshoots.

2. E-payment System

With the growth of business in the field of e-wallet and financial technology, the Company open the opportunity of cooperation to financial technology partners as a means of payment for passengers and can provide more benefits to passengers.

3. Telecommunication

The LRT Jakarta area is surrounded by both low and high rise densely populated housing. For that reason, telecommunication provider partners can work with LRT Jakarta for the laying of signal support towers.

4. Wifi-Advertising

Internet penetration is growing rapidly along with the growth of LRT Jakarta traffic, so that wifi-advertising products at stations are in great demand and can be used as digital marketing solutions.



5. Iklan Luar Ruang

Melihat pertumbuhan *traffic* pada area LRT Jakarta dan di mana area stasiun baik luar ruang dan dalam ruang memiliki *visibility* yang baik, sehingga LRT Jakarta dapat menjadi media sebagai solusi promosi dari tiap mitra.

6. Naming Rights

Penamaan stasiun juga dapat dilakukan oleh mitra di area LRT Jakarta sebagai media *creative* yang dapat menjadi *top of mind brand* di area LRT Jakarta.

Selain produk pada area stasiun, PT LRT Jakarta juga melakukan bisnis dalam bidang Jasa konsultansi dan perawatan di mana PT LRT Jakarta dapat menjadi *partner operasi*, perawatan dan konsultansi untuk mitra yang bergerak di bidang transportasi. Pemanfaatan digital asset berupa sosial media dan digital asset juga terus dipacu seiring dengan trend bisnis yang semakin hari semakin besar pemanfaatan digital asset tersebut

Strategi

Saat pandemi masih berlangsung PT LRT Jakarta melakukan strategi pemasaran dengan melakukan *direct selling* atau *direct approach* dengan tujuan menjemput bola untuk menawarkan produk bisnis yang LRT miliki saat ini.

Adapun produk-produk bisnis yang ditawarkan saat pandemi masih berlangsung adalah produk yang tidak menimbulkan keramaian. Dimulai dari penawaran area untuk *cloud kitchen*, *online supermarket*, area sentra vaksinasi dan posko aman untuk *partner ride share* untuk memberikan desinfektan pada kendaraan milik driver.

LRT Jakarta juga melakukan *market sounding* ke berbagai mitra dan menawarkan harga yang *competitive*, *fair* dan sesuai *market price* hingga *site visit* bersama mitra dengan menjelaskan langsung produk – produk bisnis yang diminati tiap *partner*.

5. Outdoor Advertising

Seeing the growth of traffic in the LRT Jakarta area, in which both outdoor and indoor station area has good visibility, the LRT Jakarta can become a medium as a promotional solution for each partner.

6. Naming Rights

The naming of stations can also be done by partners in the LRT Jakarta area as creative media that can become a top of mind brand in the LRT Jakarta area.

In addition to products in the station area, PT LRT Jakarta also conducts business in the field of consulting and maintenance services in which PT LRT Jakarta can be an operation, maintenance and consulting partner for partners engaged in the transportation sector. Utilization of digital assets in the form of social media and digital assets also continues to be promoted along with business trends that are increasingly using these digital assets

Strategy

During the pandemic, PT LRT Jakarta carried out a marketing strategy by conducting direct selling or a direct approach with the aim of offering business products that currently owned by LRT Jakarta.

The business products offered during the pandemic are products that do not cause crowds, such as offering areas for cloud kitchens, online supermarkets, vaccination center areas and safe posts for ride share partners to provide disinfectant to drivers' vehicles.

LRT Jakarta also conducts market sounding to various partners and offers competitive, fair and market appropriate prices to site visits with partners by directly explaining the business products that each partner is interested in.



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan yang disusun dalam Laporan Tahunan ini telah mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT LRT Jakarta yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

Pembahasan kinerja keuangan Perusahaan juga disampaikan dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasian dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Uraian Description	2021 (Rp) (IDR)	2020 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Percentase Percentage (%)
Aset Lancar Current Assets	109.032.088.952	99.354.090.382	9.677.998.570	9,74%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	210.236.546.481	220.760.763.144	-10.524.216.663	-4,77%
Jumlah Aset Total Assets	319.268.635.433	320.114.853.526	-846.218.093	-0,26%
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	27.932.517.356	29.068.912.175	-1.136.394.819	-3,91%
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	145.933.239	3.122.784.168	-2.976.850.929	-95,33%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	28.078.450.595	32.191.696.343	-4.113.245.748	-12,78%
Ekuitas Equity	291.190.184.839	287.923.157.183	3.267.027.656	1,13%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	319.268.635.433	320.114.853.526	-846.218.093	-0,26%

Aset

Per 31 Desember 2021, Perusahaan membukukan jumlah aset sebesar Rp319,27 miliar, menurun Rp846,22 juta atau setara dengan -0,26% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp320,11 miliar.

The analysis and discussion of financial performance compiled in this Annual Report has referred to the Consolidated Financial Statements of PT LRT Jakarta which has been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradireja, Suhartono with an unqualified opinion for the years ended December 31, 2021 and 2020. The report The Company's Consolidated Finances have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia, including the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board – The Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK – IAI).

The discussion of the Company's financial performance is also conveyed by taking into account the explanations in the notes of the Consolidated Financial Statements from the external auditors as an integral part of the Annual Report.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Assets

As of December 31, 2021, the Company recorded total assets of IDR 319.27 billion, a decrease of IDR 846.22 million or equivalent to -0.26% when compared to 2020 number of IDR 320.11 billion.



Hal tersebut disebabkan oleh tingkat pelunasan utang yang lebih tinggi dibanding tahun 2021 sehingga terjadi penurunan pada sisi aset dan liabilitas.

Aset Lancar

Di tahun 2021, jumlah aset lancar Perusahaan tercatat meningkat Rp9,68 miliar atau 9,74% dari sebesar Rp99,35 miliar di tahun 2020 menjadi Rp109,03 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan subsidi sehingga terjadi kenaikan yang signifikan pada piutang pihak berelasi.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perusahaan di tahun 2021 tercatat sebesar Rp210,24 miliar, menurun Rp10,52 miliar atau -4,77% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp220,76 miliar. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan nilai buku Aset Tetap akibat adanya depresiasi.

Liabilitas

Per 31 Desember 2021, jumlah liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp28,08 miliar, menurun Rp4,11 miliar atau -12,78% dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp32,19 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat pelunasan utang yang lebih tinggi dibanding tahun 2021 sehingga terjadi penurunan pada sisi aset dan liabilitas.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perusahaan mengalami penurunan Rp1,14 miliar atau -3,91% dari Rp29,07 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp27,93 miliar di tahun 2021. Hal tersebut disebabkan tingkat pelunasan utang yang lebih tinggi dibanding tahun 2021 sehingga terjadi penurunan pada sisi aset dan liabilitas.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perusahaan di tahun 2021 tercatat sebesar Rp145,93 juta, menurun Rp2,98 miliar atau -95,33% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp3,12 miliar. Hal ini dikarenakan adanya aset program untuk dana pensiun sehingga terjadi penurunan yang signifikan pada kewajiban imbalan pasca kerja.

Ekuitas

Per 31 Desember 2021, jumlah ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp291,19 miliar, meningkat Rp3,27 miliar atau 1,13% dari tahun sebelumnya sebesar Rp287,92 miliar. Hal tersebut dikarenakan Perusahaan membukukan laba pada tahun 2021 sehingga meningkatkan saldo ekuitas di akhir tahun 2021.

This was due to a higher debt repayment rate compared to 2021, resulting in a decline in assets and liabilities.

Current assets

In 2021, the Company's total current assets recorded an increase of IDR 9.68 billion or 9.74% from IDR 99.35 billion in 2020 to IDR 109.03 billion. This was due to an increase in subsidy income, resulting in a significant increase in receivables from related parties.

Non-Current Assets

The Company's non-current assets in 2021 were recorded at IDR 210.24 billion, a decrease of IDR 10.52 billion or -4.77% compared to the previous year of IDR 220.76 billion. This was due to a decrease in the book value of Fixed Assets due to depreciation.

Liabilities

As of December 31, 2021, the Company's total liabilities were recorded at IDR 28.08 billion, a decrease of IDR 4.11 billion or -12.78% compared to 2020 which was IDR 32.19 billion. This was due to a higher level of debt repayment compared to 2021, resulting in a decrease in assets and liabilities.

Short-term Liabilities

The Company's short-term liabilities decreased by IDR 1.14 billion or -3.91% from IDR 29.07 billion in 2020 to IDR 27.93 billion in 2021. This was due to a higher debt repayment rate compared to 2021, resulting in a decrease in the assets and liabilities.

Long-Term Liabilities

The Company's long-term liabilities in 2021 were recorded at IDR 145.93 million, a decrease of IDR 2.98 billion or -95.33% compared to the previous year of IDR 3.12 billion. This was due to the presence of assets program for pension funds, resulting in a significant decrease in post-employment benefit obligations.

Equity

As of December 31, 2021, the Company's total equity was recorded at IDR 291.19 billion, an increase of IDR 3.27 billion or 1.13% from the previous year of IDR 287.92 billion. This was because the Company posted a profit in 2021, thereby increasing the equity balance at the end of 2021.



LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

STATEMENT OF PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Uraian Description	2021	2020	Selisih 2021-2020 2020-2021 Difference	YoY 2020-2021 (%)
Pendapatan Revenues	134.349.088.570	105.324.220.498	29.024.868.072	27,56% ▲
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(86.419.369.875)	(63.391.307.549)	-23.028.062.326	36,33% ▲
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	47.929.718.696	41.932.912.949		14,30% ▲
Beban Usaha Operating Expenses				
Beban Penjualan Selling Expenses	(218.009.464)	(914.398.695)	696.389.231	-76,16% ▼
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(44.409.165.702)	(39.386.858.769)	-5.022.306.933	12,75% ▲
Jumlah Beban Penjualan, Beban Umum & Administrasi Total Selling Expenses and General & Administrative Expenses	(44.627.175.166)	(40.301.257.464)	-4.325.917.702	10,73% ▲
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	3.302.543.530	1.631.655.485	1.670.888.045	102,40% ▲
Pendapatan/Beban Lainnya Other Income/Expenses				
Pendapatan Lainnya Other Income	6.733.974.683	3.030.810.595	3.703.164.088	122,18% ▲
Beban Lainnya Other Expenses	(4.177.180.357)	(494.245.388)	-3.682.934.969	745,16% ▲
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	5.859.337.856	4.168.220.692	1.691.117.164	40,57% ▲
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefit (Expenses)				
Pajak Kini Current Income Tax	-	-	-	-
Pajak Tangguhan Deferred Tax	(2.219.899.964)	(2.723.919.394)	504.019.430	-18,50% ▼
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Total Income Tax Benefit (Expenses)	(2.219.899.964)	(2.723.919.394)	504.019.430	-18,50% ▼
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Expenses)				
Keuntungan akturial atas imbalan kerja Actuarial gain on employee benefits	(477.449.021)	684.448.238	-1.161.897.259	-169,76% ▲
Dampak Pajak Income Tax Effect	105.038.785	(150.578.612)	255.617.397	-169,76% ▼
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Total Other Comprehensive Income	(372.410.236)	533.869.626	-906.279.862	-169,76% ▼
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	3.267.027.656	1.978.170.924	1.288.856.732	65,15% ▲



Pendapatan

Per 31 Desember 2021, pendapatan Perusahaan tercatat sebesar Rp134,35 miliar, meningkat Rp29,02 miliar atau 27,56% dari tahun 2020 yang sebesar Rp105,32 miliar. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh realisasi belanja yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan pendapatan subsidi meningkat signifikan.

Beban Usaha

Di tahun 2021, beban usaha Perusahaan mengalami peningkatan Rp4,33 miliar atau 10,73% dari Rp40,30 miliar di tahun 2020 menjadi Rp44,63 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh realisasi belanja yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya untuk mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaan sebagaimana anggaran yang tertuang dalam kontrak subsidi.

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan membukukan pendapatan (beban) lain-lain sebesar Rp2,56 miliar, meningkat Rp20,22 juta atau 0,80% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp2,54 miliar.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2021, Perusahaan membukukan laba (rugi) bersih sebesar Rp3,30 miliar, mengalami peningkatan Rp1,67 miliar atau 102,40% jika dibanding tahun 2020 yang mencatatkan kerugian Rp1,44 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat penyerapan anggaran subsidi yang lebih optimal dibanding tahun sebelumnya.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Perusahaan membukukan laba (rugi) komprehensif sebesar Rp3,27 miliar di tahun 2021, meningkat Rp1,29 miliar atau 65,15% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan rugi komprehensif sebesar Rp1,98 miliar. Hal ini lebih disebabkan oleh tingkat penyerapan anggaran subsidi yang lebih optimal dibanding tahun sebelumnya.

LAPORAN ARUS KAS

Uraian Description	2021 (Rp) (IDR)	2020 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Percentase Percentage (%)
Arus Kas dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi Cash Flows from (used for) Operating Activities	(1.934.718.912)	31.017.571.485	-32.952.290.397	-106,24%
Arus Kas dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows from (used for) Investment Activities	(4.105.822.599)	(4.486.285.242)	-380.462.643	-8,48%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Funding Activities	-	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas Bersih Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents	(6.040.541.511)	26.531.286.243	-32.571.827.754	-122,77%
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	93.155.474.994	66.624.188.751	26.531.286.243	39,82%
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	87.114.933.482	93.155.474.994	-6.040.541.512	-6,48%

Revenues

As of December 31, 2021, the Company's revenues was recorded at IDR 134.35 billion, an increase of IDR 29.02 billion or 27.56% from 2020 which was IDR 105.32 billion. This increase was mainly due to higher realization of expenditure compared to the previous year, resulting in a significant increase in subsidy revenues.

Operating Expenses

In 2021, the Company's operating expenses increased by IDR 4.33 billion or 10.73% from IDR 40.30 billion in 2020 to IDR 44.63 billion. This was due to higher realization of expenditure compared to the previous year to optimize the Company's operational activities as the budget stated in the subsidy contract.

Other Income (Expenses)

Until the end of 2021, the Company recorded other income (expenses) of IDR 2.56 billion, an increase of IDR 20.22 million or 0.80% compared to the previous year of IDR 2.54 billion.

Net Profit (Loss) for the Year

As of December 31, 2021, the Company posted a net profit (loss) of IDR 3.30 billion, an increase of IDR 1.67 billion or 102.40% compared to 2020 which recorded a loss of IDR 1.44 billion. This was caused by the absorption rate of the subsidy budget which was more optimal than the previous year.

Comprehensive Profit (Loss) for the Year

The Company posted a comprehensive profit (loss) of IDR 3.27 billion in 2021, an increase of IDR 1.29 billion or 65.15% compared to the previous year which recorded a comprehensive loss of IDR 1.98 billion. This was due to the absorption rate of the subsidy budget which is more optimal than the previous year.

CASH FLOW STATEMENT



Perusahaan mencatatkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar minus Rp1,93 miliar di tahun 2021, sementara tahun sebelumnya Perusahaan mencatatkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar surplus Rp31,02 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan terdapat piutang subsidi yang belum diterima tunai oleh perusahaan. Sementara itu, arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi tercatat sebesar minus Rp4,11 miliar, menurun Rp753,26 juta atau -16,79% dibanding tahun 2020 sebesar minus Rp4,47 miliar. Hal ini dikarenakan oleh aktivitas belanja modal (CAPEX) yang lebih selektif di tahun 2021.

Sedangkan per 31 Desember 2021, kas dan setara kas akhir tahun Perusahaan yang tercatat sebesar Rp87,11 miliar mengalami penurunan sebesar Rp6,04 miliar atau -6,48% dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp93,16 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat pelunasan utang yang lebih tinggi dibanding tahun 2021 dan tingkat kolektibilitas piutang yang lebih rendah.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan Perusahaan dalam Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas)

Kemampuan membayar utang jangka pendek Perusahaan dicerminkan dengan rasio likuiditas di mana tingkat likuiditas dapat dilihat dari rasio kas, dan rasio lancar, sebagaimana terlihat di bawah ini:

dalam % | in %

Uraian Description	2021	2020	Perubahan Changes
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	311,88%	320,46%	-2,68%
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	390,34%	341,79%	14,21%

Rasio Kas perusahaan pada tahun 2021 sebesar 312%, menurun dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek perusahaan dengan menggunakan kas menurun dibanding tahun sebelumnya. Sementara rasio Lancar perusahaan pada tahun 2021 sebesar 390% meningkat dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek perusahaan dengan menggunakan aset lancar lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas)

Kemampuan membayar utang jangka panjang maupun jangka pendek Perusahaan terlihat dari rasio solvabilitas yang terdiri dari Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva, sebagaimana terlihat di bawah ini:

The Company recorded cash flows used for operating activities of minus IDR 1.93 billion in 2021, while in the previous year, the Company recorded cash flows obtained from operating activities of a surplus of IDR 31.02 billion. The decrease was due to the subsidy receivables that had not been received in cash by the Company. Meanwhile, cash flow obtained from (used for) investment activities was recorded at minus IDR 4.11 billion, a decrease of IDR 753.26 million or -16.79% compared to 2020 which was minus IDR 4.47 billion. This was due to more selective capital expenditure (CAPEX) activities in 2021.

Meanwhile, as of December 31, 2021, the Company's cash and cash equivalents at the end of the year were recorded at IDR 87.11 billion. It was a decrease of IDR 6.04 billion or -6.48% compared to 2020 which was recorded at IDR 93.16 billion. This was due to a higher debt repayment rate compared to 2021 and a lower collectibility level of receivables.

LIQUIDITY AND LEVEL OF RECEIVABLE COLLECTIBILITY

Company's Liquidity

The ability of the Company's to pay short-term debt is reflected in the liquidity ratio in which the level of liquidity can be seen from the cash ratio and current ratio, as shown below:

The Company's cash ratio in 2021 is 312%, a decrease from 2020. This shows that the Company's cash liquidity has decreased compared to the previous year. Meanwhile, the Company's current ratio in 2021 is 390%, an increase from 2020. This shows that the Company's liquidity using current assets is better than the previous year.

Solvency

The Company's solvency and liquidity can be seen from the solvency ratio which consists of the Equity-to-Assets ratio, as shown below:



dalam % | in %

Uraian Description	2021	2020	Perubahan Changes
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Aset Total-Debt-to-Total-Assets Ratio	8,79%	10,06%	-12,55

Rasio jumlah liabilitas terhadap aset perusahaan pada tahun 2021 sebesar 8,79% menurun dari tahun 2020 sebesar 10,06%.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Dalam mengukur tingkat kolektibilitas piutang, Perusahaan menggunakan indikator *Collection Period*. Indikator ini digunakan untuk mengukur periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu.

dalam % | in %

Uraian Description	2021	2020	Perubahan Changes
Rasio Kolektibilitas Piutang (hari) Receivable Collectibility Ratio (in days)	16,51	27,19	-39,27%

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan Struktur Modal

Perusahaan mengelola struktur modal untuk menjaga kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan juga menjaga struktur modalnya agar tetap optimal untuk mengurangi biaya modal, serta melakukan telaah dan mengelola struktur modal secara rutin.

Di tahun 2021, struktur modal LRT terdiri dari liabilitas dan ekuitas, yang lebih menitikberatkan struktur permodalannya dari sisi ekuitas. Adapun jumlah liabilitas dan ekuitas Perusahaan masing-masing tercatat sebesar Rp28,08 miliar dan Rp291,19 miliar.

Dasar Pemilihan Struktur Modal

Kebijakan manajemen dalam mengelola struktur modal bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha serta dapat memberikan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Penetapan kebijakan struktur modal tersebut juga ditujukan untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimal guna mengurangi biaya modal.

Rincian Struktur Modal

Komposisi struktur modal Perusahaan di tahun 2021 terdiri atas liabilitas sebesar 8,79% dan ekuitas sebesar 91,21%, di mana komposisi ini mengalami perubahan dari tahun 2020. Rincian struktur modal Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

The Company's Total-Debt-to-Total-Assets Ratio in 2021 was 8.79%, a decrease from 2020 of 10.06%.

Accounts Receivable Collectibility Level

In measuring the collectibility of receivables, the Company uses the Collection Period indicator. This indicator is used to measure the average period required to collect receivables (in days). This indicator can be used to measure the Company's ability to collect receivables within a certain period of time.

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Capital Structure Policy

The Company manages the capital structure to maintain business continuity and maximize benefits for shareholders and other stakeholders. The Company also maintains its optimal capital structure to reduce the cost of capital, as well as conducts regular reviews and manages the capital structure.

In 2021, the capital structure of LRT consists of liabilities and equity, which focuses more on the capital structure from the equity side. The Company's total liabilities and equity were recorded at IDR 28.08 billion and IDR 291.19 billion, respectively.

Basis for Choosing Capital Structure

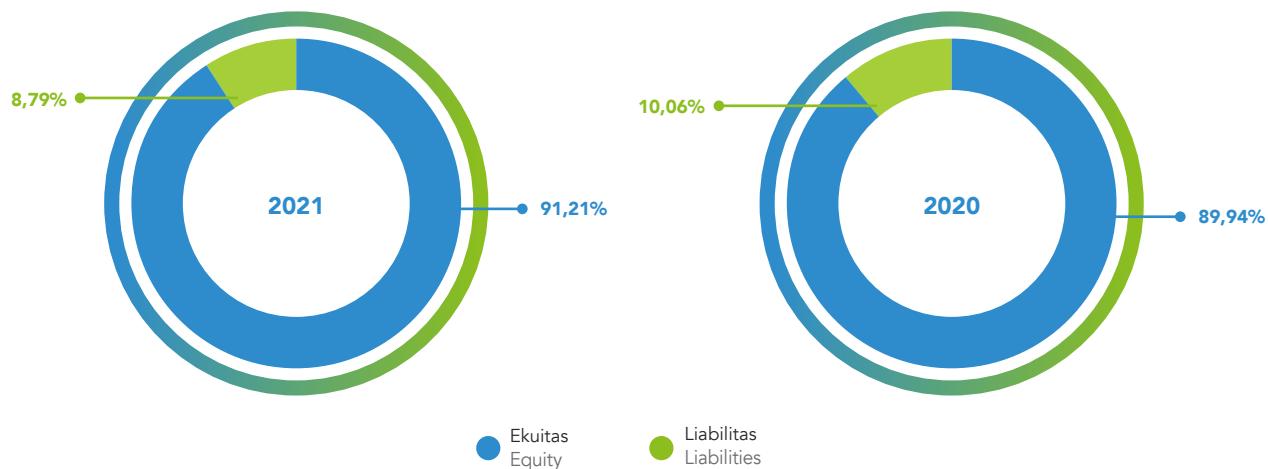
The management policy in managing the capital structure aims to maintain business continuity and provide optimal returns for shareholders and other stakeholders. The stipulation of the capital structure policy is also aimed at maintaining an optimal capital structure in order to reduce the cost of capital.

Capital Structure Details

The composition of the Company's capital structure in 2021 consists of liabilities of 8.79% and equity of 91.21%, in which this composition has changed from 2020. Details of the Company's capital structure can be seen as follows:



Uraian Description	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal (Rp) (IDR)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp) (IDR)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp) (IDR)	Percentase Percentage (%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	28.078.450.595	8,79%	32.191.696.343	10,06%	-4.113.245.748	-12,78%
Jumlah Ekuitas Total Equity	291.190.184.839	91,21%	287.923.157.183	89,94%	3.267.027.656	1,13%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	319.268.635.433	100,00%	320.114.853.526	100,00%		



IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal, dalam artian bukan merupakan ikatan pendanaan di tahun 2021. Dengan demikian, informasi terkait hal tersebut tidak dapat disampaikan.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Perusahaan merealisasikan investasi barang modal (capital expenditure) sebagai salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam mengembangkan kegiatan usahanya sehingga dapat memberikan hasil optimal di kemudian hari. Investasi barang modal merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan tujuan membeli sejumlah aset maupun memperbaiki aset yang telah dimiliki. Realisasi investasi barang modal Perusahaan hingga 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL EXPENDITURE

Throughout 2021, the Company has no material commitments for capital expenditure, in the sense that it is not a funding commitment in 2021. Therefore, information related to this cannot be conveyed.

REALIZATION OF CAPITAL EXPENDITURE

The Company realizes capital expenditure as one of the important things to do in developing its business activities so that it can provide optimal results in the future. Capital expenditure is a cost incurred by the Company with the aim of buying a number of assets or repairing assets that are already owned. The realization of the Company's capital expenditure as of December 31, 2021 is as follows:

Uraian Description	Tujuan Investasi Investment Purposes	Nilai (Rp juta) Value (in IDR million)
Kamera Pengawas Surveillance Camera	Untuk keamanan Ruangan Pengendali Operasi, Ruangan Komersil dan Entrance Stasiun PT LRT Jakarta For the security of Operation Control Room, Commercial Room and Entrance of PT LRT Jakarta Station	Rp1.870.000.000
Konstruksi Kanopi Pedestrian Pedestrian Canopy Construction	Untuk kenyamanan penumpang menuju stasiun Pegangsaan Dua For the convenience of passengers going to Pegangsaan Dua station	RP1.672.624.779



Uraian Description	Tujuan Investasi Investment Purposes	Nilai (Rp juta) Value (in IDR million)
Handralling	Fasilitas Safety pada Lokasi Depo Sarana LRT Jakarta Safety Facilities at the Jakarta LRT Facility Depot Area	Rp563.197.820
Jumlah Total		4.105.822.599

Per 31 Desember 2021, realisasi investasi barang modal yang dilakukan Perusahaan tercatat sebesar Rp4,11 miliar, mengalami penurunan Rp380,46 juta atau -8,48% dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp4,49 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas belanja modal (CAPEX) yang lebih selektif di tahun 2021.

As of December 31, 2021, the realization of capital expenditure by the Company was recorded at IDR 4.11 billion, a decrease of IDR 380.46 million or -8.48% compared to 2020 which was IDR 4.49 billion. This was due to more selective capital expenditure (CAPEX) activities in 2021.

Uraian Description	2021 (Rp) (IDR)	2020 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Percentase Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Expenditure	Rp4.105.822.599	Rp4.486.285.242	-380.462.643	-8,48%

PENCAPAIAN TARGET DENGAN REALISASI, DAN TARGET/PROYEKSI KE DEPAN

Pencapaian Target dengan Realisasi dan Proyeksi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan melalui Manajemen melakukan analisis secara berkala terkait realisasi pencapaian target yang telah ditentukan pada awal tahun dengan realisasinya pada tahun berjalan. Perbandingan pencapaian target dan realisasinya pada tahun 2021 serta proyeksi untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

ACHIEVEMENT OF TARGETS AGAINST THE REALIZATION, AND FUTURE TARGETS/PROJECTIONS

Achievement of Targets against the Realization and Projection

In carrying out its business activities, the Company, through its Management, conducts periodic analysis regarding the realization of the target achievement that has been determined at the beginning of the year against its realization in the current year. Comparison of target achievement and realization in 2021, as well as projections for 2022 are as follows:

Deskripsi Description	Audited 2020 2020 Audited	RKAP 2021 2021 Work Plan and Budget	RKAP Perubahan 2021 Revised 2021 Work Plan and Budget	Target 2022 2022 Target
Pendapatan Income				
Pendapatan Operasi Operating Income				
Non Farebox	3.729.932.769	16.238.567.500	7.384.481.575	7.142.011.650
Tiket Ticket	2.541.903.468	10.210.875.000	2.026.912.483	2.737.500.000
Subsidi Sarana Facility Subsidy	64.556.629.154	125.373.538.518	104.563.614.376	12.9979.018.783
Subsidi Praasarana Infrastructure Subsidy	34.495.755.107	93.752.677.556	93.240.475.997	117.873.611.770
Jumlah Pendapatan Total Income	105.324.220.498	245.575.658.574	207.215.484.431	257.732.142.203



Deskripsi Description	Audited 2020 2020 Audited	RKAP 2021 2021 Work Plan and Budget	RKAP Perubahan 2021 Revised 2021 Work Plan and Budget	Target 2022 2022 Target
Beban Pokok Operasi Cost of Operation				
Beban Operasi & Perawatan Sarana Perkeretaapian Operating & Maintenance Expenses for Railway Facilities	(48.398.217.389)	(114.805.956.324)	(85.896.568.271)	(103.006.567.629)
Beban Operasi & Perawatan Prasarana Dan Fasilitas Operasi Operating & Maintenance Expenses for Operational Facilities and Infrastructure	(14.954.012.198)	(61.813.776.913)	(54.504.074.478)	(76.128.180.232)
Beban Optimalisasi Aset Asset Optimization Expense	(39.077.962)	(780.000.000)	(465.000.000)	(805.200.000)
Beban Jasa Operasi & Perawatan Sarana & Prasarana Operating & Maintenance Service Expenses for Facilities & Infrastructure	-	-	(1.809.900.000)	(1.237.500.000)
Jumlah Beban Pokok Operasi Total Operation Expenses	(63.391.307.549)	(177.399.733.237)	(142.675.542.749)	(181.177.447.861)
Laba Kotor Gross Profit	41.932.912.949	68.175.925.337	64.539.941.683	
Beban Operasional Operational Expenses				
Beban Penjualan (Iklan, Pameran, Kegiatan Promosi, DLL) Selling Expenses (Advertising, Exhibition, Promotional Activities, Etc.)	(914.398.695)	(4.672.000.000)	(535.176.100)	(1.690.075.500)
Beban Umum Dan Administrasi General and Administrative Expenses				
Beban Pegawai Non Awak Sarana Perkeretaapian Non-Crew Employees of Railway Facilities Expenses	(28.486.282.709)	(30.261.328.934)	(32.574.139.583)	(36.004.361.866)
Beban Pemeliharaan Umum General Maintenance Expenses				
Beban Penyusutan Aset Tetap Fixed Assets Depreciation Expense	(3.612.172.666)	(4.637.661.577)	(5.155.597.665)	(6.858.288.660)
Beban Jasa Profesional Professional Service Expense	(794.299.178)	(6.298.710.000)	(3.359.242.841)	(3.358.525.000)
Beban Umum General Expenses	(6.494.104.216)	(20.878.968.540)	(8.474.863.912)	(11.461.770.239)
Jumlah Beban Operasional Total Operational Expenses	(40.301.257.464)	(66.748.669.051)	(50.099.020.101)	(59.373.021.266)
Laba (Rugi) Usaha Operational Profit (Loss)	1.631.655.485	1.427.256.286	14.440.921.582	
Pendapatan/Beban Lainnya Other Income/Expenses				
Pendapatan Lainnya Other Income	3.030.810.595	2.265.625.000	2.943.001.187	2.200.000.000
Beban Lainnya Other Expenses	(494.245.388)	(2.503.906.250)	(1.313.191.911)	(840.625.000)



Deskripsi Description	Audited 2020 2020 Audited	RKAP 2021 2021 Work Plan and Budget	RKAP Perubahan 2021 Revised 2021 Work Plan and Budget	Target 2022 2022 Target
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before Income Tax	4.168.220.692	1.188.975.036	16.070.730.858	
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(2.723.919.394)	(297.243.759)	(3.535.560.789)	(4.079.030.576)
Manfaat (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Benefits (Expenses)	533.869.626	-	-	-
Jumlah laba/rugi tahun berjalan Total profit/loss for the year	1.978.170.924	891.731.277	12.535.170.069	(4.079.030.576)

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Kebijakan mengenai pembagian dividen perusahaan senantiasa mengacu pada Anggaran Dasar yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) yang diselenggarakan sirkuler pada 12 Juli tahun 2021, Perusahaan tidak membagikan dividen tahun buku 2020.

PEMBAGIAN DIVIDEN

Kronologis pembagian dan pembayaran Dividen tunai dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut,

Tahun Pembagian Year of Distribution	Tahun Dividen Divident Year	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) Cash Divident Distributed (IDR)	Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Value of Divident per Share (IDR/share)	Rasio Pembagian Dividen (%) Divident Distribution Ratio (%)
2021	2020	-	-	-	-	-
2020	2019	-	-	-	-	-
2019	2018	-	-	-	-	-

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Perusahaan hingga akhir tahun 2021 tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) dan/atau Manajemen (MSOP). Dengan demikian, LRT tidak memiliki informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP, realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga exercise.

DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

Dividend Policy

The policy regarding the distribution of the Company dividends always refers to the Articles of Association, the amount of which is determined annually at the General Meeting of Shareholders (GMS). In accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS), the Company did not distribute dividends for the 2020 fiscal year.

DIVIDEND DISTRIBUTION

The chronology of the distribution and payment of cash dividends in the last 3 (three) years is as follows:

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Until the end of 2021, the Company does not have a Share Ownership Program by Employees (ESOP) and/or Management (MSOP). Therefore, LRT does not have information regarding the number of ESOP/MSOP shares, their realization, time period, requirements for eligible employees and/or management, and exercise price.



REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Per 31 Desember 2021, Perusahaan belum pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) di Bursa Efek dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, saldo dana, dan tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

INFORMASI MATERIAL UNTUK INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Di sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak memiliki informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan maupun kinerja operasional Perusahaan.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Kebijakan tentang Pihak Berelasi

Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang dipakai adalah sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak Berelasi" adalah, suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

As of December 31, 2021, the Company has never conducted an Initial Public Offering (IPO) on the domestic or foreign Stock Exchanges. Therefore, there is no information regarding the total acquisition of funds, planned use of funds, balance of funds, and the date of approval of the GMS for changes in the use of funds.

MATERIAL INFORMATION FOR INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Throughout 2021, the Company did not have material information regarding investments, expansions, divestments, business mergers, acquisitions, and debt/capital restructuring that affect the financial and operational performance of the Company.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSAKSI WITH AFFILIATED PARTIES

Policy on Affiliated Parties

The Company conducts transactions with affiliated parties. The definition of affiliated parties is in accordance with PSAK No. 7 (Revised 2015) concerning "Disclosure of Affiliated Parties". A party is considered affiliated to the Company if:

1. A person, or close family member, has a relationship with the reporting entity and that the person:
 - a. (ils in control or joint control over the reporting entity;
 - b. possesses significant influence over the reporting entity; or
 - c. is a key management personnel of the reporting entity or of a parent entity of the reporting entity.
2. An entity is affiliated to the reporting entity if one of the following conditions is met:
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same business group (which means that the parent entity, subsidiary and subsequent subsidiaries are related to each other);
 - b. (An entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group, of which the other entity is a member);
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party.



- d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Dalam kegiatan usaha normalnya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak Berelasi" termasuk entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir melalui Menteri Keuangan.

Nama Pihak Bertransaksi dan Sifat Hubungan Afiliasi

Pengungkapan Pihak Berelasi Disclosure of Affiliated Parties		
Pihak yang Berelasi Affiliated Parties	Sifat Hubungan Nature of the Affiliation	Sifat Transaksi Nature of the Transactions
PT Jakarta Propertindo	Entitas Induk Parent Entity	Piutang Usaha, Utang Usaha Accounts Receivable, Accounts Payable
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	Pemegang Saham Shareholders	Piutang Usaha Accounts Receivable

Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi Perusahaan dengan Pihak Berelasi dilakukan sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis Perusahaan, serta prinsip saling membutuhkan antara Perusahaan dengan Pihak Berelasi.

Dalam kegiatan normal usaha, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/ atau kepengurusan, termasuk di dalamnya adalah transaksi pembiayaan bersama, transaksi pengalihan sebagian porsi piutang pembiayaan konsumen ("transaksi CAP"), transaksi penempatan deposito, utang dan piutang asuransi dan pinjaman bank.

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak-pihak Berelasi/Berafiliasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi dengan

- d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of a third entity;
- e. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
- f. an entity that is controlled or jointly controlled by the person identified in letter (a);
- g. a person identified in point (a)(i) has significant influence over the entity or is a key management personnel of the entity (or parent of the entity).

In its normal business activities, the Company conducts transactions with affiliated parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2015), "Disclosure of Affiliated Party" which includes entities that are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government of Indonesia as the ultimate owner entity through the Minister of Finance.

Name of the Affiliated Parties and the Nature of the Affiliation

Reasons for Conducting Transaction

The Company's transactions with Affiliated Parties are conducted in line with the Company's operational and business development needs, as well as the principle of mutual need between the Company and the Affiliated Parties.

In the normal condition of business, the Company conducts the transactions with affiliated parties due to ownership and/or management relationships, including joint financing transactions, transfer of portion of consumer financing receivables ("CAP transactions"), deposit placement transactions, insurance payables and receivables, and bank loan.

Explanation of the Fairness of the Transaction

The fairness of all transactions conducted by the Company with Affiliated Parties has been disclosed in the financial statements, and is in accordance with PSAK 7 standards regarding "Disclosure of Affiliated Parties". All transactions with affiliated parties are



pihak yang berelasi, dilakukan dengan persyaratan, tingkat harga, dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Tidak ada perbedaan kebijakan harga dan syarat transaksi antara pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga.

Realisasi Saldo dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Realisasi saldo dan transaksi Pihak-pihak Berelasi terhadap kinerja keuangan Perusahaan dapat disampaikan sebagai berikut.

carried out under normal terms, price levels, and conditions as those done with third parties, and have been disclosed in the financial statements. There is no difference in pricing policies and terms of transactions between affiliated parties and third parties.

Realization of Balances and Affiliated Party Transactions

Realization of affiliated party balances and transactions on the Company's financial performance can be conveyed as follows.

Keterangan Description	2021	2020
Piutang Usaha Account Receivables		
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	11.121.429.493	-
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	2.675.200.000	1.672.000.000
Jumlah Total	13.796.629.493	1.672.000.000
Percentase terhadap total asset Percentage to total assets	4,32%	0,52%
Utang Usaha Account Payables		
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	-	13.398.257.574
Jumlah Total	-	13.398.257.574
Percentase terhadap total liabilitas Percentage to total liabilities	0%	42%

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Hingga 31 Desember 2021, Perusahaan tidak memiliki informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi, sehingga tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

As of December 31, 2021, the Company does not have financial information containing extraordinary and rare events, so there is no financial information containing extraordinary and rare events.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERDAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN LAW AND REGULATIONS THAT IMPACT ON THE COMPANY

Hingga 31 Desember 2021, tidak terdapat sejumlah perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kinerja operasional Perusahaan.

As of December 31, 2021, there were no changes to the provisions of laws and regulations that have a significant effect on the financial and operational performance of the Company.



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

Pada awal tahun 2021, Perusahaan telah menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang berlaku efektif pada 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Penerapan dari standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan interim pada periode berjalan:

1. PSAK No. 112: "Akuntansi Wakaf"
2. PSAK No. 22 (amendemen): "Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis"
3. PSAK No. 73: "Sewa".
4. Amandemen PSAK No. 71, Amandemen PSAK No. 55, Amandemen PSAK No. 60, Amandemen PSAK No. 62 dan Amandemen PSAK No. 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2
5. Penyesuaian tahunan PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk"
6. Penyesuaian tahunan PSAK No. 111, "Akuntansi Wa'd"

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

1. PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi"
2. Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
3. Amandemen PSAK No. 16: "Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
4. Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual"
5. Amandemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
6. Amendemen PSAK No. 73: "Sewa - Konsesi Sewa Terkait COVID-19 Setelah 30 Juni 2021"
7. Penyesuaian tahunan PSAK No. 69: "Agrikultur"
8. Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"
9. Penyesuaian tahunan PSAK No. 73: "Sewa"

In early 2021, the Company has compiled and stipulated accounting policies in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) which are effective on January 1, 2021 until December 31, 2021. The adoption of new standards, amendments and annual adjustments to accounting standards, which are effective from January 1, 2021, did not result in significant changes to the Company's accounting policies and did not have a material impact on the amounts reported in the interim financial statements for the current period:

1. PSAK No. 112: "Accounting for Wakf"
2. PSAK No. 22 (amendment): "Business Combination: Definition of Business"
3. PSAK No. 73: "Lease".
4. Amendments to PSAK No. 71, Amendment to PSAK No. 55, Amendment to PSAK No. 60, Amendment to PSAK No. 62 and Amendment to PSAK No. 73 on Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2
5. Annual adjustment of PSAK No. 110, "Accounting for Sukuk"
6. Annual adjustment of PSAK No. 111, "Wa'd Accounting"

The new standards, amendments and annual adjustments that have been issued, but not yet effective for the financial year starting on January 1, 2021, are as follows:

1. PSAK No. 74: "Insurance Contract"
2. Amendments to PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements"
3. Amendments to PSAK No. 16: "Fixed Assets - Yield Before Intensified Use"
4. Amendments to PSAK No. 22: "Business Combinations – Reference to Conceptual Frameworks"
5. Amendments to PSAK No. 57: "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling Contracts"
6. Amendments to PSAK No. 73: "Leases - COVID-19 Related Lease Concessions After 30 June 2021"
7. Annual adjustment of PSAK No. 69: "Agriculture"
8. Annual adjustment of PSAK No. 71: "Financial Instruments"
9. Annual adjustment of PSAK No. 73: "Rent"



ASPEK PERPAJAKAN DAN KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

ASPECTS OF TAXATION AND CONTRIBUTION TO THE STATE

Sebagai wujud nyata kontribusi Perusahaan kepada negara melalui pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak dan pemotong/pemungut pajak. Sebagai wajib pajak, Perusahaan selalu patuh dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Sementara, sebagai pemotong/pemungut pajak, Perusahaan berperan aktif dalam melakukan pemotongan dan pemungutan terhadap setiap objek kena pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, Perusahaan juga memenuhi kewajibannya dalam hal pajak dengan telah menyampaikan dokumen pelaporan pajak, seperti SPT Masa PPh dan PPN, SPT Tahunan, PPh Badan dan dokumen kewajiban perpajakan lainnya kepada otoritas perpajakan yang berwenang dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Di tahun 2021, Perusahaan telah mengeluarkan kewajiban pajak sebesar Rp. 541.609.698.958 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A tangible manifestation of the Company's contribution to the state is through the fulfillment of its obligations as a taxpayer and tax withholder/collector. As a taxpayer, the Company is always compliant in fulfilling Corporate Income Tax (PPh) obligations. Meanwhile, as a tax withholder/collector, the Company performs an active role in withholding and collecting each taxable object in accordance with the applicable tax provisions.

In addition, the Company also fulfills its tax obligations by submitting tax reporting documents, such as Periodic Income Tax Returns and VAT, Annual Income Tax Returns, Corporate Income Tax and other tax obligations documents to the competent tax authorities in order to comply with applicable tax regulations. In 2021, the Company has paid a tax liability of IDR 541,609,698,958 which can be described as follows:

Jenis Pajak Type of Tax	2021 (Rp) (IDR)	2020 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference (Rp)	Percentase Percentage (%)
PPh 4 ayat 2 Income Tax, article 4 paragraph 2	60.206.727	5.574.418	54.632.309	83%
PPh 21 Income Tax, article 21	3.570.578.125	3.983.626.236	-413.048.111	-10,37%
PPh 22 Income Tax, article 22	-	-	-	0%
PPh 23 Income Tax, article 23	322.791.774	247.013.680	75.778.094	13%
Jumlah Total	3.953.576.626	4.236.214.336	-282.637.708	-6,67%



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Dalam mengukur serta menilai hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan, Manajemen mengukur dan menilai beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek keuangan
 - a. Membandingkan saldo-saldo realisasi tahun 2021 dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
 - b. Menghitung kembali persentase fluktuasi yang dilaporkan oleh Manajemen antara saldo-saldo aktual tahun 2020 dengan target anggaran/RKAP tahun 2021 dan saldo-saldo aktual tahun 2020.
2. Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan
 - a. Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan indikator kinerja keuangan antara realisasi tahun 2021 target anggaran/RKAP tahun 2021 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Kinerja.
 - b. Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan indikator kinerja operasional antara realisasi tahun 2021 target anggaran/RKAP tahun 2021 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Kinerja.
 - c. Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan indikator kinerja administrasi antara realisasi tahun 2021 target anggaran/RKAP tahun 2021 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Kinerja.
 - d. Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan tingkat kesehatan Perusahaan antara realisasi tahun 2021 dengan target anggaran/RKAP tahun 2021 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Kinerja.
3. Perkembangan usaha Perusahaan
 - a. Membandingkan informasi keuangan tahun 2020 dan 2021 dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
 - b. Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan informasi rasio keuangan tahun 2020 dan 2021.

In measuring and assessing matters that have the potential to significantly affect the Company's business continuity, the Management measures and assesses the followings:

1. Financial aspect
 - a. Comparing the realized balances for 2021 with the audited Financial Statements.
 - b. Recalculated the percentage of fluctuations reported by Management between the actual balances in 2020 with the target budget/RKAP in 2021 and the actual balances in 2020.
2. Assessment of Company soundness level
 - a. Recalculate and compare financial performance indicators between the 2021 realization of the 2021 budget/RKAP targets based on the criteria set out in the Performance Assessment Guidelines.
 - b. Recalculate and compare operational performance indicators between the 2021 realization of the 2021 budget/RKAP targets based on the criteria set out in the Performance Assessment Guidelines.
 - c. Recalculate and compare administrative performance indicators between the 2021 realization of the 2021 budget/RKAP targets based on the criteria set out in the Performance Assessment Guidelines.
 - d. Recalculate and compare the Company's soundness level between the 2021 realization and the 2021 budget/RKAP target based on the criteria set out in the Performance Assessment Guidelines.
3. Company's business development
 - a. Comparing financial information for 2020 and 2021 with audited Financial Statements.
 - b. Recalculate and compare financial ratio information for 2020 and 2021.



PROSPEK USAHA BUSINESS PROSPECT

Seperti dikutip dari "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta" yang dirilis Bank Indonesia pada Februari 2022 menyatakan bahwa, perekonomian DKI Jakarta diprakirakan melanjutkan pemulihan yang lebih tinggi pada triwulan I 2022. Selain karena faktor base effect pada tahun sebelumnya yang masih mencatatkan kontraksi, pertumbuhan ekonomi secara tahunan juga didukung oleh lebih longgarnya kebijakan PPKM level 3 yang berlaku sejak 8 Februari 2021 dibandingkan PPKM Makro-Mikro yang berlaku pada triwulan I 2021. Adapun peningkatan status PPKM sudah mulai terjadi di awal tahun 2022, yaitu melalui peningkatan status ke level 2 yang berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022 sebagai respons dari Pemerintah untuk menahan lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron yang mulai meningkat di awal tahun 2022.

Dengan perkembangan tersebut, perekonomian dari sisi pengeluaran masih akan ditopang oleh Konsumsi RT dan pertumbuhan yang positif dari seluruh komponen. Dari sisi LU, seluruh LU utama diperkirakan akan tumbuh positif seiring dengan masih cukup tingginya aktivitas ekonomi masyarakat pada saat pelonggaran aktivitas. Secara triwulan, kinerja perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2022 diprakirakan akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2021, seiring dengan optimisme masyarakat yang masih tinggi di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang lebih terkendali.

Pada triwulan II 2022, perekonomian DKI Jakarta diproyeksikan masih akan terus melanjutkan pemulihan sejalan dengan prakiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi global dan domestik serta meningkatnya harga komoditas dan volume perdagangan dunia. Perbaikan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan II 2022 juga akan didorong oleh beberapa faktor yaitu relatif terkendalinya kasus COVID-19 sehingga diperkirakan akan berdampak pada pelonggaran level PPKM, akselerasi program vaksinasi ketiga (booster) di DKI Jakarta, serta pelaksanaan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri. Dari sisi pengeluaran, motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada triwulan II 2022 masih bersumber dari konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II 2022 masih akan ditopang oleh pertumbuhan beberapa LU utama yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran dan reparasi kendaraan bermotor, konstruksi, serta informasi dan komunikasi. Berdasarkan perkembangan tersebut, perekonomian Jakarta pada tahun 2022 diprakirakan tumbuh lebih tinggi yaitu pada kisaran 5,3-6,1% (yoY) dibandingkan tahun 2021.

As quoted from the "DKI Jakarta Provincial Economic Report" which was released by Bank Indonesia in February 2022, it is stated that the DKI Jakarta economy was predicted to continue the higher recovery in the first quarter of 2022. In addition to the Base Effect factor in the previous year, which still recorded contractions, annual economic growth is also supported by further loosening of Level 3 PPKM policies applied since February 8, 2021, if compared to macro-micro PPKM which was applied in the first quarter of 2021. The increase in the level of the PPKM has begun in early 2022, which is through an increase in status to level 2, since January 4, 2022. This is a response from the government to hold a surge in the case of COVID-19 Omicron variants which began to increase in early 2022.

With these developments, in terms of expenditure, the economy will still be supported by household consumption and positive growth of all components. In terms of LU, all major LU is expected to grow positively, along with the economic activity of the community during the loosening period, which was still high. Quarterly, the performance of the DKI Jakarta's economy on the first quarter of 2022 is predicted to be slightly higher than the fourth quarter of 2021, in line with the optimism of society which remains high in the midst of a more controlled COVID-19 case surge.

In the second quarter of 2022, the DKI Jakarta economy is projected to continue recovery, in line with the forecast of improving global and domestic economic growth and increasing commodity prices and world trade volume. DKI Jakarta's economic improvement in the second quarter of 2022 will also be driven by several factors, namely the relatively controlled of COVID-19 cases which is expected to have an impact on the loosening of PPKM's level, the acceleration of the Third Vaccination Program (Booster) in DKI Jakarta, and the Religious Holy Month of Ramadhan and Eid al-Fitr. In terms of expenditure, the main driving force of economic growth in DKI Jakarta in the second quarter of 2022 is still originated from household consumption.

Meanwhile, in terms of Business Field (LU), DKI Jakarta's economy in the second quarter of 2022 will still be supported by the growth of several major LU, namely the Processing Industry, Big and Retail Trade, Repairs of Motor Vehicles, Construction, and Information and Communication. Based on these developments, the Jakarta economy in 2022 is predicted to grow higher, which is in the range of 5.3-6.1% (yoY) compared to 2021.



Dari sisi harga, inflasi diprakirakan masih rendah, meski melanjutkan peningkatan pada triwulan I 2022. Inflasi yang meningkat seiring dengan berlanjutnya aktivitas dan konsumsi masyarakat, serta adanya kenaikan beberapa tarif yang diatur pemerintah seperti harga gas elpiji dan cukai rokok. Meskipun demikian, meningkatnya kasus COVID-19 dan adanya peningkatan status PPKM hingga ke level 3 di triwulan berjalan, berpotensi menahan konsumsi masyarakat. Dari sisi komoditas makanan, adanya panen besar di bulan Februari – April 2022 berdampak terhadap peningkatan pasokan bahan pangan sehingga turut menjaga inflasi tetap rendah.

Inflasi pada triwulan II 2022 diprakirakan masih akan tetap terjaga di kisaran target inflasi nasional yaitu $3 \pm 1\%$ (yoY) meskipun akan sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi utamanya bersumber dari meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan Ramadhan dan HBKN. Disamping itu, tekanan inflasi juga bersumber dari kenaikan harga komoditas global, kondisi cuaca serta peningkatan tensi geopolitik. Pada 2022, inflasi Jakarta diprakirakan lebih tinggi didorong oleh pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat, namun masih terkendali di kisaran $3,0 \pm 1,0\%$ (yoY).

Berdasarkan ulasan tersebut, LRT Jakarta telah merancang kebijakan strategis dalam rangka menggapai kinerja yang berkelanjutan di masa mendatang, sebagai berikut:

1. Peningkatan Bisnis & Operation Excellence

Penyesuaian operasional dan layanan serta pengembangan potensi bisnis non-farebox dengan memanfaatkan asset dan kapabilitas yang dimiliki.

2. Optimalisasi Aspek Finansial

Optimalisasi penggunaan anggaran terkait Operasi & Perawatan LRT Jakarta Fase 1 serta alternatif Pendanaan Pembangunan LRT Jakarta Fase 2 dan 3 beserta seluruh perizinannya.

3. Program Integrasi dan Sinergi

Integrasi dengan Moda Transportasi lain serta program sinergi dengan BUMD/BUMN/ Pemerintahan dalam proses pengembangan bisnis.

In terms of price, inflation is predicted to be low, despite continuing an increase in the first quarter of 2022. Inflation increases along with the continuing activities and consumption of the community, as well as an increase in several government regulations such as in LPG and Cigarette Excise prices. Nevertheless, the increase in COVID-19 cases and the increase in the status of PPKM to Level 3 in the current quarter, has the potential to hold the consumption of society. In terms of food commodities, a large harvest in February to April 2022 has an impact on the increase in food supply which is expected to also maintain inflation to remain low.

Inflation in the second quarter of 2022 is predicted to remain within the national inflation target range of $3\% \pm 1\%$ (yoY), although it will be slightly higher than the previous quarter. The main source of inflationary pressure is the increase in public demand during the month of Ramadan and HBKN. In addition, inflationary pressures also came from rising global commodity prices, weather conditions and rising geopolitical tensions. In 2022, Jakarta's inflation is predicted to be higher, driven by the economic recovery and increasing purchasing power of the people, but remains under control in the range of $3.0\% \pm 1.0\%$ (yoY).

Based on this review, LRT Jakarta has designed the following strategic policies in order to achieve sustainable performance in the future:

1. Business Improvement & Operation Excellence

Adjustment of operations and services as well as development of non-farebox business potential by utilizing existing assets and capabilities.

2. Optimization of Financial Aspect

Optimizing the use of budget related to the Operation & Maintenance of the Jakarta LRT Phase 1, as well as the alternative Funding for the Development of the Jakarta LRT Phase 2 and 3 along with all permits.

3. Integration and Synergy Program

Integration with other modes of transportation as well as synergy programs with Regional-Owned Enterprises/SOEs/ Government in the business development process.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT OCCURED AFTER
THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan pada akhir periode 31 Desember 2021 hingga tanggal laporan akuntan tanggal 25 Februari 2022. dengan demikian, informasi tersebut tidak dapat disampaikan.

There is no material information and facts that occurred after the date of the accountant's report at the end of the period December 31, 2021 until the date of the accountant's report on February 25, 2022. Therefore, there is no information relating to this that can be submitted.



LRT JAKARTA





05

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

BUSINESS SUPPORT FUNCTIONS



SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES



PT LRT Jakarta percaya bahwa keberhasilan jangka panjang Perusahaan salah satunya bergantung pada kontribusi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya, terutama dalam menghadapi tantangan Perusahaan yang semakin kompleks di masa yang akan mendatang. Sepanjang tahun 2021, Perusahaan telah melakukan penataan organisasi yang berdasarkan pada kebutuhan bisnis organisasi Perusahaan untuk terus dapat mendukung kinerja Perusahaan. Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan berkomitmen dan tetap mengedepankan pegawai yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga setiap kebijakan SDM yang diterapkan dapat mendukung upaya pengembangan Perusahaan secara berkesinambungan.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan, PT LRT Jakarta sudah pasti membutuhkan SDM yang berkualitas, berintegritas, profesional, serta berkompetensi secara kelas dunia. Oleh karena itu, Perusahaan telah menyusun program-program pengelolaan di bidang SDM yang kemudian dilaksanakan secara bertahap yang mencakup penyelarasan organisasi, pengelolaan manajemen kinerja, penyempurnaan sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi.

PT LRT Jakarta believes that the Company's long-term success depends on the contribution of its Human Resources (HR), especially in facing the increasingly complex challenges in the future. Throughout 2021, the Company has carried out organizational restructuring based on the business needs of the Company's organization to continue to be able to support the Company's performance. In the context of managing Human Resources (HR), the Company is committed and continues to prioritize employees who have competitive advantages so that every HR policy implemented can support the Company's sustainable development efforts.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT POLICY

To be able to support the achievement of the Company's vision and missions, PT LRT Jakarta definitely needs professional and world-class competent human resources who are qualified and full of integrity. Therefore, the Company has compiled management programs in the field of HR which are then implemented in stages which include organizational alignment, performance management, and improvement of competency-based HR management systems.



Selain itu, Perusahaan juga telah menetapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka mendukung strategi pengelolaan SDM. Kebijakan tersebut mengatur berbagai aspek terkait manajemen SDM di antaranya mengenai strategi pengelolaan SDM, evaluasi jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pengembangan dan pelatihan karyawan, kompensasi, pengelolaan talent, sistem manajemen kinerja karyawan, serta aturan mengenai pemberhentian karyawan.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perusahaan akan memberikan pelatihan dan pengelolaan kompetensi karyawan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat dan karakter individu. Hal ini diberikan dengan harapan mampu menjadi salah satu upaya yang dilakukan Perusahaan untuk menunjang pengembangan bisnis di Perusahaan. Perusahaan memberikan kesempatan bagi setiap karyawan untuk menempati posisi senior dan strategis sesuai dengan pengalaman di bidang masing-masing.

Sepanjang 2021, di kategori pelatihan karyawan, didominasi oleh pelatihan yang bersifat *softskill* dengan jumlah persentase 51% dan *hardskill* 49%.

Strategi dan Pelaksanaan Program Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Di sepanjang tahun 2021, Perusahaan melakukan perekrutan pegawai baru sebanyak 44 orang dengan rincian sebagai berikut:

In addition, the Company has also established HR management policies in order to support HR management strategies. The policy regulates various aspects related to HR management including HR management strategies, job evaluation, workforce planning, recruitment, employee development and training, compensation, talent management, employee performance management systems, as well as regulations regarding employee termination.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Human Resource Development

The Company will provide training and management of employee competencies to develop individual potential, talents, interests and character. This is given in the hope of being able to become one of the efforts made by the Company to support business development in the Company. The Company provides opportunities for every employee to occupy senior and strategic positions according to their experience in their respective fields.

Throughout 2021, the employee training category will be dominated by 51% soft skills training and 49% hard skills.

Strategy and Implementation of Human Resources Recruitment Program

Throughout 2021, the Company recruited 44 new employees with the following details:

Perkembangan Rekrutmen Karyawan Tahun 2021
Employee Recruitment Development 2021

Bulan Month	Jumlah (orang) Total (person)
Januari January	17
Februari February	2
Maret March	0
April April	6
Mei May	2
Juni June	0
Juli July	3
Agustus August	2
September September	1



Perkembangan Rekrutmen Karyawan Tahun 2021

Employee Recruitment Developmentin 2021

	Bulan Month	Jumlah (orang) Total (person)
Oktober October		1
November November		5
Desember December		5
Total		44

Tingkat Turnover Karyawan

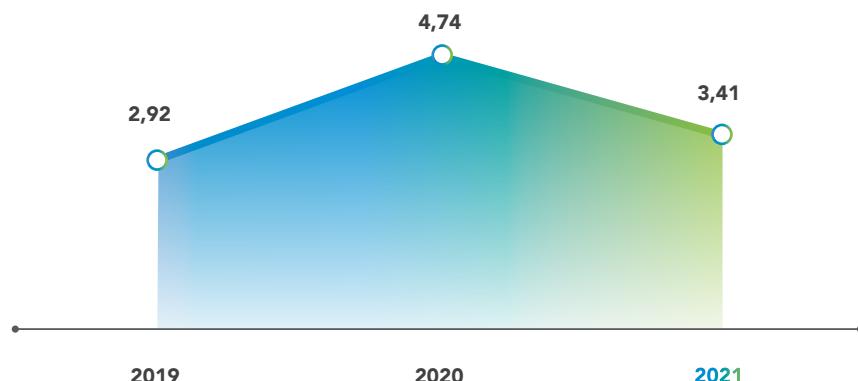
Tingkat turnover karyawan merupakan salah satu indikator keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif selain itu juga sebagai refleksi dari budaya dan sistem kerja di lingkup PT LRT Jakarta. Untuk itu, Perusahaan senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh pegawai menunjukkan hasil nyata. Di mana pada tahun 2021, tingkat turnover pegawai tercatat sebesar 3,41% yang turun dari tahun 2020 sebesar 4,74%.

Employee Turnover Rate

The employee turnover rate is an indicator of the Company's success in creating a conducive work environment as well as a reflection of the culture and work system within PT LRT Jakarta. For this reason, the Company always strives to create a conducive work environment for all employees to show tangible results. In 2021, the employee turnover rate was recorded at 3.41%, which was a decrease from 2020 at 4.74%.

Penyebab Reasons	2021	2020	2019
Pensiun Retirement	1	0	0
Meninggal dunia Death	3	0	0
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri Resigned at his/her own request	9	18	20
Diberhentikan Dismissed	4	0	0
Jumlah karyawan yang keluar Total Employees Exiting the Company	34	49	25
Total karyawan di akhir tahun Total Number of Employee at the End of the Year	253	245	272
Percentase turnover Turnover Percentage	3,41%	4,74%	2,92%

Grafik Tingkat Turnover Karyawan 3 Tahun Terakhir 2019-2021
 Employee Turnover Rate Chart for the Last 3 Years 2019-2021





Pengembangan Karier

Perusahaan senantiasa melakukan pengembangan karier bagi karyawannya yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kompetensi tiap masing-masing karyawan. Program pengembangan karier dilakukan melalui berbagai tahapan agar penempatan karyawan pada posisi jabatan yang tepat, yaitu posisi yang sesuai antara level kompetensi yang dimiliki individu dengan profil kompetensi pekerjaan yang diisyaratkan oleh pekerjaan.

Pengembangan karier karyawan pada tahun 2021 yakni adanya Rotasi karyawan yang disesuaikan dengan profil kompetensi pekerjaan dengan profil individu yang dimiliki.

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Setiap tahunnya, Perusahaan senantiasa mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pelatihan dan/atau pendidikan yang diselenggarakan baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, komitmen LRT dalam meningkatkan kompetensi SDM juga tercermin dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan karyawan sebagai berikut:

Career Development

The Company always carries out career development for its employees that is tailored to the interests, talents, and competencies of each employee. The career development program is carried out through various stages so that employees are placed in the right positions, namely positions that match the competency level of the individual with the job competency profile implied by the job.

Employee career development in 2021 was the employee rotations that are adjusted to the job competency profile with the individual profile they have.

Employee Education and Training

Every year, the Company always engages its employees in training and/or education programs held both internally and externally. In addition, LRT's commitment to improving HR competencies is also reflected in various employee education and training programs as follows:

Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Implementation of Employee Competency Development in 2021

Nama & Jenis Pelatihan/Pendidikan Name and Types of Training/Education	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation		Jumlah Peserta Number of Participants
	Tanggal	Lokasi	
Pelatihan Basic Microsoft Visio Microsoft Visio Basic Training	29 Juni 2021 June 29, 2021	Jakarta	8
Uji Kompetensi Pengendali Perjalanan Kereta Api Railroad Controller Competency Test	27- 28 Januari 2021 January 27-28, 2021	Jakarta	13
Webinar: "Creating a Positive Workplace for Millennials"	29 April 2021 April 29, 2021	Jakarta	6
Anti Korupsi dan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Berbasis ISO 37001:2016 Anti-Corruption and Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) Based on ISO 37001:2016	21 Oktober 2021 October 21, 2021	Jakarta	117
Basic Concept of Leadership	24 Juni 2021 June 24, 2021	Jakarta	1
Communication Influence	05 Juli 2021 July 5, 2021	Jakarta	6
Diklat Orientasi Calon Masinis Machinist Candidate Orientation Training	13 Januari 2021 January 13, 2021	Jakarta	11
Diklat Orientasi Calon Masinis (Lanjutan 2) Machinist Candidate Orientation Training (Advanced 2)	14 April 2021 April 14, 2021	Jakarta	14
Diklat Orientasi Calon Masinis (Lanjutan 3) Machinist Candidate Orientation Training (Advanced 3)	16 Maret 2021 March 16, 2021	Jakarta	12
Effective Interpersonal Communication	17 Maret 2021 March 17, 2021	Jakarta	24
Emotional Awareness for Spiritual Enhancement	18 Maret 2021 March 18, 2021	Jakarta	10
Excellent Public Speaking	21 April 2021 April 21, 2021	Jakarta	23



Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Implementation of Employee Competency Development in 2021

Nama & Jenis Pelatihan/Pendidikan Name and Types of Training/Education	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation		Jumlah Peserta Number of Participants
	Tanggal Date	Lokasi Location	
Induction Company Profile, PP, QSHE & Lingkup Kerja Induction Company Profile, PP, QSHE & Scope of Work	06 Mei 2021 May 1, 2021	Jakarta	17
IT Strategic Plan	19 Mei 2021 May 19, 2021	Jakarta	1
ITS WEBINAR SERIES day 1	01 Februari 2021 February 1, 2021	Jakarta	1
ITS WEBINAR SERIES day 2	25 Januari 2021 January 25, 2021	Jakarta	1
Jakarta Webinar Series 2021: UU Cipta Kerja - Titik Balik Reformasi Regulasi (PWC) Jakarta Webinar Series 2021: Job Creation Law - The Turning Point for Regulatory Reform (PWC)	05 April 2021 April 5, 2021	Jakarta	1
Kelas Career Talk - Perform Under Pressure Career Talk Class - Perform Under Pressure	12 April 2021 April 12, 2021	Jakarta	8
Kelas Jurnalistik - Creative Writing Journalism Class - Creative Writing	03 Mei 2021 May 03, 2021	Jakarta	12
Komisaris Profesional - Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab Professional Commissioner - Become a Competent and Responsible Commissioner	21-22 April 2021 April 21-22, 2021	Jakarta	2
Langkah Jitu Raih ISO 27001 The Excellent Steps to Achieve ISO 27001	27 Januari 2021 January 27, 2021	Jakarta	1
Leading in the Age of Digital Transformation Webinar (AWS Amazon)	27 Januari 2021 January 27, 2021	Jakarta	1
LRTJ Culture (Leadership, Respect & Trust)	17 Februari 2021 February 17, 2021	Jakarta	9
Materi PP 72/2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan KA serta PD 16A tentang Dinasan KA & Syarat ASP & PD 19 Jilid I tentang urusan KA & Langsir PP 72/2009 material on Railway Traffic & Transportation and PD 16A regarding Railway Service & ASP, and PD 19 Volume I regarding Train & Its Movement	01 Juli 2021 July 1, 2021	Jakarta	11
Paparan & Evaluasi Diklat Awal ASP Exposure & Evaluation of Early ASP Training	20 Mei 2021 May 20, 2021	Jakarta	9
Pelatihan Bahasa Inggris English Training	2-3 Juni 21 June 2-3, 2021	Jakarta	30
Pelatihan Bahasa Inggris (2) English Training (2)	17 Maret 2021 March 17, 2021	Jakarta	17
Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Madya dan Utama - CRP (Certified Risk Profesional) Intermediate and Primary Risk Management Training and Certification - CRP (Certified Risk Professional)	17 Februari 2021 February 17, 2021	Jakarta	1
Pelatihan QSHE Auditor SMK3 - Sertifikasi Kemnaker SMK3 Auditor QSHE Training - Ministry of Manpower Certification	03 Mei 2021 May 3, 2021	Jakarta	18
Pemahaman Perkeretaapian Understanding of Railways	23 Maret 2021 March 23, 2021	Jakarta	10
Pemahaman Perkeretaapian (Lanjutan 2) Understanding of Railways (Advanced 2)	26 Maret 2021 March 26, 2021	Jakarta	10
Pengendali Stasiun Station Controller	17 Juni 2021 June 17, 2021	Jakarta	9



Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Implementation of Employee Competency Development in 2021

Nama & Jenis Pelatihan/Pendidikan Name and Types of Training/Education	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation		Jumlah Peserta Number of Participants
	Tanggal Date	Lokasi Location	
Pentingnya Sertifikasi Untuk HR The Importance Of Certification For HR	24 Juni 2021 June 24, 2021	Jakarta	1
Personality - DISC	26-27 Juni 2021 June 26-27, 2021	Jakarta	1
Problem Solving Virtual Training Precena	28 Mei 2021 May 28, 2021	Jakarta	1
QSHE : APAR	29 Mei 2021 May 29, 2021	Jakarta	32
Seminar ESQ - Berdamai Dengan Masa Lalu, Menuju Masa Depan Yang Cerah ESQ Seminar - Making Peace with the Past, Towards a Bright Future	31 Mei 2021 May 31, 2021	Jakarta	6
Simak Kamis Episode 2: Stakeholders, Peran, dan Solusi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Aspek Sosial-Ekonomi Simak Kamis (Watch Thursday) Episode 2: Stakeholders, Roles, and Integrated Waste Management Solutions from Socio-Economic Aspects	06 Maret 2021 March 6, 2021	Jakarta	1
Simulasi Kebakaran Stasiun Velodrome Velodrome Station Fire Simulation	08 Maret 2021 March 8, 2021	Jakarta	17
Social Media Government - Menyusun Indikator Kinerja di Media Sosial Social Media Government - Develop Performance Indicators on Social Media	22 Maret 2021 March 22, 2021	Jakarta	1
Social Media Government - Menyusun Strategi Kehumasan di Media Sosial Social Media Government - Develop Public Relations Strategy on Social Media	29 April 2021 April 29, 2021	Jakarta	1
Social Media Government - Strategi Mengelola Komentar di Media Sosial Social Media Government - Strategy for Managing Comments on Social Media	15-16 Maret 2021 March 15-16, 2021	Jakarta	1
Sosialisasi dan Eksplorasi Penggunaan Ms. Team Dissemination and Exploration of the Use of Ms. Team	10 Maret 2021 March 10, 2021	Jakarta	12
Sosialisasi Penggunaan Single Data ERP Dynamics 365 Dissemination on the Use of Single Data ERP Dynamics 365	12 Maret 2021 March 12, 2021	Jakarta	1
Sosialisasi Trial 360 Assessment Dissemination of Trial 360 Assessment	17 Juni 2021 June 17, 2021	Jakarta	16
Teknik Mengelola Stress Agar Kerja Tetap Produktif Techniques for Managing Stress to Stay Productive	05 Mei 2021 May 5, 2021	Jakarta	210
Teknik Menyelesaikan Konflik dengan Siapapun Techniques for Resolving Conflicts with Anyone	21 Mei 2021 May 21, 2021	Jakarta	206
The Power Of Forgiveness	18 Februari 2021 February 18, 2021	Jakarta	2
Time Management - A Life Hack to be More Productive	10 Maret 2021 March 10, 2021	Jakarta	213
Training of Trainer - Sertifikasi BNSP Training of Trainer - BNSP Certification	07 April 2021 April 7, 2021	Jakarta	12
Training Safety Awareness - Sistem Mutu & K3 Perkeretaapian, Tanggap Darurat & Pemadam Kebakaran Safety Awareness Training - Railway Quality & OHS System, Emergency Response & Fire Fighting	31 Maret 2021 March 31, 2021	Jakarta	65
Webinar - Innovative Infrastructure Financing Through Value Capture in Indonesia	24 Maret 2021 March 24, 2021	Jakarta	2



Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Implementation of Employee Competency Development in 2021

Nama & Jenis Pelatihan/Pendidikan Name and Types of Training/Education	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation		Jumlah Peserta Number of Participants
	Tanggal Date	Lokasi Location	
Webinar Hari Kartini LRTJ : "Bincang Ringan Bersama dr. Michelle – Tips and Trick Menjaga Kesehatan Reproduksi Wanita" LRTJ Kartini Day Webinar : "Light Talk with dr. Michelle – Tips and Tricks for Maintaining Women's Reproductive Health"	29 Maret 2021 March 29, 2021	Jakarta	34
Webinar HUT LRTJ : "Tantangan Integrasi dan Interaksi Transportasi Publik di Era Post COVID-19" LRTJ Anniversary Webinar: "The Challenge of Integration and Interaction of Public Transportation in the Post COVID-19 Era"	03 Mei 2021 May 3, 2021	Jakarta	99
Webinar: (GPS) - Road to Summit 2021: Sovereign Wealth Fund through the Lens of Indonesia's Development	18 Februari 2021 February 18, 2021	Jakarta	1
Webinar: Powerful Insights to Drive Employee Engagement in 2021	17 Mei 2021 May 17, 2021	Jakarta	1
What A Wonderful Indonesia : Integrating Intelligent Transport & Tourism	17 Juni 2021 June 17, 2021	Jakarta	1
Workshop Manual Kebijakan Investasi di Lingkungan JakPro Group Workshop on Investment Policy Manual in JakPro Group	24 Mei 2021 May 24, 2021	Jakarta	1
Assessment Center Assessor Certification	05 Mei 2021 May 5, 2021	Jakarta	2
Effective Communication	17 Juni 2021 June 17, 2021	Jakarta	53
Cascading Balanced Scorecard	14-16 Juni 2021 June 14-16, 2021	Jakarta	1
Key Performance Indicator : Konsep, Studi Kasus, dan Expert's Tips Key Performance Indicators: Concepts, Case Studies, and Expert's Tips	20 April 2021 April 20, 2021	Jakarta	1
Business Model Canvas : The Strategic Tool for Business Concept Development	21 April 2021 April 21, 2021	Jakarta	1
Innovative Infrastructure Financing through Value Capture in Indonesia	22 April 2021 April 22, 2021	Jakarta	1
Digital Construction in Indonesia's Infrastructure Project	24 Mei 2021 May 24, 2021	Jakarta	1
Kupas Tuntas Permenkeu No.18/PMK.03/2021/ sebagai Juklak UU Cipta Kerja Jilid 3 (KUP) CompleteAnalysis of the Regulation of the Minister of Finance No.18/ PMK.03/2021/ as the Guidelines for the Job Creation Law Volume 3 (KUP)	21 April 2021 April 21, 2021	Jakarta	1
Coaching for Optimal Performance	14 April 2021 April 14, 2021	Jakarta	5
How to be a Great Public Speaker	24 Februari 2021 February 24, 2021	Jakarta	6
Pelatihan Bahasa Inggris English Training	15 Januari 2021 January 15, 2021	Jakarta	27
Inovasi Digital di Bidang Industri Perkeretaapian Indonesia Digital Innovation in the Indonesian Railway Industry	26 - 31 Juli 2021 July 26-31, 2021	Jakarta	1
Peningkatan Efektivitas Sistem Manajemen Dalam Rangka Efisiensi Cost Selama Masa Pandemi Increasing the Effectiveness of Management Systems in the Context of Cost Efficiency During the Pandemic	03 Mei 2021 May 3, 2021	Jakarta	1
ToT "Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan" ToT "Planning the Presentation of Training Materials"	30-31 Juli 2021 July 30-31, 2021	Jakarta	3



Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Implementation of Employee Competency Development in 2021

Nama & Jenis Pelatihan/Pendidikan Name and Types of Training/Education	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation		Jumlah Peserta Number of Participants
	Tanggal	Lokasi	
QSHE - Emergency Response Plan	05 Agustus 2021 August 5, 2021	Jakarta	46
Leader As A Coach (Batch 1)	30 Juli 2021 July 30, 2021	Jakarta	3
HR Supervisor Sertifikasi BNSP HR Supervisor BNSP Certification	06 Juli 2021 July 6, 2021	Jakarta	1
ISO 37001 Anti Bribery with Certification by PECB	23 Juli 2021 July 23, 2021	Jakarta	1
Pelatihan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker General OHS Expert Training Ministry of Manpower Certification	31 Juli 2021 July 31, 2021	Jakarta	1
Pelatihan Brevet AB AB Brevet Training	12 Agustus 2021 August 12, 2021	Jakarta	4
Leader As A Coach (Batch 2)	20 Agustus 2021 August 20, 2021	Jakarta	6
General Affair Management Program	23 -24 Agustus 2021 August 23-24, 2021	Jakarta	2
Win-Win Negotiation Skill	16, 18-19, 23 Agustus 2021 August 16,18-19, and 23, 2021	Jakarta	2
Leader As A Coach (Batch 3)	19-20 Agustus 2021 August 19-20, 2021	Jakarta	6
Leader As A Coach (Batch 4)	23 Agustus - 04 September 2021 August 23-September 4, 2021	Jakarta	7
Training of Trainer Sertifikasi BNSP BNSP Certification Training of Trainers	25 Agustus - 12 Oktober 2021 August 25 - October 12, 2021	Jakarta	1
Advance Secretary Program	25-26 Agustus 2021 August 25-26, 2021	Jakarta	2
Petugas Pelatihan K3 Kimia Sertifikasi Kemnaker Chemical K3 Training Officer, Ministry of Manpower Certification	26-27 Agustus 2021 August 26-27, 2021	Jakarta	1
Smart Secretary	30-31 Agustus 2021 August 30-31, 2021	Jakarta	3
Leader As A Coach (Batch 5)	06-07 September 2021 September 6-7, 2021	Jakarta	6
Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	08-09 September 2021 September 8-9, 2021	Jakarta	2
Recruitment Sertifikasi BNSP BNSP Certification Recruitment	08-09 September 2021 September 8-9, 2021	Jakarta	1



Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Implementation of Employee Competency Development in 2021

Nama & Jenis Pelatihan/Pendidikan Name and Types of Training/Education	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation		Jumlah Peserta Number of Participants
	Tanggal	Lokasi	
Designing Learning	13-14 September 2021 September 13-14, 2021	Jakarta	1
Outsourcing Management	14-21 September 2021 September 14-21, 2021	Jakarta	2
HR For Non-HR (Batch 1)	16 September 2021 September 16, 2021	Jakarta	10
HR For Non-HR (Batch 2)	20-21 September 2021 September 20-21, 2021	Jakarta	11
Corporate Culture	06-10 September 2021 September 6-10, 2021	Jakarta	2
IR Manager Sertifikasi BNSP IR Manager BNSP Certification	13-17 September 2021 September 13-17, 2021	Jakarta	1
Pelatihan Pajak Pph Ps 21 & SPT Pph Ps 21 Article 21 Income Tax Training & Article 21 Income Tax Return	06-07 September 2021 September 6-7, 2021	Jakarta	2
Pendidikan Designing Key Performance Indicator With Balance Scorecard Training on Designing Key Performance Indicator With Balanced Scorecard	21-24 September 2021 September 21-24, 2021	Jakarta	3
Diklat Awak Sarana Perkeretaapian Otomatis (Teori dan Praktek) Training for Crew of Automatic Railway Facilities (Theory and Practice)	22-23 September 2021 September 22-23, 2021	Jakarta	10
QSHE - Fatigue Management	22 September 2021 September 22, 2021	Jakarta	33
QSHE - Incident Investigation	23 September 2021 September 23, 2021	Jakarta	46
QSHE - Ergonomi di Tempat Kerja QSHE - Ergonomics at Work	10-12 November 2021 November 10-12, 2021	Jakarta	38
Diklat Perawatan Sarana Facility Maintenance Training	28-30 September 2021 September 28-30, 2021	Jakarta	7
Diklat Pemeriksaan Sarana Facility Maintenance Training	08-10 September 2022 September 8-10, 2021	Jakarta	14
Pelatihan Finance for Non-Finance Finance for Non-Finance Training	23-24 September 2021 September 23-24, 2021	Jakarta	19



Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Implementation of Employee Competency Development in 2021

Nama & Jenis Pelatihan/Pendidikan Name and Types of Training/Education	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation		Jumlah Peserta Number of Participants
	Tanggal	Lokasi	
Pelatihan SCADA (Power & Facility) SCADA (Power & Facility) training	07-08 Oktober 2021 October 7-8, 2021	Jakarta	21
Diklat Pemeriksaan dan Perawatan Fasilitas Operasi Operational Facility Inspection and Maintenance Training	09 Juni - 03 September 2021 June 9-September 3, 2021	Jakarta	8
Diklat Pemeriksa Perawatan Jalur dan Bangunan Line and Building Maintenance Inspector Training	14-18 Juni 2021 June 14-18, 2021	Jakarta	5
Diklat Perawatan Sinyal Signal Maintenance Training	10 September 2021 September 10, 2021	Jakarta	4
Horisson Asesment	16 September 2021 September 16, 2021	Jakarta	3
Design Grafis Menggunakan Power Point Graphic Design Using Power Point	17 September 2021 September 17, 2021	Jakarta	12
Feasibility Study of MRT/LRT System, Shaping Suistainable Urban Mobility	12-16 Juli & 25 Agustus - 03 September 2021 July 12-16, and August 25-September 3, 2021	Jakarta	2
Inventory Management	21-23 Juli & 6-9 September 2021 July 21-23, and September 6-9, 2021	Jakarta	2
Pelatihan P3K Sertifikasi Kemnaker Ministry of Manpower Certification First Aid Training	12-14 Oktober 2021 October 12-14, 2021	Jakarta	25
Strategic OD	04-06 Oktober & 14-15 Oktober 2021 October 4-6, and October 14-15, 2021	Jakarta	2
Pembinaan & Sertifikasi Operator Overhead Crane Kelas III Class III Overhead Crane Operator Training & Certification	04-06 Oktober & 18-19 Oktober 2021 October 4-6, and October 18-19, 2021	Jakarta	1
Safety - HIRADC	07-09 Oktober & 14-15 Oktober 2021 October 7-9, and October 14-15, 2021	Jakarta	46
Mastering Project Finance & Public Private Partnership	07-09 Oktober & 18-19 Oktober 2021 October 7-9, and October 18-19, 2021	Jakarta	9
Time Management & Delegation Skill	11-13 Oktober & 14-15 Oktober 2021 October 11-13, and October 14-15, 2021	Jakarta	28
Meaning of Work : Leader as Meaning Maker	11-13 Oktober & 18-19 Oktober 2021 October 11-13, and October 18-19, 2021	Jakarta	50



Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Implementation of Employee Competency Development in 2021

Nama & Jenis Pelatihan/Pendidikan Name and Types of Training/Education	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation		Jumlah Peserta Number of Participants
	Tanggal	Lokasi	
Design Virtual Learning	20 September - 15 Oktober 2021 September 20 – October 15, 2021	Jakarta	1
Pelatihan Gada Utama Gada Utama Training	20 - 22 September & 29 September - 01 Oktober 2021 September 20-22, and September 29-October 1, 2021	Jakarta	1
Supervisory Management	20 - 30 September & 04-07 Oktober 2021 September 20-30, and October 4-7, 2021	Jakarta	24
QSHE - APAR & Hydrant	13-15 Oktober 2021 October 13-15, 2021	Jakarta	43
Ahli K3 Lingkungan Kerja Sertifikasi Kemnaker OHS Expert Work Environment, Certification of the Ministry of Manpower	26-27 Oktober 2021 October 26-27, 2021	Jakarta	1
Audit Pengadaan Barang/Jasa Goods/Services Procurement Audit	09-12 Agustus 2021 August 9-12, 2021	Jakarta	1
QSHE - Internal Audit ISO 9001:2015	26-29 Oktober 2021 October 26-29, 2021	Jakarta	15
Certified Risk Governance Professional - CRGP	16-18 November 2021 November 16-18, 2021	Jakarta	1

Kesejahteraan Karyawan

Di Tahun 2021, PT LRT Jakarta mengikutkan karyawan kedalam Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang dikelola oleh salah satu DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) untuk mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan landasan hukum dana pensiun yaitu Undang-undang Nomor 11 tanggal 20 April 1992 serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, PT LRT Jakarta juga memperhatikan kebutuhan kesejahteraan karyawan dalam hal BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Kesehatan untuk Karyawan dan Keluarga Karyawan, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Pendidikan dan Tunjangan Akhir Tahun.

Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh LRT pada tahun 2021 adalah sebesar Rp29.775.094.082 mengalami kenaikan 5% dibanding tahun 2020 sebesar Rp28.486.282.709. Adapun pos-pos biaya tenaga kerja yang dikeluarkan meliputi gaji, beban manfaat karyawan, tunjangan, beban Pph Karyawan, Beban Tantiem & Jasa Produksi, Beban Premi Asuransi Pegawai, Tunjangan Hari Raya, BPJS Ketenagakerjaan, Beban diklat dan pelatihan sertifikasi, pengobatan, BPJS Kesehatan, Beban Pegawai Lainnya, Pakaian Dinas.

Employee Welfare

In 2021, PT LRT Jakarta enrolled its employees into the Defined Contribution Pension Program (PPIP) managed by one of the DPLK (Financial Institution Pension Funds) to manage and operate programs that promise pension benefits based on the legal basis of pension funds, namely Law Number 11 dated 20 April 1992, and its implementing regulations. In addition, PT LRT Jakarta also pays attention to the welfare needs of employees in terms of BPJS Kesehatan (Social Health Insurance Administration Body), BPJS Ketenagakerjaan (National Social Security), and Health Insurance for Employees and Employees' Families, Holiday Allowances, Educational Allowances and Year-End Allowances.

Labor Costs

The labor costs incurred by the LRT in 2021 are IDR 29,775,094,082, an increase of 5% compared to 2020 of IDR 28,486,282,709. The labor costs incurred include salaries, other employee's benefit, allowances, employee's income tax, tantiem & production services, employee's insurance, religious holiday allowances, BPJS Ketenagakerjaan, employee's training and certification, medical allowance, BPJS Kesehatan, Other Employee's Expenses, and Employee's Uniform



Biaya Tenaga Kerja 2021-2020
Labor Costs 2021-2020

No	Pos Biaya Tenaga Kerja Labor Costs Posts	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Nominal Nominal (Rp)	Percentase Percentage (%)
1	Gaji Salary	15,538,073,936	12,407,516,784	3,130,557,152	25%
2	Beban Manfaat Karyawan Other Employee's Benefit	1,867,005,330	1,795,883,617	71,121,713	4%
3	Tunjangan Allowance	3,036,969,877	3,503,781,164	(466,811,287)	-13%
4	Beban PPh Karyawan Employee Income Tax	2,100,827,929	2,632,946,659	(532,118,730)	-20%
5	Beban Tantiem Dan Jasa Produksi Tantiem and Production Service	2,089,790,587	2,631,214,107	(541,423,520)	-21%
6	Beban Premi Asuransi Pegawai Employee's Insurance	1,558,756,171	2,444,968,282	(886,212,111)	-36%
7	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	993,956,201	947,995,666	45,960,535	5%
8	BPJS Ketenagakerjaan	990,623,987	911,995,007	78,628,980	9%
9	Beban Diklat dan Pelatihan Sertifikasi Employee's Training and Certification	621,948,137	83,091,400	538,856,737	649%
10	Beban Pengobatan Medical Allowance	432,601,402	726,648,154	(294,046,752)	-40%
11	BPJS Kesehatan	354,323,240	336,592,838	17,730,402	5%
12	Beban Pegawai Lainnya Other Employee's Expenses	87,773,622	45,448,288	42,325,334	93%
13	Pakaian Dinas Employee's Uniform	29,356,375	18,200,743	11,155,632	61%
14	Beban Karyawan Lainnya Other Employee Expenses	73,087,288	-	73,087,288	100%
Jumlah Total		29,775,094,082	28,486,282,709	1,288,811,373	5%

RENCANA KERJA DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA 2022

Pada tahun kerja 2022, Divisi SDM tetap berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan insan perusahaan yang dituangkan dalam Program Kerjanya, antara lain:

1. Pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi akan terus menjadi fokus utama dalam pemenuhan prasyarat kompetensi jabatannya.
2. Peran Leader dalam era saat ini sangatlah penting sehingga tahun 2022 ini, kami juga fokus melakukan pengembangan untuk para Leader melalui Leadership Training Program untuk lebih efektif dan menciptakan Tim yang unggul dan kompeten sesuai dengan perannya sebagai pemimpin dan mengelola sebuah tim.

HUMAN RESOURCES DIVISION'S WORK PLAN FOR 2022

In the 2022 working year, the HR Division will continue to strive to improve the quality of management and development of the Company's personnel, as outlined in its Work Program, which includes:

1. Competency-based training and certification will continue to be the main focus in fulfilling the competency requirements of the position.
2. The role of Leaders in the current era is very important. So, in 2022, the Company will also focus on developing Leaders through the Leadership Training Program to be more effective and create a superior and competent team in accordance with their role as leaders and managing a team.



3. Penyesuaian digitalisasi juga dibutuhkan di dalam pengembangan, yakni adanya *Learning Management System* (LMS) yang menjadi salah satu solusi pembelajaran untuk mengasah *self-learning* dan sangat efektif bagi karyawan yang bekerja dengan jadwal shift yang padat. Dalam pengelolaan LMS, Divisi SDM tidak hanya disupport oleh tim internal yang disebut *Learning Partner*, tetapi juga akan berkolaborasi dengan beberapa provider penyedia content *learning development*.
4. Program *employee wellbeing* merupakan program yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan secara utuh, tidak hanya dari aspek remunerasi, namun juga mencapai berbagai aspek dalam kehidupan yang mendukung kualitas profesionalnya. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pada tahun 2022, kami membuat program yang diberi nama *Employee Assistant Program* (EAP). Fokus program EAP ini adalah untuk membantu karyawan dalam menghadapi dan mengatasi berbagai masalah pribadi, keluarga maupun pekerjaan demi terjaganya prestasi kerja, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan. Adapun kegiatannya meliputi Survey Karyawan untuk melihat permasalahan dalam organisasi yang dialami karyawan, konseling one on one dengan psikolog professional dan ataupun Webinar/ online seminar dengan tema terkait kesehatan mental.
5. Pembuatan Jenjang Karier.
6. Pelaksanaan *Engagement Survey*
7. Penguatan komunikasi perwakilan karyawan dengan perwakilan manajemen dengan mengadakan LKS Bipartit yang bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan Pengusaha & Aspirasi Karyawan dan mampu mendeteksi dini dan menampung permasalahan Hubungan Industrial Perusahaan.
3. Digitalization adjustments are also needed in development, namely the existence of a Learning Management System (LMS) which is one of the learning solutions to hone self-learning and is very effective for employees who work with a busy shift schedule. In managing LMS, the HR Division is not only supported by an internal team called Learning Partners, but will also collaborate with several providers of content learning development providers.
4. Employee wellbeing program is a program that is useful to improve employee welfare as a whole, not only from the aspect of remuneration, but also to achieve various aspects of life that support their professional quality. In order to support this, in 2022, the Company is creating a program called the Employee Assistant Program (EAP). The focus of this EAP is to assist employees in dealing with and overcoming various personal, family and work problems in order to maintain work performance, health, and employee welfare. The activities include an Employee Survey to see problems in the organization experienced by employees, one-on-one counseling with professional psychologists, and or Webinar/ online seminars with themes related to mental health.
5. Making Career Paths.
6. Implementation of the Engagement Survey
7. Strengthening communication between employee representatives and management representatives by holding a Bipartite Cooperation Organization (LKS) which aims to facilitate the communication of Employer's policies & Employee Aspirations, and early detection and accommodation of problems in the Company's Industrial Relations.



TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY



PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

LRT menyadari bahwa di era digital saat ini menuntut Perusahaan untuk terus dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga bisnis yang dijalani Perusahaan memiliki daya saing yang tinggi. Untuk dapat mengikuti perkembangan digital, LRT memiliki kebijakan yang mengatur Teknologi Informasi sehingga mempermudah ruang gerak Perusahaan. Penggunaan Teknologi Informasi secara tepat guna diyakini mampu meningkatkan performa Perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya.

Mengacu pada IT Master Plan LRT Jakarta Tahun 2019 – 2022, Peranan Teknologi Informasi dalam menunjang sistem operasional dan manajerial sangat penting dan memegang peranan esensial yang bertujuan:

1. Terwujudnya sistem informasi manajemen yang terintegrasi di lingkungan PT LRT Jakarta;
2. Terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan teknologi informasi serta terselenggaranya sumber daya secara efektif dan efisien.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

LRT realizes that the current digital era requires the Company to continue to be able to keep up with the times so that the business carried out by the Company has high competitiveness. To be able to keep up with digital developments, LRT has a policy that regulates Information Technology to make it easier for the Company to advance. The proper use of Information Technology is believed to be able to improve the Company's performance to compete with other companies.

Referring to the IT Master Plan of LRT Jakarta Year for 2019 – 2022, the role of Information Technology in supporting operational and managerial systems is very important and plays an essential role which aims to:

1. Realize an integrated management information system within PT LRT Jakarta
2. Create coordination, integration and synchronization in the planning, implementation, and management of information technology as well as the implementation of resources effectively and efficiently



PENGEMBANGAN TI DAN BIAYA INVESTASI TI

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan melakukan beberapa langkah terkait pengembangan teknologi informasi di Perusahaan seperti berikut:

1. ERP Dynamics 365, yang digunakan untuk mengelola data transaksi pengadaan, keuangan dan akutansi;
2. Pengembangan Aplikasi Mobile LRTJ, dengan menambahkan fitur Sahabat LRTJ e-Card (SLC) dan fitur Pengamatan dan Usaha Pengendalian (PEDULI);
3. IT Service Tiketing via Microsoft Planner, untuk mempermudah pelaporan kendala perangkat IT dan request dari user LRT Jakarta.

Perusahaan senantiasa melakukan investasi di bidang TI, sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam melakukan pengembangan teknologi untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Sepanjang tahun 2021, Perusahaan telah menginvestasikan anggaran di bidang TI sebesar Rp 470.683.360 yang lebih difokuskan pada perpanjangan license & pengembangan modul sistem ERP (Enterprise Resource Planing) Dynamic 365 serta Perpanjang Server Cloud Untuk Web & Aplikasi Mobile Apps LRT Jakarta. Nilai investasi tersebut turun sebesar 8,1% dibandingkan dengan tahun 2020. Berikut rincian realisasi investasi pada tahun 2021:

IT DEVELOPMENT AND IT INVESTMENT COSTS

Throughout 2021, the Company conducted several actions related to the development of information technology in the Company as follows:

1. ERP Dynamics 365, which is used to manage procurement, finance and accounting transaction data;
2. Development of the LRTJ Mobile Application, by adding the Sahabat LRTJ e-Card (SLC) feature and the Observation and Control Effort feature (PEDULI);
3. IT Service Ticketing via Microsoft Planner, to facilitate reporting of IT equipment problems and requests from Jakarta LRT users.

The Company continues to invest in IT, as a form of the Company's commitment to developing technology to create more effective, efficient, and productive business processes. Throughout 2021, the Company has invested a budget in the IT sector of IDR 470,683,360, which is focused more on extending the license & developing the Dynamic 365 ERP (Enterprise Resource Planing) system module and Extending the Cloud Server for Web & Mobile Apps LRT Jakarta. The investment value decreased by 8.1% compared to 2020. The followings are the details of investment realization in 2021:

Realisasi Biaya Investasi Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2021
 Realization of Information Technology Development Investment Costs in 2021

No	Pengadaan Procurement	Biaya (Rp) Costs
1	ERP Dynamics 365 ERP Dynamics 365	453.078.360
2	Pengembangan Aplikasi Mobile LRTJ (Biaya Sewa Server Cloud Per Tahun) LRTJ Mobile Application Development (Cloud Server Rental Fees Per Annum)	17.605.000
3	IT Service via Microsoft Planner	NIHIL (*in House)
Jumlah Total		470.683.360

Sesuai dengan pemetaan kebutuhan aplikasi dan sistem yang harus dibangun di lingkungan LRT Jakarta maka rencana yang disusun sesuai dengan IT Mapping LRT Jakarta adalah sebagai berikut:

RENCANA TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAM

In accordance with the mapping of application and system requirements that must be built in the Jakarta LRT environment, the plans prepared according to the Jakarta LRT IT Mapping are as follows:

FUTURE IT DEVELOPMENT PLAN

No	Aplikasi / Sistem Terintegrasi Integrated Systems/Applications	Deskripsi Description
1	Repository Prosedur/ Regulasi Perusahaan Repository Procedures/Company Regulations	Centralization of documents and regulations concerning the Company's business processes, and related external regulations or standards



No	Aplikasi / Sistem Terintegrasi Integrated Systems/Applications	Deskripsi Description
2	Sistem Manajemen Dokumen Document Management System	Monitoring dan penelusuran dokumen baru yang masuk dan keluar di PT LRT Jakarta. Sistem ini juga memiliki fungsi untuk membuat versi digital dari dokumen. Monitoring and tracking of incoming and outgoing new documents at PT LRT Jakarta. The system also has a function to create digital versions of documents.
3	Personal Integrated Dashboard	Sistem <i>personal dashboard</i> yang berfungsi sebagai portal aplikasi penghubung pengguna dengan sistem informasi Departemen IT LRTJ lainnya. A personal dashboard system that functions as an application portal that connects users with other LRTJ IT Department information systems.
4	Management Dashboard	Portal <i>monitoring</i> dan <i>control</i> yang diakses oleh manajemen, khususnya yang berhubungan dengan performansi sistem informasi penting. Misalnya: <i>finance monitoring</i> , <i>production monitoring</i> , dan lain-lain. Monitoring and control portal that is accessed by management, especially those related to the performance of important information systems. For example: finance monitoring, production monitoring, and others.
5	Integrated Asset Management System	Sistem manajemen aset perusahaan yang mencakup beberapa fitur kritis yang relevan bagi PT LRT Jakarta, misalnya <i>Asset Register</i> , <i>Automatic Work Scheduling</i> , <i>Equipment Criticality Analysis</i> , <i>Material Management</i> , dan lain-lain. The Company's asset management system includes several critical features relevant to PT LRT Jakarta, such as Asset Register, Automatic Work Scheduling, Equipment Criticality Analysis, Material Management, and others.
6	Compliance Information System	Aplikasi yang digunakan untuk membantu sertifikasi, assessment, dan evaluasi <i>compliance</i> terhadap standar atau regulasi eksternal, contohnya ISO 9001, ISO 14001, ISO 55000, ISO 27000, dan lain-lain. Applications used to assist certification, assessment, and evaluation of compliance with external standards or regulations, for example with ISO 9001, ISO 14001, ISO 55000, ISO 27000, and others.
7	Knowledge Management System	Sistem <i>knowledge-based</i> perusahaan baik yang berasal dari internal maupun hasil <i>knowledge transfer</i> . Ketika menggunakan pihak eksternal untuk melaksanakan suatu kegiatan. The Company's knowledge-based system, both internal, and the result of knowledge transfer, when using an external party to carry out an activity.
8	IT Service Request	Sistem <i>ticketing</i> terhadap layanan Departemen IT LRTJ, yang mencakup <i>software</i> , <i>hardware</i> dan <i>service desk</i> . Termasuk di dalamnya fitur penilaian kepuasan. Ticketing system for LRTJ IT Department services, which includes software, hardware and service desk. This includes a satisfaction rating feature.
9	Computer-based training	Sistem pelatihan elektronik berbasiskan komputer. Materi dan fitur dapat disesuaikan dengan permintaan dari Departemen HR. Computer based electronic training system. Materials and features can be customized upon request from the HR Department.
10	HR Integrated System	Pengelolaan SDM di lingkungan PT LRT Jakarta yang mencakup perencanaan, operasional, hingga terminasi, termasuk di dalamnya <i>performance review</i> . HR management within PT LRT Jakarta which includes planning, operations, to termination, including performance review.
11	HSE Monitoring	Aplikasi pengelolaan dan pengawasan terhadap performa HSE beserta indikator-indikator kuncinya. Application of management and monitoring of HSE performance and its key indicators.
12	Early Warning System	Retrieval informasi potensi kebencanaan (gempa, banjir, tsunami, dan lain-lain) dari sumber informasi resmi/terpercaya, misalnya BMKG. Retrieval of disaster potential information (earthquake, flood, tsunami, etc.) from official/reliable sources of information, such as Indonesian Agency for Meteorological, Climatological and Geophysics (BMKG).
13	Risk Management System	Sistem agregasi data-data risiko untuk mengevaluasi risiko bisnis PT LRT Jakarta Risk data aggregation system to evaluate PT LRT Jakarta's business risks
14	Sistem Informasi Anggaran dan Kontrak Budget and Contract Information System	Pengelola administrasi dan analisis keuangan PT LRT Jakarta dengan fitur <i>budgeting</i> , <i>planning</i> , dan lain-lain. Organizer of administration and financial analysis of PT LRT Jakarta with features of budgeting, planning, and others.



No	Aplikasi / Sistem Terintegrasi Integrated Systems/Applications	Deskripsi Description
15	Finance Monitoring System	Monitoring transaksi keuangan pengguna jasa transportasi PT LRT Jakarta, termasuk informasi yang berasal dari payment gateway eksternal. Monitoring of financial transactions of users of PT LRT Jakarta transportation services, including information from external payment gateways.
16	E-Procurement	Sistem Pengadaan barang/jasa secara elektronik dan berbasis web/internet. Electronic and web/internet-based procurement system for goods/services.
17	Digital Signature	Implementasi sistem tanda tangan elektronik pada dokumen-dokumen PT LRT Jakarta Implementation of the electronic signature system on PT LRT Jakarta documents
18	Situs Web, Public Information/Display, Mobile App LRT Jakarta, Dashboard SLC Website, public information/display, LRT Jakarta Mobile App, SLC Dashboard	Media penyampaian informasi kepada publik/pengguna jasa transportasi PT LRT Jakarta dan dashboard informasi pengguna jasa transportasi PT LRT Jakarta. Media for delivering information to the public/users of PT LRT Jakarta transportation services and dashboard of information for users of PT LRT Jakarta transportation services.

Berdasarkan rencana Teknologi Informasi diatas, maka timeline pengembangan aplikasi dan sistem integrasi direncanakan sebagai berikut:

Based on the Information Technology plan above, the application development timeline and integration system are planned as follows:

Aplikasi/Sistem Terintegrasi Integrated Systems/Applications	2022	2023	2024	2025	2026
Repository Prosedur/Regulasi Perusahaan Repository Procedures/Company Regulations	✓				
Sistem Manajemen Dokumen Document Management System	✓	✓			
Personal Integrated Dashboard	✓	✓	✓		
Management Dashboard	✓	✓	✓		
Integrated Asset Management System	✓	✓	✓	✓	✓
Compliance Information System				✓	✓
Knowledge Management System				✓	✓
IT Service Request	✓	✓			
Computer-based training			✓	✓	
HR Integrated System	✓				
HSE Monitoring	✓	✓			
Early Warning System	✓				
Risk Management System				✓	✓
Sistem Informasi Anggaran dan Kontrak Budget and Contract Information System	✓				
Finance Monitoring System	✓				
E-Procurement	✓				
Digital Signature	✓				
Situs Web, Public Information/Display, Mobile App LRT Jakarta, Dashboard SLC	✓				



LRT JAKARTA



LRT JAKARTA



2021 LAPORAN TAHUNAN
Annual Report



06

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY



KOMITMEN PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan unsur penting untuk mengembangkan sebuah perusahaan yang diharapkan dapat mengarahkan praktik bisnis yang bertanggung jawab sehingga dapat memastikan pengelolaan lingkungan kerja yang kondusif. Bagi Perusahaan, tata kelola perusahaan bukan hanya wujud kepatuhan regulasi, namun sebuah mekanisme yang mampu menjaga kesinambungan kinerja usaha.

Pandangan tersebut menjadikan Perusahaan untuk berkomitmen menjadikan implementasi GCG sebagai landasan terbentuknya sistem, struktur dan budaya Perusahaan yang mampu mengatasi perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif. Komitmen tinggi dalam penerapan GCG di lingkungan Perusahaan dipercaya dapat membuat Perusahaan bertahan dan tangguh sehingga mampu mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan dengan baik.

COMPANY'S COMMITMENT IN IMPLEMENTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is an important element to develop a company that is expected to conduct responsible business practices so as to ensure the management of a conducive work environment. For the Company, corporate governance is not only a form of regulatory compliance, but also a mechanism that is able to maintain sustainable business performance.

This viewpoint creates the Company commitment to make the implementation of GCG as the basis for the formation of a corporate system, structure and culture that is able to cope with changes in the competitive business environment. High commitment in implementing GCG within the Company is believed to be able to create the Company's sustainability and resilience which enables the Company to achieve its vision, mission and objectives properly.



Manajemen PT LRTJ sepenuhnya menyadari pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) untuk pencapaian kinerja Perusahaan. Manajemen Perusahaan senantiasa mengoptimalkan penerapan GCG secara berkesinambungan dengan terus melakukan penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik terbaik, pengujian keandalan, serta penyesuaian sistem dan prosedur sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi atau ketentuan yang berlaku. GCG menjadi penting karena pada dasarnya didesain untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham (Shareholders) maupun para Pemangku Kepentingan lainnya (Stakeholders).

TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan GCG dalam kegiatan usaha di PT LRT Jakarta dilakukan secara menyeluruh sehingga memiliki tujuan untuk:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan;
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian setiap organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan;
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya;
6. Meningkatkan daya saing perusahaan baik secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

DASAR PENERAPAN DAN PRINSIP GCG

Dalam menjalankan implementasi GCG di setiap lini bisnis, Perusahaan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan secara eksternal maupun internal, yakni:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 96 tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

The management of PT LRTJ is fully aware of the importance of Good Corporate Governance (GCG) implementation for the achievement of the Company's performance. The Company's management continues to optimize the implementation of GCG on an ongoing basis by continuously strengthening infrastructure to achieve best practices, reliability testing, as well as adjustments to systems and procedures in accordance with business developments and applicable regulations or provisions. GCG is important because it is basically designed to protect the interests of shareholders and other stakeholders.

PURPOSE OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG in business activities at PT LRT Jakarta is carried out thoroughly with the objectives to:

1. Encourage the achievement of corporate sustainability through a management practice based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and equality;
2. Encourage the empowerment of the function and independence of every organ of the Company, namely the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the General Meeting of Shareholders;
3. Encourage the shareholders, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors, to make decisions and carry out their actions based on high moral values and compliance with laws and regulations;
4. Encourage the emergence of awareness and corporate social responsibility towards the community and environmental sustainability, especially around the Company;
5. Optimize the value of the Company for shareholders, while still paying attention to other stakeholders;
6. Increase the competitiveness of companies both nationally and internationally, thereby increasing market confidence that can encourage investment flows and sustainable national economic growth.

BASIC IMPLEMENTATION AND PRINCIPLES OF GCG

In carrying out the implementation of GCG in every line of business, the Company refers to the policies stipulated externally and internally, namely:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Government Regulation No. 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises.
3. Decree of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta No. 96 of 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in Regional Owned Enterprises (BUMD) within the Special Capital Region of Jakarta.



4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT LRT Jakarta
5. Anggaran Dasar Perusahaan.

Perusahaan memandang bahwa penerapan GCG merupakan sebuah pilar kuat untuk memajukan pertumbuhan. Oleh sebab itu, Perusahaan berupaya untuk senantiasa menerapkan GCG terhadap seluruh pemangku kepentingan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kualitas dari penerapan praktik terbaik GCG dengan secara terus menerus dilakukan, melakukan pemutakhiran berbagai kebijakan, standar, pedoman, prosedur yang disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keadaan lingkungan bisnis, dan juga perkembangan usaha dan kinerja Perusahaan.

Penerapan GCG dalam Perusahaan mempunyai tujuan-tujuan strategis yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan secara lebih baik serta berkelanjutan. Penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan dilandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar bisnis Perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan. Kerangka kerja penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Penerapan kelima asas tersebut di lingkup Perusahaan adalah sebagai berikut:

4. PT LRT Jakarta Code of Corporate Governance
5. Company's Articles of Association.

The Company considers the implementation of GCG as a strong pillar to promote growth. Therefore, the Company strives to always implement GCG for all stakeholders by complying with the applicable laws and regulations. Improvement on the quality of the implementation of GCG best practices is continuously conducted by updating various policies, standards, guidelines, and procedures which are adapted to changes in applicable laws and regulations, the state of the business environment, as well as business development and Company performance.

The implementation of GCG in the Company possesses strategic objectives which are expected to be a means to achieve the Company's vision, mission and objectives in a better and sustainable manner. The implementation of GCG principles within the Company is based on the highest ethical standards and is one of the absolute requirements for the Company's business to grow sustainably. The framework for implementing GCG principles within the Company refers to 5 (five) basic principles, namely: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, as has been released in the General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

The implementation of these five principles within the Company are as follows:

Prinsip-prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Descriptions
Transparansi (Transparency)	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai Perusahaan. Transparency in carrying out the decision-making process and in presenting material and relevant information about the Company.
Akuntabilitas (Accountability)	Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Clarity of functions, task execution, and responsibilities of the Company's organs so that the management of the Company is carried out effectively.
Responsibilitas/Tanggung Jawab (Responsibility)	Kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Conformity in the management of the Company to the prevailing laws and regulations as well as sound corporate principles.
Kemandirian/Independensi (Independence)	Keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. A situation in which the Company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.
Kewajaran (Fairness)	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations.



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

JEJAK LANGKAH PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Berikut jejak langkah perkembangan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

2019

1. Pengesahan pedoman perilaku etika (Code of Conduct). Berdasarkan SK Direksi No. 002/SDM/111/XI/2019.
2. Pengesahan pedoman tata kelola perusahaan (Code of Corporate Governance). Berdasarkan SK Direksi No. 002/SPR/111/2019.
3. Rencana Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) LRT Jakarta tanggal 4 Februari 2019.
4. Pengesahaan Peraturan Kebijakan Teknologi Informasi dan Jaringan PT LRT Jakarta. Berdasarkan SK Direksi No. 001/DUK/111/VII/2019.

2020

1. Pengesahan Hubungan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board manual*). tanggal 11 Februari 2020
2. Pengesahan tim satuan tugas penanganan COVID-19 PT LRT Jakarta. Berdasarkan SK Direksi 001/ARS/111/XII/2020
3. Awal Pembentukan Komite Audit Komisaris PT LRT Jakarta. Berdasarkan SK Komisaris No. 41/SDM/111/II/2020 Tanggal 10 Maret 2020
4. Penetapan skor Tata Kelola Perusahaan sebagai salah satu KPI Perseroan. Berdasarkan Kontrak Kinerja Direksi dengan Pemegang Saham Tahun 2020
5. Pengesahan Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Berdasarkan SK Direksi No.001/AIT/111/I/2020
6. Pelaksanaan Audit ISO. Perseroan berhasil memperoleh sertifikasi ISO Terintegrasi dalam Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) yang berlaku sampai dengan tahun 2023
7. Pengesahan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Coporate Governance* (GCG) di Lingkungan PT LRT jakarta. Berdasarkan SK Direksi No.001.MRK/111/IV/2020

2021

1. Pengesahan Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT LRT Jakarta. Berdasarkan SK Direksi No. 002/ARS/111/IV/2021

MILESTONES OF THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The followings are the stages of the development of the implementation of Good Corporate Governance in the last 3 (three) years.

2019

1. Ratification of the code of conduct. Based on the Decree of the Board of Directors No. 002/SDM/111/XI/2019.
2. Approval of the Code of Corporate Governance. Based on the Decree of the Board of Directors No. 002/SPR/111/2019.
3. Plan for the Implementation of the Jakarta LRT Railway Safety Management System (SMKP), on February 4, 2019.
4. Ratification of PT LRT Jakarta's Information Technology and Network Policy Regulations. Based on the Decree of the Board of Directors No. 001/DUK/111/VII/2019.

2020

1. Ratification of the Board manual on February 11, 2020
2. Ratification of PT LRT Jakarta's COVID-19 handling task force team. Based on the Decree of the Board of Directors 001/ARS/111/XII/2020
3. Establishment of the Audit Committee of the Board of Commissioner of PT LRT Jakarta. Based on the Decree of the Commissioner No. 41/SDM/111/II/2020 March 10, 2020
4. The setting of GCG score as one of the Company's KPIs. Based on the Contract Management between the Board of Directors and Shareholders in 2020
5. Ratification of Gratification Control Guidelines. Based on the Decree of the Board of Directors No.001/AIT/111/I/2020
6. Implementation of ISO Audits. The Company has successfully obtained the Integrated ISO certification in Quality Management System (ISO 9001:2015) with validity period until 2023
7. Ratification of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in PT LRT Jakarta. Based on the Decree of the Board of Directors No.001.MRK/111/IV/2020

2021

1. Approval of the Anti-Bribery Management System Governance within PT LRT Jakarta. Based on the Decree of the Board of Directors No. 002/ARS/111/IV/2021



2. Pengesahan Kebijakan Anti Penyuapan PT LRT Jakarta yang berisikan Komitmen Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terkait Anti Penyuapan.
3. Pengesahan Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT LRT Jakarta.
4. Pembaharuan dokumentasi untuk Manajemen Risiko dan Kepatuhan menyesuaikan dengan Struktur Organisasi terbaru.

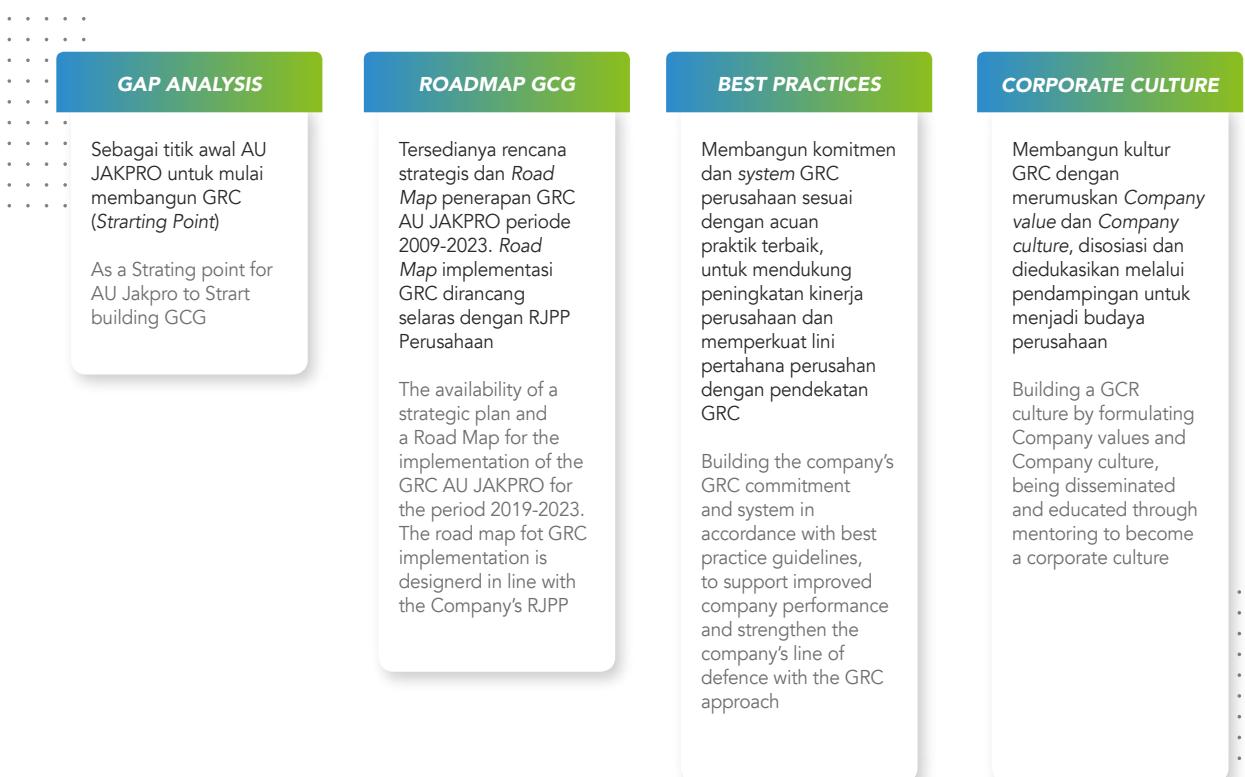
PETA JALAN: RENCANA PENGEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai wujud pengembangan GRC, Jakpro Group dan PT LRTJ telah melakukan *Gap Analysis* secara mandiri terhadap kondisi saat ini, penyusunan langkah-langkah kerja (*Area of Improvement*) sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang penerapan GRC dapat berjalan dengan baik. Langkah strategis (*Roadmap*) penerapan GRC yang akan dilakukan hingga tahun 2023 dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini:

2. Ratification of PT LRT Jakarta's Anti-Bribery Policy which contains the Commitment of the Board of Commissioners and Board of Directors regarding Anti-Bribery.
3. Ratification of the Anti-Bribery Management System Manual by the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT LRT Jakarta.
4. Updates on the documentation for Risk Management and Compliance according to the latest Organizational Structure.

ROADMAP: DEVELOPMENT PLAN FOR IMPLEMENTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE

As a form of GRC development, Jakpro Group and PT LRTJ have independently carried out a *Gap Analysis* of the current conditions, drafted work stages (*Area of Improvement*) so that it is hoped that, in the coming years, the implementation of the GRC can run well. The strategic steps (*Roadmap*) for the implementation of the GRC that will be carried out until 2023 can be explained through the image below:





PERKEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI TAHUN 2021

Uraian tentang perkembangan Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan di tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan dari aspek penilaian Pemegang Saham dan RUPS yaitu Pemegang saham melakukan pengesahan terhadap Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
2. Perbaikan dari aspek Dewan Komisaris berupa pemberian persetujuan terhadap Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta dilakukan sosialisasi. Selain itu, selama 2021 terdapat program pelatihan bagi Dewan Komisaris.
3. Perbaikan dari aspek Direksi dengan adanya Audit terhadap implementasi IT di Perusahaan beserta rekomendasi perbaikannya untuk perencanaan IT Master Plan selanjutnya. Perusahaan juga memenuhi komitmennya dalam melakukan pembayaran kepada Pemasok selama tahun 2021.

Selama tahun 2021, beberapa kegiatan GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan ISO 37001:2016.
2. Melakukan *self assessment* untuk pencapaian nilai GCG.
3. Pemberian *Induction* kepada Komisaris baru.
4. Pembuatan Pakta Integritas untuk seluruh Karyawan dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perusahaan.
5. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) untuk Direktur dan Komisaris yang baru diangkat.

ASESMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai bentuk upaya Perusahaan dalam meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan telah melakukan pengukuran atas penerapan prinsip GCG secara berkala. Secara umum, tujuan dilaksanakannya pengukuran tersebut adalah untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan GCG di Perusahaan melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perusahaan, melalui pemberian skor/ nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG Perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dan penerapannya pada Perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di Perusahaan sejalan dengan *best practices*.

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN 2020

The description of the development of Corporate Governance carried out in 2021 is as follows:

1. Improvement of the aspects of the assessment of Shareholders and the GMS, namely that the shareholders ratify the Company's Long Term Plan (RJPP).
2. Improvements from the aspect of the Board of Commissioners in the form of approval of the Company's Long Term Plan (RJPP) and Corporate Budget Work Plan (RKAP) as well as its dissemination. In addition, in 2021, there were training programs for the Board of Commissioners.
3. Improvement of the aspects of the Board of Directors with the existence of an audit of the IT implementation in the Company along with recommendations for improvement for planning the next IT Master Plan. The Company also fulfilled its commitment to make payments to Suppliers throughout 2021.

In 2021, the Company's GCG activities are as follows:

1. Implementation of the Anti-Bribery Management System based on ISO 37001:2016.
2. Conducted self-assessment for the achievement of GCG scores.
3. Induction of new Commissioners.
4. Made Integrity Pacts for all Employees and third parties who cooperate with the Company.
5. Reported State Administrators Wealth Report (LHKPN) for newly appointed Directors and Commissioners.

ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

As a form of the Company's efforts to improve the implementation of GCG principles, the Company has conducted periodic measurements of the implementation of GCG principles. In general, the objectives of carrying out these measurements are to:

1. Test and assess the implementation of GCG in the Company through the elaboration of the conditions of GCG implementation with the actual conditions applied in the Company, through the provision of scores on the implementation of GCG and the category of the quality of GCG implementation.
2. Identify the strengths and weaknesses of the Company's GCG implementation, as well as propose recommendations for improvement to reduce the gap between the GCG criteria and their application in the Company.
3. Provide recommendations for improvements to gaps found in the implementation of GCG in the Company in line with best practices.



4. Memantau konsistensi penerapan GCG pada Perusahaan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di Perusahaan.

Berdasarkan arahan PT Jakpro nomor : 176/KU0000/110/IX/2019 mengenai kewajiban seluruh Anak Perusahaan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Manajemen Risiko dan Kepatuhan maka Perusahaan menerapkan hal tersebut dan menggunakan acuan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara sebagai indikator penilaian. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap GCG sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan/assessment GCG dilakukan secara berkala oleh Perusahaan oleh assessor eksternal, dan tidak menutup kemungkinan diselingi oleh *self assessment* yang dilakukan oleh assessor internal Perusahaan.
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada *point* pertama, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Selama tahun 2021 penilaian Tata Kelola Perusahaan (GCG) dilakukan secara mandiri (*Self assessment*) dengan menggunakan indikator penilaian yang terdapat pada Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator / Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Perusahaan mencatat skor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada tahun 2021 sebesar 85,2 yang termasuk dalam predikat "Baik". Nilai ini meningkat 6,22 poin dari skor penilaian tahun 2020 yang tercatat sebesar 78,98 juga dengan predikat kualifikasi "Baik".

4. Monitor the consistency of GCG implementation in the Company and obtain input for the improvement and development of GCG policies in the Company.

Based on the instruction of PT Jakpro number: 176/KU0000/110/IX/2019 regarding the obligations of all Subsidiaries to implement Good Corporate Governance, Risk Management and Compliance, the Company applies the instruction and uses the reference to the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators / Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as an assessment indicator. The Company measures the following GCG aspects:

1. Implementation of Good Corporate Governance/GCG assessment is carried out periodically by the Company with the assistance of external assessors. Such implementation does not rule out the possibility of being interspersed with self-assessments conducted by the Company's internal assessors.
2. Evaluation (*review*), which is a program to describe the follow-up to the implementation of GCG in the Company, which is carried out in the following year after the assessment as referred to in the first point, which includes evaluation of the results of the assessment and follow-up on recommendations for improvement.

In 2021, the assessment of Corporate Governance (GCG) is carried out independently (*Self assessment*) using the assessment indicators contained in the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators / Parameters for Assessment and Evaluation of Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The Company recorded an assessment score of 85.2 on the implementation of Good Corporate Governance in 2021, which is categorized in the "Good" predicate. This value increased 6.22 points from the 2020 assessment score which was recorded at 78.98, also with the qualification predicate of "Good".



STRUKTUR TATA KELOLA

GOVERNANCE STRUCTURE



Sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa Perusahaan memiliki 3 (tiga) Organ Utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Kesemua Organ Utama tersebut wajib untuk saling menghormati tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Selanjutnya, Organ Utama tersebut didukung oleh organ-organ Perusahaan lainnya yang disebut Organ Pendukung. Organ Pendukung tersebut dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, merupakan organ tertinggi dalam Perusahaan yang berfungsi sebagai wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

In line with the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), it is stated that the Company has 3 (three) Main Organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. All of the Main Organs are required to respect each other's duties, responsibilities, and authorities in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association. Furthermore, the Main Organs are supported by other Company organs called Supporting Organs. The Supporting Organs can be formed by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS, is the highest organ in the Company that functions as a forum for Shareholders to make important decisions, by taking into account the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.



RUPS atau Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi, tanpa mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Dengan saling menghormati fungsi dan wewenang masing-masing Organ Perusahaan, diharapkan terciptanya kerja sama dan sinergi untuk mendukung pelaksanaan GCG yang berkesinambungan.

Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan, pemegang saham PT LRT Jakarta adalah PT Jakarta Propertindo (Perseroda) ("PT Jakpro") dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo ("PT JIP").

Ketentuan terkait RUPS

Dalam pelaksanaan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, RUPS memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipersiapkan secara memadai sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Untuk itu, setiap penyelenggaraan RUPS harus memperhatikan sebagai berikut:
 - a. Panggilan RUPS harus mencakup informasi yang lengkap dan akurat mengenai mata acara, tanggal, waktu, dan tempat RUPS;
 - b. Bahan dan/atau informasi mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS sehingga memungkinkan bagi Pemegang Saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Apabila bahan tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka bahan dan/atau informasi tersebut harus disediakan di kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan;
 - c. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;
 - d. Risalah RUPS harus tersedia di kantor Perusahaan dan Perusahaan menyediakan fasilitas agar Pemegang Saham dapat membaca atau memperoleh risalah tersebut.
2. Mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perusahaan terdiri dari:
 - a. RUPST mengenai persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, diselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup;
 - b. RUPS Lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perusahaan disebut RUPS Luar Biasa ("RUPSLB"), yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

The GMS or the Shareholders do not intervene in the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, without prejudice to the authority of the GMS to exercise its rights in accordance with the Articles of Association and the laws and regulations, including to replace or dismiss members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors. By respecting each other's functions and authorities, it is hopeful that the cooperation and synergy will be created to support the sustainable implementation of GCG.

As stated in the Company's Articles of Association, the shareholders of PT LRT Jakarta are PT Jakarta Propertindo (Perseroda) or ("PT Jakpro"), and PT Jakarta Infrastruktur Propertindo ("PT JIP").

Provisions regarding GMS

In implementing GCG, in accordance with its authorities and responsibilities, the GMS takes into account the following provisions:

1. The GMS must be held in accordance with the interests of the Company and take into account the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. In addition, it must be prepared adequately so that adequate resolution/s can be made. For this reason, each GMS implementation must pay attention to the following:
 - a. The summons to the GMS must include complete and accurate information regarding the agenda, date, time and place of the GMS;
 - b. Materials and/or information regarding each agenda item listed in the GMS summon are available at the Company's office from the date of the GMS summon so that it is possible for Shareholders to actively participate in the GMS and vote responsibly. If the material is not yet available when the summon for the GMS is made, then the material and/or information must be provided at the Company's office before the GMS is held;
 - c. An explanation of other matters relating to the agenda of the GMS can be given before and/or during the GMS;
 - d. Minutes of the GMS must be available at the Company's office, and the Company provides facilities so that Shareholders can read or obtain the minutes.
2. Referring to the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders ("GMS") in the Company consists of:
 - a. The AGMS regarding the approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, which is held annually and must be held no later than 6 months after the Company's fiscal year is closed;
 - b. Other GMS, hereinafter referred to in the Company's Articles of Association as Extraordinary GMS ("EGMS"), are General Meeting of Shareholders which may be held at any time based on the need for the benefit of the Company.



3. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi Perusahaan. Pemegang Saham atau RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang telah berlaku;
 - b. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak Laporan Dewan Komisaris dan Direksi, RUPS mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG;
 - c. Dalam menetapkan Auditor Eksternal, RUPS mempertimbangkan alasan pencalonan Auditor Eksternal yang disampaikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit;
 - d. Keputusan RUPS diambil dengan memperhatikan kepentingan wajar Pemegang Saham yang didasari pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen, RUPS memperhatikan kondisi kesehatan keuangan Perusahaan.
 4. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS yang mekanisme pelaksanaannya mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*;
 5. Dalam hal Direksi berhalangan maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
 6. Tata tertib RUPS akan diatur dan dibacakan pada pelaksanaan RUPST dan RUPSLB;
 7. Kewenangan RUPS antara lain:
 - a. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan;
 - d. Menyetujui dan mengesahkan atau menolak Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disusun oleh Direksi setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris;
 - e. Menetapkan besaran honorarium dan fasilitas bagi Dewan Komisaris serta gaji dan fasilitas lain bagi Direksi;
 - f. Menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;
3. GMS resolution-making is carried out fairly and transparently by taking into account the long-term and short-term interests of the Company in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association, which includes but not limited to:
 - a. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors appointed at the GMS consist of people who are fit and proper for the Company. Shareholders or the GMS appoint and dismiss the Commissioners and Directors in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association based on the prevailing Regulation of the Minister of Finance;
 - b. In making a decision of whether to accept or reject the Report of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the GMS considers the quality of the report related to GCG;
 - c. In appointing External Auditor, the GMS considers the reasons for the nomination of the External Auditor submitted by the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee;
 - d. GMS resolutions are taken by taking into account the reasonable interests of the Shareholders based on the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations;
 - e. In making decisions to award bonuses, incentives, and dividends, the GMS takes into account the financial health of the Company.
 4. The holding of the GMS is the responsibility of the Board of Directors. For this reason, the Board of Directors must prepare and hold a GMS, which its implementation mechanism refers to the Company's Articles of Association and the *Board Manual*;
 5. In the event that the Board of Directors is unable to attend, the GMS will be held by the Board of Commissioners or Shareholders in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association.
 6. The rules of the GMS will be regulated and read out at the AGMS and EGMS;
 7. The GMS's authorities include:
 - a. To stipulate amendment to the Company's Articles of Association;
 - b. To appoint and dismiss members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
 - c. To provide the necessary decisions to safeguard the long-term and short-term business interests of the Company in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association;
 - d. To approve and ratify or reject the Annual Report and Financial Statements prepared by the Board of Directors after being examined by the Board of Commissioners;
 - e. To determine the amount of honorarium and facilities for the Board of Commissioners as well as salaries and other facilities for the Board of Directors;
 - f. To appoint a Public Accounting Firm ("KAP") to audit the Company's Annual Financial Statements;



- g. Menyetujui atau menolak transaksi-transaksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan kekayaan Perusahaan sebagai jaminan utang yang bernilai sebesar sama dan/atau lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah ekuitas atau kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, seperti:
 - i) Mengagunkan atau menjaminkan aktiva tetap Perusahaan untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
 - ii) Penyertaan dan/atau pelepasan penyertaan modal pada perusahaan lain, perusahaan anak, perusahaan patungan;
 - iii) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan/atau pembubaran perusahaan anak/patungan.
- h. Menyetujui atau menolak tindakan kerja sama Perusahaan dengan Sadan Usaha atau entitas/pihak lain berupa penjaminan, kontrak penjaminan, kontrak manajemen, kerja sama lisensi, penyewaan aset atau kerja sama lainnya di mana transaksi tersebut bernilai sebesar sama atau melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perusahaan;
- i. Menyetujui aksi korporasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- j. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan;
- k. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
- l. Pemegang Saham minoritas memiliki mekanisme untuk menyelenggarakan RUPS minimal mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;
- m. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain dengan surat kuasa;
- n. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Persyaratan RUPS

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar;
2. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia;

GMS Requirements

1. GMS is held at the domicile of the Company, or at the location in where the Company conducts its main business activities as specified in the articles of association;
2. The location of the GMS as referred to in paragraph (1) must be located in the territory of the Republic of Indonesia;



3. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2), RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS;
 4. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar;
 5. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan, dengan persetujuan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
 6. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 7. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;
 8. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum;
 9. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. Rapat kedua diselenggarakan secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak rapat pertama dilangsungkan;
 10. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 11. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;
 12. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
3. In addition to holding the GMS, as referred to in paragraph (2), the GMS can also be conducted through teleconference media, video conferences, or through other electronic media facilities that allow all GMS participants to see and hear each other directly and participate in the GMS;
 4. The GMS has authorities that are not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits specified in the law and/or articles of association;
 5. In the GMS forum, shareholders are entitled to obtain relevant information, with the approval of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, as long as it relates to the agenda of the meeting and does not conflict with the interests of the Company;
 6. The GMS may be held if more than ½ (half) of the total shares with voting rights are present or represented, unless the law and/or articles of association determine a larger quorum;
 7. In the event that the quorum as referred to in paragraph (5) is not reached, a second GMS may be summoned;
 8. In the summons for the second GMS, it must be stated that the first GMS was held and did not reach a quorum;
 9. The summons as referred to in paragraph (7) must be made at least 7 (seven) days before the meeting is held, excluding the date of the summons and the date of the meeting. The second meeting shall be held as soon as 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) calendar days from the date the first meeting is held;
 10. The second GMS as referred to in paragraph (9) is valid and possesses the right to participate in the making of decisions if at the GMS, at least 1/3 (one third) of the total shares with voting rights are present or represented, unless the articles of association specify a larger quorum;
 11. In the event that the quorum for the second GMS as referred to in paragraph (10) is not reached, the Company may request the chairman of the district court whose jurisdiction covers the domicile of the Company at the request of the Company to establish a quorum for the third GMS;
 12. The summons for the third GMS must state that the second GMS has been held and has not reached a quorum and the third GMS will be held with a quorum that has been determined by the chairman of the district court.

Mekanisme Pemanggilan RUPS

1. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS;
2. Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri;
3. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

Mechanism of GMS Summon

1. The Board of Directors makes the summoning document to be sent to the shareholders prior to holding the GMS;
2. In certain cases, the summons for the GMS, as referred to in paragraph (1) may be made by the Board of Commissioners or shareholders based on the decision of the chairman of the district court;
3. The summon to the GMS is made within a period of no later than 14 (fourteen) days before the date the GMS is held, excluding the date of the invitation and the date of the GMS;



4. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ atau dengan iklan dalam Surat Kabar;
5. Dalam panggilan RUPS, dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;
6. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta;
7. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (5), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki oleh PT LRT Jakarta, bahwa pengambilan keputusan dalam RUPS berbunyi sebagai berikut:

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Risalah RUPS

1. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangi oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;
2. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Pemegang Saham memiliki hak dan tanggung jawab atas Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemegang Saham menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan kelangsungan hidup Perusahaan;
2. Perusahaan harus dapat menjamin terpenuhinya hak dan tanggung jawab Pemegang Saham didasari atas keadilan dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

4. Summons for GMS shall be made by Registered Letter and/or by advertisement in the Newspaper;
5. In the invitation to the GMS, the date, time, place, and agenda of the meeting are stated, along with a notification that the materials to be discussed at the GMS are available at the Company's office from the date the GMS summons is made until the date the GMS is held;
6. The Company is obliged to provide a copy of the material as referred to in paragraph (5) to shareholders free of charge if requested;
7. In the event that the summons does not comply with the provisions as referred to in paragraphs (3) and (4), and the summons does not comply with the provisions of paragraph (5), the resolutions of the GMS are still valid if all shareholders with voting rights are present or represented at the GMS and the decision was approved unanimously.

Decision Making Mechanism in GMS

Based on the Corporate Governance Guidelines owned by PT LRT Jakarta, the decision making in the GMS are as follow:

1. GMS resolutions are taken based on deliberation for consensus;
2. In the event that a resolution based on deliberation for consensus as referred to in paragraph (1) is not reached, the decision is valid if it is approved by more than ½ (one half) of the total votes cast, except when the law and/or article of association determines that a decision is valid if it is approved by a larger number of votes in favor.

Minutes of the GMS

1. Everytime the GMS is held, minutes of GMS must be drawn up and signed by the chairman of the meeting and at least 1 (one) shareholder appointed from and by the participants of the GMS;
2. The signature as referred to in paragraph (1) is not required if the minutes of the GMS are made with a notarial deed.

Rights and Obligations of Shareholders

Shareholders have rights and responsibilities over the Company in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association with due observance of the following principles:

1. Shareholders are aware that in exercising their rights and responsibilities, they must pay attention to the sustainability of the Company;
2. The Company must be able to guarantee the fulfillment of the rights and responsibilities of the Shareholders based on the principles of fairness and equality in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association.



Hak Pemegang Saham

1. Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan;
2. Hak untuk mengalihkan dan memindah tanggalkan kepemilikan saham;
3. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur;
4. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS;
5. Hak untuk memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Hak untuk memperoleh pembagian laba (*profit*) perusahaan;
7. Hak untuk memperoleh perlakuan setara (*equal treatment*) bagi para pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama.

Kewajiban Pemegang Saham

1. Pemegang Saham wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan-keputusan yang dibuat dalam RUPS;
2. Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengelolaan perusahaan.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, para pemegang saham telah mengambil Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 5 (lima) kali yang terdiri dari 1 (satu) kali Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan 4 (empat) kali Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

KPPS di Luar RUPS Tahunan

Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 001/KPPS/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, sebagaimana tercantum pada Akta Nomor 03 tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Wiwik Condro, S.H.

Shareholders' Rights

1. The right to obtain security guarantees on the method of registration of ownership;
2. The right to transfer and assign share ownership;
3. The right to obtain relevant information about the Company on a regular basis;
4. The right to participate and vote in the GMS;
5. The right to elect members of the board of commissioners and board of directors;
6. The right to acquire the Company's profit sharing;
7. The right to obtain equal treatment for shareholders who own shares with the same classification.

Shareholders' Obligations

1. Shareholders are required to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and the resolutions made in the GMS;
2. Shareholders have the responsibility to monitor the implementation of Good Corporate Governance principles in the Company management process.

Implementation of the 2021 GMS

Throughout 2021, the shareholders have made 5 (five) Shareholders' Resolution outside the General Meeting of Shareholders, consisting of 1 (one) Shareholders' Resolution outside the Annual General Meeting of Shareholders, and 4 (four) Shareholders' Resolution outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Shareholders' Resolution (KPPS) outside the Annual GMS

The followings are Shareholders' Resolution outside the Annual General Meeting of Shareholders Number 001/KPPS/VI/2021 dated June 22, 2021, as stated in Deed Number 03 dated July 2 2021 made before Notary Wiwik Condro, S.H.

No.	Keputusan Resolutions
1	Memutuskan, untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor R-068/2.0752/AU.1/06/0206-1/1/III/2021, tanggal 22-03-2021 (dua puluh dua Maret dua ribu dua puluh satu) dengan opini "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT LRT Jakarta tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". Decided, to approve the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2020 (two thousand and twenty), which have been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono as contained in the Independent Auditor's Report Number R- 068/2.0752/AU.1/06/0206-1/1/ III/2021, dated 03-22-2021 (the twenty-second of March two thousand and twenty-one) with the opinion "the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT LRT Jakarta as of 12-31-2020 (the thirty-first of December two thousand and twenty), as well as the Company's results of operations, and cash flows in conformity with generally accepted accounting principles".



No.	Keputusan Resolutions
2	<p>Memutuskan untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian Perseroan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan serta ketidak hati-hatian atas pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi.</p> <p>Decided to grant full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in Fiscal Year 2020 (two thousand and twenty) as long as these actions are reflected in the Annual Report and The Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2020 (two thousand and twenty). In the event that, in the future, it is found that illegal and criminal acts of abuse of office have caused losses to the Company, and are reasonably suspected to have been committed due to intentional and careless and disproportionate decision-making, the Board of Directors and the Board of Commissioners may be held personally liable.</p>
3	<p>Memutuskan, untuk menyetujui laba/rugi bersih Perseroan sebesar Rp1.444.301.298,- (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan Rupiah) sebagaimana perhitungan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor R-068/2.0752/AU.1/06/0206-1/III/2021, tanggal 22-03-2021 (dua puluh dua Maret dua ribu dua puluh satu), dan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Pemegang Saham menyetujui untuk tidak membagikan dividen.</p> <p>Decided to approve the Company's net profit/loss of IDR1,444,301,298, - (one billion four hundred forty four million three hundred one thousand two hundred ninety eight Rupiah) as calculated by the Public Accounting Firm, Kanaka Puradiredja, Suhartono, as contained in the Independent Auditor's Report Number R-068/2.0752/AU.1/06/0206-1/III/2021, dated 03-22-2021 (the twenty-second of March two thousand and twenty-one). In addition regardless of the provisions of Article 20 paragraph 1 of the Articles of Association, Shareholders agree not to distribute dividends.</p>
4	<p>Memutuskan, untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan menggunakan Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh Pemegang Saham Majoritas atau induk perusahaan.</p> <p>Decided to approve the appointment of a Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements for the 2021 (two thousand and twenty-one) Fiscal Year, and appoint the Public Accounting Firm hired by the Majority Shareholders or the parent company.</p>
5	<p>Memutuskan, untuk menyetujui besaran gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan tantiem/Insentif Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), yang perhitungannya ditetapkan oleh Pemegang Saham Majoritas dan akan disampaikan secara terpisah dalam suatu Surat Keputusan tersendiri.</p> <p>Decided to approve the amount of salary for the Board of Directors, honorarium for the Board of Commissioners and other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty one) as well as the tantiem/ work Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2020 (two thousand and two twenty), the calculation of which is determined by the Majority Shareholder and will be submitted separately in a separate Decree.</p>

KPPS di Luar RUPS Luar Biasa

- Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 001/KPPS/IV/2021 tanggal 16 April 2021, sebagaimana tercantum pada Akta Nomor 09 tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Wiwik Condro, S.H.

Shareholders' Resolution (KPPS) outside the Extraordinary GMS

- The followings are the Shareholders' Resolution outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders Number 001/KPPS/IV/2021 dated April 16, 2021, as stated in Deed Number 09 dated May 4, 2021, made before a Notary, Wiwik Condro, S.H.



No.	Keputusan	Resolutions
1	<p>Menyetujui untuk menambah anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat:</p> <p>-Tuan ROMY BARENO, lahir di Depok, tanggal 16-07-1982 (enam belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua), swasta, tinggal di Jakarta Selatan, Tanjung Mas Raya Blok VIII/20, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174091607820005, dikeluarkan tanggal 29-06-2018 (dua puluh sembilan Juni dua ribu delapan belas), Warga Negara Indonesia.</p> <p>Untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Keputusan tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>ANGGOTA DIREKSI:</p> <p>Direktur Utama : Tuan Insinyur WIJANARKO Direktur : Tuan G. INDARTO WIBISONO Direktur : Tuan RUDY HARTONO</p> <p>DEWAN KOMISARIS:</p> <p>Komisaris Utama : Tuan MUHAMMAD TAUFIQURRACHMAN Komisaris : Tuan ROMY BARENO</p>	<p>Approved to add members to the Company's Board of Commissioners by appointing:</p> <p>-Mr. ROMY BARENO, born in Depok, on 07-16-1982 (sixteenth of July one thousand nine hundred and eighty-two), a private sector employee, lives in South Jakarta, at Tanjung Mas Raya Blok VIII/20, RT 002, RW 001, Kelurahan Tanjung Barat, Jagakarsa District, a holder of Identity Card with ID number: 3174091607820005, issued on 06-29-2018 (the twenty-ninth of June two thousand and eighteen), an Indonesian citizen.</p> <p>For a period of 4 (four) years from the resolution, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:</p> <p>MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS: President Director : Mr. Ir. WIJANARKO Director : Mr. G. INDARTO WIBISONO Director : Mr. RUDY HARTONO</p> <p>BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner : Mr. MUHAMMAD TAUFIQURRACHMAN Commissioner : Mr. ROMY BARENO</p>
2	<p>Menyetujui untuk memberikan honorarium, serta tunjangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>	<p>Decided to approve the provision of honorarium, as well as other allowances based on the provisions of the legislation.</p>

2. Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 001/KPPS/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021, sebagaimana tercantum pada Akta Nomor 21 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Wiwik Condro, S.H.
2. The followings are Shareholders' Resolution outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders Number 001/KPPS/VII/2021 dated July 12, 2021, as stated in Deed Number 21 dated July 19, 2021, made before a Notary, Wiwik Condro, S.H.

No.	Keputusan	Resolutions
1	<p>Memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Muhammad Taufiqurrachman sebagai Komisaris Utama Perseroan, sejak ditandatanganinya keputusan tersebut dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.</p>	<p>Decided to honorably dismiss Mr. Muhammad Taufiqurrachman as the Company's President Commissioner, since the signing of the resolution, and the Company wishes to express the deepest gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as the Company's President Commissioner.</p>
2	<p>Memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Rudy Hartono sebagai Direktur Perseroan, sejak ditandatanganinya keputusan tersebut dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.</p>	<p>Decided to honorably dismiss Mr. Rudy Hartono as Director of the Company, since the signing of the resolution, and the Company wishes to express the deepest gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as Director of the Company.</p>
3	<p>Menyetujui untuk mengangkat Tuan M. Aprindy sebagai Plt Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal KPPS tersebut sampai dengan Pengangkatannya tersebut mendapatkan Persetujuan dari Gubernur berdasarkan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal KPPS ini menjadi sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI:</p> <p>Direktur Utama : Tuan Insinyur WIJANARKO Direktur : Tuan G. INDARTO WIBISONO</p> <p>DEWAN KOMISARIS:</p> <p>Plt Komisaris Utama : Tuan MUHAMMAD APRINDY Komisaris : Tuan ROMY BARENO</p>	<p>Decided to approve the appointment of Mr. M. Aprindy as Acting President Commissioner of the Company as of the date of the KPPS until his appointment obtains approval from the Governor based on the Laws and the Company's Articles of Association. Because of that, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, as of the date of this KPPS, is as follows:</p> <p>BOARD OF DIRECTORS : President Director : Mr. Ir. WIJANARKO Director : Mr. G. INDARTO WIBISONO</p> <p>BOARD OF COMMISSIONERS: Acting President Commissioner : Mr. MUHAMMAD APRINDY Commissioner : Mr. ROMY BARENO</p>



3. Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 001/KPPS/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, sebagaimana tercantum pada Akta Nomor 31 tanggal 17 September 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Wiwik Condro, S.H.
3. The following is the Shareholders' Resolution outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders Number 001/KPPS/VIII/2021 dated August 24, 2021, as stated in the Deed Number 31 dated September 17, 2021, made before a Notary, Wiwik Condro, S.H.

No.	Keputusan	Resolutions
1	<p>Memutuskan untuk mengangkat Tuan ADRIAN RUSMANA sebagai Plt Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal KPPS tersebut sampai dengan pengangkatannya tersebut mendapatkan persetujuan dari Gubernur berdasarkan Perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Sehingga susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal KPPS tersebut menjadi sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI:</p> <p>Direktur Utama : Tuan Insinyur WIJANARKO Direktur : Tuan G. INDARTO WIBISONO Plt. Direktur : Tuan ADRIAN RUSMANA Master Business Administration</p> <p>DEWAN KOMISARIS:</p> <p>Plt Komisaris Utama : Tuan MUHAMMAD APRINDY Komisaris : Tuan ROMY BARENO</p>	<p>Decided to appoint Mr. ADRIAN RUSMANA as Acting Director of the Company, as of the date of the KPPS until his appointment obtains approval from the Governor, based on the legislation and the articles of association of the Company.</p> <p>Because of that, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, as of the date of the KPPS, is as follows:</p> <p>BOARD OF DIRECTORS:</p> <p>President Director : Mr. Engineer WIJANARKO Director : Mr. G. INDARTO WIBISONO Acting Director : Mr. ADRIAN RUSMANA Master of Business Administration</p> <p>BOARD OF COMMISSIONERS:</p> <p>Acting President Commissioner : Mr. MUHAMMAD APRINDY Commissioner : Mr. ROMY BARENO</p>
<hr/>		
<hr/>		

4. Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 001/KPPS/XI/2021 tanggal 3 November 2021, sebagaimana tercantum pada Akta Nomor 07 tanggal 11 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Wiwik Condro, S.H.
4. The followings are Shareholders' Resolution outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders Number 001/KPPS/XI/2021 dated November 3, 2021, as stated in the Deed Number 07 dated November 11, 2021, made before a Notary, Wiwik Condro, S.H.

No.	Keputusan	Resolutions
1	<p>Memutuskan untuk menegaskan kembali sebagian isi Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta dengan Nomor 001/KPPS/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 (dua belas Juli dua ribu dua puluh satu), sebagaimana telah dibuat dalam akta Nomor 21 yang dibuat di hadapan WIWIK CONDRO Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang berbunyi: <i>"MENYETUJUI, untuk mengangkat Tuan M.APRINDY sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Sama ini sampai dengan pengangkatannya tersebut mendapatkan persetujuan dari Gubernur berdasarkan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan".</i></p>	<p>Decided to reaffirm part of the contents of the Shareholders' Resolution outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 001/KPPS/VII/2021 dated July 12, 2021 (the twelfth of July two thousand and twenty-one), as made in the deed Number 21 drawn up before WIWIK CONDRO Bachelor of Law, a Notary in Jakarta, which reads: <i>"APPROVED, to appoint Mr. M.APRINDY as Acting President Commissioner of the Company as of the date of this Shareholders' Resolution until his appointment obtains approval from the Governor based on the laws and articles of association of the Company".</i></p>
2	<p>Memutuskan untuk menegaskan kembali isi Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta dengan Nomor 001/KPPS/VIII/2021 tanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu), sebagaimana telah dibuat dalam akta tertanggal 17-09-2021 (tujuh belas September dua ribu dua puluh satu) Nomor 31 yang dibuat di hadapan WIWIK CONDRO Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang berbunyi: <i>"MEMUTUSKAN, untuk mengangkat Tuan ADRIAN RUSMANA sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Sama ini sampai dengan pengangkatannya tersebut mendapatkan persetujuan dari Gubernur berdasarkan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan".</i></p>	<p>Decided to reaffirm the contents of the Shareholders' Resolution outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta Number 001/KPPS/VIII/2021 dated 08-24-2021 (twenty-fourth of August two thousand and twenty-one), as has been made in the deed dated 09-17-2021 (seventeenth September two thousand and twenty-one) Number 31 drawn up before WIWIK CONDRO, Bachelor of Law, a Notary in Jakarta which reads: <i>"DECIDED, to appoint Mr. ADRIAN RUSMANA as Acting Director of the Company as of the date of this Shareholders' Resolution until his appointment obtains approval from the Governor based on the laws and articles of association of the Company".</i></p>



No.	Keputusan	Resolutions
3	Memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Tuan WIJANARKO sebagai Direktur Utama Perseroan dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan, adapun pemberhentian efektif sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham ditandatangani dengan pemberian pembebasan (<i>acquit et de charge</i>) setelah diterima dan disahkannya Laporan Kinerja Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).	Decided to honorably dismiss Mr. WIJANARKO as the Company's President Director with the highest appreciation for his contribution to the Company, and the dismissal is effective from the date this Shareholders' Decision is signed, with the granting of a full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) upon receipt and ratification of the Company's Performance Report for the Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty-one) at the General Meeting of Shareholders for the 2021 (two thousand and twenty-one) Fiscal Year.
4	Memutuskan untuk mengangkat Tuan HENDRI SAPUTRA sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham ditandatangani, sampai dengan pengangkatannya sebagai Direktur Utama tersebut mendapatkan persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.	Decided to appoint Mr. HENDRI SAPUTRA as Acting President Director of the Company, as of the date the Shareholders' Resolution is signed, until his appointment as President Director received approval from the Governor of DKI Jakarta in accordance with the provisions of the legislation and the articles of association of the Company.
5	Memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Tuan GENDOET INDARTO WIBISONO (Dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis G. INDARTO WIBISONO) sebagai Direktur Perseroan dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan, adapun pemberhentian efektif sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham ditandatangani dengan pemberian pembebasan (<i>acquit et de charge</i>) setelah diterima dan disahkannya Laporan Kinerja Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).	Decided to honorably dismiss Mr. GENDOET INDARTO WIBISONO (In the Identity Card, the name is written, G. INDARTO WIBISONO) as a Director of the Company with the highest appreciation for his contribution to the Company, and the dismissal is effective as of the date the Shareholders' Resolution is signed, with the granting of full release and discharge (<i>acquit et al. de charge</i>) upon receipt and ratification of the Company's Performance Report for Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty one) at the General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty one).
6	Memutuskan untuk mengangkat Tuan Aditia Kesuma Negara Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham ditandatangani, sampai dengan pengangkatannya sebagai Direktur Utama tersebut mendapatkan persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:	Decided to appoint Mr. Aditia Kesuma Negara Dalimunthe as Acting Director of the Company, starting from the date the Shareholders' Resolution is signed, until his appointment as President Director received approval from the Governor of DKI Jakarta in accordance with the provisions of the legislation and the articles of association of the Company. Because of that the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, as of the date of the Shareholders' Resolution, is as follows:
DIREKSI: Plt Direktur Utama : Tuan HENDRI SAPUTRA Plt Direktur : Tuan ADRIAN RUSMANA Plt Direktur : Tuan Aditia Kesuma Negara Dalimunthe		BOARD OF DIRECTORS: Acting President Director : Mr. HENDRI SAPUTRA Acting Director : Mr. ADRIAN RUSMANA Acting Director : Mr. Aditia Kesuma Dalimunthe Negara
DEWAN KOMISARIS: Plt Komisaris Utama : Tuan M. APRINDY Komisaris : Tuan ROMY BARENO		BOARD OF COMMISSIONERS: Acting President Commissioner : Mr. M. APRINDY Commissioner : Mr. ROMY BARENO

Realisasi Hasil Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku 2020 beserta upaya realisasinya:

Realization of the Results of the GMS Resolution of the Previous Year

The following is information regarding the resolutions of the GMS for the fiscal year 2020, and their realization efforts:



Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS 16 Juli 2020
Shareholders' Resolution Outside the GMS, July 16, 2020

Hasil Keputusan Resolutions	Sudah/Belum Terlaksana Has/Has not been realized	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by Management
--------------------------------	---	---

Menyetujui pemberhentian tuan Mohammad Hanief Arie Setianto tersebut dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan mengangkat tuan Muhammad Taufiqurrachman, SE tersebut selaku Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Dengan dilakukan pengangkatan tersebut di atas, Susunan Pengurus Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: M Taufiqurrachman

Direksi:

Direktur Utama: Wijanarko

Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis: Rudy Hartono

Direktur Operasi dan Perawatan: G Indarto Wibisono

Selanjutnya para pemegang saham memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menuangkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini ke dalam suatu akta Notaris, serta membuat perubahan yang disyaratkan guna penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Approved the dismissal of Mr. Mohammad Hanief Arie Setianto from his position as Commissioner of the Company and appointed Mr. Muhammad Taufiqurrachman, SE, as the new Commissioner of the Company for a term of office of 4 (four) years as of the closing of the Meeting.

With the above appointment, the complete composition of the Company's Management is as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner : M Taufiqurrachman

Directors:

President Director : Wijanarko

Director of Finance and Business Development: Rudy Hartono

Director of Operations and Maintenance: G Indarto Wibisono

Furthermore, the shareholders grant the power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to interpret this Shareholders' Resolution outside this General Meeting of Shareholders into a notarial deed, as well as to make the required changes to comply with the provisions.

✓: sudah terlaksana / x: Belum terlaksana

✓: has been realized / x: has not been realized

✓
Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 29 tahun 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

The resolution takes effect immediately, and has been legally institutionalized through Deed No. 29 year 2020 regarding the Minutes of the General Meeting of Shareholders



RUPS Tahunan 16 Juli 2020
AGMS, July 16, 2020

Hasil Keputusan Resolutions	Sudah/Belum Terlaksana Has/Has not been realized	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by Management
Keputusan Mata Acara 1: Menyetujui Laporan Tahunan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020. Resolutions of the 1 st Meeting Agenda: Approved the Annual Report and approved the Supervisory Task Report that has been carried out by the Board of Commissioners for the 2020 Fiscal Year.	✓	Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 29 tahun 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham The resolution takes effect immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 29 of 2020 concerning Minutes of the General Meeting of Shareholders
Keputusan Mata Acara 2: Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREJA, SUHARTONO sesuai dengan laporannya No. R-175/2.0752/AU.1/06/0207-1/1/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal yang Material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya dengan disetujuiya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. Resolutions of the 2 nd Meeting Agenda: To ratify the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2020 which has been audited by the Public Accounting Firm KANAKA PURADIREJA, SUHARTONO in accordance with its report No. R-175/2.0752/AU.1/06/0207-1/1/V/2020 dated May 4, 2020 with the opinion 'present fairly in all material respects' in accordance with financial accounting standards in Indonesia.	✓	Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 63 tahun 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham The resolution takes effect immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 63 of 2021 concerning Minutes of the General Meeting of Shareholders
Furthermore, with the approval of the Annual Report and the ratification of the Company's Financial Statements for the 2019 Fiscal Year, the GMS granted full discharge and release of responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Directors for management actions and to all members of the Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out during the Fiscal Year ending on December 31, 2019, to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements.	✓	
Keputusan Mata Acara 3: Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan Tahun Buku 2019. Resolutions of the 3 rd Meeting Agenda: Stipulation on the use of the Company's net profit/loss for the 2019 Fiscal Year.	✓	Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 29 tahun 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham The resolution takes effect immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 29 of 2020 concerning Minutes of the General Meeting of Shareholders
Keputusan Mata Acara 4: Untuk Penetapan remunerasi untuk Tahun Buku 2020 dan insentif kinerja untuk Tahun Buku 2019 bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Resolutions of the 4 th Meeting Agenda: Stipulation on remuneration for Fiscal Year 2020 and performance incentives for Fiscal Year 2019 for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.	✓	Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 63 tahun 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham The resolution takes effect immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 63 of 2021 concerning Minutes of the General Meeting of Shareholders
Keputusan Mata Acara 5: Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020. Resolutions of the 5 th Meeting Agenda: Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2020 Fiscal Year.	✓	Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 63 tahun 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham The resolution takes effect immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 63 of 2021 concerning Minutes of the General Meeting of Shareholders

✓: sudah terlaksana / x: Belum terlaksana

✓: has been realized / x: has not been realized



Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS 21 Oktober 2020
Shareholders' Resolution Outside the GMS, October 21, 2020

Hasil Keputusan Resolutions	Sudah/Belum Terlaksana Has/Has not been realized	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by Management
Keputusan Mata Acara 1: Menyetujui perubahan nilai nominal saham yang sebelumnya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) Resolutions of the 1 st Meeting Agenda: Approved the change in the nominal value of the shares which were previously IDR1.000.000,- (one million Rupiah) per share to IDR100.000,- (one hundred thousand Rupiah) per share	✓	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 75 tahun 2020 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Penerbitan saham baru dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan telah dibukukan dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan. Penerbitan saham baru sejumlah 3.338.934 lembar saham dengan nominal Rp100.000,- per saham kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dalam rangka mengkonversi setoran modal yang telah dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo menjadi Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh dalam Perseroan. The decision takes effect immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 75 of 2020 concerning the Statement of Shareholders' Decisions Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders. The issuance of new shares and the increase in issued and paid-up capital have been recorded in the Company's Financial Statements and Annual Report. Issuance of new shares totaling 3,338,934 shares with a nominal value of IDR100,00,- per share to PT Jakarta Propertindo (Perseroda) and PT Jakarta Infrastruktur Propertindo in order to convert the paid-up capital that has been made by PT Jakarta Propertindo (Perseroda) and PT Jakarta Infrastruktur Propertindo become Fully Issued and Paid-Up Capital in the Company.
Keputusan Mata Acara 2: Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak 1.838.934 (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat) lembar saham atau dengan nominal Rp183.893.400.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus Sembilan puluh tiga ratus empat ratus ribu Rupiah). Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan serta modal disetor dalam Perseroan, maka Para Pemegang Saham setuju untuk mengubah Anggaran Dasar Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perseroan tentang Modal. Resolutions of the 2 nd Meeting Agenda: Approved the increase in the issued and paid-up capital of the Company by 1,838,934 (one million eight hundred thirty eight thousand nine hundred and thirty four) shares or with a nominal value of IDR183,893,400,000,- (one hundred eighty three billion eight hundred ninety three million four hundred thousand Rupiah). In relation with the increase in the issued and paid-up capital of the Company, the Shareholders agree to amend Article 4 paragraphs (1) and (2) of the Company's Articles of Association regarding Capital.	✓	
Keputusan Mata Acara 3: Menyetujui Penerbitan saham tersimpan sebesar 1.838.934 (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar saham dengan nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per lembar saham yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Resolutions of the 3 rd Meeting Agenda: Approved the issuance of 1,838,934 (one million eight hundred thirty eight thousand nine hundred thirty four) shares of stock with a nominal value of IDR100,00,- (one hundred thousand Rupiah) per share, all of which will be subscribed by PT Jakarta Propertindo (Perseroda).	✓	

✓: sudah terlaksana / x: Belum terlaksana

✓: has been realized / x: has not been realized



DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan masukan dan rekomendasi serta nasihat kepada Direksi dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik dan tujuan Perusahaan.

KRITERIA KOMISARIS

Berdasarkan *Board Manual*, kriteria yang harus dipenuhi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Warga Negara Indonesia;
3. Sehat secara jasmani dan rohani;
4. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
5. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
6. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
7. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
8. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dinyatakan pailit;
10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
11. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;
12. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
13. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) di antara pemegang jabatan komisaris, antar Direksi dengan Komisaris, baik dalam 1 (satu) perseroan dan antar Badan Usaha Milik Daerah 1 (satu) Provinsi.
14. Pengangkatan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

The Board of Commissioners is the Company's Organ which is tasked with conducting general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association, providing advice to the Board of Directors, and ensuring that the Company implements GCG principles. In addition, the Board of Commissioners is obliged to provide input and recommendations as well as advice to the Board of Directors by taking into account the best interests and objectives of the Company.

CRITERIA OF THE BOARD OF THE COMMISSIONERS

Based on the Board Manual, the criteria that must be met by the Board of Commissioners are as follows:

1. An Individual;
2. Indonesian citizens;
3. Physically and mentally healthy;
4. Able to provide sufficient time to carry out their duties;
5. Minimum S1 diploma (S1/Bachelor Degree);
6. Maximum age of 60 (sixty) years at the time of first registration;
7. Have expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good behavior and high dedication to advancing and developing the company;
8. Is knowledgeable in the implementation of Regional Government;
9. In the 5 (five) years prior to his appointment and during his/ her tenure, he/she has never been declared bankrupt and has never been a member of the Board of Directors, Supervisory Board, or Board of Commissioners which was found guilty of causing a business entity to be declared bankrupt;
10. Never been convicted of a criminal act that was detrimental to state finances and/or related to the financial sector;
11. Have knowledge and/or expertise in the field required by the Company;
12. Not currently in charge of a political party, a candidate for regional head or candidate for deputy regional head, and/ or candidate for legislative member;
13. Do not have a blood family relationship up to the third degree, either according to a straight line or a sideline or an affinity (son-in-law or brother-in-law) between the commissioner, between the Board of Directors and the Commissioner, both within 1 (one) company and between Regional Owned Enterprises within 1 (one) Province;
14. The appointment of the Commissioners is carried out by the GMS.



- Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham dari calon-calon yang diusulkan oleh Para Pemegang Saham.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

- Masa jabatan anggota Komisaris adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS memberhentikan sewaktu-waktu;
- Apabila seorang Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan Komisaris yang digantikannya;
- Masa jabatan Komisaris berakhir apabila:
 - Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - Mengundurkan diri;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - Meninggal dunia;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Merujuk pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* PT LRT Jakarta disebutkan bahwa Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, dan apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

Berikut disampaikan komposisi Dewan Komisaris PT LRT Jakarta per 31 Desember 2021.

- Commissioners are appointed by the Shareholders from the candidates proposed by the Shareholders.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

- The term of office for members of the Board of Commissioners is a maximum of 4 (four) years without prejudice to the rights of the GMS to dismiss them at any time;
- If a Commissioner resigns or is dismissed before his/her term of office ends, then the term of office of his/her replacement is the remaining term of office of the Commissioner he/she replaces;
- The term of office of the Commissioner ends when he/she:
 - Loses his/her Indonesian Citizenship;
 - Resigns;
 - Is no longer meet the requirements of the applicable legislation;
 - Passed away;
 - Is dismissed based on the resolution of the GMS.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Referring to the Articles of Association and the Board Manual of PT LRT Jakarta, it is stated that the Board of Commissioners consists of one or more members of the Board of Commissioners, and if more than one member of the Board of Commissioners is appointed, one of them can be appointed as the President Commissioner.

The Following is the Composition of the Board of Commissioners of PT LRT Jakarta as of December 31, 2021.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Mohamad Aprindy*	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT LRT Jakarta No. 001/KPPS/VII/2021 Shareholders' Resolution outside the General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 001/KPPS/VII/2021	Pertama 1 st Term
Romy Bareno**	Komisaris Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham 001/KPPS/IV/2021 Shareholders' Resolution outside the General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 001/KPPS/IV/2021	Pertama 1 st Term
Tatak Ujiyati	Komisaris Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham 002/KPPS/XII/2021 Shareholders' Resolution outside the General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 002/KPPS/XII/2021	Pertama 1 st Term

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

Perusahaan memiliki *Board Manual* sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta mengelola hubungan dengan Direksi. *Board Manual* Dewan Komisaris telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 11 Februari 2020.

BOARD MANUAL

The Company possesses a Board Manual that serves as a guide for the Board of Commissioners in carrying out their duties, responsibilities and authorities as well as managing relationships with the Board of Directors. The Board of Commissioners' Board Manual has been signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors on February 11, 2020.



Adapun *Board Manual* Dewan Komisaris mengatur tentang:

1. Persyaratan dan komposisi, keanggotaan dan masa jabatan Dewan Komisaris
2. Program Pengenalan dan Penilaian Kapabilitas
3. Susunan, tugas dan wewenang Komisaris
4. Rapat Dewan Komisaris
5. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
6. Etika Jabatan Dewan Komisaris
7. Organ pendukung Dewan Komisaris

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Tugas, tanggung jawab hingga wewenang Dewan Komisaris telah tercantum dalam *Board Manual* Dewan Komisaris. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah:

Tugas Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.
2. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
3. Bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memantau efektifitas praktek GCG yang diterapkan oleh Perseroan.
5. Memberikan rekomendasi tertulis terhadap perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS.
6. Memberikan pendapat dan menandatangani Rencana Kerja Jangka Panjang Perseroan yang dipersiapkan dan disampaikan oleh Direksi.
7. Memberikan pendapat dan menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, selambat-lambatnya pada hari ke 30, bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai.
8. Memberikan pendapat dan saran bagi RUPS dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
9. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada waktu diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
10. Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
11. Membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
12. Mengkaji efektifitas sistem pengendalian internal.
13. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh Perseroan dalam hubungannya dengan risiko usaha.

The Board Manual of the Board of Commissioners regulates:

1. Requirements and composition, membership and term of office of the Board of Commissioners
2. Capability Recognition and Assessment Program
3. Composition, duties and authorities of the Commissioners
4. Board of Commissioners' meetings
5. Board of Commissioners Performance Assessment
6. Professional Ethics of the Board of Commissioners
7. Board of commissioners supporting organs

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners have been listed in the Board Manual of the Board of Commissioners. The duties and authorities of the Board of Commissioners are:

Duties of the Board of Commissioners

1. Supervise the Company's management policies and provide advice to the Board of Directors in carrying out the Company's management activities.
2. Perform duties, responsibilities and authorities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations and/or based on the resolutions of the GMS.
3. Act in the interest of the Company and be responsible to the General Meeting of Shareholders.
4. Monitor the effectiveness of GCG practices implemented by the Company.
5. Provide written recommendations on the actions of the Board of Directors which must be approved by the GMS.
6. Provide opinion and sign the Company's Long-Term Work Plan which is prepared and submitted by the Board of Directors.
7. Provide opinions and sign the Company's Annual Work Plan and Budget, not later than the 30th day, the first month after the new fiscal year begins.
8. Provide opinions and suggestions for the GMS in terms of the appointment and dismissal of the Board of Directors.
9. Provide feedback on the Board of Directors' periodic reports as well as when needed regarding the development of the Company.
10. Keep up with the development of the Company's activities and in the event that the Company shows signs of deterioration, immediately report to the GMS accompanied by suggestions regarding corrective steps that must be taken.
11. Establish an Audit Committee that works collectively and functions to assist the Commissioners in carrying out their duties.
12. Review the effectiveness of the internal control system.
13. Conduct periodic assessments and provide recommendations on business risks and the type and amount of insurance covered by the Company in relation to business risks.



14. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
15. Mengawasi agar Perseroan dalam mengungkapkan informasi penting kepada pemegang saham, Otoritas Bursa serta Instansi Pemerintah terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
16. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
17. Mengusulkan kepada RUPS, Akuntan Publik selaku Auditor Eksternal yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
18. Mengusulkan sistem evaluasi kinerja Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasi yang sesuai bagi Anggota Komisaris dan Direksi kepada RUPS. Dalam menjalankan kewajiban ini, Komisaris dapat dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
19. Mengusulkan sistem nominasi dan seleksi bagi calon Anggota Komisaris dan Direksi, dan mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan. Dalam menjalankan kewajiban ini, Komisaris dapat dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
20. Meminta pertanggungjawaban dari Komisaris yang mengundurkan diri sebagai Anggota Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
21. Menyusun rencana kerja Komisaris untuk periode tahun berikutnya.
22. Memastikan bahwa eksternal auditor maupun internal auditor dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perseroan yang perlu untuk melaksanakan tugasnya.
23. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan.
24. Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
14. Supervise the implementation of the Company's Work Plan and Budget.
15. Oversee the Company in disclosing important information to shareholders, the Exchange Authority and relevant Government Agencies in accordance with the prevailing laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.
16. Perform other supervisory duties as determined by the GMS.
17. Propose to the GMS, the Public Accounting Firm to serve as the External Auditor who will conduct an examination of the Company's books.
18. Propose a performance evaluation system for the Board of Commissioners and Board of Directors as well as an appropriate remuneration system for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors to the GMS. In carrying out this obligation, the Commissioner can be assisted by the Nomination and Remuneration Committee.
19. Propose a nomination and selection system for candidates for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and submit it to the GMS for approval. In carrying out this obligation, the Commissioner can be assisted by the Nomination and Remuneration Committee.
20. Request accountability from the Commissioners who resigned as a Member of the Commissioner since his appointment until the date of approval of the resignation.
21. Prepare a work plan for the Board of Commissioners for the following year.
22. Ensure that the external auditors, as well as the internal auditors, and the Audit Committee have access to information regarding the Company that is necessary to carry out their duties.
23. Maintain the confidentiality of information obtained while serving as a Member of the Commissioner in accordance with the provisions of the legislation.
24. Comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.

Wewenang Dewan Komisaris

1. Memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap.
2. Menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang terkait dengan pengurusan Perseroan kepada Direksi.
3. Meminta secara tertulis kepada Direksi untuk memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern.
4. Meminta bantuan tenaga ahli untuk hal dan waktu tertentu dan/atau membentuk Komite Audit dan/atau komite lainnya atas beban Perseroan.
5. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Direktur dari jabatannya apabila Direktur tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan

Authorities of the Board of Commissioners

1. Obtain access to Company information in a timely and complete manner.
2. Inquire and request for an explanation on all matters related to the management of the Company to the Board of Directors.
3. In writing, request the Board of Directors to provide information on the results of the assessment, or the results of the implementation of the duties of the Internal Audit Unit.
4. Request expert assistance for certain matters and times and/or form an Audit Committee and/or other committees at the expense of the Company.
5. Temporarily dismiss one or more Directors from their positions if the Director acts contrary to the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations, or



peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Pemberhentian sementara itu diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan dari tindakan tersebut.

6. Memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya persediaan barang memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan surat berharga lainnya.

neglects his/her obligations, or when there are urgent reasons for the Company. The temporary dismissal is notified to the person concerned accompanied by the reasons for the action.

6. Gain entry to buildings, yards, or other places used or controlled by the Company, and possesses the right to check all books, letters and other evidence of goods inventory, check and match the condition of cash (for verification purposes), and other securities.

PEMBAGIAN TUGAS ANTAR DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan atas kinerja Perusahaan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berjalan efektif, maka masing-masing Dewan Komisaris membagi tugas sebagaimana yang telah diatur di antara anggota Dewan Komisaris. Pembagian tugas antar Dewan Komisaris disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan lingkup usaha Perusahaan.

DIVISION OF DUTIES BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS

To carry out the supervisory duties on the Company's performance and ensure that the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to operate effectively, each Board of Commissioners divides the duties as stipulated among the members of the Board of Commissioners. The division of duties between the Board of Commissioners is adjusted to the capability and expertise of each member of the Board of Commissioners by taking into account the Company's business scope.

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervision Duties
Mohamad Aprindy	Komisaris Utama President Commissioner	Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris: 1. Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Sistem Pengendalian Intern 2. Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Manajemen Risiko 3. Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Sistem Teknologi Informasi 4. Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia 5. Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan 6. Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Pengadaan Barang Jasa 7. Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Mutu dan Pelayanan 8. Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perjanjian Pihak Ketiga 9. Pengawasan Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Audit Internal
Romy Bareno	Komisaris Commissioner	Board of Commissioners Supervision Policy: 1. Supervision and Provision of Advice on Internal Control System Policies 2. Supervision and Provision of Advice on Risk Management Policies 3. Supervision and Provision of Advice on Information Technology Systems 4. Supervision and Provision of Advice on Human Resource Management Policies 5. Supervision and Provision of Advice on Accounting Policies and Reporting 6. Supervision and Provision of Advice on Policies for the Procurement of Goods and Services 7. Supervision and Provision of Advice on Quality and Service Policies 8. Supervision and Provision of Advice on Compliance with Third Party Regulations and Agreements 9. Supervision of the Effectiveness of the Implementation of External Audit and Internal Audit
Tatak Ujiyati	Komisaris Commissioner	



ETIKA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisaris harus berpedoman pada standar etika berikut ini:

1. Dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perseroan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.
2. Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perusahaan lain serta melaporkan saham yang dimiliki dan setiap perubahan kepemilikannya kepada Perseroan beserta saham itu diperoleh.
3. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
4. Wajib mengungkapkan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan Anggota Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.
5. Dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan jabatan rangkap sebagai anggota Direksi Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau pejabat lain yang menimbulkan benturan kepentingan.
6. Dilarang untuk mengambil peluang bisnis Perseroan untuk kepentingan dirinya sendiri.
7. Dilarang menggunakan aset dan informasi Perseroan atau jabatannya selaku anggota Komisaris untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan.
8. Dilarang berkompetisi dengan Perseroan dengan menggunakan informasi dari dalam (*inside information*) untuk mendapatkan keuntungan bagi diri pribadi.
9. Dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Komisaris yang ditentukan oleh Pemegang Saham atau RUPS.
11. Dilarang menerima suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hibah, sumbangan atau *entertainment*, tidak boleh dilakukan dalam suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.

PROFESSIONAL ETHICS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties and functions, the Commissioner must be guided by the following ethical standards:

1. It is prohibited to take actions that have a conflict of interest and take personal benefits, either directly or indirectly, from the decisions and activities of the Company concerned other than legitimate income.
2. It is mandatory to fill out a Special Register containing his/her ownership of shares and/or his/her family share ownership in the Company and other companies and report the shares owned and any changes in ownership to the Company and the shares obtained.
3. It is prohibited to use the position for personal interest or for the benefit of other people or parties that are contrary to the interests of the Company.
4. He/she must disclose any event of a conflict of interest, and the member of the Board of Commissioners concerned may not be involved in the Company's decision-making process related to this matter.
5. It is prohibited to hold more than 2 (two) positions on the Board of Commissioners or the Supervisory Board and concurrent positions as members of the Board of Directors of the Company, State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises, or other Offices in accordance with the legislation, and/or serves in other positions which give rise to a conflict of interest.
6. It is forbidden to take the Company's business opportunities for its own benefit.
7. It is prohibited to use the assets and information of the Company, or his position as a member of the Board of Commissioners, for personal interests outside the provisions of laws and regulations and Company policies.
8. It is prohibited to compete with the Company by using inside information for personal gain.
9. It is prohibited to give, or offer, or receive, whether directly or indirectly, anything of value to, or from a customer, or a Government official, to influence, or as a form of gratification, and other actions in accordance with the laws and regulations.
10. It is prohibited to conduct transactions that have a conflict of interest and take personal benefits from the Company's activities other than the salary and facilities he receives as a member of the Board of Commissioners, as determined by the Shareholders or the GMS.
11. It is forbidden to accept a token of gratitude in business activities, such as grants, donations or entertainment, and must not be done in a situation that can be considered as an improper act.



12. Harus mengungkapkan informasi dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan.
13. Wajib mematuhi Pedoman GCG, Anggaran Dasar, Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
14. Harus mendorong terciptanya perilaku yang baik dan menjunjung tinggi etika bisnis yang tercantum dalam panduan GCG di Perseroan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan Pekerja Perseroan
15. Apabila diperlukan Perseroan dapat mengangkat Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau Pemegang Saham.
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

PROGRAM PENGENALAN BAGI KOMISARIS BARU

Sebagaimana yang telah tercantum di dalam *Board Manual* Dewan Komisaris PT LRT Jakarta, maka anggota Dewan Komisaris yang baru wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan oleh Direktur Utama atau Komisaris atau pejabat yang ditunjuk.

Program pengenalan Perusahaan bagi Komisaris Baru memiliki tujuan untuk memberikan memaparan ruang lingkup Perusahaan dan informasi penting lainnya untuk menunjang peran anggota baru tersebut. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis, ke fasilitas Perseroan, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan. Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi dan susunan Dewan Komisaris di tahun 2021, Perusahaan mengadakan pengenalan Komisaris Baru dengan rincian waktu pelaksanaan dan agenda sebagai berikut:

12. He/she must disclose information and always maintain the confidentiality of the information entrusted to him in accordance with the provisions of the law and company policies.
13. He/she must comply with the GCG Guidelines, Articles of Association, the prevailing Legislation and Company policies that have been determined.
14. He/she must encourage good behavior and uphold business ethics as stated in the GCG guidelines in the Company. One way is to make himself a good role model for the Board of Directors and Employees of the Company
15. If necessary, the Company may appoint an Independent Commissioner from outside the Company under the following conditions:
 - a. He/she is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner.
 - b. He/she does not own shares, either directly or indirectly, in the Company.
 - c. Hee/she has no affiliation with the Company, Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors, or Shareholders.
 - d. He/she has no business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.

INTRODUCTORY PROGRAM FOR NEW COMMISSIONER

As stated in the *Board Manual* of the Board of Commissioners of PT LRT Jakarta, new members of the Board of Commissioners must be given an introduction program about the Company by the President Director or Commissioner or appointed official.

The Company introduction program for New Commissioners has the objective of providing an exposure to the Company's scope of business and other important information to support the role of the new member. The introduction program can be in the form of presentations, meetings, visits to business units, or to Company facilities, reviewing Company documents or other programs deemed appropriate to the needs. This introduction program is carried out no later than 3 (three) months after the appointment of the members of the Board of Commissioners.

In relation to the changes in the composition and structure of the Board of Commissioners in 2021, the Company introduced the New Commissioners with details of the time and agenda of the implementation as follows:



No.	Hari/Tanggal Day/Date	Waktu Time	Tempat Location	Agenda
1	Kamis, 29 April 2021 Thursday, April 29, 2021	10.00 – 12.00	Ruang Rapat BoD, Lantai 5, Gedung MCC BoD Meeting Room, 5th Floor, MCC Building	<ul style="list-style-type: none"> Induksi Komisaris (Bapak Romy Bareno) Paparan Kinerja Operasional dan Keuangan Periode Januari-Maret Paparan Poin Perubahan Anggaran Dasar Commissioner Induction (Mr. Romy Bareno) Operational and Financial Performance Exposure for the Period of January to March Exposure of Points of Amendment to Articles of Association
2	Sabtu, 24 Juli 2021 Saturday, July 24, 2021	13.30 – 16.00	Ms. Teams	<ul style="list-style-type: none"> Induksi Plt. Komisaris Utama (Bapak M. Aprindy) Paparan Seluruh Kepala Divisi LRTJ Induction of Acting President Commissioner (Mr. M. Aprindy) Exposure of All Heads of LRTJ Division

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di dalam bidang pengawasan kepada Perusahaan, maka Dewan Komisaris mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam kinerja Dewan Komisaris. Rincian mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris pada tahun 2021 terdapat dalam bab 'Profil Perusahaan' Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DI TAHUN 2021

Di tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pemberian nasihat, saran, arahan dan persetujuan terkait pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, antara lain:

1. Melakukan rapat gabungan dengan dewan direksi sebanyak 10 kali dalam 1 tahun.
2. Melakukan rapat internal Dewan Komisaris bersama komite audit sebanyak 1 kali.
3. Memberikan 7 tanggapan/arahan tertulis kepada Dewan Direksi.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap jalannya perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi dan memberikan nasihat yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Peran dan fungsi Komite Audit ini diharapkan mampu secara optimal mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dengan cara memberikan informasi dan rekomendasi yang profesional dan independen untuk kepentingan Perseroan dan para pemangku kepentingan.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

To be able to support the implementation of its duties and responsibilities in the field of supervision to the Company, the Board of Commissioners participates in various competency development programs aimed at increasing effectiveness in the performance of the Board of Commissioners. Details regarding the implementation of the competency development of the Board of Commissioners in 2021 are contained in the 'Company Profile' chapter of this Annual Report.

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2021

In 2021, the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities through the provision of advice, advice, guidance, and approval regarding the management of the Company carried out by the Board of Directors, including:

1. Conduct joint meetings with the Board of Directors 10 times in 1 year.
2. Conducted 1 internal meeting of the Board of Commissioners with the Audit Committee.
3. Provide 7 written responses/directions to the Board of Directors.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Audit Committee is a supporting organ for the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties on the operation of the Company carried out by the Board of Directors and providing necessary advice in accordance with the Company's Articles of Association, as well as professional and independent recommendations for the benefit of the Company and its stakeholders.



Untuk menjalankan program/rencana kerja, Komite Audit menyusun *Key Performance Indicators* (KPI) yang akan menjadi tolok ukur kinerja Komite Audit dalam tahun anggaran 2021. KPI ini disusun berdasarkan kondisi riil yang diperkirakan akan sanggup dicapai oleh Komite Audit, sebagai berikut:

To carry out the program/work plan, the Audit Committee prepares Key Performance Indicators (KPI) which will be the benchmark for the performance of the Audit Committee in the 2021 fiscal year. These KPIs are prepared based on the real conditions expected to be achieved by the Audit Committee, which contain as follows:

No	Keterangan Description	KPI	Bobot (%) Weight (%)
1.1 Aspek Sistem Pengendalian Internal 1.1 Internal Control System Aspects			50
1 Review Penyusunan dan Pelaksanaan Review of Preparation and Implementation		2 Kali 2 times	15
2 Rapat Komite Audit: Audit Committee Meetings:	Jumlah Rapat (Audit Internal/Dewan Komisaris/BoD-BoC) Number of Meetings (Internal Audit/Board of Commissioners/BoD-BoC)	1 kali/bulan Once a month	10
	Kehadiran dalam Rapat Attendance in Meeting	100%	10
3 Memberi Nasihat/Saran kepada Audit Internal: Giving Advice/Suggestion to Internal Audit:	Jumlah (minimal) Quantity (minimum)	2 kali 2 times	15
2.1 Aspek Pelaporan 2.1 Reporting Aspects			30
1 Menyusun Program Kerja Komite Audit Prepare Audit Committee Work Program		1 kali 1 time	10
2 Menyampaikan Pendapat/Saran kepada Dewan Komisaris Submitting Opinions/Suggestions to the Board of Commissioners		1 kali 1 time	10
3 Menyampaikan Laporan Komite Audit Submitting the Audit Committee Report		2 kali 2 times	10
3.1 Aspek Dinamis 3.1 Dynamic Aspects			20
1 Telaah (<i>self assessment</i>) kinerja Komite Audit Self-assessment of the performance of the Audit Committee		1 kali 1 time	10
2 Peran dalam Peningkatan Kinerja: Role in Performance Improvement:	GCG GCG	2 kali 2 times	10



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan terbaik Perusahaan sesuai maksud dan tujuannya, mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan hingga memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

KRITERIA DIREKSI

Berdasarkan *Board Manual*, kriteria yang harus dipenuhi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Warga Negara Indonesia;
3. Sehat secara jasmani dan rohani;
4. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
5. Memahami penyelenggara pemerintahan Daerah;
6. Berijazah paling rendah S1;
7. Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali;
8. Cakap melakukan perbuatan hukum;
9. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dinyatakan pailit;
10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
11. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;
12. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
13. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semesta (menantu atau ipar) di antara pemegang jabatan komisaris, antar Direksi dengan Komisaris, baik dalam 1 (satu) perseroan dan antar Badan Usaha Milik Daerah 1 (satu) Provinsi;
14. Persyaratan lain sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;

The Board of Directors is the Company's organ that is authorized and fully responsible for managing the Company for the best interests of the Company, and in accordance to its aims and objectives, represent the Company both inside and outside the court, as well as pay attention to the interests of various stakeholders in accordance with the applicable laws and regulations. The Board of Directors carries out its duties and makes decisions in accordance with the division of tasks and authorities.

DIRECTORS CRITERIA

Based on the Board Manual, the criteria that must be met by the Board of Directors are as follows:

1. An Individuals;
2. Indonesian citizens;
3. Physically and mentally healthy;
4. Have expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good behavior and high dedication to advancing and developing the company;
5. Is knowledgeable in the implementation of regional government;
6. Minimum S1 diploma (S1/Bachelor degree);
7. The minimum age is 35 years and the highest is 55 years at the time of first registration;
8. Capable of carrying out legal actions;
9. In the 5 (five) years prior to his appointment and during his tenure he/she has never been declared bankrupt and has never been a member of the Board of Directors, Supervisory Board, or Commissioner which was found guilty of causing a business entity to be declared bankrupt;
10. Never been convicted of a criminal act that was detrimental to state finances and/or related to the financial sector;
11. Have knowledge and/or expertise in the field required by the Company;
12. Not currently in charge of a political party, a candidate for regional head or a candidate for deputy regional head, and/or candidate for legislative member;
13. Do not have a blood family relationship up to the third degree, either according to a straight line or a sideline or an affinity (son-in-law or brother-in-law) between the commissioner, between the Board of Directors and the Commissioner, both within 1 (one) company and between Regional Owned Enterprises within 1 (one) Province;
14. Other requirements as determined by the Articles of Association and laws and regulations;



15. Persyaratan lain sebagaimana huruf n di atas terdiri atas persyaratan formal, material dan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Patungan.

15. Other requirements as referred to in letter 'n' above consist of formal, material and other requirements as regulated in Governor Regulation Number 5 of 2018 concerning Procedures for Appointment and Dismissal of Directors of Regional Owned Enterprises and Joint Ventures.

MASA JABATAN DIREKSI

Dalam *Board Manual*, disebutkan perihal ketentuan masa jabatan Direksi yang menjelaskan bahwa:

1. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali;
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
3. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
4. Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Perseroan dapat mengangkat Direksi sementara sampai diangkatnya pejabat Direksi yang definitif, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan;
5. Dalam hal huruf d tersebut di atas, jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar;
6. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya;
7. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

In the *Board Manual*, regarding the terms of office of the Board of Directors, it is stated that:

1. Members of the Board of Directors are appointed for a certain period of time and may be reappointed;
2. Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, for a period of 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time;
3. The position of a Member of the Board of Directors ends when:
 - a. His/her term of office ends;
 - b. He/she resigns;
 - c. He/she can no longer fulfills statutory requirements;
 - d. He/she passes away;
 - e. He/she is dismissed based on the resolution of the GMS.
4. In the event that the position of a member of the Board of Directors ends as referred to in letter c, the Company may appoint a temporary Board of Directors until a definitive member of the Board of Directors is appointed, unless otherwise stipulated in the Company's Articles of Association;
5. In reference to point 'd' above, if for any reason the position of one or more or all members of the Board of Directors is vacant, then within 30 (thirty) days after the vacancy occurs, a GMS must be held to fill the vacancy and take into account the provisions of the laws and regulations and the Company's Articles of Association;
6. If a member of the Board of Directors resigns or is dismissed before his/her term of office ends, then the term of office of his/her replacement is the remaining term of office of the member of the Board of Directors he/she replaces;
7. If for any reason all positions of the members of the Board of Directors are vacant, then the Company is temporarily managed by members of the Board of Commissioners appointed by the meeting of the Board of Commissioners.



KOMPOSISI DIREKSI

Sesuai dengan yang telah tertuang di dalam *Board Manual* PT LRT Jakarta yang mana di dalamnya mengatur terkait susunan Direksi PT LRT Jakarta yang terdiri dari, Direktur Utama; Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis; serta Direktur Operasi dan Perawatan. Berikut disampaikan komposisi Direksi PT LRT Jakarta per 31 Desember 2021.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Hendri Saputra*	Direktur Utama President Director	KPPS No.001/KPPS/XII/2021	Pertama 1 st Term
Adrian Rusmana	Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Director of Finance and Business Development	KPPS No.001/KPPS/XII/2021	Pertama 1 st Term
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan Perawatan Director of Operations and Maintenance	KPPS No.001/KPPS/XII/2021	Pertama 1 st Term

*) mulai menjabat sejak 3 November 2021 | has been in office since November 3, 2021

PEDOMAN DIREKSI

Perusahaan memiliki *Board Manual* sebagai pedoman Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya atas pengelolaan Perusahaan. *Board Manual* Direksi telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 11 Februari 2020. Adapun *Board Manual* Direksi mengatur tentang:

1. Kebijakan Umum
2. Persyaratan dan Komposisi, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
4. Susunan, Tugas dan Wewenang Komisaris
5. Hak Direksi
6. Rapat Direksi
7. Penilaian Kinerja Direksi
8. Etika Jabatan Direksi
9. Fungsi Pendukung
10. Prinsip Dasar

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- A. Tugas dan wewenang kolegial Direksi, sebagai berikut:
 1. Menetapkan visi, misi dan strategis Perseroan.
 2. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
 3. Membuat laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with what has been stated in the PT LRT Jakarta Board Manual, which regulates the composition of the PT LRT Jakarta Board of Directors, consisting of, the President Director; Director of Finance and Business Development; and Director of Operations and Maintenance, the following is the composition of the Board of Directors of PT LRT Jakarta as of December 31, 2021.

BOARD MANUAL

The Company possesses a Board Manual that serves as a guide for the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities as well as their authority over the management of the Company. The Board of Directors' Board Manual has been signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors on February 11, 2020. The Board of Directors' Manual regulates:

1. Public policy
2. Requirements and Composition, Membership and Term of Office of the Board of Directors
3. Capability Recognition and Improvement Program
4. Composition, Duties and Authorities of the Board of Directors
5. Board of Directors' Rights
6. Board of Directors Meeting
7. Board of Directors Performance Assessment
8. Professional Ethics of the Board of Directors
9. Support Functions
10. Basic principles

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

- A. The collegial duties and authorities of the Board of Directors are as follows:
 1. Establish the Company's vision, mission and strategy.
 2. Create and maintain a register of shareholders, a special register, minutes of the GMS and the minutes of the meeting of the Board of Directors.
 3. Prepare the Company's Annual reports and financial documents as referred to in the Law on Company Documents.



4. Memberikan izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
5. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan demi kepentingan Perseroan dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai stakeholder sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengelola Perseroan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham/pemilik modal.
7. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perseroan setiap 1 (satu) bulan kepada Komisaris.
9. Menyiapkan rancangan RJPP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun yang ditandatangani bersama Dewan Komisaris serta disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
10. Menyediakan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai
11. Menjalankan Program Kerja, RJPP, Rencana Strategis dan RKAP yang sudah ditetapkan/disahkan.
12. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan, yang didalamnya terdiri dari laporan operasional dan laporan keuangan, menurut cara dan waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau setiap diminta oleh pemegang saham.
13. Menetapkan struktur/susunan organisasi Perseroan sesuai kebutuhan, dengan penetapan tugas, kewajiban, tanggung jawab untuk setiap jabatan.
14. Menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan Standar Operasional Baku ("SOP") untuk proses bisnis inti (*core business*) Perseroan yang ditinjau dan disempurnakan secara berkala.
15. Menyusun kebijakan penanganan risiko usaha (manajemen risiko) dan tindak lanjutnya guna mengurangi kemungkinan kerugian dan gangguan operasi perusahaan lainnya.
16. Menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan guna menghindari terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
17. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.
4. Give permission to shareholders to examine the shareholder register, special register, minutes of the GMS and annual report and obtain a copy of the minutes of the GMS and a copy of the annual report.
5. Maintain and manage the Company's assets for the benefit of the Company and carry out its social responsibilities and pay attention to the interests of various stakeholders in accordance with the applicable laws and regulations.
6. Manage the Company and account for the implementation of its duties to shareholders/capital owners.
7. Comply with the Articles of Association and laws and regulations, and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
8. Prepare and submit the Company's financial reports every 1 (one) month to the Board of Commissioners.
9. Prepare a draft of RJPP, which is a strategic plan that contains the Company's goals and objectives to be achieved within a period of five years which is signed with the Board of Commissioners and submitted to the GMS for approval.
10. Provide a work plan that includes the Company's annual budget to the Board of Commissioners for approval before the fiscal year begins
11. Execute the Work Program, RJPP, Strategic Plan and RKAP that have been established/ratified.
12. Provide accountability and all information regarding the condition and operation of the Company, in the form of a report on the Company's activities consisting of monthly reports, quarterly reports and annual reports, which consist of operational reports and financial reports, according to the method and time stipulated in the applicable laws and regulations. and/or whenever requested by the shareholders.
13. Determine the structure/organization of the Company as needed, with the assignment of duties, obligations, and responsibilities for each position.
14. Establish operational policies and Standard Operating Procedures ("SOPs") for the Company's core business processes which are reviewed and refined regularly.
15. Develop policies for handling business risk (risk management) and follow-up actions to reduce the possibility of losses and disruptions to other Company operations.
16. Establish an effective internal control system to secure the Company's investments and assets in order to avoid the practice of corruption, collusion and nepotism.
17. Be accountable for the implementation of their duties to the Shareholders.



18. Menyediakan daftar pemegang saham dan daftar khusus di kantor Perseroan.
19. Menandatangani kontrak manajemen sebagai perjanjian Direksi dengan Pemegang Saham mengenai peran dan tanggung jawabnya.
20. Mengumumkan paling sedikit 1 (satu) surat kabar yang terbit atau beredar di tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Perseroan dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
21. Memberitahukan secara tertulis kepada kreditor Perseroan mengenai pengurangan modal dan diumumkan 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat Persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili Para Pemegang Saham yang dimiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
23. Meminta persetujuan RUPS dalam hal melakukan kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perseroan berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, dengan skema kerja sama operasi dan dikerja samakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
24. Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis dari atau surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini:
 - i) Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang tidak bergerak yang bukan merupakan barang dagangan Perseroan, kecuali apa yang ditentukan pada point 22 di atas;
 - ii) Pembebanan dengan Hak Tanggungan atau gadai atau menjaminkan dengan cara apapun atas barang-barang kekayaan Perseroan kecuali apa yang ditentukan pada point 22 di atas;
 - iii) Mengikat Perseroan sebagai penjamin.
25. Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
18. Provide a register of shareholders and a special register at the Company's office.
19. Sign a management contract as an agreement between the Board of Directors and the Shareholders regarding their roles and responsibilities.
20. Announce in at least 1 (one) newspaper that is published or circulated at the domicile/place of business activities of the Company, and announce in writing to employees of the Company who will be merging, consolidating, taking over and separating from the Company within a period of no later than 30 (three) twenty) days prior to the summons for the GMS.
21. Notify the Company's creditors in writing regarding the reduction in capital and announce it in 1 (one) or more Indonesian language daily newspapers that are published or widely circulated, in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.
22. Request the approval of the GMS to transfer or make collateral for the debts of the Company's assets which exceed 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in one fiscal year, either in one transaction or several transactions that are stand-alone or are related to each other. GMS approval attended or represented by the Shareholders who own at least 3/4 (three quarters) of the total shares with valid voting rights must be obtained, and approved by at least 3/4 (three quarters) of the total votes legally issued at the meeting.
23. Request approval from the GMS in the case of cooperation in the form of utilization of fixed assets owned by the Company in the form of land and/or buildings originating from Regional Equity Participation in the Company, with a joint operation scheme, and said cooperation will last for a period of more than 10 (ten) years.
24. The Board of Directors must obtain written approval from the relevant letter/deed signed by the Board of Commissioners to take the following actions:
 - i) Sell or otherwise transfer immovable goods which are not the Company's merchandise, except specified in point 22 above;
 - ii) Encumbrance with Mortgage or pledge or guarantee in any way of the Company's assets, except specified in point 22 above;
 - iii) Bind the Company as guarantor.
25. Is fully authorized and responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the goals and objectives of the Company, and represent the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association.



26. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila Anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
- i) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya.
 - ii) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - iii) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - iv) Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.
27. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dankekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
28. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada point 28 di atas, berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perseroan dinyatakan pailit.
29. Menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).
30. Mengatur pendelegasian wewenang Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk atau memberikan kuasa kepada seorang atau beberapa orang Pekerja Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain.
31. Menjalankan tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun pemilikan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Rapat Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
32. Mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa ada Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan tersebut secara tertulis. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
33. Dalam hal pemindahan hak atas saham, Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham, apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi.
34. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan.
26. Each member of the Board of Directors is personally responsible if he/she is guilty and has been proven negligent in carrying out his/her duties for the interests and business of the Company, unless the member of the Board of Directors concerned can prove that:
- i) The loss is not due to his fault or negligence.
 - ii) Has carried out management in good faith and prudence for the benefit and in accordance with the goals and objectives of the Company.
 - iii) Has no conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses.
 - iv) Has taken action to prevent the loss from continuing.
27. In the event that bankruptcy occurs due to the fault or negligence of the Board of Directors, and the assets of the Company are not sufficient to cover the losses resulting from the bankruptcy, each member of the Board of Directors shall be jointly and severally liable for the loss.
28. The responsibilities as referred to in point 27 above also apply to members of the Board of Directors who committed wrong or negligent acts eventhough said member of the Board of Directors has stopped serving the Company 5 (five) years before the Company was declared bankrupt.
29. Establish accounting policies and preparation of financial statements in accordance with generally accepted financial accounting standards in Indonesia (SAK).
30. Regulate the delegation of authority of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the Court to one or several Directors who are specifically appointed, or give power of attorney to one or several employees of the Company either individually or jointly, or to other bodies.
31. Carry out other actions in relation to management and ownership in accordance with the provisions which will be further regulated in the Board of Commissioners' Meeting with due observance of the laws and regulations.
32. Take valid decisions without having to hold meetings of the Board of Directors provided that all members of the Board of Directors have given their approval of the proposed proposal in writing. Decisions taken using this approach have the same power as decisions taken legally at the Board of Directors Meeting.
33. In the case of transfer of rights to shares, the Board of Directors, at their discretion and by providing reasons, may refuse to register the transfer of rights in the Register of Shareholders, if the provisions in the Articles of Association are not fulfilled.
34. Regulate provisions regarding the Company's staffing including the determination of salaries, pensions, or old-age benefits, and other income for the Company's employees in accordance with the laws and regulations.



- 35. Mengangkat, memindah/tugaskan, mengatur tugas dan memberhentikan Pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 36. Menetapkan sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.
 - 37. Mengembangkan Sumber Daya Manusia ("SDM"), menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perseroan.
 - 38. Dapat bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS tidak ditetapkan atau menunjuk likuidator dalam pembubaran Perseroan.
 - 39. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.
 - 40. Menerapkan sistem teknologi informasi yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
 - 41. Melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan dengan menetapkan kebijakan, SOP serta Standar Pelayanan Minimal ("SPM").
 - 42. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi Perseroan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.
- B. Pendeklasiasi Wewenang Direksi
- 1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - 2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang mendapat penunjukan secara tertulis dari Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - 3. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 35. Appoint, transfer, manage duties, and dismiss the Company's employees based on the laws and regulations.
 - 36. Establish a system/guideline for measuring and evaluating performance for units and positions within the organization (structural) which is implemented in an objective and transparent manner.
 - 37. Develop Human Resources ("HR"), assess performance and provide appropriate remuneration, and build an effective HR environment to support the Company's achievements.
 - 38. May act as a liquidator if the resolution of the GMS is not determined, or appoint a liquidator in the dissolution of the Company.
 - 39. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association or determined by the GMS and the laws and regulations.
 - 40. Implement information technology systems in accordance with established policies.
 - 41. Implement product and service quality improvement systems by establishing policies, SOPs and Minimum Service Standards ("SPM").
 - 42. Carry out the procurement of goods and services that are profitable for the Company, both in terms of price and quality of the goods and services.
- B. Delegation of Authority of the Board of Directors
- 1. The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.
 - 2. In the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party, another member of the Board of Directors who has been appointed in writing by the President Director has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
 - 3. Without prejudice to the responsibilities of the Board of Directors, the Board of Directors has the right, for certain actions, to appoint one or more proxies with conditions determined by the Board of Directors in a special power of attorney; The authority given must be carried out in accordance with the Articles of Association and the applicable laws and regulations.



HAK DIREKSI

Sebagaimana tercantum pada *Board Manual* PT LRT Jakarta, Direksi memiliki hak-hak atas fungsinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola Perusahaan. Hak Direksi di antaranya:

1. Menerima gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Menerima insentif/tantiem dan besarnya insentif tersebut ditetapkan oleh RUPS.
3. Memperoleh hak cuti yang ditetapkan oleh Direksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Komisaris dan Direksi lainnya sekurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Mendapatkan program pengenalan tentang Perseroan.

PEMBIDANGAN DAN URAIAN TUGAS DIREKSI

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi agar berjalan secara efektif, Perusahaan melakukan pembidangan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya yang diharapkan dapat mencapai kinerja yang optimal. Berdasarkan *Board Manual* ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing Direksi adalah sebagai berikut:

THE RIGHTS OF THE BOARD OF DIRECTORS

As stated in the PT LRT Jakarta Board Manual, the Board of Directors, over its functions in carrying out their duties and responsibilities to manage the Company, has the following rights:

1. Receive salary as well as other facilities and/or allowances, including post-service benefits, of which amount is determined by the GMS, and the authority can be delegated to the Board of Commissioners.
2. Receive incentives/tantiem and the amount of the incentives is determined by the GMS.
3. Obtain the rights to have leave which is determined by the Board of Directors by referring to the provisions of the legislation.
4. Resign from his position by notifying in writing of his intention to the Company with a copy to the board of Commissioners and other Directors at least 30 (thirty) calendar days before the date of resignation.
5. Receive an introduction program about the Company.

DIVISION AND DESCRIPTION OF DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

To ensure the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors to operate effectively, the Company carries out a division of duties and responsibilities according to its field, which is expected to achieve optimal performance. Based on the Board Manual, the scope and responsibilities of each Board of Directors are as follows:



Direktur Utama

President Director

Tujuan Jabatan Direktur Utama adalah bertugas mengarahkan dan memastikan jalannya Perusahaan sesuai visi, misi, dan rencana strategis jangka panjang Perusahaan serta mematuhi prinsip GCG yang Baik.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Utama memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Utama
 - a. Koordinasi fungsi-fungsi korporat untuk hal-hal yang terkait dengan penetapan kebijakan dan strategi, pengendalian modal dan alokasi dan alokasi sumber daya, pengendalian risiko, serta hubungan pihak luar;
 - b. Penetapan arah, kebijakan strategi dan rencana strategis serta pengendalian pengelolaan bisnis perkeretaapian *Light Rail Transit* di area DKI Jakarta dan mengarahkan upaya pertumbuhan dengan fokus pada bisnis baru, sesuai dengan harapan para Pemangku Jabatan;
 - c. Pengendalian dan koordinasi (secara langsung) penyelenggaraan fungsi *Quality, Safety & Risk Management, Corporate Secretary* dan Internal Audit;
 - d. Tercapainya integrasi dan sinergi kebijakan serta penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran Perusahaan;
 - e. Terlaksananya rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Direksi;
 - f. Perumusan strategi bisnis yang dilakukan bersama dengan pemangku jabatan kunci, penetapan dan pengendalian implementasinya;
 - g. Terciptanya keselamatan, keamanan dan kesehatan lingkungan kerja serta mendukung tercapainya standar keselamatan dan keaman penumpang.
2. Tanggung Jawab Organisasi
 - a. Pengembangan kompetensi dan pembinaan karyawan.
 - b. Pengelolaan mutu, K3, dan lingkungan.
 - c. Penerapan sistem manajemen kinerja.
 - d. Meninjau sistem manajemen.
 - e. Asesmen dan pengelolaan risiko.
 - f. Pengendalian anggaran.
3. Wewenang
 - a. Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan.
 - b. Melakukan tindakan untuk dan atas nama Direksi serta Perusahaan.
 - c. Mengatur penyerahan kewenangan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi atau karyawan, untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan.
 - d. Melakukan segala perbuatan dan tindakan lainnya mengenai pengurusan atau pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain, serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, perundang-undangan, dan/atau keputusan RUPS.
 - e. Melakukan penandatanganan dokumen Perusahaan.
 - f. Menetapkan ketentuan pemantauan dan pengendalian kinerja Anak Usaha.

The purpose of the position of the President Director is to direct and ensure that the Company operates according to the Company's vision, mission, and long-term strategic plan, and adheres to the principles of Good GCG.

In carrying out his/her duties, the President Director has the following responsibilities and authorities:

1. Main Responsibilities
 - a. Coordinate corporate functions for matters related to the determination of policies and strategies, capital control and resource distribution and allocation, risk control, and external party relations;
 - b. Set goals, strategic policies and strategic plans as well as control the management of the Light Rail Transit railway business in the DKI Jakarta area and direct growth efforts with a focus on new businesses, in accordance with the expectations of the Position Stakeholders;
 - c. Control and coordinate (directly) the implementation of the functions of Quality, Safety & Risk Management, Corporate Secretary and Internal Audit;
 - d. Achieve integration and synergy of policies as well as the use of resources to achieve the Company's goals;
 - e. Ensure the implementation of plans and policies that have been formulated by the Board of Directors;
 - f. Formulate business strategy which is carried out together with key position holders, as well as determine and control its implementation;
 - g. Ensure the creation of safety, security and health in the work environment as well as support the achievement of passenger safety and security standards.
2. Organizational Responsibilities
 - a. Competence development and employee development.
 - b. Quality, OHS, and environment management.
 - c. Implementation of performance management system.
 - d. Review of the management system.
 - e. Risk assessment and management.
 - f. Budget control.
3. Authority
 - a. Determine the Company's management policy.
 - b. Take action for and on behalf of the Board of Directors and the Company.
 - c. Regulate the delegation of authority of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors or employees, to make decisions on behalf of the Board of Directors, or to represent the Company inside and outside the Court.
 - d. Perform all actions and other actions regarding the management or ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties, and represent the Company inside and outside the Court regarding all matters and all events, with restrictions as stipulated in the Articles of Association, legislation, and/or the resolutions of the GMS.
 - e. Sign the Company's documents.
 - f. Stipulate provisions for monitoring and controlling the performance of Subsidiaries.



Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Director of Finance and Business Development

Tujuan Jabatan Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis adalah:

1. Memastikan rencana strategis bidang pengembangan usaha untuk memastikan terlaksananya rencana dan program kerja sehingga dapat mencapai visi, misi dan rencana strategis Perusahaan.
2. Memastikan rencana strategis bidang keuangan, investasi sebagai bagian dari komitmen Perusahaan untuk menyeraskan antara strategi bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan dengan kegiatan Operasional dan Anak Perusahaan sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan untuk mencapai visi, misi dan rencana strategis Perusahaan.
3. Melakukan pengendalian Perusahaan di bidang pengelolaan keuangan untuk memastikan keberlangsungan Perusahaan dan tercapainya sasaran jangka panjang Perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Pengembangan Bisnis memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. **Tanggung Jawab**
 - a. Memimpin dan memastikan kegiatan pengembangan terkait rencana yang telah ditetapkan, Perumusan dan perencanaan program / kebijakan strategis atas pengupayaan sumber pendanaan untuk program rutin maupun pengembangan bisnis; perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RKAP; dan penyelenggaraan tata laksana perpendaharaan dan administrasi keuangan;
 - b. Perumusan dan perencanaan program/kebijakan strategis terkait dengan penetapan rencana investasi jangka pendek maupun jangka panjang Perusahaan serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap aktualisasi anggaran korporasi;
 - c. Perumusan dan perencanaan program/kebijakan strategis terkait dengan penyusunan laporan keuangan Perusahaan dan pelaporan akuntansi biaya subsidi, non subsidi dan hasil dari kinerja operasi;
 - d. Perumusan dan perencanaan program/kebijakan strategis terkait dengan fungsi perencanaan korporasi, mengarahkan upaya pertumbuhan dengan fokus terhadap bisnis baru dan memenuhi kebutuhan Perusahaan melalui pengadaan barang dan jasa;
 - e. Perumusan dan perencanaan program/kebijakan strategis terkait atas pengelolaan sumber daya manusia, meliputi: rekrutmen dan penempatan karyawan, pengembangan kompetensi karyawan, remunerasi dan manfaat, serta keharmonisan hubungan industrial;
 - f. Perumusan dan penyusunan program / kebijakan strategis terkait dengan pengelolaan fasilitas umum perkantoran dan dukungan teknologi informasi Perusahaan;
 - g. Penetapan kebijakan pelaksanaan terkait dengan fungsi Strategic, Business and Procurement, Human Resources and General Affairs and Finance, Accounting and System Support;
 - h. Terciptanya keselamatan, keamanan dan kesehatan lingkungan kerja serta mendukung tercapainya standar keselamatan dan keamanan penumpang.
2. **Wewenang**
 - a. Mengatur ketentuan kebijakan pengembangan usaha dan melakukan penandatanganan dokumen Perusahaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait strategi pengembangan bisnis Perusahaan.
 - c. Melakukan tindakan pengelolaan portofolio , investasi keuangan sesuai standar yang berlaku.
 - d. Mengatur ketentuan kebijakan pengelolaan keuangan, dan melakukan penandatanganan dokumen Perusahaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait strategi pendanaan investasi Perusahaan.

The purpose of the position of Director of Finance and Business Development are to:

1. Ensure strategic plans in the field of business development to confirm the implementation of work plans and programs so as to achieve the Company's vision, mission and strategic plans.
2. Ensure strategic plans for finance and investment as part of the Company's commitment to align the Company's business strategies as stated in the Company's Long-Term Plan with Operations and Subsidiaries activities so as to support the growth and development of the Company to achieve the Company's vision, mission and strategic plans.
3. Control the Company in the field of financial management to ensure the sustainability of the Company and the achievement of the Company's long-term goals.

In carrying out his duties, the Director of Business Development has the following responsibilities and authorities:

1. **Responsibilities**
 - a. To lead and ensure development activities related to predetermined plans, to formulate and plan strategic programs/policies for seeking funding sources for routine programs and business development; to plan, evaluate, and report on the implementation of the RKAP; and conduct administration of treasury and financial administration;
 - b. Formulate and plan strategic programs/policies related to the stipulation of the Company's short-term and long-term investment plans as well as supervise and evaluate the actualization of the corporate budget;
 - c. Formulate and plan strategic programs/policies related to the preparation of the Company's financial statements and accounting reporting of subsidized and non-subsidized costs, as well as the results of operating performance;
 - d. Formulate and plan strategic programs/policies related to the corporate planning function, direct growth efforts with a focus on new businesses, and meet the needs of the Company through the procurement of goods and services;
 - e. Formulate and plan strategic programs/policies related to the management of human resources, including: recruitment and placement of employees, development of employee competencies, remuneration and benefits, and harmonious industrial relations;
 - f. Formulate and prepare strategic programs/policies related to the management of public office facilities and the support of the Company's information technology;
 - g. Stipulate implementation policies related to the functions of Strategic, Business and Procurement, Human Resources and General Affairs and Finance, and Accounting and System Support;
 - h. Ensure the creation of safety, security and health in the work environment as well as supporting the achievement of passenger safety and security standards.
2. **Authorities**
 - a. Regulate provisions of the business development policy and sign the Company's documents based on the applicable laws and regulations.
 - b. Provide recommendations to the President Director regarding the Company's business development strategy.
 - c. Carry out portfolio management actions and financial investments according to applicable standards.
 - d. Regulate the provisions of the financial management policy, and sign the Company's documents based on the applicable laws and regulations.
 - e. Provide recommendations to the President Director regarding the Company's investment funding strategy.



Direktur Operasi dan Perawatan Director of Operations and Maintenance

Tujuan Jabatan Direktur Operasi dan Perawatan adalah:

1. Memastikan tersedianya rencana strategis bidang operasional dan mengarahkan, memimpin serta mengendalikan kegiatan dan program kerja di bidang operasional yang dilaksanakan oleh unit kerja dan Anak Perusahaan untuk memastikan terlaksananya rencana dan program kerja sehingga dapat mencapai visi, misi dan rencana strategis Perusahaan.
2. Melakukan pengendalian Perusahaan di bidang operasional untuk memastikan keberlangsungan Perusahaan dan tercapainya sasaran jangka panjang Perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Operasi dan Perawatan memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab
 - a. Perumusan dan perencanaan program/kebijakan strategis terkait dengan operasi lalu lintas perjalanan kereta, program kebijakan pengendalian operasi kereta serta kebijakan jaminan mutu perjalanan kereta meliputi penetapan standar mutu, pelaksanaan dan pengawasannya serta evaluasi dan peningkatan mutu berkelanjutan;
 - b. Perumusan dan perencanaan program/kebijakan strategis terkait dengan pemeliharaan prasarana meliputi jalur kereta, bangunan stasiun, dan fasilitas operasi;
 - c. Perumusan dan perencanaan program/kebijakan serta evaluasi pemeliharaan sarana meliputi trainset, fasilitas Depo dan segala bentuk fasilitas penunjang terkait;
 - d. Perumusan dan perencanaan program/kebijakan strategis terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis pengembangan dan proses uji sarana dan prasarana, pengelolaan/pelaksanaan kajian rekayasa teknis pengembangan dan penyusunan desain/spesifikasi teknis sarana dan prasarana, serta pelaksanaan koordinasi/kerja sama teknis di bidang yang relevan dengan pihak luar;
 - e. Perumusan dan perencanaan program / kebijakan strategis atas pengusahaan prasarana dan sarana beserta perencanaan integrasi antar moda;
 - f. Penetapan kebijakan pelaksanaan terkait dengan fungsi *Operation and Services, Infrastructure* dan *Rolling Stocks*;
 - g. Terciptanya keselamatan, keamanan dan kesehatan lingkungan kerja serta mendukung tercapainya standar keselamatan dan keamanan penumpang;
2. Wewenang
 - a. Mengatur ketentuan tentang kebijakan operasional Perusahaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melakukan penandatanganan dokumen terkait kegiatan operasional Perusahaan.
 - c. Menetapkan ketentuan pemantauan dan pengendalian kinerja Perusahaan di bidang operasional.

The purposes of the position of the Director of Operations and Maintenance are to:

1. Ensure the availability of operational strategic plans and direct, lead and control activities and work programs in the operational field carried out by work units and Subsidiaries within the aims to ensure the implementation of work plans and programs so as to achieve the Company's vision, mission and strategic plans.
2. Control the Company in the operational field with the aim to ensure the sustainability of the Company and the achievement of the Company's long-term goals.

In carrying out his/her duties the Director of Operations and Maintenance has the following responsibilities and authorities:

1. Responsibilities
 - a. Formulate and plan strategic programs/policies related to rail traffic operations, policy programs for controlling train operations, as well as policies on quality assurance for train travel including the establishment of quality standards, their implementation and supervision as well as evaluation and continuous quality improvement;
 - b. Formulate and plan strategic programs/policies related to the maintenance of infrastructure including railway lines, station buildings, and operating facilities;
 - c. Formulate and plan programs/policies, as well as evaluation of maintenance of facilities including trainsets, depot facilities, and all forms of related supporting facilities;
 - d. Formulate and plan strategic programs/policies related to the fulfillment of technical requirements for the development and testing process of facilities and infrastructure, management/implementation of technical engineering studies of development and preparation of technical designs/specifications of facilities and infrastructure, as well as implementation of technical coordination/cooperation in fields relevant to external parties;
 - e. Formulate and plan strategic programs/policies for the exploitation of infrastructure and facilities as well as intermodal integration planning;
 - f. Stipulate implementation policies related to the functions of Operation and Services, Infrastructure, and Rolling Stocks;
 - g. Ensure the creation of safety, security and health in the work environment as well as supporting the achievement of passenger safety and security standards;
2. Authorities
 - a. Regulate the provisions regarding the Company's operational policies based on the applicable laws and regulations.
 - b. Sign documents related to the Company's operational activities.
 - c. Stipulate provisions for monitoring and controlling the Company's performance in the field of operations.

ETIKA JABATAN DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi harus berpedoman pada standar etika berikut ini:

1. Dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perseroan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.
2. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. Apabila terjadi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, maka benturan kepentingan tersebut harus diungkapkan dan yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

PROFESSIONAL ETHICS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its duties and functions, the Board of Directors must be guided by the following ethical standards:

1. It is prohibited to take actions that have a conflict of interest, and to take for personal benefits, either directly or indirectly, from the decisions and activities of the Company concerned other than legitimate income.
2. Do not take advantage of the position for personal interest or for the benefit of other people or parties that are contrary to the interests of the Company.
3. If there is a conflict of interest in the decision-making process, the conflict of interest must be disclosed and the person concerned must not be involved in the decision-making process.



4. Dilarang untuk mengambil peluang bisnis Perseroan untuk kepentingan dirinya sendiri.
5. Dilarang menggunakan aset dan informasi Perseroan atau jabatannya selaku Direksi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan.
6. Dilarang berkompetisi dengan Perseroan dengan menggunakan informasi dari dalam (*inside information*) untuk mendapatkan keuntungan bagi diri pribadi.
7. Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
8. Dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Harus mengungkapkan informasi dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan.
10. Harus mematuhi seluruh kebijakan yang telah ditetapkan, panduan GCG, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
11. Harus mendorong terciptanya perilaku yang baik serta menjunjung tinggi etika kerja yang tercantum dalam Panduan GCG di Perseroan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Pekerja.

Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari Direksi senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan Perseroan.

PROGRAM PENGENALAN BAGI DIREKSI BARU

Program pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru memiliki tujuan untuk memberikan memaparan ruang lingkup Perusahaan dan informasi penting lainnya untuk menunjang peran anggota baru tersebut seperti kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan berdasarkan panduan *code of conduct* PT LRT Jakarta dan Jakpro. Tanggung jawab pengadaan program pengenalan Direksi baru dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis, ke fasilitas Perseroan, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan. Program pengenalan bagi Direksi baru dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Anggota Direksi Baru.

INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

The Company introduction program for the New Directors has the aim of providing exposure to the Company's scope, and other important information to support the new members' roles, such as the obligations, duties, responsibilities and rights of the Board of Directors as well as things that are not allowed, based on the PT LRT Jakarta and Jakpro's code of conduct guidelines. The Corporate Secretary is responsible for procuring the introduction of the new Board of Directors program. The introduction program can be in the form of presentations, meetings, visits to business units or to Company facilities, reviewing Company documents, or other programs deemed appropriate to the needs. The introduction program for new Directors is carried out no later than 3 (three) months after the appointment of new members of the Board of Directors.



Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi dan susunan Direksi di tahun 2021, Perusahaan mengadakan pengenalan Direksi Baru dengan rincian waktu pelaksanaan dan agenda sebagai berikut:

No.	Hari/Tanggal Day/Date	Waktu Time	Tempat Location	Agenda
1	Kamis, 26 Agustus 2021 Thursday, August 26, 2021	10.00-14.00	Ruang Rapat BoD, Lantai 5 Gedung MCC BoD Meeting Room, 5th Floor MCC Building	Pengenalan Perusahaan untuk Induksi Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Company Introduction for Director of Finance's Induction and Business Development
2	Kamis, 4 November 2021 Thursday, November 4, 2021	15.00 – 17.00	Ruang Rapat BoD, Lantai 5 Gedung MCC BoD Meeting Room, 5th Floor MCC Building	Pengenalan Plt Direktur Utama (Div. Prasarana & Sarana) Introduction of the Acting President Director (to the Infrastructure & Facilities Division)
3	Jumat, 5 November 2021 Friday, November 4, 2021	09.00 – 11.00	Ruang Rapat BoD, Lantai 5 Gedung MCC BoD Meeting Room, 5th Floor MCC Building	Pengenalan Plt Direktur Utama (Divisi OPL & Internal Audit) Introduction of the Acting President Director (to the OPL and Internal Audit Division)
4	Selasa, 9 November 2021 Tuesday, November 9, 2021	14.00 – 16.00	Ruang Rapat BoD, Lantai 5 Gedung MCC BoD Meeting Room, 5th Floor MCC Building	Pengenalan Plt Direktur Utama (Divisi Corporate Secretary & QSS.H.E) Introduction of the Acting President Director (to the Corporate Secretary and QSS.H.E Division)
5	Kamis, 11 November 2021 Thursday, November 11, 2021	09.00 – 12.00	Ruang Rapat BoD, Lantai 5 Gedung MCC BoD Meeting Room, 5th Floor MCC Building	Pengenalan Plt Direktur Utama (Divisi KEuangan & Akuntansi, Strategi Bisnis & Pengadaan) Introduction of the Acting President Director (to the Finance and Accounting Division, and to the Business Strategy and Procurement Division)

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Direksi dalam pengelolaan Perusahaan, Direksi telah mengikuti program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam kinerja Direksi. Rincian mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi Direksi pada tahun 2021 terdapat dalam bab 'Profil Perusahaan' Laporan Tahunan ini.

REALISASI PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Terkait pelaksanaan tugas di tahun 2021, Direksi melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan rapat BoD sebanyak 21 kali sepanjang tahun 2021
2. Menerbitkan 9 Surat Keputusan Direksi
3. Melakukan penandatanganan kontrak dan addendum subsidi dengan Jakpro
4. Mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 lewat surveillance tahunan
5. Pencapaian Learning & Growth yang sangat baik dalam mengembangkan kompetensi karyawan

In relation to the changes in the composition and structure of the Board of Directors in 2021, the Company introduced the New Directors with details of the implementation time and agenda as follows:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE BOARD OF DIRECTORS

With the aim to optimize the role and function of the Board of Directors in managing the Company, the Board of Directors has participated in a competency development program aimed at increasing the effectiveness of the Board of Directors' performance. Details regarding the implementation of the competency development programs of the Board of Directors in 2021 are contained in the 'Company Profile' chapter of this Annual Report.

REALIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Regarding the implementation of duties in 2021, the Board of Directors has carried out the following activities:

1. Conducted 21 BoD meeting activities throughout 2021
2. Issued 9 Board of Directors' Decrees
3. Signed contracts and subsidy addendums with Jakpro
4. Maintained ISO 9001:2015 certification through annual surveillance
5. Achieved Excellent Learning & Growth in developing employee competencies



TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

TRANSPARENCY OF INFORMATION REGARDING THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan baik dari latar belakang profesi dan pendidikan sebelumnya, disadari Perusahaan merupakan sesuatu hal yang penting sehingga dapat memberikan pandangan yang luas dalam menyusun langkah-langkah strategis bagi Perusahaan. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan yang dibutuhkan, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The diversity of the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors, both in terms of professional and previous educational backgrounds, is considered by the Company as something essential because it can provide a broad view in formulating strategic steps for the Company. The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out by considering the needs and requirements, as described in the table below.

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewarganegaraan Citizenship	Usia Age	Gender	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Mohamad Aprindy (Komisaris Utama) President Commissioner)	Indonesia	55	Laki-Laki Male	S2 - Magister Teknik Master of Engineering	Industri konstruksi Construction industry	Teknik Engineering
Romy Bareno (Komisaris) Commissioner)	Indonesia	39	Laki-Laki Male	S2 - Master of Arts Degree in Media Management	Media	Ilmu Politik dan Media Management Political Science and Media Management
Tatak Ujiyanti (Komisaris) Commissioner)	Indonesia	51	Perempuan Female	S2 - Master Degree. Social Development Study	Government specialist	Hukum dan Ilmu Pembangunan Sosial Law and Social Development Sciences
Direksi Board of Directors						
Hendri Saputra (Direktur Utama) President Director)	Indonesia	51	Laki-Laki Male	Sarjana (S1) Fisika Bachelor (S1) of Physics	Project Management	Fisika Physics
Adrian Rusmana (Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis) Director of Finance and Business Development)	Indonesia	52	Laki-Laki Male	S2 - Magister (S2) Master of Business Administration in Finance	Finance & Investment	Administrasi Bisnis Business Administration
Aditia Kesuma Negara (Direktur Operasi dan Perawatan) Director of Operations and Maintenance)	Indonesia	35	Laki-Laki Male	S3 - Doctoral Degree Program in Economic Business	Operations & Project Management	Teknik Engineering



PENILAIAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai fungsi pengawasan (*oversight*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan serta Kontrak Manajemen yang telah disepakati atau disetujui pada saat pengangkatannya. Indikator tersebut dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi untuk Dewan Komisaris.

Sementara terkait indikator pencapaian kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi sesuai dengan peraturan perundangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Kriteria evaluasi kinerja Direksi didasari pada target kinerja dalam Kontrak Manajemen yang disampaikan pada saat pengangkatannya. Kinerja Direksi dievaluasi setiap tahunnya oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan usulan dari Direksi yang bersangkutan. Evaluasi kinerja tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi untuk Direksi.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The Performance Achievement Indicator is a measure of the assessment of the successful implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners as a supervisory function (*oversight*) in accordance with the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association, and Management Contracts that have been agreed or approved at the time of appointment. These indicators are evaluated by the Shareholders at the GMS and become an integral part of the remuneration scheme for the Board of Commissioners.

Performance achievement indicators is also a measure of the assessment of the successful implementation of the duties and responsibilities of each Board of Directors in accordance with the laws and regulations and/or the Company's Articles of Association. The criteria for evaluating the performance of the Board of Directors are based on the performance targets in the Management Contract which were submitted at the time of filing. The performance of the Board of Directors is evaluated annually by the Shareholders in the GMS based on the performance evaluation criteria that have been determined by the Board of Commissioners in accordance with the proposal from the relevant Board of Directors. The performance evaluation is an integral part of the remuneration scheme for the Board of Directors.



Rincian KPI Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

The details of the KPIs for the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

KPI Dewan Komisaris Tahun Anggaran 2021
KPI of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2021

No	Keterangan Description	KPI	Bobot(%) Weight (%)
1.1 Aspek Sistem Pengawasan & Pengarahan 1.1 Aspects of Supervision and Guidance System			50
1	Review Kinerja Perusahaan Company Performance Review	4 Kali 4 times	15
2	Rapat Dewan Komisaris: Board of Commissioners Meeting Jumlah Rapat Direksi, Direksi & Komisaris) Number of Meetings (Board of Directors, BoD and BoC)	12 Kali 12 times	10
	Kehadiran dalam Rapat Attendance in Meetings	50%	10
3	Memberi Nasihat/Saran kepada Direksi Giving Advice/Suggestion to the Board of Commissioners Jumlah (minimal) Number of Advice/Suggestion given (minimum)	2 Kali 2 times	15
2.2 Aspek Pelaporan 2.2 Aspects of Reporting			30
1	Menyusun Program Kerja Dewan Komisaris Prepare the Work Program of the Board of Commissioners	1 kali 1 time	10
2	Menyampaikan Pendapat/Saran kepada Pemegang Saham/RUPS Submitting Opinions/Suggestions to Shareholders/GMS	1 kali 1 time	10
3	Menyampaikan Laporan tentang Tugas Pengawasan Submit a Supervisory Task Report	2 Kali 2 times	10
3.1 Aspek Dinamis 3.1 Dynamic Aspects			20
1	Peningkatan Kompetensi (Minimal) Competency Improvement (Minimum)	1 kali 1 time	10
2	Peran dalam Peningkatan Kinerja: Role in Performance Improvement:		
	GC	85%	10


Hasil KPI Direksi

The Results of the Board of Directors' KPI

No	Perspektif Perspectives	Bobot Weight	KPI	Target	Bobot IKU IKU Weight	Kriteria Penilaian Assessment Criteria
1	Financial	25%	Meningkatkan Pendapatan Increase Income	Rp207,22 miliar billion	7,5%	Realisasi vs Target Realization vs Target
			Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan (Margin Laba Bersih) Increase Company Profitability (Net Profit Margin)	6,05%	5,0%	
			Mengelola Efektifitas Biaya Operasi (BOPO) Managing Operational Cost Effectiveness (BOPO)	24,2%	7,5%	
2	Customer	30%	Tingkat Komplain Pelanggan Customer Complaint Rate	<1%	10,0%	
			Pemenuhan Data Pendukung Kajian Tarif Integrasi Jaklingko Fulfillment of Supporting Data for the Jaklingko Integration Tariff Study	100%	10,0%	
			Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction	86%	10,0%	
3	Internal Process	25,0%	Pemenuhan SPM LRT Jakarta Fulfillment of Jakarta LRT SPM	100%	10,0%	
			System Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	30 Dec 2021	5,0%	
			Surveillance ISO 9001:2015 Surveillance ISO 9001:2015	100%	5,0%	
			Perolehan Sertifikasi SMK3 Obtaining SMK3 Certification	100%	5,0%	
			Pemenuhan Konten Sustainability Report Jakpro Group Tahun 2020 Fulfillment of Jakpro Group's 2020 Sustainability Report Content	100%	5,0%	
4	Learning & Growth	20,0%	Pengembangan Kapabilitas Karyawan Employee Capability Development	40	7,5%	
			Nilai GCG Perusahaan Corporate GCG Value	75	7,5%	
			Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Follow-up on the results of the The Audit Board of the Republic of Indonesia's examination	85%	5,0%	



TRIWULAN IV		Capaian Achievement	Nilai WIG WIG Score	Nilai Kinerja Performance Score	Total
Target	Realisasi Realization				
207.215.484.431	126.367.216.450	61%	7,5%	5%	103%
6,05%	4,16%	69%	5,0%	3%	
24,18%	35,03%	55,1%	7,5%	4%	
<1%	0,006%	100%	10,0%	10%	
100%	100%	100%	10,0%	10%	
86%	89,20%	104%	10,0%	10%	
100%	98,54%	99%	10,0%	10%	
100%	100,00%	100%	5%	5%	
100%	100%	100%	5,0%	5%	
100%	100%	100%	5,0%	5%	
100%	100%	100%	5,0%	5%	
40	93	233%	7,5%	7,5%	
75	85,03	113%	7,5%	7,5%	
85%	85%	100%	5,0%	5,0%	



REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79 tahun 2019 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI No. 79 tahun 2019, komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
<ul style="list-style-type: none"> Honorarium. Tunjangan. Fasilitas. Tantiem/Insentif Kinerja. <p>Pajak atas Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Sedangkan pajak atas Tantiem/ Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Honorarium. Allowances. Facilities. Tantiem/Performance Incentives. <p>Taxes on Honorarium, Allowances, and Facilities for the Board of Commissioners are borne by the Company. Meanwhile, taxes on bonuses/ performance incentives for the Board of Commissioners are borne by each member of the Board of Commissioners.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gaji. Tunjangan. Fasilitas. Tantiem/Insentif Kinerja. <p>Pajak atas Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Sedangkan pajak atas Tantiem/ Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Salary. Allowance. Facilities. Tantiem/Performance Incentives. <p>Taxes on salary, allowances, and facilities for the Board of Directors are borne by the Company. Meanwhile, taxes on Tantiem/Performance Incentives for the Board of Directors are borne by the respective Directors.</p>

Perhitungan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Calculation of the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Direktur Utama President Director	100%
Direksi Lainnya Other Directors	Sebesar 90% dari gaji Direktur Utama 90% of the salary of the President Director
Komisaris Utama President Commissioner	Sebesar 45% dari gaji Direktur Utama 45% of the salary of the President Director
Komisaris Lainnya Other Commissioners	Sebesar 90% dari Komisaris Utama 90% of the salary of the President Commissioner

JUMLAH NOMINAL REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 79 of 2019 concerning Guidelines for the Income of Board of Directors, Supervisory Boards, and Board of Commissioners of Regional Owned Enterprises.

REMUNERATION STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Based on the Regulation of the Governor of DKI No. 79 of 2019, the components of the income of the Board of Commissioners and the Board of Directors consist of:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
<ul style="list-style-type: none"> Honorarium. Tunjangan. Fasilitas. Tantiem/Insentif Kinerja. <p>Pajak atas Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Sedangkan pajak atas Tantiem/ Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Honorarium. Allowances. Facilities. Tantiem/Performance Incentives. <p>Taxes on Honorarium, Allowances, and Facilities for the Board of Commissioners are borne by the Company. Meanwhile, taxes on bonuses/ performance incentives for the Board of Commissioners are borne by each member of the Board of Commissioners.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gaji. Tunjangan. Fasilitas. Tantiem/Insentif Kinerja. <p>Pajak atas Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Sedangkan pajak atas Tantiem/ Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Salary. Allowance. Facilities. Tantiem/Performance Incentives. <p>Taxes on salary, allowances, and facilities for the Board of Directors are borne by the Company. Meanwhile, taxes on Tantiem/Performance Incentives for the Board of Directors are borne by the respective Directors.</p>

AMOUNT OF NOMINAL REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Information on the nominal amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is as follows:



Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Table of Nominal Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Jabatan Position	Jumlah (Rupiah) Total Amount (in IDR)
Komisaris Board of Commissioners	621.265.802
Direksi Board of Directors	3.661.691.461

RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DEWAN KOMISARIS YANG MENGUNDANG DIREKSI, DAN RAPAT DIREKSI

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS INVITING THE BOARD OF DIRECTORS, AND MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Rapat Internal Dewan Komisaris

Dalam *Board Manual* Dewan Komisari dijelaskan bahwa rapat Dewan Komisaris dapat diadakan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan, di mana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat rutin internal berkala sebanyak 1 (satu) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Internal Meeting of the Board of Commissioners

In the *Board Manual* of the Board of Commissioners it is stated that the Board of Commissioners' meeting can be held periodically, i.e. at least once in 1 (one) month, in which the Board of Commissioners may invite the Board of Directors to the meeting. Meetings of the Board of Commissioners may be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners, or at the request of 1 (one) shareholder, who jointly represent 1/10 (one tenth) of the number of shares with valid voting rights.

Throughout 2021, the Board of Commissioners has held 1 (one) regular internal meeting with the following attendance levels:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Mohamad Aprindy*	Komisaris Utama President Commissioner	1	1	100%
Romy Barenco**	Komisaris Commissioner	1	1	100%
Tatak Ujiyati***	Komisaris Commissioner	-	-	-

*) mulai menjabat sejak 12 Juli 2021 | took office since July 12, 2021

**) mulai menjabat sejak 16 April 2021 | took office since April 16, 2021

***)mulai menjabat sejak 31 Desember 2021 | took office since December 31, 2021

Agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The agenda for discussion in the meeting of the Board of Commissioners was as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Meeting Attendees
1	11 Agustus 2021 August 11, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja Juli 2021 Rencana (draft surat) Arahan Dekom ke BOD LRTJ Performance Evaluation of July 2021 Directive Plan (draft letter) from the BOC to the BOD of LRTJ 	BoC, Komite Audit, dan Sekdekom BOC, Audit Committee, Secretary of the BOC



Rapat Gabungan Antara Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menjaga hubungan komunikasi serta pandangan dalam memutuskan keputusan penting terkait dengan kelangsungan usaha Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat gabungan. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 10 kali pertemuan, dengan uraian tingkat kehadiran pada tabel berikut:

Joint Meeting Between the Board of Commissioners and the Board of Directors

In maintaining communication as well as views in making important decisions related to the continuity of the Company's business, the Board of Commissioners and the Board of Directors hold joint meetings. Throughout 2021, the Board of Commissioners and the Board of Directors held 10 joint meetings, with a description of the attendance rate in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Mohamad Aprindy*	Komisaris Utama President Commissioner	5	5	100,00%
M. Taufiqurrachman**	Komisaris Utama President Commissioner	5	5	100,00%
Romy Bareno***	Komisaris Commissioner	8	8	100,00%
Tatak Ujiyati	Komisaris Commissioner	-	-	-
Direksi Board of Directors				
Hendri Saputra****	Direktur Utama President Director	2	2	100,00%
Wijanarko*****	Direktur Utama President Director	8	8	100,00%
Adrian Rusmana	Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Director of Finance and Business Development	4	4	100,00%
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan Perawatan Director of Operations and Maintenance	2	2	100,00%
Rudy Hartono*****	Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Director of Finance and Business Development	5	5	100,00%
Indarto Wibisono*****	Direktur Operasi dan Perawatan Director of Operations and Maintenance	8	8	100,00%

*) mulai menjabat sejak 12 Juli 2021 | took office since July 12, 2021

**) berhenti menjabat sejak 12 Juli 2021 | stopped serving since July 12, 2021

***) mulai menjabat sejak 16 April 2021 | took office since April 16, 2021

****) mulai menjabat sejak 3 November 2021 | took office since November 3, 2021

*****) berhenti menjabat sejak 3 November 2021 | stopped serving since November 3, 2021

******) berhenti menjabat sejak 12 Juli 2021 | stopped serving since July 12, 2021

*****++) berhenti menjabat sejak 3 November 2021 | stopped serving since November 3, 2021

Agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

The agenda for discussion in the Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors was as follows:



No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Meeting Attendees
1	7 Januari 2021 January 7, 2021	Pembahasan Materi Performance Dialogue Discussion of Performance Dialogue Material	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris Direksi Kepala Divisi Board of Commissioners Board of Directors Head of Divisions
2	25 Februari 2021 February 25, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Operasional sampai dengan Januari 2021 Kinerja Keuangan sampai dengan Januari 2021 Operational Performance up to January 2021 Financial Performance up to January 2021 	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris Direksi Komite audit Kepala Departemen Board of Commissioners Board of Directors Audit Committee Head of Departments
3	29 April 2021 April 29, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Induksi Komisaris – Bapak Romy Bareno Paparan Kinerja Operasional dan Keuangan LRT Jakarta Januari-Maret 2021 Paparan Materi Pra-RUPS Paparan Poin Perubahan Anggaran Dasar Induction of a New Commissioner – Mr Romy Bareno Presentation of the Operational and Financial Performance of the Jakarta LRT January-March 2021 Presentation of Pre-GMS Material Exposure on Points of Changes to Articles of Association 	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris Direksi Komite audit Kepala Divisi Kepala Departemen Board of Commissioners Board of Directors Audit committee Head of Divisions Head of Departments
4	1 Mei 2021 May 1, 2021	Pembahasan Lanjutan Performance Dialogue – Posisi Cashflow LRTJ Continued Discussion on Performance Dialogue – LRTJ Cashflow Position	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris Direksi Kepala Divisi Kepala Departemen Board of Commissioners Board of Directors Head of Divisions Head of Departments
5	8 Juni 2021 June 8, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja sampai dengan Mei 2021 (Jumlah penumpang, SPM, Kinerja Sarana, Kinerja Prasarana, Kinerja Keuangan, KPI) Progress Perjanjian Subsidi 2021 Update Perjanjian Pemanfaatan Aset Rencana Pelatihan Pengurus tahun 2021 Progress Bisnis NFB terhadap Target tahun 2021 Progress Human Capital Development (Penimbangan Karya, Kurve Normal, Coaching untuk Karyawan, Assessment 360 degree, Update Proses Rekrutmen) Pencapaian GCG (yang perlu dieskalasi pengurus) Performance Report up to May 2021 (including Number of passengers, SPM, Facilities Performance, Infrastructure Performance, Financial Performance, and KPI) Progress of the 2021 Subsidy Agreement Update on the Asset Utilization Agreement Management Training Plan for 2021 NFB Business Progress towards the 2021 Target Progress of Human Capital Development (Weighing Work, Normal Curve, Coaching for Employees, 360 Degree Assessment, Update on Recruitment Process) Achievement of GCG (which needs to be escalated by the management) 	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris Direksi Kepala Divisi Kepala Departemen Board of Commissioners Board of Directors Head of Divisions Head of Departments



No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Meeting Attendees
6	9 Agustus 2021 August 9, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Kinerja Operasional dan Keuangan Juli 2021 Laporan, update perkembangan & action plan kejadian kebakaran Gedung MCC Realization of Operational and Financial Performance of July 2021 Reports, progress updates & action plans for the MCC Building fire incident 	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris Direksi Komite audit Kepala Divisi Kepala Departemen Board of Commissioners Board of Directors Audit Committee Head of Divisions Head of Departments
7	10 September 2021 September 10, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Perusahaan Bulan Agustus 2021 Kinerja Bulan Agustus 2021, s.d. Bulan Agustus 2021, & Prognosa 2021 (Kinerja Operasional dan Keuangan) Materi Tambahan: <ul style="list-style-type: none"> List semua dokumen korporasi (Manual Perusahaan, Board Manual, GCG Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, dsb) Cashflow s.d. Desember 2021 Pelaksanaan dari saran dan rekomendasi Dewan Komisaris Company Activities in August 2021 Performance in August 2021, performance up to August 2021, and 2021 Prognosis (on Operational and Financial Performance) Additional Materials: <ul style="list-style-type: none"> List of all corporate documents (Company Manual, Board Manual, GCG Manual, Procedures, Work Instructions, etc.) Cashflow up to December 2021 Implementation of the suggestions and recommendations of the Board of Commissioners 	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris Direksi Komite audit Kepala Divisi Kepala Departemen Board of Commissioners Board of Directors Audit Committee Head of Divisions Head of Departments
8	13 Oktober 2021 October 13, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Perusahaan Bulan September 2021 Kinerja Bulan September 2021 & Prognosa 2021 <ul style="list-style-type: none"> Kinerja Operasional Kinerja Keuangan Update informasi terkait aksi-aksi korporasi yang strategis seperti Jaklingko, Update Tindak Lanjut Kebakaran di Gedung MCC, dan lain sebagainya Cash Flow dan gambaran Neraca Keuangan Perusahaan pada akhir tahun 2021 Rencana bisnis dan skenario untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan baru di luar pendapatan dari Subsidi dan Sunga Bank Company Activities in September 2021 Performance in September 2021 & 2021 Prognosis on: <ul style="list-style-type: none"> Operational Performance Financial performance Update information related to strategic corporate actions such as Jaklingko, Update on the Follow-up of fire incident at the MCC Building, and so on Cash Flow and Company Balance Sheet overview at the end of 2021 Business plans and scenarios to increase new sources of income apart from income from Bank Subsidy and Interest 	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris Direksi Komite audit Kepala Divisi Kepala Departemen (Sekretaris Direksi) Board of Commissioners Board of Directors Audit Committee Head of Divisions Head of Departments (Secretary to the Board of Directors)
9	8 November 2021 November 8, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Arahan Dekom ke BOD, GM, Managers, dan Asset Managers Kinerja s.d. Oktober 2021 & Pronogsa Tahun 2021 RKAP 2022 Board of Commissioners guidance to BOD, GM, Managers, and Assistant Managers Performance up to October 2021 and 2021 Pronogsis RKAP 2022 	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris Direksi Komite audit Kepala Divisi Kepala Departemen Board of Commissioners Board of Directors Audit Committee Head of Divisions Head of Departments



No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Meeting Attendees
10	9 Desember 2021 December 9, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Perusahaan pada Bulan November 2021 Kinerja Operasional dan Keuangan Bulan November 2021 & Prognosa 2021 Program Kerja Audit Intern untuk Tahun 2022 Pemetaan Risiko dan Mitigasi Risiko untuk tahun 2022 Target pencapaian GCG 2022 Company Activities in November 2021 Operational and Financial Performance for November 2021 & 2021 Prognosis Internal Audit Work Program for 2022 Risk Mapping and Risk Mitigation for 2022 Target for achieving 2022 GCG 	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris Direksi Komite audit Kepala Departemen Board of Commissioners Board of Directors Audit Committee Head of Departments

Rapat Direksi

Sesuai dengan *Board Manual* Perusahaan, Rapat Direksi merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Direksi di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi. Rapat Direksi wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan atau bila dipandang perlu diselenggarakan.

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah menyelenggarakan rapat rutin internal sebanyak 16 (enam belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Meetings of the Board of Directors

In accordance with the Company's Board Manual, the Board of Directors Meeting is a meeting held by the Board of Directors at the domicile of the Company, or the place of business activities of the Company, or in other places within the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors. Meetings of the Board of Directors must be held at least 1 (one) time a month or if deemed necessary.

Throughout 2021, the Board of Directors has held regular internal meetings for as many as 16 (sixteen) meetings with the following attendance levels:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Hendri Saputra*	Direktur Utama President Director	2	2	100%
Adrian Rusmana	Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Director of Finance and Business Development	10	10	100%
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan Perawatan Director of Operations and Maintenance	2	2	100%
Wijanarko	Direktur Utama President Director	14	13	92,8%
Rudy Hartono	Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Director of Finance and Business Development	6	6	100%
G. Indarto Wibisono	Direktur Operasi dan Perawatan Director of Operations and Maintenance	14	14	100%

*) mulai menjabat sejak 3 November 2021

*) took office since November 3, 2021



Agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan rapat Direksi adalah sebagai berikut:

The agenda for discussion in the meeting of the Board of Directors was as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda
1	2 Februari 2021 February 2, 2021	Anggaran subsidi 2021, portofolio bisnis, kinerja Januari 2021, SDM 2021 subsidy budget, business portfolio, January 2021 performance, HR
2	2 Juni 2021 June 2, 2021	Program peningkatan Ridership, SDM, Strategi Bisnis, Cashflow Ridership improvement program, HR, Business Strategy, Cashflow
3	7 Juni 2021 June 7, 2021	Strategi Bisnis, SDM, Keuangan Business Strategy, HR, Finance
4	22 Juni 2021 June 22, 2021	SDM, KPPS penambahan bidang usaha, pendataan vaksinasi karyawan HR, Shareholders' Resolution on the addition of business fields, employee vaccination data collection
5	29 Juni 2021 June 29, 2021	Keuangan, SDM, Strategi Bisnis, RKAP 2022 Finance, HR, Business Strategy, 2022 RKAP
6	6 Juli 2021 July 6, 2021	SMK3, Progress Bisnis NFB, Subsidi, Revisi RKAP 2022 Occupational Health and Safety Management System, NFB Business Progress, Subsidy, Revision of 2022 RKAP
7	7 September 2021 September 7, 2021	GCG, Integritas dalam Bekerja, Progress Pengadaan, Penetapan Weekly BoD Meeting, Health Monitoring GCG, Work Integrity, Procurement Progress, Determination of Weekly BoD Meeting, Health Monitoring
8	14 September 2021 September 14, 2021	Progres verifikasi taksasi revenue, progress review SOP, tindak lanjut notulen Bod-BoC, Rencana vaksinasi di stasiun PGD, tindak lanjut hasil konsultan SDM dan langkah-langkah strategis Revenue taxation verification progress, progress review of SOPs, follow-up to Bod-BoC minutes, vaccination plans at PGD stations, follow-up on results of HR consultants and strategic steps
9	21 September 2021 September 21, 2021	Proses Pemilihan Asuransi Kesehatan, tindak lanjut aset DLP, rencana penyelesaian audit KAP, progres rekrutmen Health Insurance Selection Process, follow-up on DLP assets, Public Accounting Firm audit completion plan, recruitment progress
10	28 September 2021 September 28, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Aset Jakpro dengan kategori DLP • Tindak Lanjut Surat Jakpro terkait Penyelesaian Asuransi Kasus Derailment • Progress SOP Bidang Operasi dan Perawatan • Kelanjutan Memo Mutasi Karyawan dan Kelanjutan Pekerjaan Konsultan SDM • Struktur Organisasi menyangkut QS.H.E dan Risk Management • Status rekrutmen GM SDM & GA and Head Legal • Kebijakan Tunjangan Pendidikan • Update Asuransi Kesehatan dan DPLK • Update Proyeksi revenue LRT 2021 • Penilaian Performance Individu Semester 2 • Settlement of Jakpro Assets with the DLP category • Follow-up on Jakpro's Letter regarding Derailment Case Insurance Settlement • Progress of SOP for Operation and Maintenance • Continuation of Employee Transfer Memo and Continuation of HR Consultant Work • Organizational Structure regarding QSHE and Risk Management • Recruitment status of GM HR & GA and Head of Legal • Educational Allowance Policy • Update on Health Insurance and DPLK • Update the 2021 LRT revenue projection • Individual Performance Assessment for the 2nd Semester
11	5 Oktober 2021 October 5, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Update Status Asuransi Kesehatan Karyawan • Update Pedoman Kebijakan Investasi Barang Modal (Capex) • Update Progres Pengadaan E-Procurement • Update Progress Review SOP Pedoman dan Kebijakan di Direktorat O&M • Progress Tindak Lanjut Meeting BoD 28 September 2021 • Lomba Healthy Challenge LRTJ • Update on Employee Health Insurance Status • Update on the Policy Guidelines for Capital Goods Investment (Capex) • E-Procurement Progress Update • Update on Progress Review of SOP Guidelines and Policies at the O&M Directory • Progress of the follow-up to the BoD Meeting on September 28, 2021 • LRTJ Health Challenge Competition



No.	Tanggal Date	Agenda
12	13 Oktober 2021 October 13, 2021	Pembahasan Lanjutan Terkait Anggaran kepada Kadishub dan Komisi B Perihal PSO LRTJ pada tanggal 9 Oktober 2021 lalu Follow-up discussion regarding budget to Head of the Department of Transportation and Commission B regarding PSO LRTJ on October 9, 2021
13	19 Oktober 2021 October 19, 2021	Pembahasan anggaran belanja 2021-2022 Discussion on the 2021-2022 budget
14	25 Oktober 2021 October 25, 2021	Pembahasan tindak lanjut rapat BoD Jakpro membahas usulan RKA th 2022 Discussion on the follow-up to the Jakpro BoD meeting discussing the 2022 RKA proposal
15	22 November 2021 November 22, 2021	<ul style="list-style-type: none">• Pembaharuan Ruang Lingkup Bisnis LRTJ• Persiapan kerangka hukum yang perlu disiapkan untuk pembaharuan ruang lingkup bisnis LRTJ• Progress Final Acceptance Certificate kontrak Prasarana Fase 1 (include DLP, major issues) dan perbaikan prasaraana yang dapat dibayai oleh dana retention• Sarapan anggaran subsidi sampai saat ini dan update subsidi 2021 yang telah disetujui terakhir• Permasalahan hal lainnya• Renewal of the LRTJ Scope of Business• Preparation of the legal framework for the renewal of the LRTJ scope of business• Progress of Final Acceptance Certificate for Phase 1 Infrastructure contracts (including DLP, major issues) and infrastructure improvements that can be financed by retention funds• Breakfast subsidy budget to date and the latest approved 2021 subsidy update• Other matters
16	6 Desember 2021 December 6, 2021	<ul style="list-style-type: none">• Rencana Perubahan Struktur Organisasi PT LRT Jakarta• Penyesuaian SOP, Matriks Kewenangan dan <i>Board Manual</i> terhadap perubahan Struktur Organisasi• Penyesuaian anggaran dasar yang perlu dibahas dalam Rapat Komisaris dan Direksi• Plan to Change the Organizational Structure of PT LRT Jakarta• Adjustment of SOP, Authority Matrix and Board Manual to changes in Organizational Structure• Adjustments of the Articles of Association that need to be discussed in the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir

PT Jakarta Propertindo (persero) ("PT Jakpro") dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo ("PT JIP") adalah Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan. Kepemilikan saham PT Jakpro atas Perusahaan adalah sebesar 99,55% sementara PT JIP memiliki saham Perusahaan sebesar 0,45%

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pemegang Saham Utama/Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki Pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing.

DISCLOSURE OF AFFILIATIONS BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Information on Major Shareholders and/or Controlling Shareholders to the Name of Ultimate Owners

PT Jakarta Propertindo (Persero) or ("PT Jakpro"), and PT Jakarta Infrastruktur Propertindo ("PT JIP") are Shareholders of the Company, as stated in the Company's Articles of Association. PT Jakpro's share ownership in the Company is 99.55%, while PT JIP owns 0.45% of the Company's shares.

Affiliations of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Major/Controlling Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors respect each other in the implementation of their respective duties, responsibilities, and authorities, in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company have guidelines and work procedures that include, among others, their respective responsibilities, obligations, authorities and rights.



Berikut disampaikan terkait hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun Pemegang Saham.

The following is the details of the affiliations of the Board of Commissioners and the Board of Directors to fellow members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as Shareholders.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Familial Relationships with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relationships with		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Dewan Komisaris Board of Commissioners							
Mohamad Aprindy	Komisaris Utama President Commissioner	x	x	x	x	x	x
Romy Bareno	Komisaris Commissioner	x	x	x	x	x	x
Tatak Ujiyati	Komisaris Commissioner	x	x	x	x	x	x
Direksi Board of Directors							
Hendri Saputra	Direktur Utama President Director	x	x	x	x	x	x
Adrian Rusmana	Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis Director of Finance and Business Development	x	x	x	x	x	x
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan Perawatan Director of Operations and Maintenance	x	x	x	x	x	x

✓ = ada | x = tidak ada | ✓ = there is a relationship | x = there is no relationship

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hingga akhir tahun 2021, Perseroan tidak melakukan penerbitan saham untuk dimiliki oleh publik, dan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham Perseroan.

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Until the end of 2021, the Company does not issue shares to be owned by the public, and does not have a share ownership program by management. Thus, the Board of Commissioners and the Board of Directors do not own the Company's shares.

	Kepemilikan Saham Share Ownership	
	PT LRT Jakarta	Perusahaan lain > 5% Other companies >5%
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Mohamad Aprindy (Komisaris Utama) (President Commissioner)	x	x



	Kepemilikan Saham Share Ownership	
	PT LRT Jakarta	Perusahaan lain > 5% Other companies >5%
Romy Bareno (Komisaris) (Commissioner)	x	x
Tatak Ujiyanti (Komisaris) (Commissioner)	x	x
Direksi Board of Directors		
Hendri Saptura (Direktur Utama) (President Director)	x	x
Adrian Rusmana (Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis) (Director of Finance and Business Development)	x	x
Aditia Kesuma Negara (Direktur Operasi dan Perawatan) (Director of Operations and Maintenance)	x	x

✓ = ada | x = tidak ada | ✓ = owns shares | x = doesn't own shares

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan Kepengurusan antar anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain dalam periode tahun 2021:

DISCLOSURE OF CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The following table shows the managerial relationship between members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in other companies in the 2021 period:

	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Management at Other Companies/Institutions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As a Member of the Board of Directors	Jabatan Lainnya Other Positions
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Mohamad Aprindy (Komisaris Utama) (President Commissioner)	x	x	x
Romy Bareno (Komisaris) (Commissioner)	x	x	x
Tatak Ujiyanti (Komisaris) (Commissioner)	x	x	x
Direksi Board of Directors			
Hendri Saptura (Direktur Utama) (President Director)	x	x	x
Adrian Rusmana (Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis) (Director of Finance and Business Development)	x	x	x
Aditia Kesuma Negara (Direktur Operasi dan Perawatan) (Director of Operations and Maintenance)	x	x	x

✓ = ada | x = tidak ada | ✓ = holds concurrent position | x = doesn't hold concurrent position



ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal pengawasan, Dewan Komisaris membentuk organ pendukung yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris dibentuk Dewan Komisaris untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dibentuk Sekretariat Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Komisaris mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam Rapat Dewan Komisaris. Bahan-bahan tersebut antara lain Dokumen/laporan manajemen Perusahaan yang diperoleh dari Sekretaris Perusahaan berupa:
 - a. Laporan Bulanan Perusahaan;
 - b. Laporan Triwulanan Perusahaan;
 - c. Laporan Tahunan Perusahaan; dan
 - d. Laporan-laporan lainnya yang diperlukan, serta dokumen/laporan dari komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.
2. Mempersiapkan bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya antara lain usulan penjualan aktiva, rencana investasi/portofolio, rencana kredit/hal-hal yang berkaitan dengan permodalan perusahaan, masalah-masalah yang timbul antara Perseroan dan pihak di luar, masalah-masalah lain yang mengharuskan pengambilan keputusan oleh Komisaris dan hal-hal lain.
3. Menyelenggarakan rapat dalam lingkungan Komisaris, baik yang bersifat rutin maupun non rutin dengan berbagai pihak.
4. Sekretaris Dewan Komisaris mendokumentasikan bahan-bahan yang diterima dari Sekretaris Perusahaan tersebut sesuai prosedur administrasi.
5. Sekretaris Dewan Komisaris menyampaikan bahan-bahan tersebut kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Komitenya.

In supporting the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, in terms of supervision, the Board of Commissioners establishes a supporting organ consisting of the Secretary to the Board of Commissioners, and the Audit Committee.

SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretary to the Board of Commissioners was established by the Board of Commissioners to facilitate and optimize the implementation of the duties and authorities of the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners are as follows:

1. The Secretary to the Board of Commissioners prepares the materials to be used in the Meeting of the Board of Commissioners. These materials include documents/reports on Company management obtained from the Corporate Secretary in the form of:
 - a. Company Monthly Report;
 - b. Company Quarterly Report;
 - c. Company's Annual Report; and
 - d. Other required reports, as well as documents/reports from committees under the Board of Commissioners.
2. Prepare the necessary materials/documents related to matters that must obtain a decision from the Board of Commissioners regarding the Company's management activities carried out by the Board of Directors and all staff, including proposals for selling assets, investment plans/portfolios, credit plans/other aspects related to the Company's capital, problems that arise between the Company and external parties, problems that require decision making by the Commissioner, and other matters.
3. Hold meetings within the Board of Commissioners, both routine meetings and non-routine meetings with various parties.
4. The Secretary to the Board of Commissioners shall document the materials received from the Corporate Secretary in accordance with administrative procedures.
5. The Secretary to the Board of Commissioners conveys these materials to all Members of the Board of Commissioners and their Committees.



6. Sekretaris Dewan Komisaris menindaklanjuti setiap arahan Dewan Komisaris dan Komitenya.
7. Jika arahan tersebut harus ditindaklanjuti dengan rapat, Sekretaris Dewan Komisaris segera menyusun agenda rapat sesuai arahan Dewan Komisaris.
8. Sekretaris Dewan Komisaris mendengarkan agenda rapat beserta bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat kepada para Anggota Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan-masukan atas agenda rapat tersebut.
9. Anggota Dewan Komisaris menerima, membaca dan mempelajari agenda rapat beserta bahan-bahannya. Setelah selesai, agenda tersebut dikirimkan kembali kepada Sekretaris Dewan Komisaris beserta masukan-masukan dari Anggota Dewan komisaris yang bersangkutan dan membutuhkan paraf sebagai tanda menyetujui agenda rapat.
10. Sekretaris Dewan Komisaris membuat surat undangan rapat setelah menerima semua masukan yang ada dari Anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum diadakan rapat Dewan Komisaris, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
11. Dalam surat undangan tersebut, Sekretaris Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta menyusun butir-butir masalah yang akan dibicarakan dalam rapat.
12. Jika rapat tersebut mengundang pihak lain, Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk membuat surat undangan kepada pihak yang dimaksud.
13. Peserta rapat menerima undangan dan bahan-bahan rapat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum diadakan rapat Dewan Komisaris.
14. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara Anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara Anggota Dewan Komisaris yang hadir.
15. Sekretariat Dewan Komisaris membuat dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Komisaris.
6. The Secretary to the Board of Commissioners follows up on every instructions from the Board of Commissioners and its Committees.
7. If the instructions must be followed up with a meeting, the Secretary to the Board of Commissioners immediately prepares the meeting agenda according to the instruction of the Board of Commissioners.
8. The Secretary to the Board of Commissioners pays attention to the agenda of the meeting along with the materials to be discussed in the meeting with the Members of the Board of Commissioners to obtain inputs on the agenda of the meeting.
9. Members of the Board of Commissioners receive, read and study the meeting agenda and its materials. After completion, the agenda is sent back to the Secretary to the Board of Commissioners along with inputs from the relevant Member of the Board of Commissioners which requires initials as a sign of approval of the meeting agenda.
10. The Secretary to the Board of Commissioners shall make an summoning letter for the meeting after receiving all input from the Members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days prior to the meeting of the Board of Commissioners, excluding the date of the summons and the date of the meeting.
11. In the summoning letter, the Secretary to the Board of Commissioners must include the agenda, date, time, and place of the meeting and compile points of problems to be discussed in the meeting.
12. If the meeting invites other parties, the Secretary to the Board of Commissioners is tasked with making an invitation letter to the party concerned.
13. Meeting participants receive invitations or summons and meeting materials no later than 3 (three) working days prior to the Board of Commissioners meeting.
14. The Board of Commissioners Meeting is chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is unable to attend, which does not need to be proven to a third party, the Board of Commissioners Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is elected by and from among the members of the Board of Commissioners present.
15. The Secretariat to the Board of Commissioners prepares and administers the minutes of the Board of Commissioners' meetings.



KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Piagam Komite Audit

Komite Audit Perseroan memiliki Piagam sebagai acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal Perseroan.

Piagam Komite Audit antara lain berisi:

1. Struktur Komite Audit;
2. Pembentukan dan pengangkatan anggota Komite Audit;
3. Persyaratan dan masa tugas anggota Komite Audit;
4. Fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Audit;
5. Lingkup pekerjaan;
6. Kode etik dan mekanisme rapat.

Kriteria Komite Audit dan Masa Jabatan

Persyaratan

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis operasi Perseroan;
5. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perseroan.

Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Audit Perusahaan adalah 1 (satu) Tahun.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee was established and is responsible to the Board of Commissioners in assisting the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal system and the effectiveness of the implementation of the duties of the external auditor and internal auditor by monitoring and evaluating the planning and implementation of the audit as well as monitoring the follow-up to the audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.

Audit Committee Charter

The Company's Audit Committee has a Charter as a reference and work guideline for the Audit Committee in carrying out its duties and authorities, and in carrying out its obligations to comply with laws and regulations and the Company's internal control.

The Audit Committee Charter, among others, contains:

1. Structure of the Audit Committee;
2. Formation and appointment of members of the Audit Committee;
3. Requirements and Terms of Office of members of the Audit Committee;
4. Functions, duties, authorities and responsibilities of the Audit Committee;
5. Scope of work;
6. Code of ethics and meeting mechanism.

Audit Committee Criteria and Term of Office

Condition

1. Possesses high integrity, ability, knowledge, and adequate experience in accordance to their educational background, and able to communicate well;
2. At least one of the members of the Audit Committee must have an educational background and experience in finance and accounting;
3. Possesses sufficient knowledge to read and understand financial statements;
4. Possesses adequate knowledge of laws and regulations, especially those concerning Regional Owned Enterprises, and laws and regulations relating to the Company's business operations;
5. One of the members of the Audit Committee has the ability and understanding of the Company's business scope.

Term of Office

The term of office of the Company's Audit Committee is 1 (one) year.



Komposisi Komite Audit

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Establishment
Denny	Komite Audit Audit Committee	001/SDM/111/II/2021

Profil Komite Audit

Denny

Komite Audit | Head of Audit Committee
Periode Jabatan 01 Februari 2021 – 31 Januari 2022
Term of Office:

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 51 tahun per 31 Desember 2021

Domicili

DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi & Manajemen – Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Riwayat Pekerjaan

- Staff Ahli Internal Audit, BAKTI – Kementerian Komunikasi & Teknologi Informasi (2020)
- Konsultan Internal Audit, BAKTI – Kementerian Komunikasi & Teknologi Informasi (2018-2019)
- Lead Auditor and Implementer of ISO 27001:2015, PT. Sertifikasi Nasional Indonesia (2016-2018)
- Information Technology Audit Manager, Crowe Horwath (2015-2016)
- Internal Audit Manager, PT Allianz Life Indonesia (2013-2015)
- Information Technology Audit Manager, PT Rabobank International - Indonesia (2011-2013)
- Information Technology Development and CAATs Audit Manager, PT Bank International Indonesia (2010-2011)
- Information Technology Operations Audit Manager, PT Bank International Indonesia (2008-2010)
- Information Technology Development Audit Team Leader, PT Bank International Indonesia (2006-2008)
- Information Technology Development Audit Staff, PT Bank International Indonesia (2004-2006)
- Information Technology Operation Audit Staff, PT Bank International Indonesia (2002-2004)
- Operational and Credit Audit Staff, PT Bank International Indonesia (1997-2002)
- Account Officer, PT. Haga Bank (1994 – 1997)

Sertifikasi

- Lead Auditor ISO/IEC 27001, PEBC
- Lead Implementer ISO/IEC 27001, PEBC
- BSMR Level 1, BSMR
- Qualified Internal Auditor, YPIA

Profile of the Audit Committee

Personal Data

Indonesian
51 years old as of December 31, 2021

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

Educational Background

Bachelor (S1) of Economics & Management – Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Employment History

- Internal Audit Expert Staff, BAKTI – Ministry of Communication & Information Technology (2020)
- Internal Audit Consultant, BAKTI – Ministry of Communication & Information Technology (2018-2019)
- Lead Auditor and Implementer of ISO 27001:2015, PT. Sertifikasi Nasional Indonesia (2016-2018)
- Information Technology Audit Manager, Crowe Horwath (2015-2016)
- Internal Audit Manager, PT Allianz Life Indonesia (2013-2015)
- Information Technology Audit Manager, PT Rabobank International Indonesia (2011-2013)
- Information Technology Development and CAATs Audit Manager, PT Bank International Indonesia (2010-2011)
- Information Technology Operations Audit Manager, PT Bank International Indonesia (2008-2010)
- Information Technology Development Audit Team Leader, PT Bank International Indonesia (2006-2008)
- Information Technology Development Audit Staff, PT Bank International Indonesia (2004-2006)
- Information Technology Operation Audit Staff, PT Bank International Indonesia (2002-2004)
- Operational and Credit Audit Staff, PT Bank International Indonesia (1997-2002)
- Account Officer, PT. Haga Bank (1994 – 1997)

Certification

- ISO/IEC 27001 Lead Auditor, PEBC
- ISO/IEC 27001 Lead Implementer, PEBC
- BSMR Level 1, BSMR
- Qualified Internal Auditor, YPIA

Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit Perseroan diwajibkan memenuhi kriteria independensi:

1. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam

Independensi Komite Audit

Members of the Company's Audit Committee are required to meet the following independence criteria:

1. Not an employee of a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, or other party providing audit services, non-audit services and or other consulting services to



- waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
2. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris.
 3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugastugas sebagai anggota Komite Audit.
 4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor eksternal
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi atas segala informasi yang dikeluarkan Perseroan
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
6. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan
7. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan
9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan dalam Perseroan
10. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa
11. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan dan kepatuhan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga;
12. Melakukan penelaahan atas saran, permasalahan, atau keluhan stakeholders yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris

the Company within the last 6 (six) months prior to being appointed by the Board of Commissioners.

2. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, or control the Company within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners, except for members of the Audit Committee from the Board of Commissioners.
3. Does not have a business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business, including not receiving compensation from the Company and its subsidiaries other than the service fee received in relation with their duties as a member of the Audit Committee.
4. Does not have any familial relationship due to marriage and descendant, up to the second degree, both horizontally and vertically with the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/Controlling Shareholders of the Company.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

1. Assist the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external auditor's duties;
2. Assess the implementation of activities and the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and external auditors
3. Provide recommendations on the improvement of the management control system and its implementation;
4. Ensure that there is an evaluation procedure for all information issued by the Company
5. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners;
6. Review the financial information to be issued by the Company, including financial statements, projections and other reports related to the Company's financial information
7. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between the Board of Directors and the external auditor on the services provided;
8. Review complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes
9. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company
10. Provide recommendations regarding the appointment of an external auditor to the Board of Commissioners based on independence, scope of assignment, and remuneration
11. Review compliance with laws and regulations related to the Company's activities and compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties;
12. Review suggestions, problems, or complaints from stakeholders that are submitted directly to the Board of Commissioners



13. Melakukan penelaahan atas saran, permasalahan, atau keluhan stakeholders yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris;
 14. Komite Audit dapat memberikan rekomendasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Internal kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris; dan
 15. Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit.
13. Review suggestions, problems, or complaints from stakeholders that are submitted directly to the Board of Commissioners;
 14. The Audit Committee may provide recommendations regarding the appointment and dismissal of the Head of the Internal Audit Unit to the Supervisory Board/Board of Commissioners; and
 15. The Board of Commissioners may give other assignments to the Audit Committee as stipulated in the Audit Committee charter.

Wewenang Komite Audit

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit diberikan wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap dokumen/catatan, data dan informasi Perseroan tentang pegawai, dana, aset dan sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Meminta dan memperoleh informasi, masukan, penjelasan yang dibutuhkan dari Direksi, pegawai, dan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Dapat meminta kehadiran Direksi, jajaran eksekutif dan pegawai Perseroan melalui Direksi, atau auditor eksternal dalam rapat Komite Audit;
4. Berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Pengendalian Internal, manajemen risiko, tata kelola perusahaan dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, di tahun 2021 Komite Audit telah mengikuti program pengembangan kompetensi. Uraian terkait program pengembangan kompetensi Komite Audit disajikan secara lengkap di bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Remunerasi bagi Anggota Komite Audit

LRT Jakarta memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi Komite Audit. Persetujuan pemberian remunerasi Komite Audit ditetapkan berdasarkan RKAT tahun 2021.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2021

Selama tahun 2021, Komite Audit melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit tahun 2021
2. Mengikuti agenda BoD BoC sebanyak 12 kali
3. Melakukan rapat dengan BoC sebanyak 1 kali

13. Review suggestions, problems, or complaints from stakeholders that are submitted directly to the Board of Commissioners;
14. The Audit Committee may provide recommendations regarding the appointment and dismissal of the Head of the Internal Audit Unit to the Supervisory Board/Board of Commissioners; and
15. The Board of Commissioners may give other assignments to the Audit Committee as stipulated in the Audit Committee charter.

Authorities of the Audit Committee

To carry out its duties and responsibilities, the Audit Committee is given the following authorities:

1. Full, free and unrestricted access to documents/records, data and information of the Company regarding employees, funds, assets and other resources of the Company related to the implementation of their duties;
2. To request and obtain information, input, explanations needed from the Board of Directors, employees, and other parties related to the Company's activities;
3. May request the presence of the Board of Directors, executives and employees of the Company through the Board of Directors, or external auditors in the Audit Committee meeting;
4. Communicate directly with employees, including the Board of Directors, and those who carry out the functions of Internal Control, risk management, corporate governance and external auditors regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;
5. Carry out other authorities given by the Board of Commissioners.

Competency Development of the Audit Committee

To improve competency and expertise in carrying out their duties and responsibilities, in 2021, the Audit Committee has participated in a number of competency development program. A complete description of the competency development programs attended by the Audit Committee is presented in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Remuneration Policy for Audit Committee Members

LRT Jakarta has a policy regarding remuneration for the Audit Committee. Approval for granting the remuneration of the Audit Committee is determined based on 2021 RKAT.

Implementation of the Duties of the Audit Committee in 2021

In 2021, the Audit Committee carried out the following activities:

1. Prepare the Audit Committee Work Plan for 2021
2. Following the BoD BoC agenda for 12 times
3. Conducted meetings with the BoC 1 times



ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan, Direksi dibantu oleh beberapa organ pendukung, yaitu Sekretaris Perusahaan, Prasarana, SDM dan GA, Sarana, Akuntansi dan Keuangan, Strategi, Bisnis dan Pengadaan, dan Audit, Risiko dan Keselamatan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Salah satu elemen dalam struktur dan proses Tata Kelola Perusahaan adalah pemastian bahwa penggunaan wewenang dan hubungan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik untuk kepentingan Perseroan. Untuk mendukung fungsi pembentukan citra positif Perseroan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan, manajemen Perseroan didukung oleh Sekretaris Perusahaan. Selain fungsi tersebut, Sekretaris Perusahaan juga bertugas untuk membantu tugas Direksi, yaitu merumuskan dan menyusun kebijakan dan pedoman, perencanaan, evaluasi, dan melaksanakan aktivitas hubungan eksternal, pemasaran, tanggung jawab sosial, protokoler, legal, administrasi, dan komunikasi internal Perseroan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ira Yuanita berdasarkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 007/SDM/106/VII/2021, tanggal 5 Juli 2021 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT LRT Jakarta. Berikut disampaikan informasi terkait profil Sekretaris Perusahaan.

In carrying out the duties and responsibilities of managing the Company, the Board of Directors is assisted by several supporting organs, namely the Corporate Secretary, Infrastructure Division, HR and GA Division, Facilities Division, Accounting and Finance Division, Strategy Division, Business and Procurement Division, and Audit, Risk, and Safety Division.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is an official who is specially appointed to carry out the functions of the Corporate Secretary and is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

One of the elements in the structure and process of Corporate Governance is ensuring that the use of authority and relationships with stakeholders functions well for the benefit of the Company. To support the function of forming a positive image of the Company through the management of effective communication programs to all stakeholders, the management of the Company is supported by the Corporate Secretary. In addition to these functions, the Corporate Secretary is also tasked with assisting the duties of the Board of Directors, namely formulating and compiling policies and guidelines, planning, evaluating, and carrying out external relations, marketing, social responsibility, protocol, legal, administrative, and internal communication activities of the Company in accordance with the Company's policies, guidelines and plans that have been set.

Profile of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary position is held by Ira Yuanita, pursuant to the Decree of the Board of Directors No. 007/SDM/106/VII/2021, dated July 5, 2021 regarding the Appointment of Permanent Employees of PT LRT Jakarta. The following is information regarding the profile of the Corporate Secretary.



Ira Yuanita

**Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary
Menjabat sejak 5 April 2021 | Term of Office**

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 41 tahun per 31 Desember 2021

Domisili

Depok, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Pendidikan

1998 – 2003 Degree of Communication, Padjadjaran University, Faculty of Communication, Majoring in Communication Management, Specification in Media Management (3,46 GPA)

Riwayat Pekerjaan

- Head of Government Relations & Regulatory Affairs Dept. – Integrated Corporate Secretary Division of FTA TV Stations of MNC Media (RCTI, MNCTV, GTV, iNews) (2017-2021)
- Head of Government Relations & Regulatory Affairs Dept., PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) (2015-2021)
- Corporate Communications Section Head, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) (2011-2015)
- Corporate Communications Senior Officer, PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNC) (2007-2011)
- Expert Assistant, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (2005-2007)
- Researcher, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Komunikasi Massa (LPPKM) (2003-2005)
- Creative Team, Production Division, TRANS TV (internship) (2002)
- Reporter, GAMMA weekly news magazine (2001)

Personal Data

Indonesian
41 years old as of December 31, 2021

Domicile

Depok, West Java, Indonesia

Educational Background

1998 – 2003 Degree of Communication, Padjadjaran University, Faculty of Communication, Majoring in Communication Management, Specification in Media Management (3.46 GPA)

Employment History

- Head of Government Relations & Regulatory Affairs Dept. – Integrated Corporate Secretary Division of FTA TV Stations of MNC Media (RCTI, MNCTV, GTV, iNews) (2017-2021)
- Head of Government Relations & Regulatory Affairs Dept., PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) (2015-2021)
- Corporate Communications Section Head, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) (2011-2015)
- Corporate Communications Senior Officer, PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNC) (2007-2011)
- Expert Assistant, Central Indonesian Broadcasting Commission (2005-2007)
- Researcher, Research and Development Institute for Mass Communication (LPPKM) (2003-2005)
- Creative Team, Production Division, TRANS TV (internship) (2002)
- Reporter, GAMMA weekly news magazine (2001)

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan investor (*investor relation*) termasuk penatausahaan serta membuat, memelihara dan menyimpan dokumen Perseroan antara lain Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus serta Risalah rapat Direksi maupun RUPS;
2. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (*public relation*);
3. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen triwulan dan tahunan yang akurat dan dapat diandalkan.
4. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, RUPS serta kegiatan lainnya dengan stakeholders antara lain press conference, dengar pendapat dengan Anggota Dewan;
5. Memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan mengenai data atau perfomance dari Perseroan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan Perseroan dan penyampaian laporan-laporan lainnya yang kepada stakeholders lainnya sesuai peraturan perundang-undangan disampaikan tepat waktu;
6. Membina dan mengendalikan kepatuhan hukum, perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memastikan terpenuhinya ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas pasar modal, bursa efek serta selalu berusaha memenuhi undang-undang dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Main Duties and Functions

1. Carry out activities related to the investor relations function, including administration as well as create, maintain and store Company documents including the Shareholders Register, Special Register, Minutes of the Board of Directors and GMS meetings;
2. Carry out activities related to the public relation functions;
3. Coordinate the preparation of accurate and reliable quarterly and annual Management Reports.
4. Organize and coordinate Board of Directors Meetings, Board of Directors and Board of Commissioners Meetings, GMS, and other activities with stakeholders including press conferences and hearings with Member of the House of Representatives;
5. Provide information services needed regarding data or performance from the Company within the limits set out in the Information Protocol established by the Company and the submission of other reports to other stakeholders in accordance with the laws and regulations submitted on time;
6. Foster and control compliance with laws, regulations and good corporate governance in order to ensure the fulfillment of the provisions set by the capital market authorities and stock exchanges, as well as always strive to comply with the laws and regulations set by the Government;



7. Mengelola kesekretariatan Direksi untuk memberikan dukungan bagi Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 9. Memberikan informasi yang material dan relevan kepada stakeholders;
 10. Mengadakan program pengenalan Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya;
 11. Melaporkan hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dan tingkat kepatuhan Perseroan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Manage the secretariat division of the Board of Directors to provide support for the Board of Directors in carrying out their duties and functions;
 8. Provide information needed by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
 9. Provide material and relevant information to stakeholders;
 10. Implement an introduction program for the Company to new members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
 11. Report the results of a review of the new laws and regulations and the Company's level of compliance with the applicable laws and regulations.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan sesuai Keputusan Direksi no. 009/SDM/111/III/2020. Berikut struktur organisasi Sekretaris Perusahaan yang menggambarkan fungsi-fungsi yang berada di dalamnya.

Organizational Structure of the Corporate Secretary

The organizational structure of the Corporate Secretary is stipulated according to the Decree of the Board of Directors no. 009/SDM/111/III/2020. The following is the organizational structure of the Corporate Secretary which describes the functions within it.



Per 31 Desember 2021, jumlah karyawan Sekretaris Perusahaan adalah sebanyak 15 (lima belas) orang, dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2021, the number of employees of the Corporate Secretary is 15 (fifteen) people, with details as follows:

Jabatan Position	Jumlah Karyawan Number of Employees
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Head of Corporate Secretary Division	1
Kepala Departemen Hukum Head of Legal Department	1
Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan Head of Corporate Communications Department	1
Kepala Departemen Kesekretariatan dan Administrasi Head of Secretariat and Administration Department	1
Officer Hukum Legal Officer	1
Staff Hukum Legal Staff	1



Jabatan Position	Jumlah Karyawan Number of Employees
Officer Hubungan Media Media Relations Officer	1
Officer Desain Kreatif Creative Design Officer	1
Staff Media Sosial Social Media Staff	1
Officer Acara & Promosi Event & Promotion Officer	1
Supervisor Komunikasi Perusahaan Corporate Communication Supervisor	1
Staff Kesekretariatan dan Administrasi Secretarial and Administrative Staff	1
Sekretaris Direksi Secretary to the Board of Directors	2
Admin Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Administration	1
Jumlah Total	15

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam menjalankan fungsi dan peranannya, di tahun 2021 Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi yang pembahasannya disajikan secara lengkap di bab Profil Perusahaan.

Laporan Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Di sepanjang tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan, di antaranya:

1. Mengadakan event penguatan hubungan eksternal dengan stakeholder perusahaan (Corporate Visit) sebanyak 9 kali;
2. Penguatan *Brand Awareness*, Pelaksanaan Program Kolaborasi dengan Lembaga Pemerintahan, Swasta & Komunitas, dan CSR secara kolaborasi sebanyak 84 kali;
3. Melakukan pembuatan dan review perjanjian dan kontrak kerja sama terealisasi 100%;
4. Melaksanakan RUPS tahunan secara sirkuler terlaksana sesuai rencana.

AUDIT INTERNAL

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal

Kepala Divisi Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Divisi Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris jika Kepala Divisi Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan piagam audit internal perusahaan dan/ atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas dengan mempertimbangkan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Competency Development Of the Corporate Secretary

To improve competency and expertise in carrying out its functions and roles, in 2021, the Corporate Secretary has participated in a number of competency development programs which discussion is presented in full in the Company Profile chapter.

Corporate Secretary Activity Report

Throughout 2021, the Corporate Secretary has carried out various tasks and activities, including:

1. Held an event to strengthen external relations with Company stakeholders (Corporate Visit) for 9 times;
2. Strengthened Brand Awareness, Implementation of Collaboration Programs with Government, Private & Community Institutions, and CSR for 84 times;
3. Made and reviewed agreements and cooperation contracts with 100% realization;
4. Conducted the annual GMS in a circular manner according to the plan.

INTERNAL AUDIT

Appointment and Dismissal of the Head of the Internal Audit Division

The Head of the Internal Audit Division is appointed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners. The President Director may dismiss the Head of the Internal Audit Division, after obtaining approval from the Board of Commissioners, in the event that the Head of the Internal Audit Division does not meet the requirements as stipulated in the Company's internal audit charter and/or fails or is incompetent in carrying out his duties by considering and fulfilling the requirements set by the Company.



Profil Kepala Divisi Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/SDM/106/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT LRT Jakarta Perusahaan mengangkat Santosa sebagai Kepala Divisi Audit Internal.

Berikut disampaikan profil Kepala Divisi Audit Internal.

Santosa

Kepala Divisi Audit Internal | Head of Internal Audit Division

Menjabat sejak 21 Oktober 2019 | Term of Office: Held office since October 21, 2019

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 52 tahun per 31 Desember 2021

Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Akuntansi - STAN, Jakarta, Indonesia (1997)
- Magister (S2) Magister Manajemen – Institut Pertanian Bogor, Indonesia (2020)

Riwayat Pekerjaan

- Kepala Divisi SDM & Umum, PT Jamkrindo Syariah (2019)
- Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Risiko, PT Jamkrindo Syariah (2017-2019)
- Kepala Cabang Bandung, PT Jamkrindo Syariah, Bandung (2015-2017)
- Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Jamkrindo Syariah (2015)
- Kepala Satuan Pengawasan Intern, PT Survai Udara Penas (Persero) (2013-2015)

Sertifikasi

- Certified Risk Governance Professional (2019)
- Financial Modeling Fundamental with Sensitivity Analysis and Xcelsius (2013)
- Credit Analystis (2012)
- Training for Examiner that Will Work For and on behalf of BPK (2009)

Profile of Head of Internal Audit Division

Based on the Decree of the Board of Directors No. 009/SDM/106/I/2020 dated January 20, 2020 regarding the Appointment of Permanent Employees of PT LRT Jakarta, the company appointed Santosa as the Head of the Internal Audit Division.

The following is the profile of the Head of the Internal Audit Division.

Personal Data

Indonesian
Age: 52 years old as of 31 December 2021

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

Educational Background

- Bachelor (S1) of Accounting - STAN, Jakarta, Indonesia (1997)
- Master (S2) of Management – IPB, Indonesia (2020)

Employment History

- Head of HR & General Affairs Division, PT Jamkrindo Syariah (2019)
- Head of Risk Management Planning and Development Division, PT Jamkrindo Syariah (2017-2019)
- Head of Bandung Branch, PT Jamkrindo Syariah, Bandung (2015-2017)
- Head of PT Jamkrindo Syariah Internal Control Unit (2015)
- Head of Internal Control Unit, PT Survai Udara Penas (Persero) (2013-2015)

Certification

- Certified Risk Governance Professional (2019)
- Financial Modeling Fundamental with Sensitivity Analysis and Xcelsius (2013)
- Credit Analystis (2012)
- Training for Examiners that Will Work For and on behalf of BPK (2009)

Struktur Organisasi Audit Internal

Di tahun 2021, struktur organisasi Audit Internal memiliki 3 (tiga) orang auditor yang terbagi atas General Manager (GM) Internal Audit, Internal Audit Specialist dan Junior Auditor sebagaimana terlihat pada bagan berikut:



Organizational Structure of the Internal Audit Division

In 2021, the organizational structure of the Internal Audit division is complemented by 3 (three) auditors which are categorized into the Internal Audit General Manager (GM), Internal Audit Specialist, and Junior Auditor as shown in the following chart:



Sertifikasi Profesi Audit Internal

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor mengenai hal yang berkaitan dengan audit. Pelaksanaan fungsi Audit Internal merujuk pada standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (*The Institute of Internal Auditors*). Perusahaan senantiasa memfasilitasi auditor dalam meningkatkan kemampuan dengan mengikutsertakan pada beragam sertifikasi profesi guna memenuhi standar yang dibutuhkan Perusahaan. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Divisi Audit Internal hingga akhir tahun 2021.

Nama dan Jabatan Name and Position	Level Sertifikasi Level of Certification
Santosa, GM Internal Audit Internal Audit General Manager	<ul style="list-style-type: none">ManajerialCertified Risk Governance Professional - CRGP
Bambang Arifin, Internal Audit Specialist Internal Audit Specialist	<ul style="list-style-type: none">LanjutanAudit Pengadaan Barang/Jasa
Angga Chandra Permana, Junior Auditor	Dasar Basic

Piagam Audit Internal

Sebagai landasan legal formal dan pedoman bagi Audit Internal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti yang telah tertuang dalam Piagam Audit Internal dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi. Piagam Audit Internal ini ditandatangani tanggal 26 November 2019.

Piagam Audit Internal antara lain berisi:

- Visi, Misi, dan Tujuan
- Lingkup Pekerjaan
- Struktur dan Posisi
- Tugas dan Tanggung Jawab
- Kewenangan
- Pertanggungjawaban dan Pelaporan
- Standar Pelaksanaan Tugas, dan
- Kode

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam Piagam Audit Internal yang dimiliki Perseroan, tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan langsung maupun pengawasan secara tidak langsung, dalam rangka penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

Internal Audit Professional Certification

Professional certification is an important aspect for auditors in relation to audit-related matters. The implementation of the Internal Audit function refers to the International Standards of Professional Practice of Internal Auditing (*The Institute of Internal Auditors*). The Company always facilitates auditors in improving their capabilities by participating in various professional certifications to meet the standards required by the Company. The followings are the professional certifications held by employees of the Internal Audit Division until the end of 2021.

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter

It functions as a formal legal basis and guidelines for Internal Audit in carrying out its duties and authorities, as stated in the Internal Audit Charter with the approval of the Board of Commissioners and Board of Directors. This Internal Audit Charter was signed on November 26, 2019.

The Internal Audit Charter, among others, contains:

- Vision, Mission and Goals
- Scope of work
- Structure and Position
- Duties and Responsibilities
- Authorities
- Accountability and Reporting
- Task Implementation Standards, and
- Code

Duties and Responsibilities

In the Company's Internal Audit Charter, the duties and responsibilities of the Internal Audit Division can be described as follows:

- Develop and implement an annual internal audit plan.
- Test and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with Company policy.
- Conduct both direct and indirect inspections, in order to assess efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities.
- Provide improvement suggestions and objective information about the activities examined at all levels of management.



5. Membuat Laporan Hasil Audit (LHA) dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
6. Memantau, emnaganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
7. Bekerja sama dengan Komite Audit
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

5. Make an Audit Result Report (LHA) and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners
6. Monitor, analyze and report on the implementation of follow-up of improvements that have been suggested
7. Cooperate with the Audit Committee
8. Conduct special inspection if needed

Wewenang Audit Internal

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Divisi Internal Audit mempunyai kewenangan dalam hal:

1. Melakukan akses terhadap seluruh informasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal

Authorities of the Internal Audit Division

In carrying out its duties and responsibilities, the Internal Audit Division has the authorities to:

1. Access all information, records, employees, resources and funds as well as other Company assets related to the implementation of the audit.
2. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee
3. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
4. Coordinate its activities with the activities of external auditors

Rapat Audit Internal

Sepanjang tahun 2021, Audit Internal telah melaksanakan 60 (enam puluh) kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Santosa	GM Internal Audit Internal Audit General Manager	60	60	100%
Bambang Arifin	Internal Audit Specialist	60	60	100%
Angga Chandra Permana*	Junior Auditor	-	-	-

*Angga Chandra Permana baru mulai bergabung dengan Divisi Internal Audit pada tanggal 6 Desember 2021.

*Angga Chandra Permana has just joined the Internal Audit Division on December 6, 2021.

Agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan rapat SPI adalah sebagai berikut:

The agenda for discussion in the Internal Audit Division meetings are as follow:

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	4 Januari 2021 January 4, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
2	12 Januari 2021 January 12, 2021	Kickoff meeting audit perencanaan dan pengembangan bisnis Kickoff meeting of audit on business planning and development
3	18 Januari 2021 January 18, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
4	1 Februari 2021 February 1, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
5	8 Februari 2021 February 8, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
6	15 Februari 2021 February 15, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress



No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
7	22 Februari 2021 February 22, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
8	22 Februari 2021 February 22, 2021	Pembahasan hasil audit perencanaan dan pengembangan bisnis Discussion of the results of the audit of business planning and development
9	24 Februari 2021 February 24, 2021	Kickoff meeting audit kelengkapan SOP Kickoff meeting of audit on completeness of SOP
10	26 Februari 2021 February 26, 2021	Kickoff meeting audit IT security system Kickoff meeting of audit on IT security system
11	1 Maret 2021 March 1, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
12	8 Maret 2021 March 8, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
13	15 Maret 2021 March 15, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
14	22 Maret 2021 March 22, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
15	1 April 2021 April 1, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
16	5 April 2021 April 5, 2021	Pembahasan hasil audit audit IT security system Discussion of the results of the audit of IT security system
17	12 April 2021 April 12, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
18	19 April 2021 April 19, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
19	26 April 2021 April 26, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
20	26 April 2021 April 26, 2021	Kickoff meeting audit operation and maintenance sarana Kickoff meeting of audit on facilities operation and maintenance
21	3 Mei 2021 May 3, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
22	10 Mei 2021 May 10, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
23	20 Mei 2021 May 20, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
24	31 Mei 2021 May 31, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
25	7 Juni 2021 June 7, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
26	10 Juni 2021 June 10, 2021	Pembahasan hasil audit operation and maintenance sarana Discussion of the results of the audit of facilities operation and maintenance
27	14 Juni 2021 June 14, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
28	21 Juni 2021 June 21, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
29	28 Juni 2021 June 28, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
30	30 Juni 2021 June 30, 2021	Kickoff meeting audit pelaksanaan outsourcing Kickoff meeting of audit on the implementation of outsourcing
31	5 Juli 2021 July 5, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
32	12 Juli 2021 July 12, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress



No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
33	19 Juli 2021 July 19, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
34	26 Juli 2021 July 26, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
35	26 Juli 2021 July 26, 2021	<i>Kickoff meeting audit payroll</i> Kickoff meeting of audit on payroll
36	2 Agustus 2021 August 2, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
37	9 Agustus 2021 August 9, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
38	16 Agustus 2021 August 16, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
39	23 Agustus 2021 August 23, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
40	1 September 2021 September 1, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
41	6 September 2021 September 6, 2021	Pembahasan hasil audit pelaksanaan <i>outsourcing</i> Discussion of the results of the audit of the implementation of outsourcing
42	13 September 2021 September 13, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
43	15 September 2021 September 15, 2021	<i>Kickoff meeting audit kerja sama dengan AP II</i> Kickoff meeting of audit on cooperation with AP II
44	20 September 2021 September 20, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
45	27 September 2021 September 27, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
46	4 Oktober 2021 October 4, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
47	11 Oktober 2021 October 11, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
48	12 Oktober 2021 October 12, 2021	Pembahasan hasil audit kerja sama dengan AP II Discussion of the results of the audit of cooperation with AP II
49	18 Oktober 2021 October 18, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
50	25 Oktober 2021 October 25, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
51	27 Oktober 2021 October 27, 2021	<i>Kickoff meeting audit subsidi dan pendapatan</i> Kickoff meeting of audit on subsidy and income
52	1 November 2021 November 1, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
53	8 November 2021 November 8, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress



No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
54	10 November 2021 November 10, 2021	Pembahasan hasil audit subsidi dan pendapatan Discussion of the results of the audit of subsidy and income
55	15 November 2021 November 15, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
56	15 Novembver 2021 November 15, 2021	<i>Kickoff meeting audit operation and maintenance prasarana</i> Kickoff meeting of audit on f infrastructure operation and maintenance
57	22 November 2021 November 22, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
58	1 Desember 2021 December 1, 2021	Pembahasan hasil audit <i>operation and maintenance prasarana</i> Discussion of the results of the audit of infrastructure operation and maintenance
59	2 Desember 2021 December 2, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress
60	13 Desember 2021 December 13, 2021	Pembahasan progres audit Discussion on audit progress

Pelaksanaan Tugas Divisi Audit Internal

Pada tahun 2021, Divisi Audit Internal telah melaksanakan kegiatan audit internal (*monitoring dan control*) yang meliputi:

1. Audit perencanaan dan pengembangan bisnis;
2. Audit IT security systems;
3. Audit *operation and maintenance* sarana;
4. Audit pelaksanaan outsourcing;
5. Audit kerja sama dengan PT Angkasa Pura II;
6. Audit proses subsidi dan pendapatan;
7. Audit *operation and maintenance* prasarana;
8. Audit kelengkapan SOP;
9. Audit payroll.

Implementation of the Duties of the Internal Audit Division

In 2021, the Internal Audit Division has carried out internal audit (*monitoring and control*) activities, which include:

1. Audit on business planning and development;
2. Audit on IT security systems;
3. Audit on facilities operation and maintenance;
4. Audit on the implementation of outsourcing;
5. Audit on cooperation with PT Angkasa Pura II;
6. Audit on subsidy and revenue process;
7. Audit on infrastructure operation and maintenance;
8. Audit on SOP completeness;
9. Audit on payroll.



AUDITOR EKSTERNAL

EXTERNAL AUDITOR

Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal yang fungsinya dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Auditor Eksternal ditunjuk untuk melakukan audit finansial serta untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketatausahaan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan Perseroan ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor Eksternal yang ditunjuk harus independen dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak yang berkepentingan di Perseroan.

PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL

Untuk menjaga profesionalitas dan independensi, pemilihan Auditor Eksternal yang dilakukan setiap tahun wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur bahwa 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit maksimal 2 (dua) Tahun Buku berturut-turut dan dengan Akuntan Publik (Mitra) maksimal 3 (tiga) Tahun Buku berturut-turut. Hal tersebut dilakukan untuk terus menjaga transparansi dan independensi atas laporan keuangan Perseroan.

Auditor eksternal Perusahaan selama 4 (empat) tahun terakhir sampai dengan 2021 antara lain sebagai berikut.

The Company hires the services of an external auditor, whose function is carried out by a Public Accounting Firm (KAP), to express an opinion on the fairness, in all material respects, the Company's financial position, results of operations, changes in equity and cash flows, in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.

The External Auditor is appointed to conduct a financial audit as well as to provide an independent and objective opinion regarding the fairness, compliance and conformity of the Company's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards and applicable laws and regulations. The Company's accountant is appointed by the GMS from the candidates proposed by the Board of Commissioners. The appointed External Auditor must be independent, free from the influence of the Board of Directors, Board of Commissioners, and other interested parties in the Company.

APPOINTMENT OF EXTERNAL AUDITOR

In order to maintain professionalism and independence, the selection of an External Auditor, which is conducted annually, must comply with the provisions of the Minister of Finance Regulation no. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 concerning Public Accounting Firm, which stipulates that 1 (one) Public Accounting Firm (KAP) may only audit a maximum of 2 (two) consecutive fiscal years, and with a Public Accountants (Partners), a maximum of 3 (three) consecutive Fiscal Years. This is conducted to continue to maintain transparency and independence of the Company's financial statements.

The Company's external auditors for the last 4 (four) years, until 2021, are as follows.

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Main Service	Jasa Lainnya Other Services	Biaya (Rp) Fee(in IDR)
2021	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Syamsudin	Audit atas Laporan Keuangan PT LRT Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Audit of PT LRT Jakarta Financial Statements for the year ended December 31, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2021. • Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap pengendalian internal tahun 2021. • Assurance services on reports compliance with the 2021 legislation. • Assurance services on reports compliance with 2021 internal control 	Rp124.960.000 IDR 124,960,000



Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan PUBLIK Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Main Service	Jasa Lainnya Other Services	Biaya (Rp) Fee(in IDR)
2020	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Suhartono, MPA, Ak., CPA	Audit atas Laporan Keuangan PT Light Rail Transit Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Audit of the Financial Statements of PT Light Rail Transit Jakarta for the year ended December 31, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2020. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap pengendalian internal tahun 2020. Assurance services on reports compliance with the 2020 legislation. Assurance services on reports compliance with 2020 internal control 	Rp96.562.400 IDR 96,562,400
2019	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Andy Eldes, Ak., CA., CPA	Audit atas Laporan Keuangan PT Light Rail Transit Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Audit of the Financial Statements of PT Light Rail Transit Jakarta for the year ended December 31, 2019	<ul style="list-style-type: none"> Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2019. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap pengendalian internal tahun 2019. Assurance services on reports compliance with the 2019 legislation. Assurance services on reports compliance with 2019 internal control 	Rp48.109.041 IDR 48,109,041
2018	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Benny Andria	Audit atas Laporan Keuangan PT Light Rail Transit Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Audit of the Financial Statements of PT Light Rail Transit Jakarta for the year ended December 31, 2018	<ul style="list-style-type: none"> Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2018. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap pengendalian internal tahun 2018. Assurance services on reports compliance with the 2018 legislation. Assurance services on reports compliance with 2018 internal control 	Biaya masih ditanggung oleh PT Jakarta Propertindo sebagai Holding The fees are still borne by PT Jakarta Propertindo as the Holding Company



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan unit kerja Perseroan yang melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi (*consultative management*) yang dalam pelaksanaannya memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu Direktur Utama mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, system pengendalian internal dan *corporate governance*,
2. Memberikan saran/usulan perbaikan,
3. Mengadakan penilaian atas sistem pengendalian internal

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal telah dilakukan setiap kali Divisi Internal Audit melakukan audit sesuai Program Kerja Audit Tahunan (PKAT). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada PT LRT Jakarta telah cukup efektif.

Internal Control System (SPI) is the Company's work unit that carries out assurance activities and consultative management, in which its implementation has the following duties:

1. Assist the President Director in evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control systems and corporate governance,
2. Provide advice / suggestions for improvement,
3. Conduct an assessment of the internal control system

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

Evaluation of the implementation of the Internal Control System has been carried out every time the Internal Audit Division conducts an audit in accordance with the Annual Audit Work Program (PKAT). Based on the evaluation results, the implementation of the Internal Control System at PT LRT Jakarta is considered quite effective.



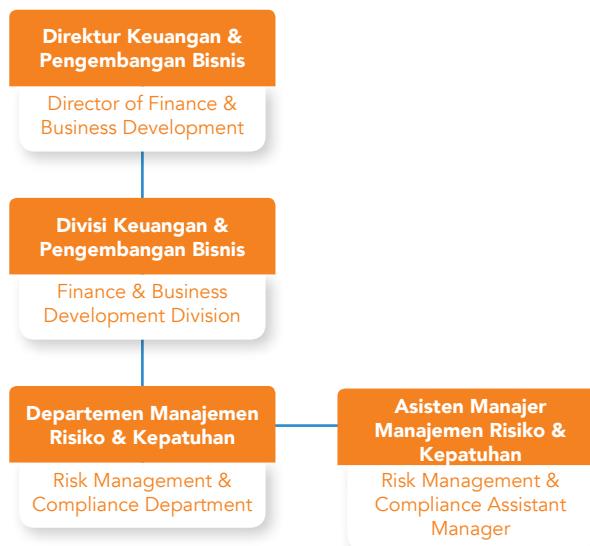
MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Manajemen Risiko merupakan serangkaian proses sistem pengelolaan risiko dan perlindungan terhadap Perusahaan yang mencakup aset, operasional, keuangan, dan lain sebagainya atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya risiko.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2021, Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan berada di bawah Divisi Keuangan & Akuntansi Direktorat Keuangan & Pengembangan Bisnis, dengan struktur sebagai berikut:



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan:

1. Mengimplementasikan praktik pengelolaan perusahaan yang berdasarkan pada GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengelola perusahaan berlandaskan peraturan dan etika yang berlaku;
2. Menetapkan kebijakan, prosedur, instruksi kerja dan formulir atas praktik manajemen risiko;
3. Melakukan asesmen risiko pada tiap-tiap Departemen;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan atas penerapan Manajemen Risiko melalui risk profile sesuai Key Performance Indicator (KPI);
5. Mengimplementasikan pemenuhan Compliance Review atau pengujian kepatuhan atas penerapan kontrol yang berlaku sesuai SOP Kepatuhan Perusahaan;

Risk Management is a series of risk management system processes and protection for the Company which includes assets, operations, finances, and so on for possible losses due to risk.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF RISK MANAGEMENT

In 2021, the risk management & compliance department will be under the finance & accounting division of the finance & business development directorate, with the following structure:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Risk Management & Compliance Department are:

1. Implement Company management practices based on GCG or Good Corporate Governance by managing the Company based on applicable regulations and ethics;
2. Establish policies, procedures, work instructions and forms for risk management practices;
3. Conduct a risk assessment in each Department;
4. Prepare and submit reports on the implementation of Risk Management through a risk profile according to Key Performance Indicators (KPI);
5. Implement compliance with Compliance Review or compliance testing on the implementation of applicable controls in accordance with the Company's Compliance SOP;

6. Menciptakan keselamatan, keamanan dan kesehatan lingkungan kerja serta mendukung tercapainya standar keselamatan dan keamanan penumpang.

6. Create safe, secure, and healthy condition in the work environment and support the achievement of passenger safety and security standards.

KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI PROFESI

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi karyawan di Divisi Manajemen Risiko untuk memahami perkembangan mitigasi dan profil risiko, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Divisi Manajemen Risiko hingga akhir tahun 2021.

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND CERTIFICATIONS

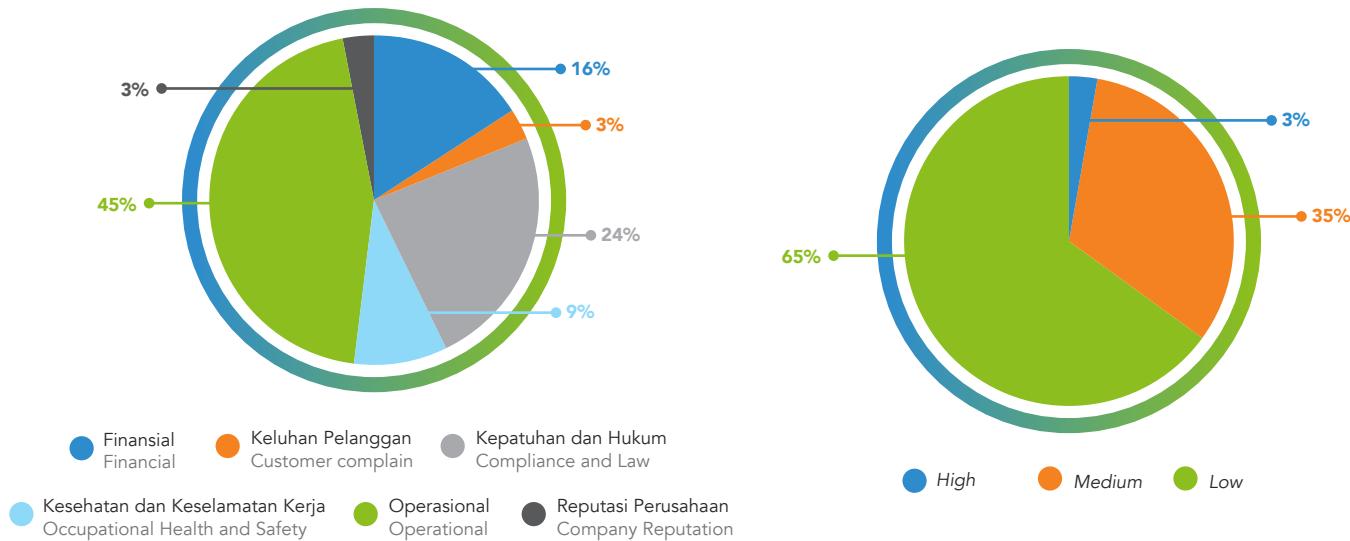
Professional certification is an important aspect for employees in the Risk Management Division to understand the development of mitigation and risk profiles, particularly related to regulatory compliance and industry developments. The followings are the professional certifications held by employees of the Risk Management Division until the end of 2021.

Nama dan Jabatan Name and Position	Level Sertifikasi Level of Certification
Raden Ananditya Dewangga (Kepala Departemen) (Head of Department)	<ul style="list-style-type: none"> Qualified Risk Management Professional (QRMP) Certified Governance Professional (CGP)
Tridewi Pujamawaty (Asisten Manajer) (Assistant to the Manager)	Certified Risk Management Professional (CRMS)

RISIKO PERUSAHAAN TAHUN 2021 DAN PENGELOLAANNYA

COMPANY RISKS IN 2021 AND ITS MANAGEMENT

Profil Risiko Perusahaan
Company Risk Profile



Profil risiko LRTJ tahun 2021 terdiri dari 182 risiko yang teridentifikasi dari 8 Divisi dan 25 Departemen. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dapat diketahui bahwa risiko LRTJ didominasi pada aspek operasional serta kepatuhan dan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi dengan memperkuat internal control, prosedur dan assurance untuk memastikan kegiatan risiko-risiko operasional maupun aspek kepatuhan dan hukum masih dalam level toleransi LRTJ. Sedangkan level risiko secara keseluruhan masih didominasi pada level Low sehingga dapat dipastikan

The LRTJ risk profile in 2021 consists of 182 identified risks from 8 Divisions and 25 Departments. Based on the results of identification, it can be seen that LRTJ risk is dominated by operational aspects as well as compliance and legal aspects. Therefore, it is necessary to carry out mitigation by strengthening internal control, procedures and assurance to ensure that operational risks, as well as compliance and legal aspects, are still within the LRTJ tolerance level. Meanwhile, the overall risk level is still at the Low level, so it can be ascertained that the risks in



risiko-risiko di LRTJ masih dalam level toleransi risiko Perusahaan. Namun untuk level high perlu segera dilakukan treatment agar level risiko bisa diturunkan hingga ke level toleransi yang dapat diterima.

Berikut ini daftar risiko dengan level penilaian High:

Kategori Risiko Risk Category	Risiko Risks	Risk Level	Residual Value
Finansial Financial	Tidak terealisasinya pencairan uang muka subsidi The unrealized disbursement of the subsidy advance	High	Medium
Finansial Financial	Keterlambatan pencairan subsidi bulanan Late disbursement of monthly subsidies	High	Medium
Kepatuhan dan Hukum Compliance and Legal	Keterlambatan finalisasi draft Perjanjian (Perjanjian Subsidi) Delay in finalizing the draft Agreement (Subsidy Agreement)	High	Medium
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	Adanya Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan operasional Perusahaan terhambat The emergence of the COVID-19 Pandemic which resulted in the obstruction in the Company's operations	High	Medium
Finansial Financial	Pendapatan Non Farebox tidak tercapai Unachieved non Farebox income	High	Medium

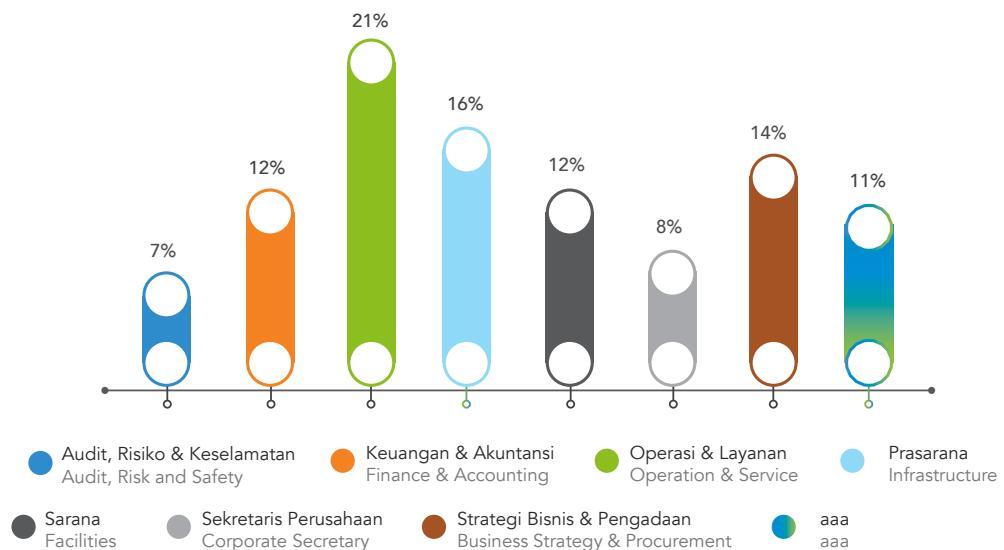
Untuk persebaran risiko yang teridentifikasi masih didominasi pada divisi operasi dan layanan serta prasarana. Berikut ini gambaran profil risiko yang diidentifikasi berdasarkan masing-masing divisi.

LRTJ are still within the Company's risk tolerance level. However, for high level risks, treatment needs to be given immediately so that the risk level can be lowered to an acceptable tolerance level.

The following is a list of high level risks:

The distribution of identified risks is still dominated by the operations and services, as well as the infrastructure divisions. The following is a description of the risk profile identified by each division.

Profil risiko berdasarkan divisi
Risk profile by division



Proses identifikasi risiko dilakukan pada awal tahun dan dilakukan monitoring serta evaluasi di setiap triwulannya kepada Departemen MRK untuk memastikan seluruh risiko yang teridentifikasi masih di bawah level toleransi risiko LRTJ.

The risk identification process is carried out at the beginning of the year, while monitoring and evaluation is carried out on a quarterly basis to the Risk Management & Compliance Department to ensure all identified risks are still below the LRTJ risk tolerance level.

Profil Risiko Berbasis RKAP 2021

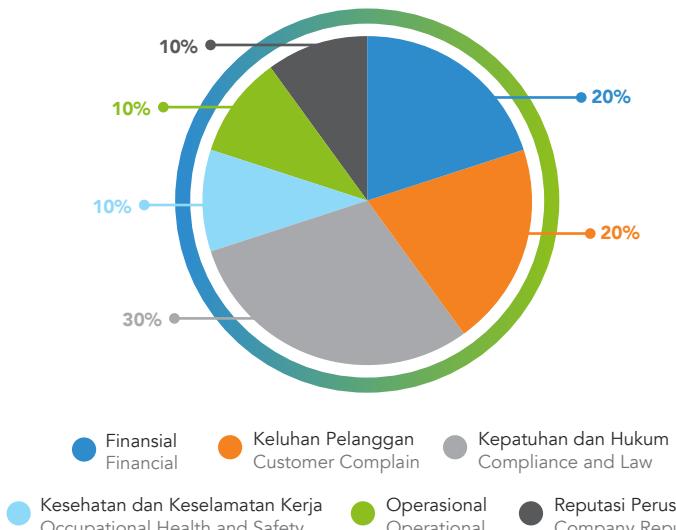
Setiap tahun LRTJ melakukan pemetaan risiko berdasarkan tujuan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Risk Profile Based on RKAP 2021

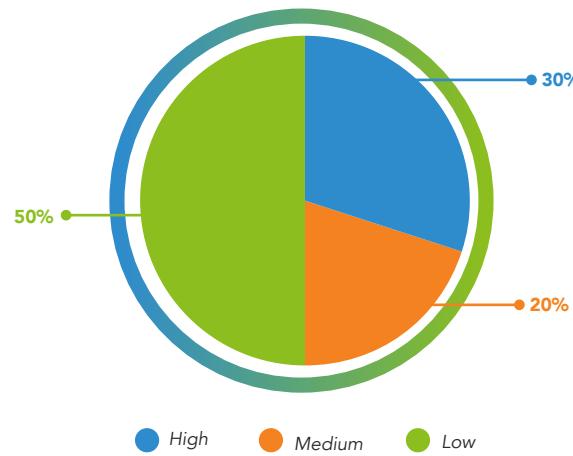
Every year LRTJ conducts risk mapping based on the objectives of the Company's Work Plan and Budget (RKAP).



Berikut ini profil risiko RKAP tahun 2021:



The following is the risk profile of the 2021 RKAP:



Profil risiko RKAP LRTJ tahun 2021 terdiri dari 10 risiko yang teridentifikasi untuk 9 tujuan (objective). Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dapat diketahui bahwa risiko LRTJ didominasi pada aspek kepatuhan dan hukum. Sebagai BUMD yang baru berdiri terdapat pemenuhan terkait compliance yang harus dipenuhi khususnya penyesuaian dengan kriteria compliance dari PT JakPro selaku holding. Sedangkan level risiko secara keseluruhan masih didominasi pada level Low sehingga dapat dipastikan risiko-risiko di LRTJ masih dalam level toleransi risiko Perusahaan. Namun untuk level high perlu segera dilakukan treatment agar level risiko bisa diturunkan hingga ke level toleransi yang dapat diterima.

The risk profile of the 2021 LRTJ RKAP consists of 10 identified risks for 9 objectives. Based on the results of identification, it can be seen that LRTJ risk is dominated by compliance and legal aspects. As a newly established regional owned enterprise, there are compliance related requirements that must be met, especially adjustments to the compliance criteria of PT JakPro as the holding company. Meanwhile, the overall risk level is still at the Low level, so it can be ascertained that the risks in LRTJ are still within the Company's risk tolerance level. However, for high levels, treatment needs to be given immediately so that the risk level can be lowered to an acceptable tolerance level.

Berikut ini daftar risiko dengan level penilaian High:

Kategori Risiko	Risiko	Risk Level
Financial	Pendapatan Subsidi tidak tercapai Unachieved subsidy income	High
Financial	Pendapatan Non Farebox tidak tercapai Unachieved Non Farebox income	High
Kepatuhan dan Hukum Legal and Compliance	Adanya Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan operasional Perusahaan terhambat The emergence of the COVID-19 Pandemic which resulted in the obstruction in the Company's operations	High

Kajian Risiko & Kepatuhan Inisiatif Perusahaan

Dalam upaya mendukung LRTJ mencapai sasaran RKAP dan mengelola ketidakpastian dalam pemenuhan strategi inisiatif Perusahaan disetiap tahunnya, unit manajemen risiko melakukan analisa risiko untuk inisiatif strategis Perusahaan dan proses pengadaan dengan nilai di atas IDR 500.000.000. Dasar permintaan Analisa tersebut berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku, antara lain SK Direksi/Kebijakan/Pedoman/SOP /LTA, Matriks kewenangan PT LRT Jakarta, Memo usulan pengadaan dan permintaan review dokumen oleh Direksi.

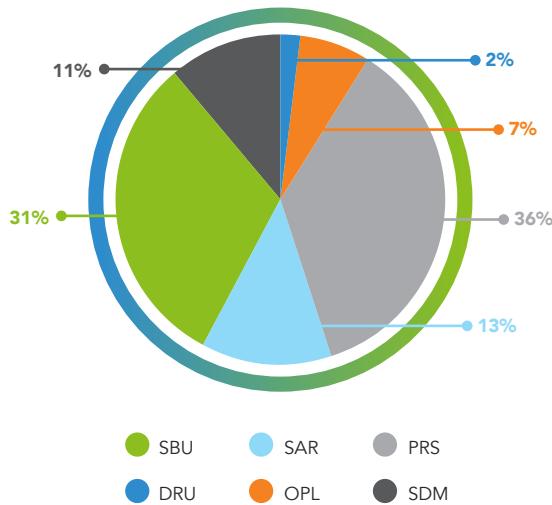
Company Initiative Risk & Compliance Review

In an effort to support LRTJ in achieving RKAP targets and managing uncertainty in the fulfillment of the Company's strategic initiatives every year, the risk management unit conducts risk analysis for the Company's strategic initiatives and procurement processes with a value of over IDR 500,000,000. The basis for the request for analysis is based on the applicable provisions, including the Decree of the Board of Directors / Policy / Guidelines /SOP /LTA, the matrix of authority of PT LRT Jakarta, Memo of procurement proposals and request for document review by the Board of Directors.



Selama tahun 2021 LRTJ sudah menerbitkan 55 laporan risiko dan kepatuhan dengan kontribusi permintaan laporan tertinggi pada Divisi Infrastruktur (PRS) dan Divisi Strategic, Business and Procurement (SBU).

In 2021, LRTJ has published 55 risk and compliance reports with the highest contribution to report requests in the Infrastructure Division (PRS) and the Strategic, Business and Procurement (SBU) Division



EVALUASI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko dilakukan langsung pada level Departemen, Divisi dan Korporasi untuk risiko-risiko strategis Perusahaan. Dimulai dengan identifikasi risiko, pengukuran, penentuan rencana mitigasi hingga pelaporan pelaksanaan mitigasi disetiap triwulan kepada Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan. Pengelolaan risiko di tahun 2021 dapat dikatakan cukup efektif di mana seluruh risiko yang teridentifikasi masih di bawah level toleransi risiko Perusahaan.

PERNYATAAN MANAJEMEN ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Manajemen menilai kecukupan sistem manajemen risiko perusahaan sudah berjalan dengan baik dan efektif untuk mendukung perusahaan.

RENCANA SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2022

Di tahun 2022 Perusahaan akan bekerja sama dengan pihak Konsultan dalam melakukan pengukuran tingkat maturitas pelaksanaan Manajemen Risiko dan menentukan Road Map Manajemen Risiko dalam tiga tahun kedepan. Aktivitas ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Manajemen Risiko di Perusahaan dapat berjalan dengan efektif, konsisten dan berkelanjutan.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

For the Company's strategic risks, risk management is carried out directly at the Department, Division and Corporate levels. Starting with risk identification, measurement, determination of mitigation plans, to reporting the implementation of mitigation every quarter to the Risk Management & Compliance Department. Risk management in 2021 can be said to be quite effective since all identified risks are still below the Company's risk tolerance level.

MANAGEMENT STATEMENT ON THE ADEQUACY OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company management assesses the adequacy of the Company's risk management system has been functioning well and effectively to support the Company.

2022 RISK MANAGEMENT SYSTEM PLAN

In 2022, the Company will cooperate with a consultant in measuring the maturity level of the implementation of Risk Management, and in determining the Risk Management Road Map in the next three years. This activity is carried out to ensure that the implementation of Risk Management in the Company can function effectively, consistently and sustainably.



CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk kebijakan dan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk membangun lingkungan dan masyarakat yang berkualitas. Terkait pelaksanaan CSR, Perusahaan membaginya ke dalam 7 aspek utama dalam tanggung jawab sosial.

Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of policies and activities carried out as an effort to build a quality environment and community. Regarding the implementation of CSR, the Company divides it into 7 main aspects of social responsibility.

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Governance	Komitmen atas Hak Asasi Manusia Commitment to Human Rights	Tanggung Jawab atas Operasi yang Adil Responsibility for Fair Operation	Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan Hidup Social Responsibility to the Environment	Tanggung Jawab Sosial pada Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Social Responsibility on Employment, Health and Safety	Tanggung Jawab atas Produk dan Terhadap Konsumen Responsibility toward its Product and Consumer	Tanggung Jawab Sosial pada Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Social Responsibility in Community Social Development
---	--	---	--	---	---	---

Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perusahaan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

More details about the implementation of CSR by the Company can be seen in the Corporate Social Responsibility chapter in this Annual Report.



PERKARA PENTING IMPORTANT EVENTS

Permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan dapat bersifat material, baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon, dan/ atau termohon yang secara material dapat memengaruhi keberlangsungan kegiatan bisnis Perusahaan. Rincian perkara/ kasus yang dihadapi oleh Perusahaan sepanjang tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Legal problems faced by the Company can be material, either as a plaintiff, defendant, applicant, and/or respondent, which can materially affect the continuity of the Company's business activities. Details of cases faced by the Company throughout 2021 can be seen in the following table:

No.	Pokok Perkara Cases	No. Perkara Case Numbers	Status Penyelesaian Perkara/Gugatan Case/Lawsuit Settlement Status	Risiko yang Dihadapi Perusahaan Risks Faced by the Company	Nilai Nominal Tuntutan/ Gugatan Nominal Value of Claim/Lawsuit
			NIHIL		

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif yang dijatuhan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, maupun anggota Direksi.

IMPORTANT CASES ENCOUNTERED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2021, there were no important cases faced by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Throughout 2021, there were no administrative sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors.



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan GCG dalam segala aktivitas Perusahaan melalui transparansi dan pengungkapan informasi kepada seluruh pemangku. Perusahaan menerapkan diversifikasi media penyampaian informasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai media yang dimanfaatkan Perusahaan, antara lain:

1. Laporan Tahunan

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66, Perusahaan mengungkapkan kinerja keuangan maupun nonkeuangan kepada para Pemegang Saham melalui Laporan Tahunan yang tersedia dalam *hardcopy*.

2. Situs Web Perusahaan

Perusahaan memiliki situs Perusahaan, yakni www.lrtjakarta.co.id yang digunakan untuk memberikan informasi penting bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Perusahaan. Informasi penting yang disediakan antara lain profil perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, bisnis yang dijalankan, GCG, anak-anak Perusahaan, berita dan siaran pers, serta informasi penting bagi masyarakat yang ingin berkarier di Perusahaan.

3. Media Cetak Perusahaan

Perusahaan memiliki media penyampaian informasi berupa media cetak yang meliputi surat kabar nasional, media internal mitra bayar, brosur, dan *leaflet* yang dijadikan sebagai sarana penyampaian informasi. Selain itu, Perusahaan juga kerap mempublikasikan beberapa informasi dan kegiatan penting Perusahaan di beberapa surat kabar nasional.

4. Siaran Pers

Perusahaan senantiasa memuat informasi terkait kegiatan Perusahaan dalam bentuk siaran pers yang disampaikan sebanyak 13 kali di tahun 2021.

The Company is committed to implementing GCG in all Company activities through transparency and disclosure of information to all stakeholders. The Company implements diversification of information delivery media in accordance with applicable laws and regulations. Various media of information disclosure used by the Company, among others, are:

1. Annual Report

Based on Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Article 66, the Company discloses its financial and non-financial performance to the Shareholders through the Annual Report which is available in hardcopy.

2. Company Website

The Company has a website, namely www.lrtjakarta.co.id which is used to provide important information for the public who want to know more about the Company. Important information provided in the site includes Company profile, vision and mission, organizational structure, business operated, GCG, subsidiaries, news, press releases, as well as important information for people who want to have a career in the Company.

3. Corporate Print Media

The Company has a print media for delivering information, which includes national newspapers, internal media for paying partners, brochures, and leaflets which are used as a means of delivering information. In addition, the Company also frequently publishes some important information and activities of the Company in several national newspapers.

4. Press Release

The Company always discloses information related to the Company's activities in the form of press releases submitted as many as 13 times in 2021.



PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN

CORPORATE CODE OF CONDUCT

Pedoman *Code of Conduct* merupakan wujud komitmen PT LRT Jakarta dalam menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan. Pedoman ini merupakan panduan dalam bertindak dan berperilaku serta untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya PT LRT Jakarta. Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan yang telah disahkan pada tanggal 28 Oktober 2019.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Code of Conduct Perusahaan berisikan terkait:

1. Pendahuluan
2. Etika Kerja
3. Etika Usaha
4. Penerapan *Code of Conduct*

PEMBERLAKUAN KODE ETIK BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode etik Perusahaan sebagaimana diatur dalam *Code of Conduct* berlaku bagi seluruh insan LRT Jakarta. Hal ini ditandai dengan kewajiban bagi seluruh Insan LRT Jakarta untuk menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen Insan LRT Jakarta untuk melaksanakan *Code of Conduct* yang diperbarui setiap tahun;

SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Dalam rangka menegakkan *Code of Conduct* ini maka Perusahaan wajib melakukan sosialisasi. Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sense of belonging terhadap *Code of Conduct* sehingga melahirkan kesadaran dari seluruh Insan LRT J untuk melaksanakan *Code of Conduct* ini;
2. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Insan LRT J mengenai arti penting *Code of Conduct* bagi kelangsungan bisnis Perusahaan;
3. Memberikan kesadaran kepada Insan LRT J bahwa *Code of Conduct* merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Insan LRT J.

The Code of Conduct is a form of PT LRT Jakarta's commitment in implementing Good Corporate Governance (GCG) practices consistently and sustainably. This code of conduct is a guideline in acting and behaving, as well as in influencing, shaping, regulating, and conforming behavior so as to achieve consistent outputs that are in accordance with the values and culture of PT LRT Jakarta. The Company's Code of Conduct was approved on October 28, 2019.

CODE OF CONDUCT

The Company's Code of Conduct contains the following:

1. Introduction
2. Work Ethics
3. Business Ethics
4. Implementation of the Code of Conduct

THE APPLICATION OF THE CODE OF CONDUCT FOR ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

The Company's code of ethics, as regulated in the Code of Conduct applies to all LRT Jakarta personnel. This is marked by the obligation for all Jakarta LRT personnel to sign the Integrity Pact, which is the commitment of Jakarta LRT personnel to implement the Code of Conduct which is updated every year;

DISSEMINATION OF THE CODE OF CONDUCT

In order to enforce its Code of Conduct, the Company is obliged to conduct dissemination. The objectives of dissemination are as follows:

1. To actualize a sense of belonging to the Code of Conduct so as to create awareness from all LRTJ personnel to implement this Code of Conduct;
2. To increase the knowledge and insight of LRTJ personnel regarding the importance of the Code of Conduct for the Company's business continuity;
3. To make LRTJ Personnel aware that the Code of Conduct is an integral part of business practices and performance appraisal of all LRTJ Personnel.



Di tahun 2021, Perusahaan melakukan survey terhadap pemahaman GCG serta pedoman perilaku yang secara menyeluruh mendapatkan hasil 78% Kegiatan ini akan terus dilakukan di setiap tahunnya dan telah menjadi bagian dari program kerja secara berkelanjutan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN

Sebagaimana tertuang pada *Code of Conduct* Perusahaan, dijelaskan bahwa:

1. Setiap Insan LRT J yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
2. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari Atasan Langsung Karyawan yang bersangkutan;
3. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing;
4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham;
5. Bila Mitra Kerja atau Stakeholders lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

Pelaksanaan *Code of Conduct* merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan LRT J. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka Insan LRT J wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:

1. Sekretaris Perusahaan;
2. Atasan Langsung;
3. Kotak Pengaduan/WhistleBlowing System. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/*fitnah*.

In 2021, the Company conducted a survey on the understanding of GCG and the code of conduct, which as a whole obtained results of 78%. This activity will be carried out every year and has become part of the work program on an ongoing basis.

SANCTIONS FOR VIOLATION OF THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT

As stated in the Company's *Code of Conduct*, it is explained that:

1. Every LRTJ employee who is proven to have violated this *Code of Conduct* will be given a sanction in accordance with the applicable rules and regulations in the Company;
2. Sanctions for employees who commit violations are determined by the Board of Directors, after receiving a report from the employee's immediate supervisor;
3. The Board of Commissioners and the Board of Directors decide on the coaching, disciplinary sanctions, and/or other actions as well as preventive actions that must be carried out by the Direct Superiors in their respective work environments;
4. Sanctions for the Board of Directors and Board of Commissioners who commit violations are decided by the Shareholders;
5. If Partners, or other Stakeholders, commit violations, the provisions as stated in the contract will be imposed. If it is related to a criminal act, it can be forwarded to the authorities.

VIOLATION REPORTING MECHANISM

The implementation of the *Code of Conduct* is the commitment and responsibility of all LRTJ personnel. If there is a violation or deviation, the LRTJ personnel are required to report the violation through:

1. Corporate Secretary;
2. Direct Supervisor;
3. Complaint Box/Whistle Blowing System. Disclosure must be made in good faith and not a personal complaint against a certain company policy (*grievance*) or based on bad will/*slander*.



Pegenap Insan LRT J dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan oleh oknum Insan LRT J dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.

All LRT J personnel and external parties of the Company (Customers, Business Partners, and the Community) can report violations of the Code of Conduct committed by LRTJ personnel, and the Company is required to follow up on reports that have the potential to materially harm the Company and damage its image, which can be cause, among others, by irregularities, manipulation, and so on.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK PERUSAHAAN TAHUN 2021

Sebagai realisasi penegakan Standar Etika Perusahaan, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama tahun 2021 dan perbandingannya dengan tahun 2020.

NUMBER OF VIOLATIONS OF THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT IN 2021

As a realization of the enforcement of the Company's Ethical Standards, the followings are the details of the sanctions imposed related to the enforcement of the Code of Conduct in 2021, and their comparison with 2020.

Sanksi Sanctions	2021	2020
Tindakan Disiplin Ringan Mild Disciplinary Action	2	4
Tindakan Disiplin Sedang Moderate Disciplinary Action	2	8
Tindakan Disiplin Berat Heavy Disciplinary Action	Nihil Nil	Nihil Nil
Jumlah Total	4	12



SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

Ruang lingkup penyusunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan persyaratan standar internasional, yang disadur menjadi Standar Nasional Indonesia ("SNI") ISO 37001 :2016, dengan tetap mengacu pada ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang relevan. Implementasi SMAP yang baik ditandai dengan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari dewan pengarah, manajemen puncak dan keterlibatan seluruh pekerja, serta memastikan dilakukannya peningkatan berkelanjutan dalam setiap program.

Penerapan SMAP berlaku untuk semua unit kerja perusahaan, wilayah kerja perusahaan, Insan LRTJ yang bekerja di perusahaan, tingkatan organisasi, termasuk mitra bisnis dan individu dari pihak mitra bisnis yang bekerja sama dengan perusahaan dalam rangka mendukung operasi LRT J.

Tujuan penyusunan penerapan SMAP ini adalah:

1. Menjaga kredibilitas Perusahaan (PT LRT Jakarta) dan meningkatkan kepercayaan publik serta para pemangku kepentingan lainnya kepada perusahaan.
2. Meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan.
3. Memitigasi Risiko "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" dengan cara memberikan bukti yang kuat bahwa Perusahaan telah melakukan langkah-langkah pencegahan yang memadai apabila terjadi penyidikan 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi' oleh Penegak Hukum (KPK, Kepolisian and Kejaksaan) maupun Pengadilan apabila ada perkara yang telah masuk ke tahap peradilan.
4. Memberi pesan yang kuat baik ke dalam maupun keluar perusahaan terkait komitmen Perusahaan terhadap anti penyuapan dan anti korupsi.
5. Menjaga keberlangsungan perusahaan dengan cara mencegah terjadinya penyuapan yang berakibat kepada *high-cost economy* sebagai akibat terjadinya biaya-biaya yang tidak wajar.
6. Memberikan dukungan kepada Perusahaan dan Jakpro Group untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* agar korporasi dapat terus berkembang secara berkesinambungan.

Tahun 2021 sudah dilakukan pemenuhan baik dari sisi dokumentasi maupun aktivitas sesuai dengan pedoman ISO 37001:2016. Berikut ini hasil pemenuhan ketentuan SMAP tersebut:

The scope of the preparation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) is based on the requirements of international standards, which is adapted into the Indonesian National Standard ("SNI") ISO 37001:2016, while still referring to the relevant provisions, regulations, and laws. Good SMAP implementation is characterized by strong commitment and leadership from the steering board, top management and involvement of all employees, as well as ensuring continuous improvement in each program.

The application of SMAP applies to all Company's work units, work areas, LRTJ personnel who work in the Company, and at organizational levels, which includes business partners and individuals from business partners who cooperate with the Company in order to support LRTJ operations.

The objectives of preparing the implementation of this SMAP are:

1. To maintain the credibility of the Company (PT LRT Jakarta) and increase the trust of the public and other stakeholders to the Company.
2. To increase shareholder confidence and at the same time increase Company value.
3. To mitigate the risk of "Corporate Criminal Liability" by providing strong evidence that the Company has taken adequate preventive measures in the event of a 'Corporate Criminal Liability' investigation by Law Enforcers (Corruption Eradication Commission, Police, and the Prosecutor's Office), or the Court in the event that there are cases that have entered the court stage.
4. To give a strong message to both the internal and external parties of the Company regarding the Company's commitment to anti-bribery and anti-corruption.
5. To maintain the sustainability of the Company by preventing bribery which results in the high-cost economy as a result of the occurrence of unreasonable costs.
6. To provide support to the Company and Jakpro Group to implement Good Corporate Governance so that the corporation can continue to develop sustainably.

In 2021, compliance has been carried out both in terms of documentation and activities, in accordance with ISO 37001:2016 guidelines. The following are the results of fulfilling the SMAP requirements:



No	Aktivitas Pemenuhan Fulfillment Activities	Aktivitas Activities
1	Deklarasi Komitmen Anti Penyuapan (Dewan Komisaris dan Direksi) sudah sesuai dengan Kebijakan SMAP SNI ISO 37001:2016 Declaration of Anti-Bribery Commitment (by the Board of Commissioners and Directors), which is in accordance with SMAP SNI ISO 37001:2016 Policy	Tandatangan Komitmen oleh Dewan Komisaris dan Direksi Signing of the Commitment by Board of Commissioners and Board of Directors
2	Pembentukan Tata Kelola SMAP SNI ISO 37001:2016 Establishment of SMAP SNI ISO 37001:2016 Governance	Penyusunan SK Tata Kelola SMAP Preparation of SMAP Governance Decree
3	Manual SMAP SNI ISO 37001:2016 SMAP SNI ISO 37001:2016 Manual	Penyusunan Manual SMAP SMAP Manual Compilation
4	Pakta Integritas seluruh Insan LRTJ (Dewan Komisaris dan organ pendukung, Direksi dan karyawan, termasuk seluruh pihak yang bekerja di Perusahaan (<i>outsource : security, cleaning service, office boy/girl</i> dan lainnya)) Integrity Pact for all LRTJ Personnel (Board of Commissioners and supporting organs, Directors and employees, including all parties working in the Company (which are outsourced, such as security, cleaning service, office boy/girl and others))	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi penerapan SMAP SNI ISO 37001:2016 kepada seluruh Insan Anak Usaha dan <i>outsource</i> • Pelatihan terkait SMAP SNI ISO 37001:2016 kepada seluruh Insan Anak Usaha dan <i>outsource</i> • Program pengenalan SMAP SNI ISO 37001:2016 kepada seluruh personel (karyawan) baru • Dissemination of the application of SMAP SNI ISO 37001:2016 to all Subsidiary and Outsourced Personnel • Trainings related to SMAP SNI ISO 37001:2016 for all Subsidiary and Outsourced Personnel • SMAP SNI ISO 37001:2016 introduction program for all new personnel (employees)
5	Surat dari Perusahaan kepada seluruh rekan bisnis (mitra strategis dan mitra pengadaan), terkait penerapan SMAP SNI ISO 37001:2016 di lingkungan Perusahaan Letter from the Company to all business partners (strategic and procurement partners), regarding the implementation of SMAP SNI ISO 37001:2016 within the Company	<ul style="list-style-type: none"> • Pengiriman surat kepada seluruh rekan bisnis. • b. Sosialisasi penerapan SMAP SNI ISO 37001:2016 kepada seluruh rekan bisnis Anak Usaha (website, Instagram dst) • Sending letters to all business partners. • Dissemination of SMAP SNI ISO 37001:2016 implementation to all Subsidiary's business partners (through website, Instagram etc.)
6	Prosedur Penilaian Risiko Penyuapan (Kategori, Kriteria dan level risiko Penyuapan) Bribery Risk Assessment Procedure (Category, Criteria, and Level of Bribery risk)	Penyusunan Prosedur Penilaian Manajemen Risiko & Kepatuhan Serta Manajemen Anti Penyuapan Preparation of Risk Management & Compliance Assessment Procedures and Anti-Bribery Management
7	Pembuatan Kertas Kerja Bribery Risk Assessment Preparation of Bribery Risk Assessment Working Paper	Pengisian Bribery Risk Assessment oleh seluruh unit kerja. Completion of Bribery Risk Assessment by all work units.



No	Aktivitas Pemenuhan Fulfillment Activities	Aktivitas Activities
8	<p>Pembuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Uji Kelayakan Rekan Bisnis (mitra strategis dan mitra pengadaan); • Prosedur Uji kelayakan personel (rekrutmen); • Prosedur Uji kelayakan transaksi; • Prosedur Uji kelayakan investasi Termasuk formulir pelaksana uji kelayakan. <p>Making:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Due Diligence Procedures for Business Partner (strategic and procurement partners); • Due Diligence Procedures for personnel (recruitment); • Due Diligence Procedures for Transactions; • Due Diligence Procedures for Investment feasibility which include the Due Diligence implementation form. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam setiap proses pemilihan rekan bisnis disampaikan terlebih dahulu penerapan SMAP SNI ISO 37001:2016 dan ketentuan yang berkaitan dengan rekan bisnis). Contoh seperti dalam proses aanwijzing pengadaan. • Proses rekrutmen harus menilai integritas, pemahaman korupsi/ pelanggaran dan sikap terhadap persitiwa pelanggaran). • Dilaksanakannya uji Kelayakan • In each process of selecting business partners, the application of SMAP SNI ISO 37001:2016 and the provisions relating to business partners is conveyed first. Examples of such is in the aanwijzing procurement process. • The recruitment process must assess the integrity, understanding of corruption/ violations, and attitudes towards incidents of violations. • Conducted Feasibility test
9	<p>Pembuatan klausul baku terkait Right to Audit kepada rekan bisnis</p> <p>Making standard clauses related to Right to Audit to business partners</p>	<p>Penerapan Klausul Right to Audit untuk seluruh perikatan/perjanjian dengan pihak ketiga.</p> <p>Implementation of the Right to Audit Clause for all engagements/agreements with third parties.</p>
10	<p>Pedoman Pengendalian Gratifikasi termasuk adanya Unit Pengendalian Gratifikasi.</p> <p>Guidelines for Gratification Control including the existence of a Gratification Control Unit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi • Melaporkan kepada SDM jika mendapatkan Gratifikasi • Preparation of Gratification Control Guidelines • Report to HR in the event of Gratification
11	<p>Pedoman Pelaporan Pelanggaran dan Mekanisme Pelaporan Pelanggarannya.</p> <p>Violation Reporting Guidelines and Mechanisms.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Pedoman Pelaporan Pelanggaran • Menyampaikan kepada Jakpro Bersih jika terindikasi adanya Penyuapan • Preparation of Violation Reporting Guidelines • Report to Jakpro Bersih in the event of indication of bribery
12	<p>Corrective action Request (Hasil Audit dari internal)</p> <p>Corrective Action Request (Result of internal audit)</p>	<p>Pelaksanaan Audit Internal (evaluasi SMAP SNI ISO 37001:2016)</p> <p>Implementation of Internal Audit (evaluation of SMAP SNI ISO 37001:2016)</p>



KEBIJAKAN TERKAIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

POLICY REGARDING GRATIFICATION CONTROL

Perusahaan senantiasa mengedepankan prinsip keadilan dan kejujuran dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu wujud komitmen Perusahaan adalah dengan disahkannya Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT LRT Jakarta sesuai dengan Keputusan Direksi PT LRT Jakarta No. 001/AIT/111/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT LRT Jakarta.

Di dalam pedoman pengendalian gratifikasi tersebut disebutkan bahwa:

1. Setiap karyawan dilarang menerima dan wajib menolak Gratifikasi yang dianggap suap dari pihak manapun yang diterima secara langsung, yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang di Perusahaan.
2. Pada kondisi tertentu, di mana karyawan tidak dapat menghindar untuk menolak Gratifikasi yang dianggap suap tersebut, maka karyawan wajib melaporkan dan menyerahkan uang/barang/fasilitas dimaksud kepada Tim Pengendalian Gratifikasi.
3. Setiap karyawan apabila ditawarkan atau diberikan Gratifikasi yang dianggap suap wajib melakukan penolakan dengan cara santun dan memberikan penjelasan secara memadai terhadap kebijakan dan aturan yang ada dalam pedoman ini kepada Mitra Usaha/Pihak Ketiga.
4. Setiap karyawan dilarang memberi Gratifikasi yang dianggap suap baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak manapun, yang bertujuan untuk mempengaruhi pihak yang dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal yang berlawanan dengan tugas dan kewenangannya.

Selain itu, di dalam internal Perusahaan juga telah dibentuk Tim Pengendalian Gratifikasi dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Direksi
Ketua	: Kepala Divisi Audit Internal
Anggota	: Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Kepala Divisi SDM dan Bagian Umum

Tim Pengendalian Gratifikasi bertugas untuk memonitor/memantau pelaksanaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini dan memberikan laporan secara berkala setiap tahun kepada Direksi mengenai implementasinya.

The Company always prioritizes the principles of fairness and honesty in operating its business. One manifestation of the Company's commitment is the ratification of the Guidelines for Control of Gratification within PT LRT Jakarta, in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT LRT Jakarta No. 001/AIT/111/I/2020 dated January 24, 2020 regarding Guidelines for Gratification Control in PT LRT Jakarta.

In the gratification control guidelines it is stated that:

1. Every employee is prohibited from accepting and must refuse Gratification, which is considered a bribe from any party received directly. This is because it can affect the independence and objectivity of the implementation of duties and authorities in the Company.
2. In certain conditions, in which the employee cannot refuse Gratification, which is considered a bribe, the employee is obliged to report and submit the money/goods/facilities in question to the Gratification Control Team.
3. If offered or given Gratuity, which is considered a bribe, every employee must refuse it in a polite manner and provide an adequate explanation of the policies and rules contained in this guideline to Business Partners/Third Parties.
4. Every employee is prohibited from giving Gratification, which is considered a bribe, either directly or indirectly to any party, which aims to influence the intended party to do and/or not to do something that is contrary to their duties and authorities.

In addition, internally the Company has also formed a Gratification Control Team with the following structure:

Person in Charge : Board of Directors
Head of the Gratification Control Team: Head of Internal Audit Division
Member of the Gratification Control Team: Head of Corporate Secretary Division, Head of HR Division and General Affairs

The Gratification Control Team is tasked with monitoring/supervising the implementation of this Gratification Control Guidelines and providing periodic reports every year to the Board of Directors regarding its implementation.



KEBIJAKAN TERKAIT AKTIVITAS POLITIK DAN SOSIAL ORGANISASI

POLICY RELATED TO ORGANIZATIONAL POLITICAL AND SOCIAL ACTIVITIES

Perusahaan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perusahaan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Secara tegas, Perusahaan tidak mengizinkan insan LRT Jakarta menggunakan fasilitas atau sumber daya apapun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik, sebagaimana yang telah diatur dalam Kode Etik Perusahaan. Kendati demikian, Perusahaan tidak melarang karyawan untuk menentukan aspirasi politiknya tanpa ada paksaan tertentu, selama dilakukan di luar lingkup profesinya sebagai karyawan LRT Jakarta.

The Company has a policy to prohibit the involvement of individuals on behalf of the Company in political activities, including making donations for political purposes. Strictly speaking, the Company does not allow Jakarta LRT personnel to use any facilities or resources for the purpose of political campaigns, political fundraising or for political participation purposes, as regulated in the Company's Code of Ethics. However, the Company does not prohibit employees from choosing their political aspirations without any particular coercion, as long as it is outside the scope of their profession as employees of the Jakarta LRT.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

STATE ADMINISTRATOR WEALTH REPORT (LHKPN)

Berdasarkan Keputusan Direksi :

- PT Jakarta Propertindo nomor : 008/UT0000/111/I/2020 mengenai Ketentuan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di PT Jakarta Propertindo dan Anak Usaha
- PT LRT Jakarta nomor : 001/SPR/111/IV/2020 tentang Ketentuan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di PT LRT Jakarta.

Ditetapkan pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK adalah Dewan Komisaris dan Direksi. Penyampaian LHKPN kepada KPK dilakukan pada saat :

- Pengangkatan pada saat pertama kali menjabat;
- Pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
- Berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
- Setelah diterbitkannya keputusan bagi yang belum pernah menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- Secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Penyampaian LHKPN periodik disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Based on the Decree of the Board of Directors of:

- PT Jakarta Propertindo number: 008/UT0000/111/I/2020 regarding the Provisions on Obligation to Submit State Administrator Wealth Report (LHKPN) at PT Jakarta Propertindo and its Subsidiaries
- PT LRT Jakarta number: 001/SPR/111/IV/2020 concerning Provisions on Obligation to Submit State Administrator Wealth Report (LHKPN) at PT LRT Jakarta.

It is stipulated that the officials who are obligated to submit LHKPN to the KPK are the Board of Commissioners and the Board of Directors. Submission of LHKPN to KPK is conducted:

- At the time of appointment when taking office for the first time;
- At re-appointment after expiry of term of office or retirement;
- At the time of expiration of term of office, or retirement;
- After the issuance of a decree for those who have never submitted an LHKPN to the KPK.
- Periodically every 1 (one) year, on assets acquired from January 1 to December 31. Periodic LHKPN submissions must be submitted no later than on March 31 of the following year.



PENGADAAN BARANG DAN JASA

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan LRT Jakarta mengacu pada SK. Direksi No .001/SBU/111/III/2020 merujuk pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

METODE PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Metode Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT LRT Jakarta antara lain:

1. Tender Terbuka/Lelang
2. Pemilihan Langsung
3. Pengadaan Langsung
4. Penunjukan Langsung
5. Pembelian Langsung
6. Swakelola

ALUR PROSES PENGADAAN

Berikut Alur Pengadaan Metode Pemilihan Langsung:

User:

User Menyusun KAK, PR dan Anggaran – Finance Cek ketersediaan Anggaran – Review Risk (Jika di atas 500Jt), Approval Direksi.

Pengadaan:

Pengadaan menerima PR, Analisa kebutuhan, Persiapan Dokumen Tender (RFP, Undangan, Form-Form), tentukan Due date Submission etc, Kirim Undangan Tender.

Proses seleksi Administrasi, Teknis & Financial, Konfirmasi teknis ke user, susun Memo Penetapan & PO/SPK, Review Risk (jika di atas 500jt), Review Kepala Divisi, Approval Direksi.

Pengumuman Pemenang, Menunggu masa sanggah, Kirimkan PO/SPK/Kontrak.

User:

User menerima Barang & Menyusun Good Received, BAST & BAPP

Guidelines for the Procurement of Goods and Services in the Jakarta LRT Environment refers to the Decree of The Board of Directors No.001/SBU/111/III/2020 which refers to Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Government Procurement of Goods and Services.

MANAGEMENT METHOD OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

Methods of Procurement of Goods and Services within PT LRT Jakarta include:

1. Open Tender/Auction
2. Direct Election
3. Direct Procurement
4. Direct Appointment
5. Direct Purchase
6. Self-management

FLOW OF PROCUREMENT PROCESS

The following is the Flow of Procurement Process of the Direct Selection Method:

User:

User Prepare TOR, PR and Budget – Finance Division Check availability of Budget – Conduct Risk Review (if above 500 million), Board of Directors Approval.

Procurement:

Procurement receives PR, conduct needs analysis, prepare Tender Documents (RFP, Invitations, Forms), determine Submission Due Date etc, Send Tender Invitations.

Administrative, Technical & Financial selection process, technical confirmation to users, draft Memorandum of Determination & PO/SPK, Conduct Risk Review (if above 500 million), Division Head conduct Review, Board of Directors Approval.

Tender Winner Announcement, Waiting for the rebuttal period, Send PO/SPK/Contract.

Users:

User receives Goods & Arranges Good Received, BAST & BAPP



KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Di tahun 2021, jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang telah diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan operasi Perusahaan, baik melalui metode pengadaan langsung, pemilihan langsung, pelelangan, dan penunjukan langsung akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

No.	Metode Pengadaan Procurement Methods	Jumlah Total
1	Pengadaan Langsung Direct Procurement	192
2	Pemilihan Langsung/Tender Sederhana Direct Selection/Simple Tender	100
3	Pelelangan/Tender/Seleksi Auction/Tender/Selection	1
4	Penunjukan Langsung Direct Appointment	86
5	Pembelian Langsung Direct Purchase	0
6	Penugasan Assignment	0
7	Proses Process	9
8	Hold/Batal	1

Adapun untuk nilai pengadaan telah dikalkulasikan oleh unit terkait berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT ACTIVITIES

In 2021, the number of goods and services procurement packages that have been completed to meet the Company's operational needs, either through direct procurement, direct selection, auctions, and direct appointments method is described in the following table:

The followings are the procurement value which has been calculated by the relevant unit based on the data that can be accounted for.

No.	Metode Pengadaan Procurement Methods	Nilai Anggaran/HPS (dalam Rupiah Penuh) Budget Value/HPS (in Full IDR)	Nilai Kontrak (dalam Rupiah Penuh) Contract value (in Full IDR)
1	Pengadaan Langsung Direct Procurement	Rp. 16.186.684.672	Rp. 12.899.344.899
2	Pemilihan Langsung/Tender Sederhana Direct Selection/Simple Tender	Rp. 63.996.166.163	Rp. 54.564.889.351
3	Pelelangan/Tender/Seleksi Auction/Tender/Selection	Rp. 2.996.800.563	Rp. 2.887.825.997
4	Penunjukan Langsung Direct Appointment	Rp. 48.962.579.898	Rp. 40.325.202.309
Jumlah		Rp. 132.142.231.296	Rp. 110.677.262.556
Total			



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

VIOLATION REPORTING SYSTEM

Perusahaan memiliki mekanisme pelaporan pelanggaran yang merupakan bentuk upaya Perusahaan dalam menciptakan suasana kerja yang bersih dan bertanggung jawab. Perusahaan memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Berdasarkan prosedur pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) Perusahaan menerima pelaporan pelanggaran baik dari internal Perusahaan maupun eksternal Perusahaan. Saat ini mekanisme pelaporan dari eksternal Perusahaan masih menggunakan *Whistleblowing system* yang dikelola oleh PT Jakpro (Perseroda). Setiap pelaporan pelanggaran yang diterima oleh Perusahaan akan dilakukan validasi terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan kepada Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris untuk menentukan pelaksanaan penanganan pelaporan ke tahap investigasi. Tim investigasi independent akan dibentuk oleh Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris untuk selanjutnya melakukan proses investigasi dan melaporkan hasil investigasi kepada Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris. Rekomendasi penyelesaian pelanggaran dan sanksi akan merujuk kepada kebijakan dan ketentuan Peraturan Perusahaan.

SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sosialisasi sistem *Whistleblowing* dilakukan melalui intranet milik Perusahaan kepada seluruh Karyawan Perusahaan.

SANKSI BAGI PELANGGAR

Sanksi yang diberikan kepada Pelanggar diberikan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perusahaan.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perusahaan memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan pelapor atas pelaporan pelanggaran yang diadukan yaitu menjamin kerahasiaan identitas Pelapor dan memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi ataupun Tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, selama dan sepanjang Pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang dilaporkan. Khusus Pelapor yang merupakan pihak internal (karyawan Perusahaan) yang memberikan identitasnya, Perusahaan memberikan perlindungan dari hal-hal sebagai berikut :

The Company has a violation reporting mechanism which is a form of the Company's efforts to create a clean and responsible working atmosphere. The Company possesses a whistleblowing system in place.

VIOLATION REPORTING AND HANDLING MECHANISM

Based on the whistleblowing procedure, the Company receives reports of violations from both internal and external parties of the Company. Currently, the Company's external reporting mechanism is still using the Whistleblowing system which is managed by PT Jakpro (Perseroda). Each violation report received by the Company will be validated first and then submitted to the President Director and/or the Board of Commissioners to determine the handling of the report to the investigation stage. An independent investigation team will be formed by the President Director and/or the Board of Commissioners to further carry out the investigation process and report the results of the investigation to the President Director and/or the Board of Commissioners. Recommendations for resolving violations and sanctions will refer to the policies and provisions of the Company Regulations.

DISSEMINATION OF VIOLATION REPORTING SYSTEM

Dissemination of the Whistleblowing system is carried out through the Company's intranet to all Company employees.

SANCTIONS FOR VIOLATORS

Sanctions given to violators are given in accordance with the policies and provisions of the Company Regulations.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

The Company provides protection and guarantees the confidentiality of the whistleblower for reporting the violation, namely by ensuring the confidentiality of the identity of the reporter and providing protection to the reporter from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party, as long as the whistleblower can maintain the confidentiality of the reported case. For whistleblowers who are the Company's internal parties (or Company employees) who provide their identities, the Company provides protection from the following:



1. Pemecatan yang tidak sesuai ketentuan dan diskriminatif
2. Penurunan jabatan
3. Catatan yang merugikan pribadi Pelapor
4. Perbuatan diskriminasi dalam pengembangan karier di Perusahaan.

1. Dismissal, provided that it is not in accordance with the provisions and is discriminatory
2. Demotion
3. Records that harm the Whistleblower
4. Discrimination in career development in the Company.

JUMLAH PENGADUAN TAHUN 2021 DAN TINDAK LANJUTNYA

Hingga akhir tahun 2021, terdapat pelaporan pelanggaran yang diduga terjadi di lingkungan Perusahaan.

NUMBER OF COMPLAINTS IN 2021 AND THEIR FOLLOW-UP

Until the end of 2021, there were reports of alleged violations within the company.

Jumlah Laporan Number of Reports	Laporan (Closed) Closed Report	Laporan (Open) Open Report	Tindak Lanjut Follow-up
-	-	-	-

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Adapun kontribusi pajak dari Perusahaan di tahun 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut.

The Company is always committed to fulfilling all tax obligations. The tax contributions from the Company in 2021 and 2020 are as follows.

(dalam Jutaan)

(in IDR million)

Uraian Description	Tahun Pajak Tax Year	
	2021	2020
PPh 4 ayat 2 Income Tax 4 Paragraph 2	60.206.727	5.574.418
PPh 21 Income Tax 21	3.570.578.125	3.983.626.236
PPh 22 Income Tax 22	-	-
PPh 23 Income Tax 23	322.791.774	247.013.680
Jumlah Total	3.953.576.626	4.236.214.336



TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak menerima pelaporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan, baik di sekitar kantor pusat maupun di sekitar lingkungan Perusahaan. (Jika ada, mohon diuraikan)

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Seluruh penyajian informasi dalam Laporan Tahunan ini, khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang telah di audit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

KASUS TERKAIT BURUH DAN KARYAWAN

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat ada kasus dengan buruh dan karyawan.

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DI WEBSITE PERUSAHAAN

Laporan Tahunan digital Perusahaan baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

REPORT ON COMPANY ACTIVITIES POLLUTING THE ENVIRONMENT

Throughout 2021, the Company did not receive any reports on the Company's activities that pollute the environment, either around the head office or around the Company's environment.

INCONSISTENCY IN THE PRESENTATION OF ANNUAL REPORTS AND FINANCIAL STATEMENTS WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

The entire presentation of information in this Annual Report, particularly related to financial performance and other matters, refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2021 and December 31, 2020 which have been audited by Kanaka Puradiredja KAP Presentation and disclosure of the Company's consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), issued by the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI).

CASES RELATED TO WORKERS AND EMPLOYEES

Throughout 2021, there were no cases with workers and employees.

CONFORMITY OF THE ANNUAL REPORT BOOK AND ANNUAL REPORT ON THE COMPANY'S WEBSITE

The Company's digital annual report, whether submitted to shareholders, stakeholders, or uploaded on the Company's official website, is in accordance with the annual report book printed and published by the Company.



2021 LAPORAN TAHUNAN
Annual Report



07

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENT RESPONSIBILITY

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENT RESPONSIBILITY GOVERNANCE



Pada era seperti saat ini para pelaku bisnis dituntut untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab, dengan tidak hanya berfokus untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainability Development* yang berkembang dari keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara *people*, *profit* dan *planet*, memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan kegiatan usaha dengan tetap bertanggungjawab terhadap lingkungan sosialnya.

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLS) Perusahaan, yang wajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan. Pada dasarnya, tata kelola organisasi (*organizational governance*) merupakan faktor kunci yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

In this era, business actors are required to operate their business more responsibly; by not only focusing on gaining profit from their business activities, but they are also required to make a positive contribution to their social environment in creating sustainable development. The concept of Sustainability Development, which developed from the desire of many parties regarding the balance between people, profit and planet, raises new awareness about the importance of carrying out business activities while remaining responsible for the social environment.

In Indonesia, regulators have encouraged this harmonization effort through Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSLS), which requires business entities to have policies and programs related to their commitment to building sustainable relationships with stakeholders. Basically, organizational governance is a key factor needed in implementing social responsibility regarding the impact of an organization's decisions and actions as well as



tanggung jawab sosial atas dampak keputusan dan tindakan sebuah organisasi serta mengintegrasikan tanggung jawab sosial di seluruh kegiatan operasionalnya. Tata kelola organisasi mencerminkan strategi-strategi, target dan komitmen penerapan tanggung jawab sosial, termasuk komitmen dan akuntabilitas Pimpinan.

Komitmen dan Kebijakan Penerapan Program TJSL Perusahaan

Perusahaan memadang kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional yang dijalankan. Sehingga, komitmen LRT untuk terus mewujudkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya direalisasikan melalui perilaku etis dan transparan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, yang dengan tetap memperhatikan harapan pemangku kepentingan serta senantiasa sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LRT percaya bahwa perusahaan yang baik bukan hanya yang berhasil mencapai target *profit* yang dicanangkan, tetapi juga yang mampu memberi kontribusi positif terhadap perkembangan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu LRT menjadikan CSR sebagai bagian tidak terpisahkan dari operasional Perusahaan untuk mendukung keberlanjutan usaha.

Uji Tuntas/Due Diligence Kegiatan Perusahaan dan Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Kegiatan CSR diarahkan secara berkesinambungan untuk mendorong kemandirian dengan menitikberatkan pada program pembangunan sosial, Ekonomi dan Lingkungan (*Triple Bottom Line*) dengan upaya pencapaian *profit*, *people*, dan *planet*, di antaranya:

1. *Profit*, tingkat laba rugi perusahaan;
2. *People*, masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang terdampak atas pelaksanaan kegiatan perusahaan;
3. *Planet*, tingkat tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.

Perusahaan menyadari pentingnya keselarasan antara pencapaian tujuan dan tanggung jawab terhadap lingkungan wilayah kerja beroperasi. Penyusunan kegiatan TJSL LRT Jakarta telah terintegrasi dan sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Uji tuntas dilakukan dalam rangkaian kegiatan perusahaan dan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan, baik dampak positif maupun negatif. Proses uji tuntas yang melibatkan semua sektor yang saling terkait dan membentuk rantai bisnis proses.

integrating social responsibility in all its operational activities. Organizational governance reflects the strategies, targets, and commitment to implementing social responsibility, which includes the commitment and accountability of its Leaders.

Commitment and Policy for the Implementation of the Company's Social Environment Responsibility Program

The Company views corporate social responsibility activities as an inseparable part of its operational activities. Therefore, the LRT's commitment to continue in realizing its responsibility to the community and the environment is implemented through ethical and transparent behavior that is oriented towards sustainable development and community welfare, while taking into account the expectations of stakeholders and compliance with the prevailing laws and regulations. LRT believes that a good company is not only one that succeeds in achieving the profit set in the target, but also one that is able to make a positive contribution to the development of people's living standards. Therefore, LRT makes CSR an inseparable part of the Company's operations to support business sustainability.

Due Diligence of Company Activities, and Social, Economic and Environmental Impacts

CSR activities are directed continuously to encourage self-reliance by focusing on social, economic, and environmental development programs (*Triple Bottom Line*) with efforts to achieve harmony in profit, people, and the planet, namely:

1. *Profit*, the Company's profit and loss rate;
2. *People*, the community as stakeholders who are affected by the implementation of the Company's activities;
3. *Planet*, the level of corporate responsibility to the environment.

The Company realizes the importance of harmony between the achievement of goals and responsibility towards the environment in which the Company operates. The arrangement of the Jakarta LRT's CSR activities has been integrated and in accordance with the Company's business strategy. Due diligence is conducted in a series of Company activities and social, economic and environmental impacts, whether on the positive and negative impacts. The due diligence process involves all sectors that are interrelated and establish a chain of business processes.



Point dari uji tuntas yang dilakukan di antaranya menitikberatkan pada tingkat manfaat dan keberlanjutan program terhadap dampak yang terjadi dan prioritas wilayah operasi yang terdampak.

Isu-isu Penting Sosial, Ekonomi dan Lingkungan terkait Dampak Kegiatan Perusahaan

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam menyelaraskan kinerja usaha yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah operasi LRT yang merupakan bagian dari para pemangku kepentingan dari Perusahaan. Manfaat yang diberikan termasuk pada aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

The points of carrying out the due diligence include focusing on the level of benefits and sustainability of the program for the impacts that occur and the priority of the affected operating areas.

Important Social, Economic and Environmental Issues related to the Impact of Company Activities

The Company's CSR is a form of the Company's commitment in aligning business performance that can provide benefits to the community and the environment around the LRT operating area, which is part of the Company's stakeholders. The benefits include social, economic, and environmental aspects as seen in the following table.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Definisi Definition	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan Influence/Impact of Company Activities
Pemegang Saham/Investor Shareholders/Investors	PT Jakarta Propertindo	Kinerja keuangan Perusahaan akan berdampak terhadap besarnya setoran dividen yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham The Company's financial performance will have an impact on the amount of dividends paid to the DKI Jakarta Provincial Government as the shareholder
Manajemen/Karyawan The Management/Employees	Seluruh pekerja yang bekerja di Perusahaan All employees who work in the Company	Kesinambungan Perusahaan berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang Company sustainability affects the welfare of workers in the long term
Regulator/Pemerintah Regulator/Government	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi DKI Jakarta • Kementrian Perhubungan • DKI Jakarta Provincial Government • Ministry of Transportation 	Kinerja keuangan perusahaan akan berdampak terhadap besarnya setoran pajak yang diserahkan kepada Pemerintah sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk modal pembangunan The Company's financial performance will have an impact on the amount of tax payments submitted to the Government as state revenue used for development capital
Masyarakat The Community	Masyarakat umum baik yang menggunakan produk-produk Perusahaan maupun tidak The community, whether or not they are using the Company's products	Kegiatan bisnis Perusahaan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat baik melalui produk dan layanan maupun atas keberadaan Perusahaan yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar The Company's business activities have an impact on improving the quality of life of the community, whether through products and services, as well as through the Company's existence, which can have a positive impact on the economy of the surrounding community.
Konsumen/Pelanggan Customer/Consumer	Para klien baik domestik maupun asing Domestic and foreign clients	Kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada Konsumen akan berpengaruh terhadap loyalitas mereka dalam menggunakan produk dan layanan tersebut The quality of products and services provided to consumers will affect their loyalty in using these products and services
Rekanan Partners	Kontrak dan Perjanjian Kerja Sama, Proses Operasional Cooperation Contracts and Agreements, Operational Process	Proses pengadaan yang adil dan transparan; Proses evaluasi yang objektif; Hubungan yang harmonis Fair and transparent procurement process; Objective evaluation process; Harmonious relationship
Media Massa Mass Media	Media yang menyiarakan informasi tentang perusahaan baik media cetak, media elektronik maupun media sosial, dan media online Media that broadcasts information about the Company, whether through print media, electronic media and social media, as well as online media	Kegiatan Perusahaan yang disampaikan oleh media massa, akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan produk-produk Perusahaan Company activities broadcasted by the mass media will affect the level of knowledge and understanding of the public about the Company's products



TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAK ASASI MANUSIA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN HUMAN RIGHTS

Komitmen dan Kebijakan

LRT dalam menjalankan usahanya senantiasa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berkarya dan bekerja. Perusahaan berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi segala ketentuan hukum serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan HAM.

Perusahaan menyadari bahwa perlindungan terhadap HAM menjadi salah satu hal penting yang terus dijunjung tinggi dan telah menjadi tanggung jawab Perusahaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik kegiatan usahanya maupun hubungan dengan karyawannya. Untuk itu, penegakan HAM menjadi komitmen penting bagi LRT, yang dirumuskan pada pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Selain itu Perusahaan juga telah memiliki fasilitas ruang laktasi, dan sarana penanganan keluh kesah pegawai.

Lingkup Perumusan Tanggung Jawab Sosial Terkait HAM

Dalam merumuskan tanggung jawab sosial terkait HAM, secara internal Perusahaan menitikberatkan pada aspek ketenagakerjaan yakni menjaga hubungan industrial dengan para karyawannya agar senantiasa sehat dan adil.

Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait pelaksanaan HAM di lingkup Perusahaan di antaranya meliputi perlakuan/tindakan diskriminasi, pengakuan dan jaminan bagi karyawan, hak pemberian waktu kerja, cuti tahunan, izin istirahat jika melahirkan/keguguran atau sakit karena haid, izin menjalankan ibadah maupun izin meninggalkan pekerjaan jika ada sesuatu hal.

Isu dan Risiko terkait HAM yang Relevan dengan Perusahaan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, isu hak asasi manusia dititik beratkan pada 2 (dua) elemen penting, yakni terkait etika bisnis dan etika kerja di lingkup LRT Jakarta. Perusahaan menyadari bahwa dalam pelaksanaan operasionalnya juga banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beberapa isu HAM yang relevan dengan Perusahaan antara lain pembebasan lahan, kebisingan dan gangguan saat pelaksanaan proyek pembangunan. Selain itu, juga terdapat isu-isu HAM yang relevan dan berkaitan langsung dengan Perusahaan adalah pada bidang ketenagakerjaan.

Commitments and Policies

In operating its business, LRT always upholds Human Rights (HAM) in various aspects of life, including in workplace. The Company is committed to respecting, protecting, and fulfilling all legal provisions and principles related to human rights.

The Company realizes that the protection of human rights is one of the important aspects that is continuously upheld and has become the responsibility of the Company in every activity which is conducted, whether in its business activities or in relations with its employees. For this reason, the enforcement of human rights is an important commitment for LRT, which is formulated in the prevention of acts of discrimination, freedom of association, working time arrangements, emergency permits, and opportunities to worship. In addition, the Company also has facilities for lactation rooms, and facilities for handling employee complaints.

Scope of Formulation of Social Responsibility Related to Human Rights

In formulating corporate social responsibilities related to human rights, the Company internally focuses on the employment aspect, namely in maintaining industrial relations with its employees so that they are always healthy and fair.

The scope of social responsibility related to the implementation of human rights within the Company includes non-discriminatory treatment/actions, recognition and guarantees for employees, the right to work time, annual leave, permission to rest in case of childbirth/miscarriage or illness due to menstruation, permission to worship, or permission to leave work if there is any emergency.

Issues and Risks related to Human Rights that are Relevant to the Company

As a Company engaged in the transportation sector, human rights issues in Jakarta LRT are focused on 2 (two) important elements, namely business ethics and work ethics. The Company realizes that in performing its operations, there are also many direct contacts with the community. Several human rights issues relevant to the Company include land acquisition, and noise and disturbance during the implementation of development projects. In addition, there are also human rights issues that are relevant and directly related to the Company in the field of employment.



Pemangku Kepentingan dan Lingkup Dampak Tanggung Jawab Sosial Hak Asasi Manusia

Perusahaan memandang bahwa, HAM merupakan hak mendasar bagi setiap individu. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan terdefiniskan dalam lingkup ini. Secara spesifik, LRT Jakarta menekankan pada karyawan, pemasok, distributor, konsumen dan pengguna akhir, serta masyarakat di sekitar lokasi usaha atau proyek, sebagai pemangku kepentingan yang memiliki dampak langsung terkait pemenuhan HAM dari kegiatan operasi dan bisnis yang dilakukan LRT Jakarta.

Prosedur dan Mekanisme Penanganan Konflik Terkait Hak Asasi Manusia

Perusahaan menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik dan meminimalisasi konflik yang terjadi terkait hak asasi manusia. Oleh karenanya, Perusahaan mempersilahkan setiap aduan permasalahan disampaikan kepada Perusahaan. Setiap keluhan maupun pengaduan yang sampai akan ditindaklanjuti sesuai hukum dan peraturan yang berlaku secara umum, maupun prosedur dan peraturan yang berlaku di lingkup Perusahaan.

Pencapaian dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

Di tahun 2021, tidak terdapat penghargaan secara spesifik terkait tanggung jawab sosial bidang hak asasi manusia. Namun, di sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak mendapati atau menerima pengaduan terkait pelanggaran hak asasi manusia antara lain pengaduan tindakan diskriminasi, insiden pelanggaran HAM maupun pengaduan terkait kebebasan berserikat di lingkungan Perusahaan serta insiden kerja paksa yang dialami karyawan. Perusahaan senantiasa berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas karyawan sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh Insan Perusahaan. Penghargaan inisiatif tanggung jawab sosial bidang hak asasi manusia juga ditunjukkan oleh karyawan berupa peningkatan loyalitas, produktivitas dan efektivitas karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan dalam membentuk citra positif Perusahaan untuk kesejahteraan bersama.

Di samping itu, untuk menghormati hak-hak konsumen dan lingkungan masyarakat, Perusahaan membuka layanan konsumen dan masyarakat, dengan siap menindaklanjuti setiap keluhan konsumen atau masyarakat tanpa melakukan diskriminasi terhadap konsumen dan masyarakat.

Stakeholders and Scope of Impact of the Social Responsibility related to Human Rights

The Company views that human rights are fundamental rights for every individual. Because of that, all stakeholders are defined in this scope. Specifically, the LRT Jakarta emphasizes employees, suppliers, distributors, consumers and end users, as well as the community around the business or project location, as stakeholders who have a direct impact on the fulfillment of human rights from the operations and business activities carried out by the LRT Jakarta.

Procedures and Mechanisms for Handling Conflicts Related to Human Rights

The Company ensures the implementation of policies properly, and minimizes conflicts that occur related to human rights. Therefore, the Company welcomes any complaints to be submitted to the Company. Every complaint that is submitted will be followed up in accordance with generally applicable laws and regulations, as well as prevailing procedures and regulations within the Company.

Achievements and Awards for Social Responsibility Initiatives in the Human Rights Sector

In 2021, there were no specific awards related to social responsibility in the field of human rights. However, throughout 2021, the Company did not find or receive complaints related to human rights violations, including complaints of acts of discrimination, incidents of human rights violations or complaints related to freedom of association within the Company, or incidents of forced labor experienced by employees. The Company always strives to improve the quality of management and the quality of employees so that they can work efficiently and effectively and provide benefits for all Company Personnel. The awards for social responsibility initiatives in the field of human rights were also shown by employees in the form of increasing employee loyalty, productivity and effectiveness in order to improve the Company's performance in establishing a positive image of the Company for mutual prosperity.

In addition, to respect the rights of consumers and the community, the Company provides services to consumers and the public; it is ready to follow up on any complaints from consumers or the public without discriminating against consumers and the public.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS



Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik operasi yang adil. Praktik ini didasari bahwa sebagai entitas bisnis Perusahaan harus profesional dalam menghasilkan produk dan jasanya, menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan bisnisnya, memiliki kesadaran untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, menghargai hak cipta dan sadar untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui langkah-langkah ini, Perusahaan berupaya menerapkan praktik operasi yang adil. Sebagai landasan dari praktik ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal, serta berbagai standar baku yang berlaku baik nasional maupun internasional.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen, Perusahaan mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung. Kebijakan ini tertera pada peraturan Perusahaan, *code of conduct*, maupun dokumen lainnya.

Commitments and Policies

The Company is committed to always implementing fair operating practices. This practice is based on the fact that as a business entity, the Company must be professional in producing and providing its products and services, uphold integrity in conducting its business, have the awareness to create a climate of fair business competition, respect copyright and be compliance with prevailing laws and regulations. Through these measures, the Company seeks to implement fair operation practices. The basis for this practice are applicable laws and regulations, internal policies, as well as various standards that apply both nationally and internationally.

As a follow-up to this commitment, the Company has developed various supportive policies. This policy is stated in the Company's regulations, *code of conduct*, and other documents.



Selain itu, Perusahaan juga membangun *whistleblowing systems* untuk memudahkan pengaduan bila terdapat pelanggaran. Kebijakan dan pedoman tersebut khususnya ditujukan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat dan adil.

Perusahaan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menerapkan kegiatan operasional dengan memperhatikan hak para pemangku kepentingan sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan mewujudkan keseimbangan atas kepentingan seluruh para pemangku kepentingan.

Di samping itu, penerapan prinsip GCG seperti yang telah disampaikan dalam keseluruhan bagian Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam laporan tahunan ini akan memperkuat aspek fundamental Perusahaan yang akan berimbang pada nilai positif bagi keberlanjutan Perusahaan. Wujud kegiatan operasional yang adil yaitu praktik bebas dari korupsi dan suap, netralitas dalam isu-isu politik, menghormati kekayaan intelektual, berkompetisi dengan adil serta patuh pada hukum dan regulasi yang berlaku.

Lingkup Perumusan Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil

Untuk merumuskan program-program CSR terkait operasi yang adil, LRT turut melakukan pemetaan terhadap dampak dan isu sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkaitan dengan prinsip operasi yang adil. Perusahaan meyakini pelaksanaan CSR terkait operasi yang adil ini akan sangat bergantung kepada tingkah laku dan tindakan yang dilakukan oleh seluruh pegawai LRT.

Sebagai bentuk nyata, Perusahaan telah mengatur segala sikap dan perilaku yang dilakukan oleh seluruh pegawai tanpa terkecuali, hal tersebut tercantum pada sebuah kebijakan kode etik Perusahaan. Seperti yang telah diketahui bahwa kode etik Perusahaan merupakan salah satu cara LRT untuk meminimalisir terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip operasi yang adil.

Pemangku Kepentingan dan Lingkup Dampak Tanggung Jawab atas Operasi yang Adil

Operasi yang adil terutama menekankan pada pentingnya pengelolaan Perusahaan yang transparan, wajar, dan setara. Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

1. Pemegang saham dan kepentingannya terhadap pengelolaan Perusahaan yang transparan dan akuntabel;
2. Karyawan yang berkepentingan terhadap Prosedur Tetap yang wajar, adil, dan dengan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan terhadap proses kemitraan yang bersandar pada transparansi dan keadilan;

In addition, the Company has also built a whistleblowing system to facilitate complaints in the event of violations. These policies and guidelines are specifically aimed at preventing conflicts of interest and implementing sound and fair business activities.

The Company guarantees that every interested party gets fair treatment, in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. The Company implements operational activities by taking into account the rights of the stakeholders so as to create a harmonious relationship and create a balance between the interests of all stakeholders.

In addition, the implementation of GCG principles as stated in the entire Good Corporate Governance section in this annual report will strengthen the Company's fundamental aspects which will have a positive impact on the Company's sustainability. The form of fair operational activities are practices of free from corruption and bribery, neutrality in political issues, respect for intellectual property, fair competition and compliance with applicable laws and regulations.

Scope of Formulation of Corporate Social Responsibility Regarding Fair Operation

To formulate CSR programs related to fair operation, LRT also does a mapping of social, economic and environmental impacts and issues related to the principle of fair operation. The Company believes that the implementation of CSR related to fair operations will depend on the behavior and actions of all LRT employees.

To actualize it, the Company has regulated all attitudes and behaviors carried out by all employees without exception, this is stated in a policy of the Company's code of ethics. As it is known, the Company's code of ethics is one of the LRT ways to minimize the occurrence of practices that are contrary to the principle of fair operation.

Stakeholders and Scope of Impact of the Corporate Social Responsibility regarding Fair Operations

Fair operation mainly emphasizes the importance of transparent, fair and equal management of the Company. Fulfillment of fair operation aspects involves the interests of various stakeholders, including:

1. Shareholders and their interests in transparent and accountable management of the Company;
2. Employees who have an interest in the Standard Procedures that are reasonable, fair, and with an accountable working mechanism;
3. Partners and suppliers who have an interest in the partnership process that relies on transparency and fairness;



4. Konsumen dan pengguna akhir dengan kepentingan atas kualitas produk yang dapat dipertanggungjawabkan, serta terbukanya jalur keluhan;
5. Regulator yang memiliki kepentingan atas industri yang stabil.

4. Consumers and end-users with an interest in product quality that can be accounted for, as well as open lines of complaints;
5. Regulators who have an interest in a stable industry.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Aspek Operasi yang Adil

Perusahaan senantiasa menargetkan dalam perencanaan tahunannya untuk menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Sasaran dan target serta rencana penerapan tanggung jawab atas operasi yang adil ditekankan pada penerapan Tata Kelola Perusahaan yang bersandar pada 2 (dua) tujuan utama, yaitu pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta pelibatan pemangku kepentingan untuk dapat tumbuh bersama. Perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan penerapan GCG pada ke-2 aspek tersebut, dengan harapan mampu menciptakan operasi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Corporate Social Responsibility Planning on the Aspects of Fair Operations

In its annual planning, the Company always aims to ensure the implementation of all fair operating practice policies. The targets and objectives, as well as the plan for implementing CSR regarding fair operations are emphasized on the implementation of Good Corporate Governance which relies on 2 (two) main objectives, namely compliance with applicable laws and regulations, as well as stakeholder involvement in order to grow together. The Company strives to continuously improve the implementation of GCG in these 2 aspects, with the hope of being able to create fair and accountable operations.

Penerapan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Aspek Operasi yang Adil

Perusahaan memiliki Tata Kelola Organisasi yang telah menyesuaikan dengan iklim dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan Perusahaan dijalankan dengan kelengkapan organ pendukung yang dapat memberikan kinerja yang optimal. Perusahaan juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis bagi kinerja keberlanjutan Perusahaan.

Implementation of Corporate Social Responsibility Initiatives on the Aspects of Fair Operations

The Company has an Organizational Governance that has adapted to the climate and prevailing laws and regulations. The duties and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the supervision and management of the Company are carried out with the assistance of supporting organs that can provide optimal performance. The Company also holds a General Meeting of Shareholders (GMS) as a forum for shareholders in making strategic decisions for the Company's sustainability performance.

Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kode Etik, hingga prosedur dan kebijakan Perusahaan lainnya disusun untuk menciptakan operasi yang adil dalam praktik operasi dan bisnis LRT Jakarta. Perusahaan berharap, penerapan GCG yang dilakukan akan terus memperkuat kinerja LRT Jakarta dan melindungi seluruh insan Perusahaan dari kemungkinan praktik pengelolaan bisnis yang tidak sehat.

The Articles of Association, Guidelines for Good Corporate Governance, Code of Ethics, and other Company procedures and policies are prepared to create fair operations in the LRT Jakarta's operating and business practices. The Company hopes that the implementation of GCG will continue to strengthen the performance of the LRT Jakarta and protect all Company personnel from possible unhealthy business management practices.

Perusahaan menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, segenap insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah. Segenap insan Perusahaan dan keluarganya juga dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari mitra usaha dan pihak lainnya yang akan mempengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan tugasnya di Perusahaan.

The Company guarantees fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders based on the prevailing laws and regulations. In addition, with reference to the laws and regulations, all Company personnel are prohibited from taking actions that have a conflict of interest, and taking personal benefits, either directly or indirectly from decision-making and Company activities other than legitimate income. All employees of the Company and their families are also prohibited from receiving gratification in any form, either directly or indirectly, from business partners and other parties that will affect the independence and objectivity of carrying out their duties in the Company.



Prosedur dan Mekanisme Penanganan Konflik Terkait Operasi yang Adil

Perusahaan menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik dan meminimalisasi konflik yang terjadi terkait kegiatan operasi yang adil. Oleh karenanya, Perusahaan membuka sarana penyampaian saran dan pendapat atau pengaduan yang disajikan secara terbuka bagi para pemangku kepentingan. Adapun setiap keluhan maupun pengaduan yang sampai, akan ditindaklanjuti secara independen dan rahasia oleh fungsi-fungsi terkait. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya, sehingga mekanisme ini aman bagi para pelapor. Pelaporan yang masuk akan ditelusuri fakta material yang terjadi. Bila memang terdapat pelanggaran, maka Perusahaan akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pencapaian dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil

Komitmen Perusahaan dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil telah meningkatkan kepercayaan para stakeholders. Sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak memiliki kasus indikasi korupsi dan suap yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun karyawan Perusahaan. Segenap insan Perusahaan juga tercatat tidak berpartisipasi aktif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada partai politik. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan *Code Of Conduct* serta prinsip-prinsip GCG yang telah diterapkan dengan baik, serta partisipasi pemangku kepentingan yang turut mendukung penerapan program tanggung jawab sosial terhadap operasi yang adil.

Selain itu, atas pelaksanaan bisnis Perusahaan yang terarah dan bertujuan luhur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Perusahaan juga memberikan dampak positif atas operasi yang telah dilakukan dalam bentuk nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan. Bentuk penghargaan yang diberikan Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, dibuktikan dengan ketaatan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban terhadap negara berupa pajak dari nilai ekonomi yang dihasilkan. Perusahaan juga mendistribusikannya langsung kepada lingkungan dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dan bantuan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar khususnya di sekitar proyek operasi Perusahaan, yang diberikan secara adil dan sesuai kebutuhan.

Procedures and Mechanisms for Handling Conflicts Related to Fair Operations

The Company ensures the implementation of policies properly and minimizes conflicts that occur related to fair operations. Therefore, the Company opens a means of submitting suggestions and opinions or complaints that are presented openly to stakeholders. Every complaints that are submitted will be followed up independently and confidentially by the related functions. The identity of the reporter is guaranteed to be confidential, so, this mechanism is safe for the whistleblower. Submitted complaints will be traced to the occurring material facts. If there is indeed a violation, the Company will provide sanctions according to the level of the violation committed.

Achievements and Awards for Corporate Social Responsibility Initiatives Related to Fair Operations

The Company's commitment to implementing corporate social responsibility related to fair operation practices has increased the trust of stakeholders. Throughout 2021, the Company did not have any cases of indications of corruption and bribery faced by members of the Board of Commissioners and Board of Directors, or employees of the Company. All of the Company's personnel are also recorded as not actively participating, either directly or indirectly, with political parties. This is influenced by the implementation of the *Code Of Conduct* and the principles of GCG that have been implemented properly, as well as the participation of stakeholders who also support the implementation of corporate social responsibility programs for fair operations.

In addition, the Company's business implementation is purposeful and has noble aims to improve the welfare of the community, the Company also has a positive impact on its operations in the form of economic value generated and distributed. The form of appreciation given by the Company to stakeholders is evidenced by the Company's obedience in fulfilling obligations to the state in the form of taxes from the resulting economic value. The Company also distributes its impact directly to the environment and the community in the form of activities and assistance to the community and the surrounding environment, especially around the Company's operational projects, which are given fairly and according to need.



TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE ON THE ASPECTS OF ENVIRONMENT



Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan menyadari bahwa lingkungan hidup menjadi salah satu indikator dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, Perusahaan senantiasa memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional. Perusahaan selalu berupaya untuk menjaga pencemaran lingkungan serta melestarikan lingkungan dalam setiap kegiatan operasional. Setiap kebijakan terkait pelestarian lingkungan senantiasa di evaluasi dengan melakukan identifikasi, kontrol dan menghindari atau meminimalkan penggunaan bahan atau alat-alat dalam kegiatan operasional Perusahaan yang dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan. Perusahaan juga senantiasa memperbaharui dan meningkatkan sistem manajemen lingkungan yang diterapkan untuk meningkatkan nilai.

Commitments and Policies

The Company realizes that the environment is one of the indicators of the implementation of sustainable development. For this reason, the Company always pays attention to the balance of the environment, by prioritizing the principle of prudence in carrying out business and operational activities. The Company always strives to maintain environmental cleanliness and preserve the environment in every operational activity. Every policy related to environmental preservation is constantly evaluated by identifying, controlling and avoiding or minimizing the use of materials or tools in the Company's operational activities that can have a negative impact on the environment. The Company also continuously updates and improves the environmental management system that is implemented to increase the value



Dampak dan Risiko Lingkungan Terkait Kegiatan Usaha Perusahaan Beserta Pengelolaannya

Perusahaan berkomitmen untuk mengelola lingkungan dengan baik, pengelolaan terhadap lingkungan dalam hal ini adalah segala upaya yang dilakukan Perusahaan dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan semua aspek yang timbul dalam proses usaha Perusahaan sehingga meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul terhadap karyawan dan lingkungan sekitar.

Program dan Kegiatan yang Dilakukan Terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan

Dalam setiap aktivitas bisnisnya, Perusahaan selalu berupaya memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

Pelestarian Lingkungan Hayati

Untuk menjaga ekosistem alam, mendukung ketersediaannya sarana kebersihan, dan memberdayakan kebiasaan menanam pohon untuk keberlangsungan penghijauan, Perusahaan melakukan kegiatan penanaman pohon dan penyediaan peralatan angkut sampah yang dilaksanakan di setiap area operasi Perusahaan. Guna membentuk lingkungan hidup yang harmonis antara kegiatan operasional dan kebutuhan akan lingkungan alam, Perusahaan menata taman sekitaran kantor operasional. Selain digunakan untuk menciptakan suasana yang asri, taman ini dapat berfungsi sebagai area resapan air, sekaligus untuk menjaga kualitas udara agar dapat selalu terjaga dalam kondisi baik.

Komitmen Perusahaan terkait pelestarian lingkungan diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Penghijauan
Melalui Hari Gerakan Satu Juta Pohon pada tanggal 10 Januari 2019, PT Jakarta Propertindo Perseroda selaku Pemilik Proyek LRT Jakarta melakukan penanaman pohon di area Gedung MCC Depo LRT Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai inisiatif dari anak usaha Jakpro yaitu PT LRT Jakarta.

Dalam proses pembangunan proyek LRT Jakarta dari Depo di Jalan Pegangsaan Dua Kelapa Gading sampai dengan Stasiun Velodrome Rawamangun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai Kontraktor Proyek LRT Jakarta bertanggung jawab melakukan penggantian pohon yang terkena imbas pembangunan LRT, mengikuti rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

Sebanyak 1.190 pohon sebagian telah ditanam di area stasiun dengan rincian 500 pohon Mahoni, 500 pohon Ketapang dan 190 pohon Sawo.

Environmental Impacts and Risks Related to the Company's Business Activities and Management

The Company is committed to managing the environment properly. Environmental management in this case is all the efforts made by the Company in order to carry out the planning, implementation and supervision of all aspects that arise in the Company's business processes so as to minimize negative impacts that may arise on employees and the surrounding environment.

Programs and Activities Related to Corporate Social Responsibility on the Aspects of Environment

In each of its business activities, the Company always does its best to pay attention to environmental aspects through the following various activities:

Conservation of the Biological Environment

In order to maintain the natural ecosystem, support the availability of cleaning facilities, and empower the habit of planting trees for sustainable reforestation, the Company conducted tree planting activities and provides garbage collection equipment which is carried out in every area of the Company's operations. In order to establish a harmonious living environment between operational activities and the need for the natural environment, the Company arranges to have a park around the operational office. Besides being used to create a beautiful atmosphere, this park can function as a water catchment area, as well as to maintain air quality so that it can always be maintained in good condition.

The Company's commitment to environmental preservation is implemented through the following activities:

- Greening
Through the One-Million-Trees-Movement Day on January 10, 2019, PT Jakarta Propertindo Perseroda, as the owner of the LRT Jakarta Project, planted trees in the Kelapa Gading LRT MCC Depo Building area, North Jakarta, as an initiative of Jakpro's subsidiary, PT LRT Jakarta.

In the process of developing the LRT Jakarta project from the Depo on Jalan Pegangsaan Dua Kelapa Gading to the Velodrome Rawamangun Station, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, as the LRT Jakarta Project Contractor, is responsible for replacing trees affected by the LRT construction, following the recommendation from the DKI Jakarta Provincial Forestry Service.

A total of 1,190 trees have been partially planted in the station area with details of 500 Mahogany trees, 500 Ketapang trees and 190 Sawo trees.



Selanjutnya setelah operasi komersial pada Desember 2019, PT LRT Jakarta terus melakukan kegiatan penghijauan guna meningkatkan kualitas udara sekaligus sebagai bentuk beautifikasi di lingkungan Depo LRT Jakarta. Berbagai tipe/jenis, di antaranya Tabebuya, ketapang kencana, mahoni, kamboja, tanaman buah, dan sebagainya.

- Pengelolaan RKL/RPL

Dalam rangka menjaga dan memelihara kualitas lingkungan operasional dan perawatan LRT Jakarta, Perusahaan telah melaksanakan program Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada jalan tol beroperasi sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

- Pengelolaan Limbah

Pengolahan limbah diatur melalui Surat Tugas Pelaksana Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3 dari Kegiatan Operasional LRT Jakarta Nomor 015/UT0000/118/X/2019 bahwa pengelolaan limbah meliputi limbah domestik dan limbah B3.

Pengelolaan Limbah Domestik; berasal dalam lokasi Depo LRT Pegangsaan Dua (mulai dari Gedung MCC, kantor JakPro, kantin WIKA, kantor kontraktor dan timbulan sampah lainnya di dalam gedung) dan seluruh stasiun yang beroperasi diserahkan Pengelolaannya kepada PT. LRT Jakarta Jakarta. Pengelolaan Limbah B3; berasal dari hasil kegiatan operasional baik di Stasiun maupun di lingkungan Depo LRT Jakarta yang selanjutnya dikelola oleh vendor yang memiliki lembar kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- Efisiensi dan Konservasi Air

Kegiatan operasional dan perawatan LRT Jakarta tidak terlepas dari penggunaan air sebagai kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan air tersebut, diperoleh dari PDAM. Intensitas penggunaan air baik untuk keperluan domestik maupun operasional perawatan di perusahaan haruslah dilakukan dengan efektif dan efisien. Apabila tidak, akan menimbulkan kesulitan dalam menangani air limbah yang berakibat pada menurunnya kualitas dan kuantitas air bersih. Dengan adanya isu lingkungan tersebut, perusahaan melakukan pengelolaan air yang baik dengan membuat program efisiensi air.

- Upaya Mitigasi Emisi Karbon

Dilakukan dengan penghematan energi listrik. Perusahaan berupaya menerapkan budaya hemat energi dengan memasang himbauan hemat listrik dan penggunaan lampu hemat energi di setiap ruangan kantor.

Furthermore, after commercial operations in December 2019, PT LRT Jakarta continued to carry out reforestation activities to improve air quality as well as a form of beautification in the LRT Jakarta Depot. Various types / types, including Tabebuya, Ketapang Kencana, mahogany, frangipani, fruit trees, and so on.

- Management of RKL/RPL

In order to maintain and preserve the quality of the operational environment and maintenance of the LRT Jakarta, the Company has implemented Environmental Monitoring Plan (RPL) and Environmental Management Plan (RKL) programs on operating toll roads in accordance with the Decree of the Minister of the Environment No. 45 of 2005 concerning Guidelines for Compiling Reports on the Implementation of Environmental Monitoring Plans (RPL) and Environmental Management Plans (RKL) as well as Government Regulation no. 27 of 2012 concerning Environmental Permits.

- Waste Management

Waste management is regulated through the Letter of Assignment for the Management of Domestic Waste and Hazardous Waste from LRT Jakarta Operational Activities Number 015/UT0000/118/X/2019 that includes waste management of domestic waste and hazardous and toxic waste (B3).

Domestic Waste Management originated from the location of the Pegangsaan Dua LRT Depot (starting from the MCC Building, JakPro office, WIKA canteen, contractor's office and other waste heap in the building), and all operating stations are handed over to PT LRT Jakarta. Hazardous Waste Management; derived from the results of operational activities both at the station and in the LRT Jakarta Depot, is then managed by a vendor who has a cooperation sheet in accordance with the provisions of the legislation.

- Water Efficiency and Conservation

The operational and maintenance activities of the LRT Jakarta cannot be separated from the use of water as a necessity. The fulfillment of the water needs is obtained from the PDAM. The intensity of water use for both domestic purposes and maintenance operations in the Company must be carried out effectively and efficiently. If not, it will cause difficulties in dealing with wastewater which results in a decrease in the quality and quantity of clean water. With these environmental issues, the Company carries out good water management by making water efficiency programs.

- Carbon Emission Mitigation Efforts

This is achieved by saving electrical energy. The Company strives to implement an energy-saving culture by installing electricity-saving appeals and the use of energy-saving lamps in every office room.



Guna mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan, Perusahaan memiliki program-program pengelolaan lingkungan seperti:

1. Penanaman pohon di dalam lingkungan Depo.
2. Penyediaan tempat sampah yang dibedakan yang organik dan non organik.
3. Melakukan pengukuran dan pemantauan lingkungan melalui RKL dan RPL

Pengelolaan Limbah

Perusahaan memiliki kebijakan dalam proses dan prosedur pengolahan limbah yang ramah lingkungan, baik limbah padat maupun cair. Kegiatan pengelolaan limbah padat mencakup pemilihan dan pengelolaan limbah biasa dengan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta pengelolaan tempat pembuangan sampah sementara.

1. Pengelolaan Limbah Padat

Limbah Domestik dikelola oleh Dinas Lingkungan setempat dengan dokumen pengangkutan dan pembayaran retribusi daerah secara resmi dibayarkan dikelola oleh Perusahaan.

Untuk limbah domestik non LB3 yang masih dapat digunakan seperti hasil pekerjaan bubut yang masih bernilai ekonomis dikelola oleh vendor yang memiliki Izin Usaha/ Izin Lingkungan untuk pengelolaan limbah domestik ekonomis tersebut.

2. Pengelolaan Limbah B3

Limbah B3 (minyak pelumas, gemuk bekas, cairan accu/ asam sulfat, solar kadaluarsa, oli bekas, tiner bekas, bahan pembersih dan solvent, bahan penghilang cat dan vernis) hasil kegiatan operasional LRT Jakarta dikelola (pengangkutan, penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan sampai kepada penimbunan) oleh vendor yang memiliki MoU kerja sama dengan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

3. Pengelolaan Limbah Cair

Limbah Cair hasil kegiatan operasional LRT Jakarta berasal dari toilet, kloset dan bak cuci piring serta kegiatan pencucian kereta. Penanganan limbah cair tersebut dilakukan oleh pengelola gedung dan fasilitas Sarana Prasarana LRT Jakarta.

Program Green Office

Program CSR terhadap lingkungan hidup dilaksanakan melalui Program Green Office yaitu dengan menerapkan berbagai penghematan, yakni dengan melakukan berbagai macam program dan kebijakan yang terkait dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Seperti pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana dalam kegiatan operasional menjadi salah satu kebijakan Perusahaan; di antaranya penggunaan energi listrik, air, kertas, dan semua hal yang terkait dengan sumber daya alam.

Program tersebut dapat memberikan manfaat nyata seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, dan juga peningkatan citra Perusahaan.

In order to optimize the implementation of environmental management programs and activities, the Company has environmental management programs such as:

1. Planting trees in the within the Depo.
2. Provision of organic and non-organic waste bins.
3. Conduct environmental measurements and monitoring through RKL and RPL

Waste Management

The Company has environmentally friendly policies on processes and procedures for processing both solid and liquid waste. Solid waste management activities include the selection and management of ordinary waste, and hazardous and toxic materials (B3), as well as the management of temporary waste disposal sites.

1. Solid Waste Management

Domestic waste is managed by the local Environmental Service. The transport documents and the payment of local retribution is officially paid and managed by the Company. For non-B3 domestic waste that can still be used, such as the residue of lathe work which is still economically valuable, it is managed by a vendor who has a Business License/ Environmental Permit for the economic management of domestic waste.

2. Hazardous Waste Management

B3 waste (lubricating oil, used grease, battery fluid/ sulfuric acid, expired diesel fuel, used oil, used thinner, cleaning agents and solvents, paint and varnish remover) from the operational activities of the LRT Jakarta are managed (which includes the management of the transportation, storage, utilization, processing and hoarding) by vendors who have an MoU of cooperation with the Company, in accordance with the provisions of laws and regulations.

3. Liquid Waste Management

Liquid Waste from the operational activities of the LRT Jakarta comes from toilets, closets and sinks as well as train washing activities. The handling of the liquid waste is carried out by the manager of the Jakarta LRT building and facilities division.

Green Office Program

The CSR program for the environment is carried out through the Green Office Program, namely by implementing various efficiency programs, namely by conducted various programs and policies related to environmental sustainability. One example of the Company's policies is the efficient usage of natural resources in operational activities. This includes the use of electrical energy, water, paper, and all things related to natural resources.

The program can provide tangible benefits such as reduced operational costs, increased efficiency, and also improved the Company's image.



Pengelolaan penggunaan Material dan Energi

Salah satu komitmen menjaga lingkungan hidup diwujudkan Perusahaan melalui kebijakan penggunaan energi yang efektif dan efisien. Selain berimbang pada penggunaan energi yang tepat guna, kebijakan ini terbukti dapat mengurangi beban biaya operasional Perusahaan. Material dan energi yang kerap digunakan dalam operasional Perusahaan adalah air, kertas maupun bentuk alat tulis kantor (ATK) lainnya, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).

Perusahaan memiliki kebijakan terkait penggunaan material dan energi pada kegiatan operasional agar digunakan secara efisien serta berorientasi pada meminimalisir dampak lingkungan. Perusahaan berkomitmen melaksanakan efisiensi terkait material dan energi yang digunakan dalam operasional Perusahaan melalui penerapan sejumlah program. Di mana Perusahaan mengimbau agar seluruh insan Perusahaan menggunakan kertas kembali pada sisi yang kosong, dan menggunakan air bersih secukupnya, serta mematikan semua listrik apabila tidak digunakan atau selesai bekerja, juga menggunakan BBM sesuai dengan kebutuhan.

Penghematan penggunaan kertas terus diupayakan oleh Perusahaan, yaitu melalui dukungan Teknologi Informasi. Untuk volume penggunaan material kertas dalam kegiatan operasional di tahun 2021 dan perbandingannya dengan tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Perbandingan Konsumsi Kertas 2020-2021
Comparison of Paper Consumption In 2020-2021

	2021	2020	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease (%)	
Volume (Rim) (Rim/Ream)	570	700	-18,5%	✓
Nilai (Rp) Nominal Value (in IDR)	19.950.000	25.854.500	-22,8%	✓

Sementara itu, keberadaan air bersih yang terus menyusut tiap tahunnya, juga membuat insan Perusahaan terus berupaya dalam menjaga persedianya. Untuk menjaga stok atau persediaan air bersih dalam kegiatan operasional kantor sehari-hari, Perusahaan melakukan sosialisasi penghematan terhadap penggunaan sumber daya air di lingkungan kantor, serta melakukan pengecekan secara rutin terhadap instalasi air sehingga dengan cepat diketahui dan dilakukan perbaikan apabila ada kebocoran.

Di samping itu, Perusahaan mendorong penggunaan listrik dalam kegiatan operasional perkantoran secara lebih optimal dan efisien. Perusahaan menggunakan listrik yang di beli dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai sumber energi untuk kegiatan operasional kantor. Perusahaan menggunakan pendekatan perhitungan jumlah konsumsi energi listrik dengan cara mengkonversi total biaya penggunaan listrik dari PLN menjadi rata-rata jumlah kilo watt jam penggunaan.

Management of Material and Energy Usage

One of the commitments to protect the environment is realized by the Company through an effective and efficient energy use policy. In addition to having an impact on the efficient use of energy, this policy has proven to be able to reduce the burden of the Company's operational costs. Materials and energy that are often used in the Company's operations are water, paper and other forms of office stationery (ATK), electricity, and fuel oil (BBM).

The Company has policies related to the use of materials and energy in operational activities so that they are used efficiently and are oriented towards minimizing environmental impacts. The Company is committed to implementing efficiency related to materials and energy used in the Company's operations through the implementation of a number of programs. In these programs, the Company urges all Company personnel to re-use paper, consume clean water as needed, and turn off all electricity when it is not in use, or after work. The Company also urges its employees to use fuel as needed.

The Company continues to strive to reduce paper usage, namely through the support of Information Technology. The volume of paper material used in operational activities in 2021 and its comparison with 2020 can be seen in the following table:

Meanwhile, the availability of clean water, which continues to dwindle every year, also makes the Company's personnel continue to strive to maintain its supply. To maintain the stock or supply of clean water in daily office operational activities, the Company conducts dissemination on the efficient use of water resources in the office environment, as well as routinely checks water installations so that leaks are quickly identified and repaired.

In addition, the Company encourages a more optimal and efficient use of electricity in office operations. The Company uses electricity purchased from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) or PLN as an energy source for office operations. The Company uses an approach to calculating the amount of electrical energy consumption by converting the total cost of electricity usage from PLN to the average number of kilowatt hours of use.



Perbandingan Penggunaan Listrik 2020-2021
 Comparison of Electricity Usage in 2020-2021

	2021	2020	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease (%)	
Penggunaan (kWh) Electricity Usage (in kWh)	8.331.530	9.668.690	-13,83%	
Nilai (Rp) Nominal Value (in IDR)	Rp.13.458.683.801	Rp.23.906.825.637	-43,70%	

Sementara itu, kebijakan penggunaan BBM, lebih mempertimbangkan kelayakan seluruh kendaraan operasional yang telah lulus uji emisi. Upaya efisiensi yang dilakukan Perusahaan terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Meanwhile, the policy on the use of fuel takes into account the feasibility of all operational vehicles that have passed the emission test. The efficiency efforts made by the Company are shown in the table and graph below.

Perbandingan Konsumsi BBM 2020-2021
 Comparison of Fuel Consumption in 2020-2021

	2021	2020	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease (%)	
Volume (Liter) Volume (Liter)	5113,59	5567,78	-8,15%	
Nilai (Rp) Value (Rp)	39.119.000	42.593.500	-8,15%	

Pertimbangan Aspek Lingkungan terkait Kerja Sama dengan Mitra Kerja Pemasok/Vendor/Supplier

Dalam kegiatan usaha yang dilakukan, Perusahaan kerap melakukan proses kerja sama dengan beberapa mitra kerja seperti Pemasok, Vendor ataupun Supplier, yang pada setiap prosesnya, Perusahaan selalu mempertimbangkan kualitas material yang akan dipakai oleh mitra kerja. Perusahaan senantiasa menganalisa setiap material yang akan digunakan oleh mitra kerja untuk meminimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan.

Environmental Aspects Considerations related to Cooperation with Partners/Supplier/Vendor

In its business activities, the Company often cooperates with several work partners, such as Suppliers or Vendors, which in each process, the Company always considers the quality of the material that they use. The Company always analyzes every material that is used by work partners to minimize the impact that it may cause to the environment.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup

Komitmen Perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan diwujudkan dengan efisiensi penggunaan kertas, listrik dan BBM, atau pengelolaan lingkungan lainnya yang berdampak terhadap efisiensi biaya operasional Perusahaan.

Quantitative Impact of Corporate Social Responsibility Activities on the Aspect of Environment

The Company's commitment to sustainable environmental management is manifested by the efficient use of paper, electricity and fuel, or other environmental management that has an impact on the efficiency of the Company's operational costs.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Perusahaan melaksanakan inisiatif program tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup sebagai bentuk kontribusi Perusahaan dalam memberikan manfaat yang lebih luas bagi peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, selain kegiatan rutin, Perusahaan juga menekankan program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengelolaan dan kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang merupakan pelaksanaan Inisiatif kegiatan Perusahaan

Implementation of Corporate Social Responsibility Initiatives on the Aspect of Environment

The Company carries out corporate social responsibility program initiatives related to the environment as a form of the Company's contribution in providing wider benefits for improving environmental quality in a sustainable manner. As previously described, in addition to routine activities, the Company also emphasizes corporate social responsibility programs for environmental management and conservation activities, which



terkait lingkungan hidup yang dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Berikut pelaksanaan kegiatan program bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan Perusahaan di sepanjang tahun 2021.

are the implementation of the Company's initiatives related to the environment that can have a positive impact on the environment and society.

The following are the implementation of environmental program activities performed by the Company throughout 2021.

No	Kegiatan yang Dilakukan Activities	Tempat dan Waktu Pelaksanaan Time and Place	Nilai (Rp) Nominal Value (IDR)
1	Pengukuran dan Pemantauan RKL RPL Tahun 2021 Measurement and Monitoring Environmental Monitoring Plan (RPL) 2021	Area Operasional LRTJ (Stasiun, Depo Sarana, Lingkungan Depo, Kantor MC) Semester 1 & 2 Tahun 2021 LRTJ Operational Area (Station, Facility Depot, Depot Environment, MC Office) Semester 1 & 2 Year 2021	170.357.000

Mekanisme dan Informasi tentang Pengaduan Masalah Lingkungan

Perusahaan membuka kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan pengaduan terkait pelanggaran pencemaran lingkungan dari kegiatan operasi yang dilakukan Perusahaan. Saluran pengaduan tersebut dilayangkan melalui telephone, surat, email, atau situs web resmi Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan tidak mendapati adanya pengaduan terkait masalah lingkungan yang berdampak cukup signifikan dan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.

Complaints Mechanisms and Information on Environmental Problems

The Company opens opportunities for all parties to file complaints related to violations of environmental pollution from the Company's operations. The complaint channels are by telephone, letter, email, or the Company's official website.

Until the end of 2021, the Company did not find any complaints related to environmental issues that had a significant impact and affected the Company's business continuity.

Sertifikasi dan Penghargaan di Bidang Lingkungan

Environmental Certifications and Awards

Penghargaan

Tanggal Date	Nama Penghargaan Name of the Award	Institusi Yang Memberikan Awarding Institution
20 April 2021 April 20, 2021	Jalan Hijau Achievement Award	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Transportation Management Agency for the Greater Jakarta Area of the Ministry of Transportation

Sertifikasi

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak memiliki dan/atau mendapatkan sertifikasi terkait lingkungan hidup. Dengan demikian, informasi terkait hal tersebut tidak dapat disampaikan.

Awards

Certification

Throughout 2021, the Company did not have and/or received certifications related to the environment. Thus, information related to this cannot be conveyed.

Biaya Implementasi Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Aspek Lingkungan Hidup

Pada 2021, total biaya yang dikeluarkan Perusahaan dalam menjalankan komitmen perusahaan terkait pelestarian lingkungan hidup adalah sebesar Rp170,36 juta.

Cost of Implementing Corporate Social Responsibility Initiatives on the Aspects of Environment

In 2021, the total costs incurred by the Company in carrying out the Company's commitments related to environmental conservation was Rp170.36 billion.



TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE ON THE ASPECTS OF EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Komitmen dan Kebijakan

Hubungan industrial yang baik antara Perusahaan dengan seluruh karyawan merupakan kunci dalam menunjang pencapaian berbagai target Perusahaan. Implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan terkait praktik ketenagakerjaan adalah tanggung jawab Perusahaan terhadap karyawan sebagai pemangku kepentingan internal. Implementasi ini meliputi praktik terbaik atas pengelolaan ketenagakerjaan, keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi, serta persamaan hak dan kesempatan kerja.

Untuk memastikan praktik ketenagakerjaan tersebut, Perusahaan menerapkan berbagai kebijakan. Di antaranya melakukan berbagai pemenuhan atas hak karyawan, melakukan pengembangan talenta, mengupayakan remunerasi yang kompetitif, memberikan apresiasi serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan Perusahaan dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial terhadap K3 adalah Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang "Ketenagakerjaan" dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT LRT dan Pegawai.

Selain praktik ketenagakerjaan, Perusahaan juga mengupayakan praktik mitigasi keselamatan dan kesehatan kerja terbaik untuk para karyawan. Komitmen ini meliputi mitigasi maupun minimalisasi atas risiko kecelakaan, penyakit ataupun absensi kerja yang dapat terjadi pada karyawan. Di samping itu, Perusahaan juga menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari budaya kerja yang diharapkan mampu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh insan Perusahaan. Sebagai bentuk mitigasi pandemi COVID-19, Perusahaan juga menyediakan ruang swapulih, dan obat-obatan untuk karyawan yang terkena COVID-19. Di sisi lain, Perusahaan juga menyediakan ekstra nutrisi bagi karyawan guna menjaga vitalitasnya.

Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Aspek Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perusahaan berkomitmen untuk bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan bagi para pegawai serta menyediakan peralatan dan lingkungan

Commitments and Policies

Good industrial relationship between the Company and all its employees are key in supporting the achievement of the Company's various targets. The implementation of corporate social responsibility policies related to employment practices is the responsibility of the Company towards employees as internal stakeholders. This implementation includes best practices on labor management, balance between work and personal life, as well as equal rights and employment opportunities.

To ensure the proper application of these employment practices, the Company implements various policies. These include fulfilling various employee rights, developing talent, seeking competitive remuneration, giving appreciation and creating a conducive work environment. One of the policies implemented by the Company in relation to social responsibility towards Occupational Health and Safety (OHS/K3) is the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning "Employment" and the Collective Labor Agreement (PKB) between PT LRT and its Employees.

In addition to employment practices, the Company also strives for the best occupational safety and health mitigation practices for employees. This commitment includes mitigation and minimization of the risk of accidents, and illness or work absences that may occur to employees. In addition, the Company also applies occupational safety and health standards as part of the work culture, which is expected to be able to create a conducive working environment for all Company personnel. As a form of mitigation of the COVID-19 pandemic, the Company also provides a recovery room and medicines for employees affected by COVID-19. On the other hand, the Company also provides extra nutrition for employees to maintain their vitality.

Coverage and Formulation of Corporate Social Responsibility on the Aspects of Employment, Occupational Health and Safety

The Company is committed to taking full responsibility for the welfare, safety and health of its employees. The Company is committed to providing welfare, as well as providing safety equipment and a safe and healthy work environment for its



kerja yang aman dan sehat. Lingkup kegiatan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari program ketenagakerjaan yang meliputi kesetaraan gender, kesempatan kerja yang sama, kesetaraan dalam program pengembangan kompetensi, pemenuhan hak kesejahteraan karyawan, remunerasi, pembentukan lingkungan kerja yang kondusif, rekrutmen dan turnover karyawan, apresiasi terhadap karyawan, kebebasan berserikat, perjanjian kerja bersama, dan program pensiun.

Selanjutnya, program pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi program sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, memperkuat sarana keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi dan pelatihan K3, program jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi karyawan. Perusahaan juga telah mengatur pengelolaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai dalam beberapa kebijakan dengan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap K3 meliputi pelaksanaan program mitigasi risiko K3, penyediaan sarana dan prasarana K3 yang sesuai dengan standar, peningkatan pengetahuan, kemampuan dan kesadaran karyawan melalui sosialisasi maupun pelatihan, evaluasi kepatuhan regulasi terkait K3, pengendalian operasional K3 di lingkungan kerja, dan pelaksanaan rutin simulasi tanggap darurat berdasarkan risiko area kerja.

Program dan Kegiatan yang Dilakukan Terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja yang Sama, serta Pemberian Izin Cuti

Perusahaan senantiasa memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam hal kesempatan bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya. Demikian juga dalam sistem rekrutmen, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun untuk dapat diterima menjadi karyawan Perusahaan, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun gender.

Kesetaraan gender dan kesempatan kerja yang sama, juga berlaku dalam program pengembangan karier, di mana sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlaku di

employees. The coverage of corporate social responsibility activities related to employment, occupational health and safety consists of employment programs that include gender equality, equal employment opportunities, equality in competency development programs, fulfillment of employee welfare rights, remuneration, establishment of a conducive work environment, employee recruitment and turnover, employee appreciation, freedom of association, collective labor agreements, and pension plans.

Furthermore, the occupational health and safety management program includes an occupational health and safety certification program for employees, strengthening occupational health and safety facilities, dissemination and training of K3, work accident insurance program, as well as health insurance and work accident insurance for employees. The Company has also regulated the management of the occupational health and safety aspects of its employees in several policies with reference to the prevailing policies and laws and regulations.

In general, the corporate social responsibility on the aspects of K3 includes the implementation of K3 risk mitigation programs, provision of K3 facilities and infrastructure in accordance with standards, increased knowledge, skills and awareness of employees through dissemination and training, evaluation of regulatory compliance related to OHS, controlling K3 operations in the work environment., and routine implementation of emergency response simulations based on work area risks.

Programs and Activities Related to Corporate Social Responsibility on the Aspects of Employment, Occupational Health and Safety

Gender Equality and Equal Employment Opportunities, and Granting Leave Permits

The Company always provides equal rights and opportunities in terms of work opportunities regardless of differences in religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions. Likewise in the recruitment system, the Company provides equal opportunities to anyone to be accepted as an employee of the Company, regardless of ethnicity, religion, race, or gender.

Gender equality and equal employment opportunities also apply to career development programs, in which the Human Resources



internal Perusahaan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan juga memberikan izin cuti bagi karyawan perempuan yang sedang hamil dan akan melahirkan. Sementara untuk karyawan laki-laki yang istrinya tengah melahirkan, mendapatkan izin tidak bekerja selama 2 hari (+2 hari jika di luar kota) hari tanpa di potong cuti.

Persamaan Hak dalam Pengembangan Kompetensi dan Karier

Perusahaan senantiasa menyelenggarakan beberapa program pengembangan kompetensi bagi karyawan secara berkala setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan usaha Perusahaan. Di samping itu, Perusahaan juga menjamin bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan organisasi.

Di sepanjang tahun 2021, Perusahaan menginvestasikan pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp1.473.063.737 Pengembangan kompetensi yang dilakukan Perusahaan ini disesuaikan dengan kebutuhan, yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap kinerja Perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tanggung jawab terhadap para pemegang saham dalam rangka memperkuat keberlanjutan usaha Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan juga memberikan hak yang sama bagi semua pegawai dalam hal pengembangan karier baik promosi, maupun rotasi. Program ini dilakukan untuk membentuk para pemimpin masa depan Perusahaan. Program ini dikembangkan untuk menempatkan karyawan pada beberapa *level* tertentu yang disesuaikan dengan kompetensi dan *skill* yang dimiliki sehingga proses regenerasi karyawan dari *level* terendah pada organisasi Perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Pemenuhan Hak Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan insan Perusahaan juga tidak luput dari perhatian. Standar gaji telah ditetapkan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku, termasuk pemberian tunjangan kepada karyawan. Kesejahteraan seluruh karyawan senantiasa menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Perusahaan, agar selalu terjalin sinergi antar karyawan dengan Perusahaan demi terciptanya produktivitas kerja dan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, Perusahaan terus berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan guna meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas karyawan terhadap Perusahaan. Hal ini mendorong Perusahaan untuk senantiasa memberikan kompensasi yang layak dan adil sebagai imbal jasa terhadap hasil kinerja karyawan.

Tingkat Turnover Karyawan

Rasio employee turnover dapat menunjukkan produktivitas dan loyalitas SDM. Selain itu, tingkat turnover karyawan juga

(HR) development system that applies internally to the Company provides equal opportunities for every employee to be promoted to a higher position in accordance with applicable regulations within the Company.

In addition, the Company also provides leave for female employees who are pregnant and about to give birth. Meanwhile, for male employees whose wives are giving birth, they get permission to be absent from work for 2 (two) days (or + 2 (two) day, days without it being counted as leave.

Equality in Competence and Career Development

The Company regularly organizes competency development programs for employees every year to support the Company's business activities. In addition, the Company also ensures that every employee has the same opportunity to participate in every education and training program that is available, in accordance with the needs and plans for organizational development.

In 2021, the Company invested IDR1.473.063.737 in employee competency development. These competency development programs are carried out by the Company, and is adjusted to the needs. These programs are expected to have a positive impact on the Company's performance as a form of responsibility to shareholders in order to strengthen the Company's business sustainability.

In addition, the Company also provides equal rights for all employees in terms of career development, both in terms of promotion and rotation. This program is conducted to shape the future leaders of the Company. This program was developed to have the employees reach certain levels, which are adjusted to their competencies and skills, so that the employee regeneration process from the lowest level in the Company's organization can operate well.

Fulfillment of Employee Welfare Rights

The welfare of the Company's employee does not go unnoticed. Salary standards have been set in accordance with the prevailing District/City Minimum Wage, including the provision of benefits to employees. The welfare of all employees is always a matter of great concern to the Company, so that there is always a synergy between employees and the Company in order to create work productivity and achieve optimal performance. Therefore, the Company continues to be committed to improving employee welfare in order to increase employee performance motivation and loyalty to the Company. This encourages the Company to always provide proper and fair compensation as a reward for employee performance results.

Employee Turnover Rate

The employee turnover ratio can show the productivity and loyalty of the Company's HR. In addition, the employee turnover rate



merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Pada tahun 2021, jumlah karyawan yang keluar dari Perusahaan 35 orang, turun dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah 51 orang yang keluar dari Perusahaan. Sementara jumlah keseluruhan rekrutmen di sepanjang tahun 2021 sebanyak 44 orang, meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah rekrutmen sebanyak 21 orang.

is also a reflection of the Company's culture and work system, which can be an indicator of the Company's success in creating a conducive work environment.

In 2021, the number of employees who left the Company was 35, which was a decrease when compared to 2020 with 51 people leaving the Company. Meanwhile, the total number of recruits throughout 2021 was 44 people, which was an increase compared to 2020 with 21 recruits.

Penyebab Turnover Karyawan Reasons for Employee Turnover

Penyebab Reasons	Tahun Tahun	
	2021	2020
Pensiun alami Retirement	-	-
Pensiun dini Early retirement	1	-
Meninggal Death	3	-
Mengundurkan diri Resignation	9	18
Diberhentikan Fired	4	-
Total karyawan yang keluar Total number of employees leaving the Company	34	49
Total Karyawan Akhir Tahun Total number of Company's employees at the end of the year	253	245
Percentase turnover Turnover percentage	3,41%	4,74%

Penilaian Kinerja karyawan

Evaluasi atas kinerja karyawan dilakukan rutin setiap tahun, yaitu penilaian kinerja tengah tahun dan penilaian kinerja akhir tahun. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan kinerja karyawan terhadap target (goal) yang telah ditetapkan di awal tahun, sesuai dengan indikator kinerja yang terkait. Proses ini dilakukan dengan objektif, melibatkan proses evaluasi 360 derajat dari atasan, rekan kerja, dan juga bawahan.

Employee Performance Evaluation

Evaluation of employee performance is carried out regularly every year. There is a mid-year and year-end performance evaluation. The evaluation process is conducted by comparing employee performance against the targets (goals) that have been set at the beginning of the year, in accordance with the related performance indicators. This process is carried out objectively, involving a 360-degree evaluation process from superiors, coworkers, and also subordinates.

Hubungan Industrial

Perusahaan berkomitmen untuk mendukung hubungan industrial antara karyawan dan Perusahaan melalui kebebasan karyawan untuk berserikat. Hubungan industrial karyawan dan Perusahaan telah memenuhi standar dan perundangan-undangan yang berlaku; di samping tentunya memaksimalkan peran karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan Perusahaan.

Industrial Relationship

The Company is committed to supporting industrial relationship between employees and the Company through employees' freedom of association. Industrial relationship between employees and the Company have complied with applicable standards and laws, in addition to, obviously, maximizing the role of employees as one of the Company's stakeholders.

Manajemen Perusahaan secara aktif melakukan komunikasi dalam rangka menyampaikan informasi-informasi terkini sesuai dengan azas keterbukaan informasi dengan Serikat Pekerja secara berkala.

The Company's management perform active communication in order to convey the latest information in accordance with the principle of information disclosure with the Labor Union on



Dengan kegiatan ini maka hubungan harmonis antara Manajemen dengan karyawan dapat terus terjaga dengan baik.

Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan

Sebagai entitas usaha yang berkomitmen dalam kepatuhan atas norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan sangat mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan kerja. Untuk itu, Perusahaan telah menyediakan peralatan keselamatan kerja di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau di lingkungan kerja serta prosedur keamanan yang baku. Selain itu, Perusahaan juga telah menerapkan dan memenuhi kaidah HSE (*Health & Safety Environment*) serta K3 (*Kesehatan dan Keselamatan Kerja*) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengungkapan Tingkat Angka Kecelakaan Kerja

Perusahaan senantiasa berupaya untuk menerapkan aspek K3 di setiap kegiatan operasionalnya secara optimal untuk mencegah atau meminimalisir kecelakaan kerja fatal. Berikut informasi mengenai tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tahun 2021 dan tahun 2020, sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini.

a regular basis. With this activity, the harmonious relationship between Management and employees can be maintained properly.

Employee Health and Safety Management

As a business entity that is committed to compliance with occupational health and safety norms, as well as applicable laws and regulations in Indonesia, the Company prioritizes aspects of occupational health, safety, and the work environment. To that end, the Company has provided work safety equipment in easily accessible locations in the work environment, as well as standard safety procedures. In addition, the Company has also implemented and complied with the HSE (*Health & Safety Environment*) and K3 (*Occupational Health and Safety*) rules in accordance with applicable regulations.

Disclosure of Work Accident Rates

The Company always strives to optimally implement K3 aspects in every operational activity to prevent or minimize fatal work accidents. The following is information regarding the rate of accidents and occupational diseases in 2021 and 2020, as attached in the table below.

Jenis dan Jumlah Kecelakaan Kerja
 Type and Number of Work Accidents

Jenis Kecelakaan Kerja Type of Work Accidents	Angka Kecelakaan Kerja Number of Work Accidents		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease (%)
	2021 (orang) (people)	2020 (orang) (people)	
Meninggal Dunia Death	0	0	0%
Cedera Berat Severe Injuries	0	0	0%
Cedera Sedang Mild Injuries	1	0	100%
Cedera Ringan Light Injuries	0	0	0%
Jumlah Total	1	0	100%

Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Karyawan

Perusahaan telah menyiapkan fasilitas berupa jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi karyawan. Kedua fasilitas jaminan bagi karyawan tersebut diberikan dalam rangka menjaga

Health Insurance and Work Accident Insurance for Employees

The Company has prepared facilities in the form of health insurance and work accident insurance for employees. The two insurance program for employees are provided in order to



keamanan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja, sehingga para karyawan tetap fokus dan tidak khawatir dalam melakukan kegiatannya untuk memberikan kinerja terbaik bagi Perusahaan.

Salah satu kebijakan yang dimiliki Perusahaan adalah menekankan pentingnya aspek kesehatan para karyawan. Guna memenuhi Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2013 yang telah diubah melalui Perpres No. 111 Tahun 2013, Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selain itu, Perusahaan juga mengikutsertakan pegawai dan keluarga inti dari pegawai dalam program asuransi kesehatan rawat inap dan fasilitas penggantian biaya rawat jalan. Perusahaan juga menyediakan ruang swapulih dan menyediakan ekstra nutrisi bagi karyawan guna menjaga vitalitasnya. Perusahaan juga telah memiliki program pengelolaan COVID-19.

Dampak Kuantitatif atas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dampak dari pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial terkait dengan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja terlihat dari suasana yang kondusif di lingkungan Perusahaan, di mana hingga akhir tahun 2021, tidak terdapat permasalahan yang melibatkan karyawan dengan Perusahaan, baik di kantor pusat maupun di area operasional Perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan Perusahaan terhadap seluruh karyawan yang terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan telah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perusahaan terus berupaya untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan terhadap kenyamanan, keselamatan, kesehatan, ketertiban, keamanan, kualitas lingkungan dan produktivitas kerja akibat aktivitas kerja dari penggunaan alat, mesin, dan bahan berbahaya dalam lingkungan kerja. Penyelesaian pengaduan masalah ketenagakerjaan, keselamatan

maintain the safety and comfort of employees at work, so that employees remain focused and free from worries in carrying out their activities to provide the best performance for the Company.

One of the policies of the Company is to emphasize the importance of the health aspect of its employees. In order to comply with Law no. 24 of 2011 concerning BPJS and Presidential Regulation (Perpres) No. 12 of 2013, which has been amended through Presidential Decree No. 111 In 2013, the Company has included all employees in the BPJS Ketenagakerjaan (Social Security in terms of Employment) and BPJS Kesehatan (Health Insurance) programs. In addition, the Company also includes employees and their immediate families in inpatient health insurance programs and outpatient reimbursement facilities. The Company also provides a recovery room and provides extra nutrition for employees to maintain their vitality. The Company also has a COVID-19 management program.

Quantitative Impact on the Implementation of Corporate Social Responsibility in the Aspects of Employment, Occupational Health and Safety

The impact of implementing corporate social responsibility activities related to employment, occupational health and safety can be seen from the conducive atmosphere in the Company's environment, in which until the end of 2021, there were no issues involving employees with the Company, both at the head office and in the Company's operational areas. This proves that corporate social responsibility activities related to employment, occupational health and safety carried out by the Company for all employees involved in the Company's business activities have been operating well and in accordance with applicable regulations.

Mechanism for Complaints on Issues related to Employment, and Occupational Health and Safety

The Company continues to strive to prevent unwanted occurrences against comfort, safety, health, order, security, environmental quality, and work productivity as a result of work activities that makes use of tools, machines, and hazardous materials in the work environment. The resolution of complaints regarding employment, and occupational health and safety issues



dan kesehatan kerja para karyawan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam rangka menjamin hak-hak para karyawan. Perusahaan menyediakan sarana bagi pegawai untuk menyampaikan pengaduan, keluh kesah, saran, maupun rekomendasi sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Sertifikasi dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Aspek Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sertifikasi yang Berlaku di Tahun 2021
Certification that was still Valid in 2021

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date of Issuance of Certification	Jenis Sertifikat Types of Certification	Dikeluarkan Oleh Issued By	Masa Berlaku Hingga Valid Until
2020	ISO 9001:2015	Sucofindo	2023

Penghargaan

Sepanjang tahun 2021 , Perusahaan belum menerima dan/atau memiliki penghargaan di Bidang Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Namun demikian, Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi praktik K3 sesuai regulasi yang berlaku.

Biaya Implementasi Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Aspek Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pada 2021, total biaya yang dikeluarkan Perusahaan dalam menjalankan komitmen perusahaan terkait Ketenagakerjaan dan K3 adalah sebesar Rp481,68 juta (di luar biaya kesehatan).

for employees is one of the Company's responsibilities in order to guarantee the rights of employees. The Company provides facilities for employees to submit complaints, suggestions, and recommendations as stipulated in the Collective Labor Agreement (PKB).

Certification and Awards for Corporate Social Responsibility Initiatives in the Aspects of Employment, Occupational Health and Safety

Penghargaan

Throughout 2021, the Company has not received and/or didn't have any awards in the Field of Employment, Occupational Health and Safety. However, the Company always upholds OHS practices in accordance with applicable regulations.

Cost of Implementing Corporate Social Responsibility Initiatives on the Aspects of Employment, Occupational Health and Safety

In 2021, the total costs incurred by the Company in carrying out the Company's commitments related to Employment and K3 is Rp481.68 billion (excluding medical costs).



TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE ON THE ASPECTS OF COMMUNITY INVOLVEMENT AND DEVELOPMENT

Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan atau *community involvement & development* (CID) dalam rangka memberikan manfaat bagi masyarakat. Perusahaan juga memiliki komitmen kuat untuk senantiasa memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan secara luas. Filosofi ini dianut agar dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan senantiasa dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat; termasuk keberadaan Perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial. Hal ini juga sejalan dengan upaya Perusahaan dalam menciptakan kinerja usaha yang berkesinambungan.

Bagi Perusahaan, kelangsungan dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan tidak hanya didasarkan pada kekuatan finansial saja namun harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan sekitar di mana Perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, Perusahaan merancang dan merealisasikan program pengembangan masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekitar, sebagai bentuk partisipasinya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan skala global, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Target dan Rencana Kegiatan Tahun 2021

Program tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan ditetapkan berdasarkan pelaksanaan *social mapping* sehingga sasaran dan kegiatan yang dilakukan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap tahunnya, Perusahaan melalui Biro Sekretariat Perusahaan, berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), sebagai bentuk kepedulian Perusahaan dalam memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Rencana program tanggung jawab sosial Perusahaan menjadi program kerja tahunan bidang CSR yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, serta lingkungan sosial, dalam bentuk bantuan sarana ibadah, bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, serta bantuan sosial dan kesehatan.

Program dan Kegiatan yang Dilakukan serta Biaya yang Dikeluarkan

Pada tahun 2021, Perusahaan menyalurkan dana CSR melalui berbagai program sosial kemasyarakatan dan lingkungan yaitu sebagai berikut:

Commitments and Policies

The Company is committed to implementing community involvement & development (CID) in order to provide benefits to the community. The Company also has a strong commitment to always provide benefits to stakeholders extensively. This philosophy is adopted so that in every business activity, the Company can always provide added value to the community. This includes the presence of the Company in the midst of society. The benefits that can be received by the community are not only economical benefits, but also social ones. This is also in line with the Company's efforts to create sustainable business performance.

For the Company, sustainability and sustainable business growth is not only based on financial strength but must consider the social and environmental dimensions in which the Company operates. Therefore, the Company designs and realizes the community involvement and development programs by involving the surrounding community, as a form of participation in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Targets and Action Plans for 2021

Corporate social responsibility programs on the aspects of community involvement and development are determined based on the implementation of social mapping so that the targets and activities carried out are appropriate and in accordance with the needs of the community. Every year, the Company, through the Corporate Secretariat Division, is committed to carrying out Corporate Social Responsibility (CSR) activities, as a form of the Company's concern for sustainable community empowerment.

The corporate social responsibility program plan becomes an annual work program in the field of CSR, and it covers the fields of education, health, and the social environment, in the form of assistance for religious facilities, natural disaster assistance, educational assistance, as well as social and health assistance.

Programs and Activities that have been Conducted and the Costs

In 2021, the Company disburses CSR funds through various social and environmental programs, namely:



1. LRTJ dan ISS Indonesia melakukan kegiatan pembersihan di berbagai Rumah ibadah di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Timur pada tanggal 28 dan 29 April 2021. Kegiatan ini juga sekaligus untuk misting ataupun penyemprotan desinfektan sebagai sterilisasi untuk mencegah penularan virus covid-19. Kolaborasi ini bertujuan untuk membangun solidaritas sekaligus untuk memberikan kenyamanan bagi umat ketika melakukan persembahyang di rumah ibadah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
2. Kolaborasi PT LRT Jakarta dengan Kelurahan Kayu Putih dalam rangka Bulan Ramadan di tahun 2021, pada tanggal 7 dan 8 Mei 2021 berupa pembagian 100 rice box senilai Rp2.000.000,-.
3. LRT Jakarta melakukan Penyerahan Bantuan Program Ramadhan 2021 bersama @jktsigapsenus dan Komunitas @bagiada_id pada Jumat, 7 Mei 2021. Kegiatan ini dilakukan di Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Al-Aqsha, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Adapun bantuan yang diberikan terdiri dari beras, minyak goreng, susu, gula, sarden dan bahan sembako lainnya. Diharapkan dengan terlaksananya program ini dapat memberikan manfaat bagi santri dan santriwati di Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Al-Aqsha.

Dampak Kuantitatif atas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Secara umum, kegiatan CSR yang dilakukan Perusahaan telah memberikan manfaat terhadap pembangunan berkelanjutan khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Perusahaan juga secara tidak langsung telah ikut serta dalam membangun ekonomi kerakyatan dan membantu program Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia yang juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Saluran Pengaduan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Perusahaan berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan, untuk itu, Perusahaan menyediakan sarana saluran pengaduan bagi masyarakat, apabila terdapat kendala atau keluhan dalam kegiatan kemasyarakatan, yang dapat dilayangkan langsung ke Perusahaan atau melalui kontak layanan yang tertera di website Perusahaan.

1. LRTJ and ISS Indonesia carried out cleaning activities in various places of worship in North and East Jakarta on April 28 and 29, 2021. This activity was also used for misting or spraying disinfectants as a form of sterilization to prevent the transmission of the covid-19 virus. This collaboration aims to build solidarity as well as to provide comfort for the people when praying in places of worship while still implementing health protocols;
2. Collaboration between PT LRT Jakarta and Kayu Putih Village for the month of Ramadan in 2021, on May 7 and 8, 2021, in the form of distributing 100 rice boxes worth IDR 2,000,000.
3. The Jakarta LRT delivered the 2021 Ramadhan Program Assistance with @jktsigapsenus and the @bagiada_id Community on Friday, May 7, 2021. This activity was carried out at the Orphans and Dhuafa Al-Aqsa Islamic Boarding Schools, Kelapa Gading, North Jakarta. The assistance provided consisted of rice, cooking oil, milk, sugar, sardines and other basic necessities. The implementation of this program is expected to provide benefits for the male and female students at the Al-Aqsa Orphans and Dhuafa Islamic Boarding Schools.

Quantitative Impact on the Implementation of Corporate Social Responsibility on the Aspects of Community Involvement and Development

In general, the CSR activities carried out by the Company have provided benefits for sustainable development, especially in relation to poverty alleviation through community empowerment programs and improving the quality of public education. The Company has also indirectly participated in building the people's economy and assisted the Government's program to reduce poverty in Indonesia which is also in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Complaints Channel for the Implementation of Social Responsibility in the Field of Social and Community Development

The Company is committed to continue carrying out community involvement and development programs. For this reason, the Company provides a complaint channel for the community. If there are problems or complaints in community activities, they can be reported directly to the Company or through the service contact listed on the Company's website.



TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PRODUK DAN KONSUMEN/PELANGGAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE ON THE ASPECTS OF PRODUCTS AND CUSTOMERS/CONSUMERS

Komitmen dan Kebijakan

Komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan yang terbaik dan bermanfaat bagi setiap pemangku kepentingan atau konsumen diwujudkan melalui sikap dan respons yang profesionalisme dari Perusahaan dan segenap jajaran dalam melayani konsumen atau pelanggan. Perusahaan juga menjamin kualitas pelayanan kepada setiap konsumen atau pelanggan dengan sigap, responsif dan terpercaya.

Perusahaan mengacu Undang-Undang RI No 8 tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen". Di samping itu, untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan, Perusahaan terus memperkuat hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan mitra kerja, baik pemasok, vendor maupun supplier untuk lebih mempermudah kegiatan Perusahaan, khususnya dalam menghadirkan produk dan layanan yang bermutu.

Target dan Rencana Kegiatan Tahun 2021

Bentuk tanggung jawab terhadap konsumen atau pelanggan yang dilakukan oleh Perusahaan adalah menyediakan layanan informasi pada konsumen atau pelanggan mengenai Perusahaan, pusat pelayanan konsumen atau pelanggan, serta program peningkatan layanan. Perusahaan senantiasa merencanakan berbagai program untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan, dengan target yang hendak dicapai antara lain tidak adanya keluhan dari konsumen atau pelanggan terhadap produk dan layanan yang diberikan Perusahaan.

Program dan Kegiatan yang Dilakukan

Kesehatan dan Keselamatan Konsumen atau Pelanggan

Perusahaan berkomitmen melaksanakan proses produksi dan jasa sesuai dengan standar operasional dengan menjadikan aspek kesehatan dan keselamatan konsumen atau pelanggan sebagai prioritas utama. Untuk itu, Perusahaan senantiasa meningkatkan kualitas produk dan jasa dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu. Produk yang dihasilkan Perusahaan bukan merupakan produksi untuk keperluan konsumsi ataupun produk yang dapat membahayakan penggunanya.

Commitments and Policies

The Company's commitment to provide the best and beneficial service for every stakeholder or consumer is manifested through a professional attitude and response from the Company and all of its employees in serving consumers or customers. The Company also guarantees the quality of service to every consumer or customer swiftly, responsively, and reliably.

The Company refers to the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 concerning "Consumer Protection". In addition, to increase consumer or customer satisfaction, the Company continues to strengthen good and mutually beneficial relationships with business partners, which include suppliers and vendors, to further facilitate the Company's activities, particularly in presenting quality products and services.

Targets and Action Plans for 2021

The form of responsibility to consumers or customers carried out by the Company is to provide information services to consumers or customers about the Company, customer or consumer service centers, as well as service improvement programs. The Company always plans various programs to increase consumer or customer satisfaction, with targets to be achieved, including the absence of complaints from consumers or customers regarding the products and services provided by the Company.

Programs and Activities which have been Conducted

Consumer or Customer Health and Safety

The Company is committed to carrying out production and service processes in accordance with operational standards by making the health and safety aspects of consumers or customers a top priority. To that end, the Company continuously improves the quality of its products and services by implementing a Quality Management System. The products produced by the Company are not produced for consumption purposes or products that can endanger users.



Perusahaan juga selalu berusaha melakukan pemeliharaan, perbaikan dan penataan berbagai fasilitas secara bertahap sesuai skala prioritas, agar ketersediaan fasilitas maupun peralatan tetap terjamin dengan kualitas memadai.

Perusahaan senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas produk dan layanan sesuai dengan kemampuan Perusahaan melalui penerapan sistem yang terencana serta memberikan layanan yang memadai untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan.

Kejelasan Informasi Produk dan Promosi

Perusahaan menyediakan informasi material yang diperlukan tentang LRT secara transparan dan terbuka, akurat dan tepat waktu, sebagai dasar pengambilan keputusan bagi konsumen untuk menggunakan produk atau jasa Perusahaan. Kegiatan komunikasi kejelasan informasi produk ini juga menjadi salah satu upaya untuk melindungi hak konsumen atau pelanggan untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan dapat dipercaya. Perusahaan menyadari, komunikasi yang berjalan secara efektif dan selaras dengan layanan yang sesuai dengan harapan konsumen atau pelanggan, dapat menciptakan loyalitas dan hubungan bisnis jangka panjang. Perusahaan menyediakan berbagai sarana komunikasi yang memadai, agar kualitas produk dan layanan yang dimiliki Perusahaan senantiasa dapat memenuhi harapan konsumen atau pelanggan salah satunya melalui website Perusahaan.

Lebih lanjut, guna memberikan rasa aman dan kepercayaan konsumen atau pelanggan, Perusahaan senantiasa melengkapi produk dan layanannya dengan fasilitas kelengkapan penyediaan informasi, prosedur, proses pengaduan, dan sarana pengaduan melalui cara-cara yang mudah di akses oleh para pelanggan maupun calon konsumen atau pelanggan potensial. Di antara media-media tersebut adalah situs web, call center, sosial media.

Survei Kepuasan Konsumen atau Pelanggan

Selama beroperasi, Perusahaan telah mendapat banyak kepercayaan dari konsumen atau pelanggan. Perusahaan memandang pentingnya kepuasan konsumen atau pelanggan sebagai salah satu tolok ukur penilaian paling efektif dari keseluruhan aspek kualitas produk yang dimiliki Perusahaan. Untuk memetakan kelemahan-kelebihan produk dan posisinya di tengah-tengah konsumen atau pelanggan, Perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan yang meliputi penilaian terhadap produk dan layanan yang dimiliki Perusahaan.

The Company also always makes the effort to carry out maintenance, repair and arrangement of various facilities in stages according to a priority scale, so that the availability of facilities and equipment is guaranteed with adequate quality.

The Company continues to improve the quality of products and services in accordance with the Company's capabilities through the implementation of a planned system and provide adequate services to increase consumer or customer satisfaction.

Clarity of Product Information and Promotion

The Company provides the necessary material information about the LRT in a transparent, open, accurate, and timely manner, as a basis for making decisions for consumers to use the Company's products or services. This activity to clarify product information is also one of the efforts to protect the rights of consumers or customers to obtain accurate, clear, and reliable information. The Company realizes that effective communication, aligned with services that match consumer or customer expectations, can create loyalty and long-term business relationships. The Company provides various adequate means of communication, so that the quality of the products and services owned by the Company can always meet the expectations of consumers or customers, one of which is through the Company's website.

Furthermore, in order to provide a sense of security and trust for consumers or customers, the Company always equips its products and services with complete facilities for providing information, procedures, complaint processes, and complaints facilities through ways that are easily accessed by customers, as well as potential customers. Among these media are websites, call centers, and social media.

Consumer or Customer Satisfaction Survey

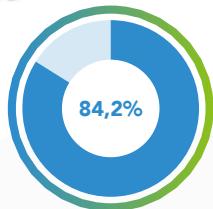
In its operation, the Company has won a lot of trust from consumers or customers. The Company views the importance of consumer or customer satisfaction as one of the most effective benchmarks for assessing all aspects of product quality owned by the Company. To map the product's strengths and position among consumers or customers, the Company conducts a customer satisfaction survey which includes an assessment of the Company's products and services.



Berikut adalah hasil indeks kepuasan pelanggan dalam dua tahun terakhir:

The following are the results of the customer satisfaction index in the last two years:

Customer Satisfaction Survey 2020



Triwulan 1 - 2020

- Pelaksanaan periode Januari 2020
- Jumlah data sebesar 100 responden
- Pengumpulan data secara *online* dan wawancara di stasiun
- Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5)
- Implementation period January 2020
- Total data is 100 respondents
- Online data collection and interviews at stations
- Measurement method with Likert scale (1-5)

Triwulan 2 - 2020

- Pelaksanaan periode April-Mei 2020
- Jumlah data sebesar 315 responden
- Pengumpulan data secara *online* dan wawancara di stasiun
- Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5)
- Implementation period April-May 2020
- Total data is 315 respondents
- Online data collection and interviews at stations
- Measurement method with Likert scale (1-5)

Triwulan 3 - 2020

- Pelaksanaan periode Agustus – September 2020
- Jumlah data sebesar 85 responden
- Pengumpulan data secara *online* dan wawancara di stasiun
- Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5)
- Implementation period August-September 2020
- Total data is 85 respondents
- Online data collection and interviews at stations
- Measurement method with Likert scale (1-5)

Triwulan 4 - 2020

- Pelaksanaan periode November-Desember 2020
- Jumlah data sebesar 111 responden
- Pengumpulan data secara *online* dan wawancara di stasiun
- Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5)
- Implementation period November-December 2020
- Total data is 111 respondents
- Online data collection and interviews at stations
- Measurement method with Likert scale (1-5)




Customer Satisfaction Survey 2021

Triwulan 1 - 2021

- Pelaksanaan periode Maret 2021
- Jumlah data sebesar 111 responden
- Pengumpulan data secara *online* dan wawancara di stasiun
- Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5)
- Implementation period March 2021
- Total data is 111 respondents
- Online data collection and interviews at stations
- Measurement method with Likert scale (1-5)

Triwulan 2 - 2021

- Pelaksanaan periode Mei-Juni 2021
- Jumlah data sebesar 114 responden
- Pengumpulan data secara *online* dan wawancara di stasiun
- Metode pengukuran dengan skala Likert (1-10)
- Implementation period May-June 2021
- Total data is 114 respondents
- Online data collection and interviews at stations
- Measurement method with Likert scale (1-10)

Triwulan 3 - 2021

- Pelaksanaan periode Agustus – September 2021
- Jumlah data sebesar 140 responden
- Pengumpulan data secara *online* dan wawancara di stasiun
- Metode pengukuran dengan skala Likert (1-10)
- Implementation period August-September 2021
- Total data is 140 respondents
- Online data collection and interviews at stations
- Measurement method with Likert scale (1-10)

Triwulan 4 - 2021

- Pelaksanaan periode November-Desember 2021
- Jumlah data sebesar 111 responden
- Pengumpulan data secara *online* dan wawancara di stasiun
- Metode pengukuran dengan skala Likert (1-10)
- Implementation period November-December 2021
- Total data is 111 respondents
- Online data collection and interviews at stations
- Measurement method with Likert scale (1-10)


Pengelolaan Hubungan dengan Mitra Kerja, Distributor/Pemasok/Supplier/Vendor

Mitra Kerja adalah pihak yang telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan LRT untuk kegiatan pengembangan usaha setelah melalui proses evaluasi kelayakan. Perusahaan terus melakukan pengembangan usaha, yang tentunya melibatkan mitra kerja di berbagai bidang pengembangan usaha. Dalam menjalankan kegiatan pengembangan usaha, pemilihan mitra kerja yang akan bekerja sama dengan LRT tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance dan ketentuan internal yang berlaku. Calon mitra kerja yang dapat ditetapkan menjadi mitra kerja adalah calon mitra kerja yang telah mengikuti prosedur dan aturan serta evaluasi yang berlaku dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi Perusahaan.

Management of Relationship with Partners, Distributors/Suppliers/Vendors

Partners are parties who have agreed and signed a cooperation agreement with LRT for business development activities after going through the feasibility evaluation process. The Company continues to develop its business, which obviously involves partners in various business fields. In carrying out business development activities, the selection of partners who will cooperate with LRT must be conducted in accordance with the principles of Good Corporate Governance and applicable internal regulations. Prospective work partners who can be designated as work partners are prospective work partners who have followed the procedures and rules, as well as the applicable evaluation. They also have to provide benefits for the Company.



Layanan Keluhan dan Pengaduan Bagi konsumen atau pelanggan

Dalam rangka melayani keluhan konsumen atau pelanggan, LRT memberikan kesempatan kepada para pelanggan untuk menyampaikan keluhannya kepada Perusahaan melalui Care Center Layanan Sahabat LRTJ (CARLA) yang beroperasi mulai pukul 08.00-17.00 WIB dari hari senin-jumat. Layanan ini bisa diakses melalui website www.lrtjakarta.co.id atau dengan menghubungi nomer hotline (021) 50899909, sementara keluhan pada hari sabtu-minggu dan hari libur nasional bisa disampaikan melalui email, media sosial dan website. Setiap pengaduan atau keluhan yang disampaikan pelanggan dan masyarakat, selanjutnya akan ditindaklanjuti Perusahaan dalam rangka memberikan layanan yang optimal kepada konsumen.

*Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional dapat disampaikan melalui email, media sosial dan Website

Complaints Service For Consumers or Customers

In order to serve consumer or consumer complaints, LRT provides an opportunity for customers to submit their complaints to the Company through the Layanan Sahabat LRTJ Care Center (CARLA) which operates from 08.00-17.00 Western Indonesia Time from Monday-Friday. This service can be accessed through the website www.lrtjakarta.co.id or by calling the hotline number (021) 50899909. Complaints on Saturdays and Sundays and national holidays can be submitted via email, social media and the website. Every complaint submitted by customers and the public, will then be followed up by the Company in order to provide optimum service to consumers.



Dampak Kuantitatif atas Program dan Kegiatan yang Dilakukan

LRT Jakarta memprogramkan untuk terus meningkatkan kepuasan konsumen. Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat keluhan konsumen yang bersifat material dan berpengaruh terhadap kinerja operasional maupun keuangan Perusahaan. LRT Jakarta senantiasa berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan layanan terhadap konsumen yang diwujudkan melalui berbagai program, produk dan layanan yang optimal.

Penghargaan dan Sertifikasi

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan belum memiliki dan/atau menerima penghargaan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Namun, Perusahaan senantiasa membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat khususnya di wilayah operasional LRT Jakarta.

Quantitative Impact on Programs and Activities which have been Conducted

LRT Jakarta has programmed to continuously improve customer satisfaction. Throughout 2021, there were no consumer complaints that were material in nature and affected the Company's operational and financial performance. LRT Jakarta is always committed to continuously improve services to consumers which is realized through various optimal programs, products and services.

Awards and Certifications

Throughout 2021, the Company has not had and/or did not receive any awards related to social and community development. However, the Company always maintains a harmonious relationship with the community, especially in the Jakarta LRT operational area.

Sertifikasi yang Berlaku di Tahun 2021 Sertifikasi yang Berlaku di Tahun 2021

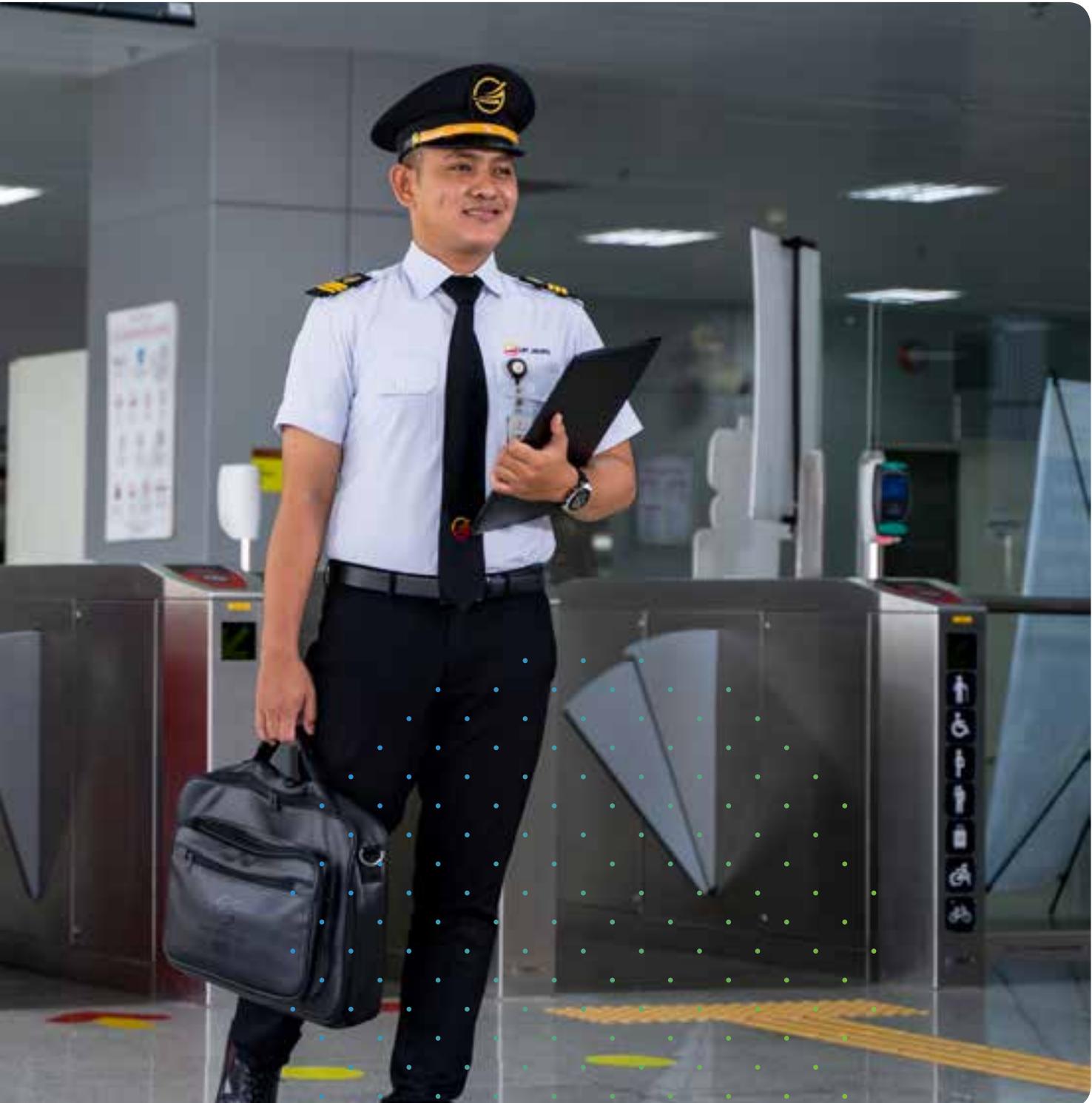
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi	Jenis Sertifikat Jenis Sertifikat	Dikeluarkan Oleh Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku Hingga Masa Berlaku Hingga
27 Maret 2020 March, 27 2020	SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems-Requirement	Sucofindo International Certification Services	2023



LRT JAKARTA



2021 LAPORAN TAHUNAN
Annual Report



08

LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS

PT LRT JAKARTA
**LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021/
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021**

DAFTAR ISI/ TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ Pages	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTORS' STATEMENT LETTER
LAPORAN KEUANGAN		FINANCIAL STATEMENTS
Laporan Posisi Keuangan	1 -2	Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas	4	Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas	5	Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 43	Notes to the Financial Statements

SURAT PERNYATAAN DIREKSI/DIRECTOR'S STATEMENT
 Nomor: 001/DRU/121/II/2022

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 *REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021*

PT LRT JAKARTA

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

We undersigned below:

1. Nama	Hendri Saputra	Name
Alamat Kantor	Jl. Raya Kelapa Nias RT000/RW025 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250	Office Address
Alamat Domisili	Kota Wisata San Fransisco Q.5/46 RT001/RW031 Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Bogor	Domicile Address
Nomor Telepon Jabatan	081257306458 Direktur Utama/President Director	Phone Number Position
2. Nama	Adrian Rusmana	Name
Alamat Kantor	Jl. Raya Kelapa Nias RT000/RW025 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250	Office Address
Alamat Domisili	Tmn Lebak Bulus IV Blok X-1 RT001/RW007 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan	Domicile Address
Nomor Telepon Jabatan	0811167487 Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis/ <i>Director of Finance and Business Support</i>	Phone Number Position

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT LRT Jakarta;
2. Laporan Keuangan PT LRT Jakarta telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT LRT Jakarta telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan PT LRT Jakarta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT LRT Jakarta.

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statement of PT LRT Jakarta;
2. The financial statements of PT LRT Jakarta have been prepared and presented in conformity with Indonesian Financial Accounting Standard;
3. a. All information in the financial statements of PT LRT Jakarta have been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The financial statements of PT LRT Jakarta do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. We are responsible for PT LRT Jakarta's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statements letter is made truthfully.

Jakarta, 25 Februari / February 25, 2022
Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf on the board of Director



Hendri Saputra

Direktur Utama / President Director

Adrian Rusmana

Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis /
Director of Finance and Business Support

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Ref.: R-049/2.0752/AU.1/06/0209-1/1/II/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

*The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors***PT LRT JAKARTA**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT LRT Jakarta terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut menghanuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan

We have audited the accompanying financial statements of PT LRT Jakarta, which comprise of statement of financial position as of December 31, 2021 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment,

FORUM OF FIRMS

NEXIA KPS - **KANAKA PURADIREDOJA, SUHARTONO** is a member firm of the "Nexia International" network. ©2021 Nexia International Limited. All right reserved. Nexia International Limited does not offer services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which include the word "NEXIA") are not engaged in rendering accounting, auditing, taxation or legal services, or any of its members, Nexia International Limited does not accept any responsibility for the compilation of any act, or version of an act, or version of a law, or regulation, or any action, albeit, or omission, on the basis of the content in this document or any documentation and/or other procedure. The term "NEXIA INTERNATIONAL", "NEXIA" and the NEXIA logo are registered by Nexia International Limited and used under license. References to "Nexia" or "Nexia International" are to those International Limited and the "Nexia International" member firms, as the case may dictate. For more information visit www.nexia.com.

Jakarta Pusat | Jakarta Barat | Jakarta Selatan | Medan | Surabaya | Semarang

auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT LRT Jakarta tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

In making those risk assessment, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT LRT Jakarta as of December 31, 2021, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO



Syamsudin

NRAP.: AP.0209

25 Februari/February, 25 2022

Ref.: R-049/2.0752/AU.1/06/0209-1/1/II/2022



PT LRT JAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	Catatan/ Notes	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	87.114.933.482	2g, 3	93.155.474.994	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha		2h, 5		<i>Trade Receivables</i>
Pihak Berelasi	13.796.629.493		1.672.000.000	<i>Related Parties</i>
Pihak Ketiga	795.048.906		6.286.308	<i>Third Parties</i>
Pendapatan Yang				
Masih Harus Diterima	3.613.539.147	2j, 6	1.324.936.564	<i>Accrued Revenue</i>
Pajak Dibayar Dimuka	937.235.519	2q, 13a	1.909.537.467	<i>Tax Prepayments</i>
Biaya Dibayar Dimuka	2.280.673.964	2k, 7	1.160.514.756	<i>Prepayments</i>
Uang Muka	494.028.441	2l, 8	125.340.293	<i>Advances</i>
Jumlah Aset Lancar	109.032.088.952		99.354.090.382	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				
Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi				Non Current Assets
Penggunaannya	1.245.384.737	4	-	<i>Restricted Cash and Cash Equivalents</i>
Aset Tetap - Bersih	194.415.650.032	2m, 9	203.669.327.410	<i>Fixed Assets - Net</i>
Aset Pajak Tangguhan	13.508.631.036	2q, 13e	15.623.492.216	<i>Deferred Tax Assets</i>
Aset Tak Berwujud - Bersih	1.066.880.676	2n, 10	1.467.943.518	<i>Intangible Assets - Net</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar	210.236.546.481		220.760.763.144	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	319.268.635.433		320.114.853.526	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

1

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT LRT JAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	Catatan/ Notes	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang Usaha		2n, 11		
Pihak Berelasi	-		13.398.257.574	
Pihak Ketiga	16.136.071.925		4.664.051.451	
Utang Pajak	635.594.816	2q, 13b	1.018.088.533	
Beban Akrual	9.783.736.800	12	8.912.036.684	
Pendapatan Diterima Dimuka	1.178.500.000	14	694.833.333	
Jaminan dan Uang Muka Lainnya	150.050.000	15	126.150.000	
Utang Retensi	21.234.551	16	217.060.345	
Utang Lain-lain	27.329.264	17	38.434.255	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	27.932.517.356		29.068.912.175	
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas Imbalan				
Pasca Kerja	145.933.239	2r, 18	3.122.784.168	
Jumlah Liabilitas	145.933.239		3.122.784.168	
JUMLAH LIABILITAS	28.078.450.595		32.191.696.343	
EKUITAS				
Modal Saham				
Nilai nominal Rp100.000 per saham. Modal dasar 6.000.000 saham. Modal ditempatkan dan disetor 3.338.934 saham.				
	333.893.400.000	19	333.893.400.000	Nominal value of Rp100.000 per share. Authorized capital 6.000.000 shares. Issued and paid-up capital 3.338.934 shares.
Saldo Laba	(42.703.215.161)		(45.970.242.817)	Retained Earnings
JUMLAH EKUITAS	291.190.184.839		287.923.157.183	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	319.268.635.433		320.114.853.526	
LIABILITY AND EQUITIES				
Current Liabilities				
Account Payables				
Related Parties				
Third Parties				
Tax Payables				
Accrued Expenses				
Unearned Revenue				
Guarantees and Other Advances				
Retention Payables				
Other Payables				
Total Current Liabilities				
Long - Term Liabilities				
Post - Employment Benefit Liabilities				
Total Non Current Liabilities				
TOTAL LIABILITIES				
EQUITY				
Share Capital				
Nominal value of Rp100.000 per share. Authorized capital 6.000.000 shares. Issued and paid-up capital 3.338.934 shares.				
Retained Earnings				
TOTAL EQUITIES				
TOTAL LIABILITY AND EQUITIES				

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

2

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT LRT JAKARTA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
PENDAPATAN	134.349.088.570	2s, 20	105.324.220.498	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(86.419.369.875)	2s, 21	(63.391.307.549)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	47.929.718.696		41.932.912.949	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban Penjualan	(218.009.464)	22	(914.398.695)	Selling Expenses
Beban Administrasi dan Umum	(44.409.165.702)	22	(39.386.858.769)	General and Administrative Expenses
Jumlah Beban Usaha	(44.627.175.166)		(40.301.257.464)	Total Operating Expenses
LABA USAHA	3.302.543.530		1.631.655.485	OPERATING PROFIT
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan Lain-lain	6.733.974.683	24	3.030.810.595	Other Income
Beban Lain-lain	(4.177.180.357)	24	(494.245.388)	Other Expenses
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	2.556.794.326		2.536.565.207	Total Other Income (Expenses)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5.859.337.856		4.168.220.692	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN)				INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN				BENEFIT (EXPENSE)
Pajak Kini	-	2q, 13c	-	Current Income Tax
Pajak Tangguhan	(2.219.899.964)	2q, 13c	(2.723.919.394)	Deferred Tax
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(2.219.899.964)		(2.723.919.394)	Total Income Tax Benefit (Expense)
LABA TAHUN BERJALAN	3.639.437.892		1.444.301.298	PROFIT FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Keuntungan Aktuarial				Actuarial Gain on Employee Benefits
Atas Imbalan Kerja	(477.449.021)	18	684.448.238	Income Tax Effect
Dampak Pajak	105.038.785	2q, 13e	(150.578.612)	
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lainnya	(372.410.236)		533.869.626	Total Other Comprehensive Income
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.267.027.656		1.978.170.924	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

3

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT LRT JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Modal saham/ Share Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Jumlah Ekuitas/ Total Equities	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020	150.000.000.000	(47.948.413.741)	102.051.586.259	Balance as of January 1, 2020
Tambahan Modal Diselotir	183.893.400.000	-	183.893.400.000	Additional Paid-in Capital
Laba Tahun Berjalan	-	1.444.301.298	1.444.301.298	Current Year Profit
Laba Aktuarial Tahun Berjalan	-	533.869.626	533.869.626	Current Year Actuarial Profit
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	333.893.400.000	(45.970.242.817)	287.923.157.183	Balance as of December 31, 2020
Laba Tahun Berjalan	-	3.639.437.892	3.639.437.892	Current Year Profit
Rugi Aktuarial Tahun Berjalan	-	(372.410.236)	(372.410.236)	Current Year Actuarial Loss
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	333.893.400.000	(42.703.215.161)	291.190.184.839	Balance as of December 31, 2021

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

4

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT LRT JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the year ended December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas Dari Pelanggan	122.579.561.033	123.040.534.470	<i>Cash Receipts From Customers</i>
Pembayaran Kas Untuk Beban Usaha dan Operasional	(80.751.602.855)	(37.357.853.241)	<i>Cash Payments for Operating and Operating Expenses</i>
Pembayaran Kas Kepada Pengurus dan Karyawan	(46.662.737.148)	(57.425.794.042)	<i>Cash Payments To Managers and Employees</i>
Penerimaan Bunga Deposito dan Giro	2.527.258.653	2.760.684.299	<i>Receipt of Interest on Deposits and Current Accounts</i>
Arus Kas Bersih Untuk Aktivitas Operasi	(2.307.520.316)	31.017.571.485	Net Cash Flow For Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES
Perolehan Aset Tidak Berwujud	-	(209.682.000)	<i>Acquisition of Intangible Assets</i>
Perolehan Aset Tetap	<u>(3.733.021.195)</u>	<u>(4.276.603.242)</u>	<i>Acquisition of Fixed Assets</i>
Arus Kas Bersih Untuk Aktivitas Investasi	<u>(3.733.021.195)</u>	<u>(4.486.285.242)</u>	Net Cash Flows Obtained For Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITY
Penerimaan/Pembayaran Pihak Berelasi	-	-	<i>Related Party Receipts/Payments</i>
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	-	Net Cash Flow From Funding Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(6.040.541.511)	26.531.286.243	INCREASE (DECREASE) NET CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	93.155.474.994	66.624.188.751	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	87.114.933.482	93.155.474.994	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

5

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT LRT Jakarta ("Perusahaan") didirikan di Jakarta dengan nama PT LRT Jakarta sesuai dengan Akta No. 10 tgl 16 April 2018 tentang Pendirian PT LRT Jakarta, dari Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., Notaris di Jakarta. Pendirian Perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 April 2018 dengan surat keputusan No. AHU-0020380.AH.01.01 Tahun 2018.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Wiwik Condro, S.H. No. 75 tanggal 26 Oktober 2020 mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0408252 tanggal 17 November 2020.

b. Kegiatan Usaha Pokok Perusahaan

Sesuai anggaran dasarnya, Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha di bidang:

1. Konstruksi bangunan sipil,
2. Konstruksi khusus,
3. Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa,
4. Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analisis dan uji teknis,
5. Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan,
6. Telekomunikasi,
7. Real estat,
8. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen,
9. Periklanan dan penelitian pasar,
10. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi,
11. Pendidikan.

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2019.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta Utara.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

c. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT LRT Jakarta sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT LRT Jakarta No. 07 tanggal 11 November 2021 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL

a. Establishment of The Company

PT LRT Jakarta ("the Company") was established in Jakarta under the name of PT LRT Jakarta in accordance with Notarial Deed No.10 dated April 16, 2018 about establishment of PT LRT Jakarta from Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notary in Jakarta. Establishment of the Company has been approved by the Minister of Justice of the Republic Indonesia dated April 17 2018 in its Decision Letter No. AHU-0020380.AH.01.01.

The Articles of Association have been amended several times, most recently by a deed of Notary Wiwik Condro, S.H. 75 dated 26 October 2020 regarding changes to the increase in issued/paid-up capital. The amendment has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0408252 dated November 17, 2020.

b. The Company's Business Activities

Based on article, The Company was established with aim and objectives to operate business activities in fields:

1. Civil building construction,
2. Special construction,
3. Land transportation and transportation through pipelines,
4. Architectural and engineering activities; technical analysis and test,
5. Warehousing and transportation support activities,
6. Telecommunications,
7. Real estate,
8. Head office activities and management consulting,
9. Advertising and market research,
10. Leasing and leasing activities without option rights,

11. Education.

The company started its commercial activities in 2019.

The company domiciled in North Jakarta.

The parent company is PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

c. Board of Commissioners and Directors

The composition of Board Commisioners and Directors of PT LRT Jakarta based on Deed of Statement of Shareholders' Resolutions Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB) PT LRT Jakarta No. 07 November 11,2021 are as follows:

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

	2021
Komisaris Utama	Aprindy
Komisaris	Romy Bareno
Komisaris	Tatak Prapti Ujiyati
Direktur Utama	Hendri Saputra
Direktur	Adrian Rusmana
Direktur	Aditia Kesuma Negara Dalimunthe

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 218 karyawan dan 179 karyawan (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Penerapan dari standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan interim pada periode berjalan:

- PSAK No. 112: "Akuntansi Wakaf"
- PSAK No. 22 (amendemen): "Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis"
- PSAK No. 73: "Sewa".

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners and Directors (continued)

	2020		
	-	President Commissiner	
Muhammad Taufiqurrahman	-	Commissiner	
	-	Commissoner	
Wijanarko	President Director		
Rudy Hartono	Director		
Gendoet Indarto Wibisono	Director		

As of December 31, 2021 and 2020, number of Company's Employees are 218 and 179 respectively (Unaudited).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which contain in Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK"), Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (DSAK-IAI).

b. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The financial statements are prepared and presented based on the going concern assumption and on the accrual basis, except for the statement of cash flows. The statement of cash flows is presented using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of these financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Company.

c. Statements and Interpretations of New and Revised Accounting Standards Effective in the Current Year

The adoption of the following new standards, amendments and annual improvements to accounting standards which are effective from January 1, 2021 did not result in substantial changes to the Company accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the interim financial statements for the current period:

- SFAS No. 112: "Accounting for Endowments"
- SFAS 22 (amendment): "Business Combination: Definition of a Business"
- SFAS No. 73: "Leases"

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- | | |
|--|---|
| <p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)</p> <p>c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amandemen PSAK No. 71, Amandemen PSAK No. 55, Amandemen PSAK No. 60, Amandemen PSAK No. 62 dan Amandemen PSAK No. 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 • Penyesuaian tahunan PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk" • Penyesuaian tahunan PSAK No. 111, "Akuntansi Wa'd" <p>Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi" • Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" • Amandemen PSAK No. 16: "Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan yang Dintensikan" • Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual" • Amandemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak" • Amendemen PSAK No. 73: "Sewa - Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021" • Penyesuaian tahunan PSAK No. 69: "Agrikultur" • Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan" • Penyesuaian tahunan PSAK No. 73: "Sewa" <p>d. Transaksi dalam Mata Uang Asing</p> <p>Dalam menyiapkan laporan keuangan, Perusahaan mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.</p> <p>Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:</p> | <p>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)</p> <p>c. <i>Statements and Interpretations of New and Revised Accounting Standards Effective in the Current Year (continued)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Amendment to SFAS No. 71, Amendment to SFAS No. 55, Amendment to SFAS No. 60, Amendment to SFAS No. 62 and Amendment to SFAS No. 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2</i> • <i>Annual improvement to SFAS No. 110, "Sukuk Accounting"</i> • <i>Annual improvement to SFAS No. 111, "Wa'd Accounting"</i> <p><i>New standards, amendments and annual improvements issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2021 are as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • SFAS No. 74, "Insurance Contracts" • Amendment to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements" • Amendment to SFAS No. 16: "Fixed Assets - Proceeds before Intended Use" • Amendment to SFAS No. 22: "Business Combinations - Reference to Conceptual Framework" • Amendment to SFAS No. 57: "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling" • Amendment to SFAS No. 73: "Leases - Covid-19 related Rent Concessions Beyond 30 June 2021" • Annual improvement to SFAS No. 69: "Agriculture" • Annual improvement to SFAS No. 71: "Financial Instruments" • Annual improvement to SFAS No. 73: "Leases" <p>d. <i>Transactions in Foreign Currencies</i></p> <p><i>In preparing the financial statements, the Company records using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (the "functional currency"). The functional currency of the Company is Rupiah.</i></p> <p><i>Transactions during the year involving foreign currencies are recorded in Rupiahs at the spot rate between the Rupiah and foreign currencies at the date of the transaction. At the end of the reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the closing exchange rate, namely the Bank Indonesia middle rate as of December 31, 2021 and 2020 as follows:</i></p> |
|--|---|

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Transaksi dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

	2021
1 Euro	16.127
Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.	

e. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

- Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:
1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor,
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, atau
 - c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
 2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain),
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor,
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a), atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

d. Transactions in Foreign Currencies (continued)

2020	2021
17.330	1 Euro
Exchange differences arising from the settlement of monetary items and from the translation of monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.	

e. Transactions and Balances with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity:

1. A person or close family member has a relationship with the reporting entity if that person:
 - a. Has control or joint control over the reporting entity,
 - b. Has significant influence over the reporting entity, or
 - c. Is a key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same business Company (meaning that the parent, subsidiary and subsequent subsidiaries are related to other entities),
 - b. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a business Company, of which the other entity is a member),
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party,
 - d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of a third entity,
 - e. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity,
 - f. An entity that is controlled or jointly controlled by the person identified in letter (a), or

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- | | |
|---|---|
| <p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)</p> <p>e. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi (lanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas), h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor. i. Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional. j. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. k. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan. <p>f. Instrumen Keuangan</p> <p>Aset Keuangan</p> <p>Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:</p> <p>Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 71, dimana PSAK 71 memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model KKE, yang menggantikan model kerugian terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah sebagai berikut:</p> <p>I. Klasifikasi</p> <p>Entitas mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan | <p>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)</p> <p>e. Transactions and Balances with Related Parties (continued)</p> <ul style="list-style-type: none"> g. The person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity), h. The entity, or a member of a Company to which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity. i. Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the government. Government refers to government, government agencies and similar bodies both locally, nationally, and internationally. j. Entities related to the Government can be entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments which are shareholders of the entity, or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as the shareholder's proxy. k. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes. <p>f. Financial Instrument</p> <p>Financial Assets</p> <p>The Company classifies its financial assets in the following measurement categories:</p> <p>Starting 1 January 2020, the Company applies SFAS 71, whereby SFAS 71 introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using the KKE model, which replaces the losses occurred model as well as providing a simpler approach to hedge accounting. Accordingly, the accounting policies in effect for the current reporting period are as follows:</p> <p>I. Classification</p> <p>An entity shall classify its financial assets into the following categories:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Financial assets measured at amortized cost; and |
|---|---|

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

I. Klasifikasi (lanjutan)

- ii. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Perusahaan dan persyaratan kontraktual arus kas apakah penentuan arus kasnya hanya dari pembayaran pokok dan bunga.

II. Pengakuan dan penghentian pengakuan

Entitas menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

III. Pengukuran

- a. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

- b. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya transaksi atas klasifikasi ini, dibebankan pada laba rugi. Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan sebagai berikut:

Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

f. Financial Instrument (continued)

Financial Assets (continued)

I. Classification (lanjutan)

- ii. Financial assets measured at fair value through profit or loss or through other comprehensive income.

This classification depends on the Company's business model and the contractual terms of cash flows - whether the determination of cash flows is solely from principal and interest payments.

II. Recognition and derecognition

An entity determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot modify it after initial application.

III. Measurement

- a. Financial assets measured at amortized cost

This classification applies to debt instruments that are managed under the held-to-obtain cash flow business model and have cash flows that meet the criteria of "solely from payment of principal and interest".

Financial assets are recognized initially at fair value plus related transaction costs. These financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method less impairment. Gains or losses on retirement or modification of financial assets carried at amortized cost are recognized in profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the profit or loss.

- b. Financial assets measured at fair value through profit or loss

Transaction costs for this classification are charged to profit or loss. This classification applies to financial assets as follows:

Debt instruments that do not have the criteria of amortized cost or fair value through other comprehensive income. The gain or loss on fair value will then be recorded in profit or loss.

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

<p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)</p> <p>f. Instrumen Keuangan (lanjutan)</p> <p>Aset Keuangan (lanjutan)</p> <p>III. Pengukuran (lanjutan)</p> <p>b. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan).</p> <p>Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.</p> <p>Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.</p> <p>c. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif. Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga". • Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai dan pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi. • Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi. <p>Liabilitas Keuangan</p> <p>Pengakuan awal</p> <p>Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. 2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. 	<p>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)</p> <p>f. Financial Instrument (continued)</p> <p>Financial Assets (continued)</p> <p>III. Measurement (continued)</p> <p>b. <i>Financial assets measured at fair value through profit or loss (continued).</i></p> <p><i>Investments in equity held for trading or for which other comprehensive income options are not applicable. Fair value gains or losses and related dividend income are recognized in profit or loss.</i></p> <p><i>Derivatives that are not hedging instruments. The gain or loss on fair value is subsequently recognized in profit or loss.</i></p> <p>c. <i>Financial assets measured at fair value through comprehensive income. This classification applies to the following financial assets:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>A debt instrument that is managed under a business model which aims to hold financial assets in order to collect and sell contractual cash flows and for which the cash flows meet the criteria of "solely from payment of principal and interest".</i> • <i>Changes in fair value of these financial assets are recorded in other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses and interest income (including transaction costs using the effective interest method), gains or losses arising from discontinuation and foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss.</i> • <i>When a financial asset is discontinued, the cumulative fair value gain or loss that was previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.</i> <p>Financial Liabilities</p> <p>Initial recognition</p> <p><i>Financial liabilities within the scope of SFAS 71 are classified as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial liabilities measured at amortized cost.</i> 2. <i>Financial liabilities at fair value through profit or loss.</i>
--	---

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Entitas menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perseroan atau pihak lawan.

Pada setiap periode pelaporan, entitas menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, entitas menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang prakiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah KKE.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

f. Financial Instrument (continued)

Financial Liabilities (lanjutan)

Initial recognition (lanjutan)

An entity determines the classification of their financial liabilities at initial recognition.

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value and, in the case of financial liabilities at amortized cost, less directly attributable transaction costs.

Measurement after initial recognition

After initial recognition, financial liabilities at amortized cost that bear interest are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Gains or losses are recognized in profit or loss when the liability is derecognized and through the amortization process.

Derecognition

Financial liabilities are derecognized when they are terminated or canceled or expired.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and their net amounts are presented in the statement of financial position if, and only if, there is a legal right to set off the carrying amount of the financial assets and financial liabilities and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liability simultaneously. The right to offset is not contingent to future events and can be enforced by law in normal business situations and in the event of insolvency, default, or the bankruptcy of the Company or counterparty.

In each reporting period, the entity assesses whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Entity uses changes in default risk that occur over the expected life of the financial instrument rather than changes in the number of KKE.

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
f. Instrumen Keuangan (lanjutan) Liabilitas Keuangan (lanjutan) Saling Hapus Instrumen Keuangan (lanjutan)	f. Financial Instrument (continued) Financial Liabilities (lanjutan) Offsetting Financial Instruments (lanjutan)
Dalam melakukan penilaian, entitas membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan prakiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Entitas menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang usaha, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit, misalnya, letter of credit dan garansi bank. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa. Entitas menilai KKE terhadap instrumen utang yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan basis forward-looking. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.	<i>In making the assessment, the entity compares the risk of default that occurs on financial instruments during the reporting period with the risk of default that occurs for financial instruments at initial recognition and considers the reasonableness and availability of information available at the reporting date relating to past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which indicate an increase in credit risk since initial recognition.</i> <i>An entity shall take a simplified approach to measure ECCE using a lifetime ECCE reserve for all trade and other receivables and contract assets without a significant financing component and a generalized approach for other financial assets. A general approach includes reviewing significant changes in credit risk since their occurrence. The KKE's review includes assumptions regarding the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment also considers the use of credit increases, for example, letters of credit and bank guarantees. To measure KKE, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and maturities.</i>
g. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.	g. Cash and Cash Equivalent <i>An entity assesses KKE against debt instruments measured at fair value through other comprehensive income on a forward-looking basis. The method of impairment is applied by considering whether credit risk has increased significantly.</i>
h. Piutang Usaha Piutang usaha adalah hak tagih terhadap pihak lain atas pemberian jasa atau barang yang merupakan bagian dari kegiatan usaha sesuai anggaran dasar. Cadangan Penurunan adalah cadangan penurunan nilai piutang tak tertagih yang sudah 100% (seratus persen) dari jumlah piutang tetap disajikan sebagai bagian dari piutang.	h. Account Receivables <i>Accounts receivable is the right to collect from other parties for the provision of services or goods which are part of business activities in accordance with the articles of association. Allowance for Impairment is the allowance for impairment of bad debts which is already 100% (one hundred percent) of the total receivables still presented as part of receivables.</i>

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

i. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain adalah hak tagih terhadap pihak lain atas kas, jasa dari kegiatan diluar kegiatan utama Perusahaan. misalnya piutang pegawai.

j. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan Pendapatan Tagihan yang timbul dari penjualan yang telah diakui dan pembayarannya akan diterima yang tagihan invocenya belum diterbitkan dicatat ke dalam akun pendapatan yang masih harus diterima.

k. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang akan dialokasikan selama masa manfaat atas masing-masing biaya tersebut. Biaya dibayar di muka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional tidak lebih dari satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan Perusahaan. Biaya dibayar di muka diakui pada saat pengeluaran uang dilakukan tetapi barang/jasa/ manfaat belum diterima. Biaya dibayar di muka berkurang pada saat barang/jasa/manfaat diterima atau habis masanya.

l. Uang Muka

Uang muka adalah uang yang telah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban atau belum dibebankan dikarenakan belum lengkap secara dokumentasi atau belum dipertanggungjawabkan oleh user. Uang muka dilakukan dalam kegiatan yang bersifat swakelola yang pencairan dananya dilakukan melalui metode SPU. Selain itu kas kecil yang telah dibelanjakan namun belum dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil dicatat sebagai uang muka.

m. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

i. Other Receivables

Other receivables are receivables from other parties for cash, services from activities outside the main activities of the Company. For example, employee receivables.

j. Accrued Revenues

Accrued revenue is Revenue Receivables arising from sales that have been recognized and payments to be received whose invoices have not been issued are recorded in the accrued income account.

k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses represent costs that will be allocated over the useful life of each of these costs. Prepaid expense function, among others, to finance operations no later than one year after the date of the Company's statement of financial position. Prepaid expenses are recognized when the money is disbursed but the goods/services/benefits have not been received. Prepaid expenses are reduced when the goods/services/benefits are received or expire.

l. Advances

Advances are money that has been paid but has not been recognized as an expense or has not been charged due to incomplete documentation or not yet accounted for by the user. Advances are carried out in self-managed activities where the disbursement of funds is carried out through the SPU method. In addition, petty cash that has been spent but has not been accounted for by petty cash holders is recorded as an advances.

m. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which consist of its acquisition cost and any directly attributable cost in bringing the assets to the location and in working condition for its intended use by management.

After its initial recognition, fixed assets, are carried at cost less accumulated depreciation, and accumulated impairment losses.

Depreciation of fixed asset begins when the asset is ready for its intended use and is calculated using the straight-line method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

	Tahun/ Years
Sarana Perekeraetapiian	4 - 30
Prasarana Perekeraetapiian	4 - 8
Renovasi Gedung	8
Inventaris Kantor	4 -10

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian. Biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuan pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

n. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan biaya atas perolehan piranti lunak komputer yang tidak terintegrasi dengan piranti keras dikapitalisasi berdasarkan biaya terjadinya untuk mendapatkan dan menyiapkan piranti lunak sampai siap digunakan; diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya, yaitu empat tahun.

o. Utang Usaha

Utang usaha adalah liabilitas yang timbul karena pengadaan kebutuhan barang dan / atau jasa untuk pelaksanaan aktivitas operasi Perusahaan. Utang usaha meliputi utang kepada pihak ketiga (vendor) untuk pengadaan barang dan/ atau jasa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

m. Fixed Assets (lanjutan)

Sarana Perekeraetapiian	Railway Facilities
Prasarana Perekeraetapiian	Railway Infrastructures
Renovasi Gedung	Renovation of Office Buildings
Inventaris Kantor	Office Equipment

Self-constructed property, plant and equipment are presented as part of property, plant and equipment as "Construction in Progress" and are stated at cost. All costs, including borrowing costs, incurred in connection with the completion of the asset are capitalized as part of the cost of property, plant and equipment in progress. The cost of property, plant and equipment in progress does not include any internal profits, abnormal amounts of wasted costs incurred in the use of raw materials, labor or other resources.

The accumulated acquisition cost will be transferred to the appropriate item of property, plant and equipment when the asset is completed or ready for use and is depreciated since operating.

The carrying amount of an item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. The gain or loss arising from the derecognition (which is determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount) is included in profit or loss at the time the derecognition is made.

At the end of the reporting period, the Company conducts periodic reviews of the useful life, residual value, depreciation method, and remaining useful life based on technical conditions.

n. Intangible Asset

Intangible asset is the costs associated with the acquisition of computer software which is not integrated with related hardware are capitalised based on costs incurred to acquire and prepare the software until ready to use. These costs are amortised using the straight-line method over their estimated useful lives, which is four years.

o. Account Payables

Account payables are liabilities arising from the procurement of goods and/or services for the implementation of the Company's operating activities. Trade payables include debts to third parties (vendors) for the procurement of goods and/or services.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

o. Utang Usaha (lanjutan)

Nilai utang usaha yang dimaksud terdiri dari jumlah pokok utang dan bunga (jika ada), dan tidak ada diskonto/premium dan biaya transaksi atas utang usaha tersebut. Sehingga secara umum, jumlah tercatat utang usaha sama dengan jumlah terutang dan tidak ada amortisasi diskon/premium dan biaya transaksi.

Utang usaha dikelompokan menjadi dua bagian:

- Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham di luar setoran modal atau pembelian barang atau jasa maupun pinjaman yang diperoleh dari perusahaan afiliasi.
- Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka kegiatan normal operasi Perusahaan. Utang ini dicatat jika hak kepemilikan barang sudah berpindah kepada perusahaan. Dilihat dari jumlahnya, yang dicatat adalah sebesar jumlah yang akan dibayar yaitu harga faktur.

p. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Perusahaan menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

o. Account Payables (lanjutan)

The value of trade payables in question consists of the principal amount owed and interest (if any), and there is no discount/premium and transaction costs for the said trade payables. So in general, the carrying amount of trade payables is the same as the amount payable and there is no amortization of discounts/premiums and transaction costs.

Accounts payable are grouped into two parts:

- *Accounts Payable to Related Parties is a loan provided by the shareholders excluding the capital contribution or the purchase of goods or services as well as loans obtained from affiliated companies.*
- *Accounts Payable to Third Parties is an obligation that arises in the course of the normal operations of the Company. This payable is recorded when the ownership rights to the goods have been transferred to the company. Judging from the amount, what is recorded is the amount to be paid, namely the invoice price.*

p. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there are indications that the assets are impaired. If any such indication exists, the Company estimates the asset's recoverable amount. The recoverable amount is determined for an individual asset, and if this is not possible, the Company determines the recoverable amount of the cash-generating unit of the asset.

The recoverable amount is the higher of the fair value less costs to dispose of and the value in use. Value in use is the present value of the cash flows that are expected to be received from the asset or cash-generating unit. Present value is calculated using a pretax discount rate that reflects the time value of money and the risk specific to the asset or unit whose impairment is measured.

If, and only if, the recoverable amount of the asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset is written down to its recoverable amount. The decrease is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan (lanjutan)

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

q. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

1. Pengakuan awal goodwill; atau
2. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Impairment of Non-Financial Assets (lanjutan)

An impairment loss that has been recognized in prior periods for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimate used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If so, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. This increase is a reversal of the impairment loss.

q. Income Taxes

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

The unpaid current tax for current and prior period are recognized as liability. If the amount paid in respect of current and prior periods exceeds the amount for those periods, the excess liability is recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods are measured at the expected amount to be paid (restituted from) to the tax authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability is recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

1. The initial recognition of goodwill; or
2. The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

1. Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
2. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

q. Income Taxes (lanjutan)

A deferred tax asset is recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to be applied to the period when the asset is recovered or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of the reporting period. The Company reduces the carrying amount of deferred tax assets if it is probable that sufficient taxable profit will no longer be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. Any such deduction is reversed on the deferred tax assets until it is probable that the available taxable profit will be sufficient.

The Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if:

1. *The company has a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities; and*
2. *Deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income tax imposed by the same taxation authority on:*

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

- a. entitas kena pajak yang sama; atau
- b. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Perusahaan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perusahaan:

1. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
2. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

r. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar asset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Income Taxes (lanjutan)

- a. the same taxable entity; or
- b. a different taxable entity that intends to recover current tax assets and liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of the deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.

The Company offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Company:

1. has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and
2. intends to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.

r. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits consist of wages, salaries, bonus and incentive.

Post-Employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Company recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Company account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

r. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

1. Ketika Perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
2. Ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Perusahaan mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - b. Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan
 - c. Kontrak memiliki substansi komersial
 - d. Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan alas barang atau jasa yang dialihkan
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

r. Employee Benefits

Post-Employment Benefits

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Company recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

1. When the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and
2. When the Company recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.

The Company measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

s. Revenue and Expense Recognition

In determining revenue recognition, the Company performs analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. Identify contracts with customers with certain criteria as follows:
 - a. The contract has been agreed by the parties involved in the contract
 - b. The Company can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred
 - c. The contract has commercial substance
 - d. It is probable that the Company will receive benefits for the goods or services transferred
2. Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury safes tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

<p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)</p> <p>s. Pengakuan Pendapatan dan Beban</p> <p>4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.</p> <p>5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).</p> <p>Pendapatan Subsidi diakui sesuai dengan realisasi pada kontrak subsidi dalam periode berjalan pada tahun bersangkutan. atas uang muka subsidi dicatat sebagai hutang uang muka/pendapatan ditangguhan dan dilakukan perhitungan dikemudian sebagai pengurang pembayaran atas susbidi setelah verifikasi data. Atas beban dan biaya yang berkaitan dengan pendapatan susbidi disajikan kedalam beban pokok pendapatan susbidi.</p> <p>Beban Pokok Penjualan dan Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual (<i>accrual basis</i>).</p> <p>t. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting</p> <p>Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjenji pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.</p> <p>Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.</p> <p>Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini.</p> <p>Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.</p>	<p>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)</p> <p>s. Revenue and Expense Recognition</p> <p>4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.</p> <p>5. Recognise revenue when performance obligations satisfied (over time or at a point in time).</p> <p><i>Subsidy Income is recognized in accordance with the realization in the subsidy contract in the current period of the year. The down payment for subsidies is recorded as advance payment/deferred income and is calculated later as a deduction for subsidies after data verification. The expenses and expenses related to subsidized income are presented in the cost of subsidized income.</i></p> <p><i>Cost of Sale and Expenses are recognized when incurred on an accrual basis.</i></p> <p>t. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements</p> <p><i>The preparation of financial statements requires management to make judgement, estimates, and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, asset disclosure and contingent liability at the date of the preparation of consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.</i></p> <p><i>Uncertainty about these assumptions and estimates could result in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities in the next reporting period.</i></p> <p><i>The main assumption of the future and the other major source of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the year, are disclosed below.</i></p> <p><i>The Company bases its estimates and assumptions on parameters that are available at the time the financial statements are prepared. Consolidated assumptions about the future development, may change due to market changes or circumstances beyond the Company's control. The changes are reflected in the related assumptions at the time of the occurrence.</i></p>
---	---

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

t. **Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting** (lanjutan)
Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting
Estimasi Umur Manfaat

Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material oleh perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat peralatan berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan potensi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan peralatan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan Perusahaan dan entitas anak melakukan penurunan maupun penghapusan aset tetap apabila peralatan tersebut sudah usang seiring dengan perkembangan teknologi. Jumlah tercatat aset tetap disajikan pada Catatan 9.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktuarial dan perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 18.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

t. **Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements** (continued)
Accounting Estimates and Assumptions
Estimated Useful Lives

The Company conducted a review of the economic useful lives of fixed assets and investment properties based on factors such as the technical conditions and technological developments in the future. Operating results in the future will be affected from the changes in estimate caused by changes in these factors.

The Company conducts periodic reviews of the useful life of the equipment based on factors such as technological changes and the potential benefits derived from the use of the equipment. This condition can cause the Company and its subsidiaries to decrease or write off fixed assets if the equipment is obsolete in line with technological developments. The carrying amount of property and equipment is presented in Note 9.

Post-employment benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The determination of Company's post-employment benefits liabilities is depend on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Management believe the assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the actuary result or significant changes in the assumptions may have materially affect its employee benefits liabilities and net employee benefits expense. Detailed information has been disclosed on Note 18.

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
t. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (lanjutan) Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (lanjutan) <u>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha</u>	t. <i>Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements</i> (continued) <i>Accounting Estimates and Assumptions</i> (lanjutan) <u>Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable</u> The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit worthiness, to record specific provisions its receivable amounts that the Company expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and if additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.
Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha.	
Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.	Considerations in the Determination of Accounting Policies The following considerations were made by the management in order to implement the Company's accounting policies that have the most significant impact on the amounts recognized in the financial statements.
Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.	Classifications of Financial Assets and Liabilities The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by taking into account the definition specified in PSAK No. 71 fulfilled. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Company's accounting policies.
3. KAS DAN SETARA KAS	3. CASH AND CASH EQUIVALENTS
	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Kas	
Rupiah	
Kas Operasional	14.000.000
Kas PSM	11.302.500
Sub Jumlah	25.302.500
	31 Desember 2020/ December 31, 2020
	Cash
	Rupiah
	Operating Cash
	Cash on PSM
	Sub Total
	17.070.000

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Bank Rupiah			Bank Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.201.920.589	9.877.087.160	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank DKI	38.682.586.816	26.063.278.201	PT Bank DKI
PT Bank Central Asia Tbk	690.804.065	1.817.900.033	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	305.869.178	226.761.216	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	208.450.334	153.378.384	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Sub Jumlah	<u>49.089.630.982</u>	<u>38.138.404.994</u>	Sub Total
Deposito Berjangka Rupiah			Time Deposits Rupiah
PT Bank DKI	38.000.000.000	55.000.000.000	PT Bank DKI
Sub Jumlah	<u>38.000.000.000</u>	<u>55.000.000.000</u>	Sub Total
Jumlah	<u>87.114.933.482</u>	<u>93.155.474.994</u>	Total
Jangka Waktu Deposito	1 Bulan/ Month	1 Bulan/ Month	Term of time deposit
Tingkat Bunga Deposito per Tahun	3,5%	4,3% - 5%	Time deposit interest rate per annum

4. KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Letter of Credit Euro			Letter of Credit Euro
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.245.384.737	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	<u>1.245.384.737</u>	<u>-</u>	Total

5. PIUTANG USAHA

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	11.121.429.493	-	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	2.675.200.000	1.672.000.000	PT Jakarta Infrastruktur Propertindo
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Angkasa Pura II (Persero)	637.833.637	-	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Balon Indo Teknologi Telekomunikasi	127.543.395	-	PT Balon Indo Teknologi Telekomunikasi
PT Solusi Kuliner Indonesia	29.671.874	-	PT Solusi Kuliner Indonesia
PT Kopi Dari Hati	-	6.286.308	PT Kopi Dari Hati
Jumlah	<u>14.591.678.399</u>	<u>1.678.286.308</u>	Total

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang usaha kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) merupakan pendapatan subsidi periode Desember 2021 dan kepada PT Jakarta Infrastruktur Propertindo atas jasa *advertising*.

6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>
Settlement Kartu Uang	
Elektronik (Bank)	39.809.671
Bunga Deposito	268.828.776
Lainnya	3.304.900.700
Jumlah	3.613.539.147

Sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat saldo Settlement Kartu Uang Elektronik (Bank) sebesar Rp39.809.671 yang merupakan data settlement penjualan tiket melalui kartu uang elektronik yang masih tertunda dan akan dibayarkan oleh pihak bank ketika data settlement dinyatakan valid. Sedangkan untuk bunga deposito sebesar Rp268.826.776 akan diterima awal periode berikutnya bulan Januari 2022. Selain itu, terdapat pendapatan yang masih harus diterima lainnya yaitu sebesar Rp2.924.900.470 yang berasal dari akrual atas potensi penggantian dari asuransi atas insiden kebakaran di Gedung MCC dan akrual atas pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan APMS periode September 2021 sebesar Rp380.000.230 berdasarkan atas SPK antara PT LRT Jakarta dengan Angkasa Pura II.

7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>
Asuransi Karyawan	1.496.824.663
Lainnya	783.849.301
Jumlah	2.280.673.964

Nilai biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.280.673.964 yang diantaranya merupakan transaksi:

- Deposit ASO asuransi rawat jalan karyawan PT LRT Jakarta kepada PT Axle Asia.
- Biaya dibayar dimuka lainnya yang merupakan lisensi Microsoft Dynamics 365 untuk satu tahun, lisensi email dan Software Talenta HR-Pro untuk karyawan selama satu tahun.

5. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

Account receivables from PT Jakarta Propertindo (Perseroda) are subsidized income for the December 2021 period and to PT Jakarta Infrastruktur Propertindo for advertising services.

6. ACCRUED REVENUES

	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Settlement of Electronic Money (Banks)	39.619.359	
Deposit Interest	198.817.205	
Others	1.086.500.000	
Total	1.324.936.564	

As of December 31, 2021, the Electronic Money Card (Bank) Settlement balance was recorded at Rp39.809.671 which is the settlement data for ticket sales via electronic money cards which is still pending and will be paid by the bank when the settlement data is declared valid. Meanwhile, deposit interest of Rp268.826.776 will be received at the beginning of the next period in January 2022. In addition, there is other income that must be received, namely Rp2.924.900.470 which comes from accruals for potential reimbursement from insurance for the fire incident at the MCC Building and the accrual of operating and maintenance service revenues for the September 2021 period is Rp380.000.230 based on the SPK between PT LRT Jakarta and Angkasa Pura II.

7. PREPAYMENTS

	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Employee's Insurance	718.895.900	
Others	441.618.856	
Total	1.160.514.756	

The value of the prepaid expenses as of December 31, 2021, is Rp1.609.865.328, which includes the following transactions:

- Deposit ASO outpatient insurance for PT LRT Jakarta employees to PT Axle Asia.
- Other prepaid expenses which are Microsoft Dynamics 365 license for one year, email license and HR-Pro Talent Software for employees for one year.

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. UANG MUKA KERJA

	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Surat Permohonan	
Uang Muka (SPU)	371.656.550
Lainnya	122.371.891
Jumlah	494.028.441

Nilai uang muka kerja per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp494.028.441 yang diantaranya merupakan transaksi:

- SPU atas kegiatan project APMS, SPU untuk penunjukan notaris terkait pembuatan Akta tahun 2021, SPU kegiatan LRTJ Healthy Challenge, SPU kegiatan verifikasi subsidi bulanan PT LRT Jakarta Periode November dan Desember 2021, SPU pengadaan penggantian lampu concourse stasiun Pegangsaan Dua, dan SPU pengadaan perangkat memory dan storage.
- Realisasi kas kecil belum dipertanggungjawabkan dan belum dilakukan top up.

8. ADVANCES

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Surat Permohonan		Advance Request
Uang Muka (SPU)	37.232.400	Letter (SPU)
Lainnya	88.107.893	Others
Jumlah	125.340.293	Total

The value of work advances as of December 31, 2021 amounted to Rp494.028.441, which included the following transactions:

- SPU for APMS project activities, SPU for appointing a notary related to the 2021 Deed, SPU for LRTJ Healthy Challenge activities, SPU for PT LRT Jakarta monthly subsidy verification activities for the November and December 2021 periods, SPU for procuring replacement of concourse lights for Pegangsaan Dua station, and SPU for procurement of memory devices and storage.
- Use of petty cash that has not been accounted for and has not been top up.

9. ASET TETAP

	2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						
Sarana Perkeretaapian	185.020.540.000	-	-	-	185.020.540.000	Acquisition Cost
Prasarana						Railway Facilities
Perkeretaapian	3.448.089.654	1.592.719.368	-	3.301.785.345	8.342.594.367	Railway
Renovasi Gedung	9.366.395.216	2.025.008.557	-	-	11.391.403.773	Infrastructures
Inventaris Kantor	8.333.149.375	1.419.649.292	-	-	9.752.798.667	Renovation of Office Buildings
Sub Jumlah	206.168.174.245	5.037.377.218	-	3.301.785.345	214.507.336.808	Office Equipment
Aset Dalam Penyelesaian	2.903.035.345	398.750.000	-	(3.301.785.345)	-	Sub Total
Sub Jumlah	209.071.209.590	5.436.127.218	-	-	214.507.336.808	Asset Under Construction
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Sarana Perkeretaapian	1.113.566.465	6.604.767.236	-	-	7.718.333.701	Railway Facilities
Prasarana						Railway
Perkeretaapian	397.219.050	1.492.090.845	-	-	1.889.309.895	Infrastructures
Renovasi Gedung	1.198.782.281	1.284.873.645	-	-	2.483.655.926	Renovation of Office Buildings
Inventaris Kantor	2.692.314.384	2.383.172.400	-	-	5.075.486.784	Office Equipment
Sub Jumlah	5.401.882.180	11.764.904.126	-	-	17.166.786.306	Sub Total
Penurunan Nilai Aset						Impairment of Fixed Assets
Renovasi Gedung	-	2.924.900.470	-	-	2.924.900.470	Renovation of Office Buildings
Sub Jumlah	-	2.924.900.470	-	-	2.924.900.470	Sub Total
	203.669.327.410				194.415.650.032	

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. FIXED ASSETS (lanjutan)

	2020					Acquisition Cost
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						
Sarana Perkeretaapian	28.240.000	184.992.300.000	-	-	185.020.540.000	Railway Facilities
Prasarana						Railway
Perkeretaapian	1.175.611.363	2.272.478.291	-	-	3.448.089.654	Infrastructures
Renovasi Gedung	8.095.594.333	1.270.800.883	-	-	9.366.395.216	Renovation of Office Buildings
Inventaris Kantor	7.641.664.459	691.484.916	-	-	8.333.149.375	Office Equipment
Sub Jumlah	16.941.110.155	189.227.064.090	-	-	206.168.174.245	Sub Total
Aset Dalam Penyelesaian	-	2.903.035.345	-	-	2.903.035.345	Asset Under Construction
Sub Jumlah	16.941.110.155	192.130.099.435	-	-	209.071.209.590	Sub Total
Akumulasi Penyusutan						
Sarana Perkeretaapian	1.765.000	1.111.801.465	-	-	1.113.566.465	Railway Facilities
Prasarana						Railway
Perkeretaapian	19.633.404	377.585.646	-	-	397.219.050	Infrastructures
Renovasi Gedung	84.329.108	1.114.453.173	-	-	1.198.782.281	Renovation of Office Buildings
Inventaris Kantor	661.195.458	2.031.118.926	-	-	2.692.314.384	Office Equipment
Sub Jumlah	766.922.970	4.634.959.210	-	-	5.401.882.180	Sub Total
Jumlah	16.174.187.184				203.669.327.410	Total

Total nilai aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp194.415.650.035, dengan nilai aset terbesar adalah sarana LRV yang diperoleh di November 2020 sebagai modal disetor (inbreng) sebesar Rp183.893.400.000. Lalu ada aset renovasi gedung, sebesar Rp8.466.503.304, dimana aset ini adalah kontrak tunggal dengan kontraktor jasa konstruksi interior untuk gedung kantor di Depo LRT Jakarta dan beberapa renovasi lainnya yang terakumulasi. Untuk aset inventaris kantor seperti komputer & elektronik, furniture, peralatan IT dan lainnya tercatat sebesar Rp9.752.798.667.

The total value of fixed assets as of December 31, 2021 was Rp194.415.650.035, with the largest asset value being the LRV facility obtained in November 2020 as paid-in capital (inbreng) of Rp183.893.400.000. Then there are building renovation assets, amounting to Rp8.466.503.304, where this asset is a single contract with an interior construction service contractor for an office building at the Jakarta LRT Depot and several other accumulated renovations. Office inventory assets such as computers & electronics, furniture, IT equipment and others were recorded at Rp9.752.798.667.

10. ASET TAK BERWUJUD

10. INTANGIBLE ASSETS

	2021					Acquisition Cost
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						
Sistem & Aplikasi	1.971.243.279	176.156.121	-	-	2.147.399.400	System & Apps
Sub Jumlah	1.971.243.279	176.156.121	-	-	2.147.399.400	Sub Total
Akumulasi Amortisasi						
Sistem & Aplikasi	503.299.761	577.218.963	-	-	1.080.518.724	Accumulated Amortization
Sub Jumlah	503.299.761	577.218.963	-	-	1.080.518.724	Sub Total
Jumlah	1.467.943.518				1.066.880.676	Total
2020						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	Acquisition Cost
Biaya Perolehan						
Sistem & Aplikasi	1.761.561.279	209.682.000	-	-	1.971.243.279	System & Apps
Sub Jumlah	1.761.561.279	209.682.000	-	-	1.971.243.279	Sub Total
Akumulasi Amortisasi						
Sistem & Aplikasi	36.699.193	466.600.568	-	-	503.299.761	Accumulated Amortization
Sub Jumlah	36.699.193	466.600.568	-	-	503.299.761	Sub Total
Jumlah	1.724.862.086				1.467.943.518	Total

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. ASET TAK BERWUJUD (lanjutan)

Aset tidak berwujud merupakan perolehan atas implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP), Aplikasi LRT Jakartapada IOS dan Android, dan Intranet LRT Jakarta.

11. UTANG USAHA

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	-	13.398.257.574	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Samjin Indonesia Enc	3.208.668.280	-	PT Samjin Indonesia Enc
PT ISS Indonesia	1.507.863.543	-	PT ISS Indonesia
PT Duta Listrik Graha Prima	1.380.018.573	-	PT Duta Listrik Graha Prima
PT Panglima Siaga Bangsa	1.310.473.867	-	PT Panglima Siaga Bangsa
PT Personel Alih Daya	1.131.850.915	-	PT Personel Alih Daya
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	888.545.124	-	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri
PT Prima Karya Sarana Sejahtera	841.982.300	-	PT Prima Karya Sarana Sejahtera
PT Datascrip	-	1.954.150.000	PT Datascrip
Utang pihak ketiga dibawah 500 Juta Rupiah	5.866.669.323	2.709.901.451	Third Party Payables Under 500 Million Rupiah
Jumlah	<u>16.136.071.925</u>	<u>18.062.309.025</u>	Total

12. BEBAN AKRUAL

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Beban Sarana	2.362.013.853	4.277.174.497	<i>Rolling-Stock Expenses</i>
Beban Prasarana	1.670.891.421	1.475.257.287	<i>Infrastructure Expenses</i>
Beban Pegawai	4.481.674.988	2.350.260.059	<i>Employee Expenses</i>
Beban Umum	532.755.723	288.354.826	<i>General Expenses</i>
Aset Dalam Penyelesaian	-	328.290.143	<i>Assets Under Construction</i>
Beban Penjualan Top-up			<i>Electronic Money Card</i>
Kartu Uang Elektronik	3.615.000	3.615.000	<i>Top-up Sales Expenses</i>
Beban Jasa Profesional	-	189.084.872	<i>Professional Expenses</i>
Lainnya	732.785.815	-	<i>Others</i>
Jumlah	<u>9.783.736.800</u>	<u>8.912.036.684</u>	Total

Biaya yang masih harus dibayar lainnya merupakan provisi pengembalian kepada Pihak Berelasi.

10. INTANGIBLE ASSETS (lanjutan)

Intangible assets are acquisitions from the implementation of the Enterprise Resource Planning (ERP) system, the Jakarta LRT Application on IOS and Android, and the Jakarta LRT Intranet.

11. ACCOUNT PAYABLES

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	-	13.398.257.574	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Samjin Indonesia Enc	3.208.668.280	-	PT Samjin Indonesia Enc
PT ISS Indonesia	1.507.863.543	-	PT ISS Indonesia
PT Duta Listrik Graha Prima	1.380.018.573	-	PT Duta Listrik Graha Prima
PT Panglima Siaga Bangsa	1.310.473.867	-	PT Panglima Siaga Bangsa
PT Personel Alih Daya	1.131.850.915	-	PT Personel Alih Daya
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	888.545.124	-	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri
PT Prima Karya Sarana Sejahtera	841.982.300	-	PT Prima Karya Sarana Sejahtera
PT Datascrip	-	1.954.150.000	PT Datascrip
Utang pihak ketiga dibawah 500 Juta Rupiah	5.866.669.323	2.709.901.451	Third Party Payables Under 500 Million Rupiah
Jumlah	<u>16.136.071.925</u>	<u>18.062.309.025</u>	Total

12. ACCRUED EXPENSES

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Beban Sarana	2.362.013.853	4.277.174.497	<i>Rolling-Stock Expenses</i>
Beban Prasarana	1.670.891.421	1.475.257.287	<i>Infrastructure Expenses</i>
Beban Pegawai	4.481.674.988	2.350.260.059	<i>Employee Expenses</i>
Beban Umum	532.755.723	288.354.826	<i>General Expenses</i>
Aset Dalam Penyelesaian	-	328.290.143	<i>Assets Under Construction</i>
Beban Penjualan Top-up			<i>Electronic Money Card</i>
Kartu Uang Elektronik	3.615.000	3.615.000	<i>Top-up Sales Expenses</i>
Beban Jasa Profesional	-	189.084.872	<i>Professional Expenses</i>
Lainnya	732.785.815	-	<i>Others</i>
Jumlah	<u>9.783.736.800</u>	<u>8.912.036.684</u>	Total

Other accrued expenses are provision for return to Related Parties.

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

13. PERPAJAKAN		13. TAXATION	
a. Pajak Dibayar Dimuka		a. Tax Prepayments	
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pajak Pertambahan Nilai	937.235.519	1.909.537.467	Value Added Tax
Jumlah	937.235.519	1.909.537.467	Total
b. Utang Pajak		b. Tax Payables	
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pajak Penghasilan			Income Tax
Pasal 4 Ayat 2	11.682.842	425.057	Article 4 Paragraph 2
Pajak Penghasilan Pasal 21	392.480.742	956.683.738	Income Tax Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 23	231.431.232	60.979.738	Income Tax Article 23
Jumlah	635.594.816	1.018.088.533	Total
c. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan		c. Final Expenses (Benefit) Income Tax	
	2021	2020	
Pajak Kini	-	-	Current Income Tax
Beban (Manfaat)			Deferred Tax
Pajak Tangguhan	2.219.899.964	2.723.919.394	(Benefit) Expense
Jumlah	2.219.899.964	2.723.919.394	Total
d. Rekonsiliasi Fiskal		d. Fiscal Reconciliation	
	2021	2020	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	5.859.337.856	4.168.220.692	Profit Before Income Tax
Perbedaan Temporer		Temporary Differences	
Penyusutan Aset Tetap	(2.871.687.765)	(478.614.628)	Depreciation of Fixed Assets
Beban Imbalan Pasca Kerja	1.867.005.330	1.795.883.617	Post - Employment Benefit Expense
Jumlah	(1.004.682.435)	1.317.268.989	Total
Perbedaan Tetap		Permanent Differences	
Beban Yang Tidak Dapat Dikurangkan	2.042.897.780	2.281.414.682	Non-Deductible Expenses
Pendapatan Yang Telah Dikenakan Pajak Final	(807.220.480)	(887.032.136)	Final Taxable Income
Pendapatan Bunga	(2.325.866.051)	(2.959.501.504)	Interest Revenue
Jumlah	(1.090.188.751)	(1.565.118.958)	Total
Laba (Rugi) Fiskal Tahun Berjalan	3.764.466.670	3.920.370.724	Fiscal Profit (Loss) For The Year

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

d. Rekonsiliasi Fiskal (lanjutan)

	2021	2020	
Rugi Fiskal Tahun Sebelumnya			Prior Year's Fiscal Loss
Tahun 2018	(10.009.005.788)	(13.929.376.512)	Year 2018
Tahun 2019	(58.362.698.381)	(58.362.698.381)	Year 2019
Akumulasi Rugi Fiskal	(64.607.237.500)	(68.371.704.169)	Accumulated Fiscal Loss

e. Pajak Tangguhan

d. Fiscal Reconciliation (continued)

	2021				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Dikreditkan ke Laba Rugi/ <i>Credited Profit and Loss</i>	Dikreditkan ke Ekuitas/ <i>Credited to Equity</i>	Penyesuaian Akibat Tarif Pajak/ <i>Adjustment Due To Changes In Tax Rates</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>
Penyusutan Aset Tetap	(105.295.218)	(631.771.308)	-	-	(737.066.526)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	687.012.517	(759.945.990)	105.038.785	-	32.105.312
Rugi Fiskal	15.041.774.917	(828.182.667)	-	-	14.213.592.250
Jumlah	15.623.492.216	(2.219.899.965)	105.038.785	-	13.508.631.036
	2020				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Dikreditkan ke Laba Rugi/ <i>Credited Profit and Loss</i>	Dikreditkan ke Ekuitas/ <i>Credited to Profit and Loss</i>	Penyesuaian Akibat Tarif Pajak/ <i>Adjustment Due To Changes In Tax Rates</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>
Penyusutan Aset Tetap	-	(105.295.218)	-	-	(105.295.218)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	502.837.197	395.094.396	(150.578.612)	(60.340.464)	687.012.517
Rugi Fiskal	17.995.153.025	(862.481.559)	-	(2.090.896.549)	15.041.774.917
Jumlah	18.497.990.222	(572.682.381)	(150.578.612)	(2.151.237.013)	15.623.492.216

14. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
PT Indosat Tbk	1.000.000.000	333.333.333	PT Indosat Tbk
PT Fintek Karya Nusantara	178.500.000	304.500.000	PT Fintek Karya Nusantara
PT Bank DKI	-	57.000.000	PT Bank DKI
Jumlah	1.178.500.000	694.833.333	Total

15. JAMINAN DAN UANG MUKA LAINNYA

	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
PT Bluemart Technology Indonesia	84.150.000	84.150.000	PT Bluemart Technology Indonesia
PT Indosat Tbk	42.000.000	42.000.000	PT Indosat Tbk
PT Solusi Kuliner Indonesia	20.000.000	-	PT Solusi Kuliner Indonesia
PT Moradi	3.900.000	-	PT Moradi
Jumlah	150.050.000	126.150.000	Total

Jaminan dan uang muka lainnya merupakan security deposit terkait sewa area di PT LRT Jakarta.

14. UNEARNED REVENUE

	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
PT Bluemart Technology Indonesia	84.150.000	84.150.000	PT Bluemart Technology Indonesia
PT Indosat Tbk	42.000.000	42.000.000	PT Indosat Tbk
PT Solusi Kuliner Indonesia	20.000.000	-	PT Solusi Kuliner Indonesia
PT Moradi	3.900.000	-	PT Moradi
Jumlah	150.050.000	126.150.000	Total

Guarantees and other advances are security deposits related to the rental of the area at PT LRT Jakarta.

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. UTANG RETENSI

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Datascript	16.847.201	-	PT Datascript
PT Landasan Tata Laksana	4.387.350	-	PT Landasan Tata Laksana
PT Nera Indonesia	-	161.900.707	PT Nera Indonesia
PT Prasetya Mulya Abadi	-	41.746.513	PT Prasetya Mulya Abadi
PT Visi Cipta Media	-	2.941.125	PT Visi Cipta Media
PT Dedato Indonesia	-	10.472.000	PT Dedato Indonesia
Jumlah	21.234.551	217.060.345	Total

Utang retensi merupakan utang kepada kontraktor atas pekerjaan penyediaan akses tangga BOH, perangkat akses lift, perangkat jaringan gedung MCC, penambahan renovasi gedung, penyediaan & pemasangan UPS, dan penyediaan & instalasi gate AFC.

16. RETENTION PAYABLES

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Datascript	16.847.201	-	PT Datascript
PT Landasan Tata Laksana	4.387.350	-	PT Landasan Tata Laksana
PT Nera Indonesia	-	161.900.707	PT Nera Indonesia
PT Prasetya Mulya Abadi	-	41.746.513	PT Prasetya Mulya Abadi
PT Visi Cipta Media	-	2.941.125	PT Visi Cipta Media
PT Dedato Indonesia	-	10.472.000	PT Dedato Indonesia
Jumlah	21.234.551	217.060.345	Total

Retention payables represent payables to contractors for the work of providing access to BOH stairs, lift access equipment, MCC building network equipment, additional building renovations, supply & installation of UPS, and supply & installation of AFC gates.

17. UTANG LAIN - LAIN

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Transportasi Jakarta	21.525.764	31.976.999	PT Transportasi Jakarta
PT Balon Indoteknologi Komunikasi	-	6.457.256	PT Balon Indoteknologi Komunikasi
Lainnya	5.803.500	-	Lainnya
Jumlah	27.329.264	38.434.255	Total

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Jumlah Pegawai	248	179	Number of Employees
Usia Pensiun	56	56	Retirement Age
Tingkat Kenaikan Gaji	8,00%	8,00%	Salary Increase Rate
Tingkat Bunga Diskonto	7,50%	7,30%	Discount Interest Rate
Tabel Mortalita	TMI IV - 2019	TMI - IV 2019	Mortality Table
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	5.978.035.239	3.122.784.168	Present Value of Obligation
Nilai Wajar Aset Program	5.832.102.000	-	Fair Value of Plan Assets
Defisit / (Surplus)	145.933.239	3.122.784.168	Deficit / (Surplus)
Batas Atas Aset Periode Ini	-	-	Asset Upper Limit for This Period
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	145.933.239	3.122.784.168	Post - Employment Benefit Liabilities
Beban Jasa Kini Perusahaan	2.566.358.575	1.643.021.109	Current Service Expense of the Company
Bunga Neto Atas Liabilitas (Aset)	211.100.210	152.862.508	Net Interest on Liabilities (Assets)
(Keuntungan) / Kerugian	(5.597.566.918)	-	(Gain) / Actuarial Loss - Asset
Aktuaria - Aset	(5.597.566.918)	-	Loss - Asset
Beban Imbalan Pasca Kerja	(2.820.108.133)	1.795.883.617	Post-employment Benefits

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Nilai Kini Liabilitas	
Awal Periode	3.122.784.168
Beban Bunga	211.100.210
Beban Jasa Kini	2.566.358.575
Pembayaran Imbalan Pasca Kerja	
Periode Berjalan	(402.637.496)
Keuntungan Kerugian Aktuaria	480.429.782
Nilai Kini Liabilitas Akhir Periode	5.978.035.239

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
		<i>Present Value of Obligation</i>
at beginning of period		
Interest Cost	2.011.348.789	
Current Service Cost	152.862.508	
Current Period	1.643.021.109	
Benefit Payment	-	
Actuarial Gain or Loss	(684.448.238)	
	3.122.784.168	

19. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta No. 10 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn tanggal 16 April 2018, yang berisi tentang pendirian Perseroan Terbatas yang bernama PT LRT Jakarta. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp600.000.000.000 terbagi atas 600.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Para Pemegang Saham sebesar 25% atau sejumlah 150.000 saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000. Akta ini juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0020380.AH.01.01. tanggal 17 April 2018.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.75 tanggal 26 Oktober 2020 dari Notaris Wiwik Condro, S.H., di Jakarta, Para Pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal per lembar saham yang sebelumnya bernilai Rp1.000.000 (satu juta) menjadi Rp100.000/lembar saham, serta menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dalam bentuk inbreng aset Light Rail Vehicle (LRV) yang telah dihitung nilai wajarnya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asrori & Rekan sebesar Rp183.893.400.000 yang seluruhnya diambil oleh PT Jakarta Propertindo. Akta ini juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU AH.01.03-0408252 tanggal 17 November 2020.

Komposisi dan susunan pemegang saham per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 dan/ and 2020		
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Percentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai/ Amount Rp
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	3.323.934	99,55%	332.393.400.000
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	15.000	0,45%	1.500.000.000
	3.338.934	100,00%	333.893.400.000

19. SHARE CAPITAL

Based on Deed No. 10 from Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn dated April 16 2018, which contains the establishment of a Limited Liability Company named PT LRT Jakarta. The authorized capital of the Company is Rp600,000,000,000 divided into 600,000 shares, each share with a nominal value of Rp1,000,000. 25% of the authorized capital has been issued and fully paid up by the Shareholders or 150,000 shares with a total value of Rp150,000,000,000. This deed has also been approved by the Ministry of Law and Human Rights in its Decree No. AHU-0020380.AH.01.01. April 17, 2018.

Based on the deed of Shareholders' Decision Statement No. 75 dated October 26, 2020 from Notary Wiwik Condro, SH, in Jakarta, the Shareholders approved the change in the par value per share which was previously valued at Rp. 1,000,000 (one million) to Rp. 100,000/share. shares, as well as approving the addition of the Company's issued and paid-up capital in the form of a Light Rail Vehicle (LRV) asset whose fair value has been calculated by the Public Appraisal Service Office (KJPP) Asrori & Partners in the amount of Rp183,893,400,000 which was entirely taken by PT Jakarta Propertindo. This deed has also been approved by the Ministry of Law and Human Rights in its Decree No. AHU AH.01.03-0408252 on 17 November 2020.

The composition and composition of shareholders as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

20. PENDAPATAN

20. REVENUES

	2021	2020	
Subsidi Sarana	65.341.684.275	64.556.629.154	<i>Rolling-Stock Subsidy</i>
Subsidi Prasarana	61.686.622.825	34.495.755.107	<i>Infrastructure Subsidy</i>
Jasa Teknis	2.800.547.708	435.000.000	<i>Technical Services</i>
Tiket	1.567.226.298	2.541.903.468	<i>Farebox</i>
Periklanan	1.519.620.580	2.240.477.504	<i>Advertising</i>
Retail dan Sewa	1.433.386.884	1.054.455.265	<i>Retail and Lease</i>
Jumlah	134.349.088.570	105.324.220.498	Total

21. BEBAN POKOK PENDAPATAN

21. COST OF REVENUE

	2021	2020	
Beban Sarana			<i>Rolling Stock Expenses</i>
Operasi Sarana	28.365.664.901	21.811.993.417	<i>Operating of Rolling Stock</i>
Perawatan Sarana	2.079.207.812	959.903.945	<i>Maintenance of Rolling Stock</i>
Overhead Sarana			<i>Overhead of Rolling Stock</i>
Pegawai Sarana	16.887.643.066	21.361.906.623	<i>Labor and of Rolling Stock</i>
Penyusutan Sarana	6.604.767.235	1.111.801.465	<i>Depreciation of Rolling Stock</i>
Pendukung Operasi Sarana	74.464.829	3.152.611.939	<i>General of Rolling Stock</i>
Beban Prasarana dan Fasilitas Operasi			<i>Operational Infrastructure and Facility Expenses</i>
Perizinan	517.514.799	-	<i>Licensing</i>
Perawatan Prasarana	17.218.421.110	1.715.639.796	<i>Maintenance of Infrastructure</i>
Operasi Prasarana dan Fasilitas Operasi	12.189.496.442	12.860.786.756	<i>Overhead of Infrastructure</i>
Penyusutan Aset Prasarana	353.377.208	160.890.075	<i>Depreciation of Infrastructure</i>
Penyusutan Aset Fasilitas			<i>Depreciation of Fasilitas</i>
Operasi Perkeretaapian	1.138.713.636	216.695.571	<i>Operating Facility</i>
Beban Optimalisasi Aset			<i>Asset Optimization Expense</i>
Perawatan Aset Properti	-	39.077.962	<i>Property Asset Maintenance</i>
Beban Jasa Operasi dan Perawatan Sarana dan Prasarana			<i>Operation & Maintenance Services Expenses</i>
Operasi dan Perawatan Sarana APMS	202.413.787	-	<i>Operation & Maintenance of Rolling Stock - APMS</i>
Operasi dan Perawatan Prasarana APMS	50.955.437	-	<i>Operation & Maintenance of Infrastructure - APMS</i>
Beban Administrasi dan Umum APMS	736.729.613	-	<i>General and Administrative Expenses - APMS</i>
Jumlah	86.419.369.875	63.391.307.549	Total

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

22. BEBAN PENJUALAN

	2021	2020	
Beban Promosi	189.904.464	307.773.409	Promotion Expenses
Beban Event & Exhibition	28.105.000	458.406.286	Event & Exhibition Expenses
Beban Media	-	148.219.000	Media Expenses
Jumlah	218.009.464	914.398.695	Total

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2021	2020	
Beban Pegawai	29.775.094.082	28.486.282.709	Employee Expenses
Beban Umum	8.845.393.012	6.494.104.216	General Expenses
Beban Penyusutan	4.245.265.009	3.612.172.666	Depreciation Expenses
Beban Jasa Profesional	1.543.413.599	794.299.178	Professional Service Expenses
Jumlah	44.409.165.702	39.386.858.769	Total

Beban Pegawai

Gaji	15.538.073.936	12.407.516.784	<i>Employee Expenses</i>
Beban Manfaat Karyawan	1.867.005.330	1.795.883.617	<i>Other Employee's Benefit</i>
Tunjangan	3.036.969.877	3.503.781.164	<i>Allowance</i>
Beban PPh Karyawan	2.100.827.929	2.632.946.659	<i>Employee's Income Tax</i>
Beban Tantiem Dan Jasa Produksi	2.089.790.587	2.631.214.107	<i>Tantiem & Production Services</i>
Beban Premi Asuransi Pegawai	1.558.756.171	2.444.968.282	<i>Employee's Insurance</i>
Tunjangan Hari Raya	993.956.201	947.995.666	<i>Religious Holiday Allowance</i>
BPJS Ketenagakerjaan	990.623.987	911.995.007	<i>BPJS Ketenagakerjaan</i>
Beban Diklat dan Pelatihan Sertifikasi	621.948.137	83.091.400	<i>Employee's Training & Certification</i>
Beban Pengobatan	432.601.402	726.648.154	<i>Medical Allowance</i>
BPJS Kesehatan	354.323.240	336.592.838	<i>BPJS Kesehatan</i>
Beban Pegawai Lainnya	87.773.622	45.448.288	<i>Other Employee's Expenses</i>
Pakaian Dinas	29.356.375	18.200.743	<i>Employee's Uniform</i>
Beban Karyawan Lainnya	73.087.288	-	
Jumlah	29.775.094.082	28.486.282.709	Total

Beban Umum

Beban Outsourcing	2.283.849.274	2.155.619.056	<i>Outsourcing Expenses</i>
Beban K3 (SHE) Consumable	1.059.294.758	474.482.240	<i>Consumable - Safety Supplies</i>
Beban Lisensi dan Perlengkapan IT	1.128.186.526	700.959.689	<i>Licenses and IT Supplies</i>
Beban Sewa Kendaraan	640.539.029	1.014.599.480	<i>Rent Expenses - Vehicles</i>
Beban Pemeliharaan Kantor	894.720.790	265.505.498	<i>Office Maintenance Expenses</i>
Beban Inventaris	518.255.463	-	<i>Equipment Expenses</i>
Beban Rapat Internal/Eksternal	329.702.283	416.619.119	<i>Internal/External Meeting Expenses</i>
Beban Kesekretariatan	530.120.358	72.750.116	<i>Secretarial Expenses</i>
Beban Sewa Peralatan Kantor	218.237.221	282.143.261	<i>Rent Expenses - Office Tools</i>
Beban Humas	174.319.596	-	<i>Public Relation Expenses</i>
Beban Bahan Habis Pakai Makanan	153.205.472	167.268.805	<i>Consumable - Pantry Supplies</i>
Beban Donasi Dan Sponsorship	134.026.679	77.675.009	<i>Donations and Sponsorships</i>
Beban Internet Kantor	127.872.784	220.207.807	<i>Internet Expenses</i>
Jumlah dipindahkan	8.192.330.233	5.847.830.080	<i>Amount transferred</i>

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)		23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (lanjutan)	
		2021	2020
Beban Umum (lanjutan)			
Jumlah pindahan	8.192.330.233	5.847.830.080	Amount of transfers
Beban Perjalanan Dinas	113.627.733	36.261.027	Business Trip
Beban ATK Dan APK	141.688.414	315.244.068	Office Stationary
Beban Bahan Habis Pakai			
Alat Pembersihan	60.101.190	36.292.519	Consumable - Cleaning
Beban Percetakan	59.050.987	43.511.392	Printing Expenses
Beban Perizinan Dan Legalitas	46.869.498	14.251.400	Legality and Permit
Beban BBM dan			
Transport Operasional	29.131.919	27.042.769	Transport Operating Expense
Beban Telepon, Faximile	31.588.908	34.973.395	Telephone and Fax
Beban Air	7.809.850	-	
Beban Kerumah tanggaan	6.288.115	-	Household Expenses
Beban Pembinaan Karyawan	4.850.000	65.763.295	Employee's Coaching
Beban Bahan Habis Pakai P3K	-	193.000	Consumable - First Aid
Beban Pos Dan Pengiriman	-	549.000	Post and Delivery Services
Beban Administrasi Umum Lainnya	152.056.165	72.192.271	Other General Expenses
Jumlah	8.845.393.012	6.494.104.216	Total
Beban Penyusutan dan Amortisasi			
Aset Renovasi Gedung Kantor	1.284.873.645	1.114.453.173	Depreciation Expenses
Inventaris Kantor	2.383.172.401	2.031.118.925	Renovation of Office Buildings
Amortisasi Lisensi Software	577.218.963	466.600.568	Office Equipment
Jumlah	4.245.265.009	3.612.172.666	Total
Beban Jasa Profesional			
Jasa Konsultan IT	155.100.000		Professional Service Expenses
Jasa Perhitungan Struktur	49.500.000		IT Consulting Services
Jasa Konsultan Hukum	86.000.000	103.012.820	Structural Calculation Services
Jasa Konsultan SDM	185.360.256		Legal Consulting Services
Jasa Konsultan Pajak	-		HR Consulting Services
Jasa Konsultan			Tax Consultant Services
Pengembangan Usaha	308.440.000		Business Development
Jasa Konsultan Manajemen	165.220.000		Consulting Services
Jasa Konsultan Penerapan dan Sertifikasi Sistem K3		108.772.400	Management Consulting Services
Jasa Konsultasi dan Sertifikasi ISO 9001 : 2015 dan SMKP	33.111.385	98.386.200	OHS System Implementation
Jasa K3 Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Kerja		63.800.000	and Certification Consultant Services
Jasa Technical Assistant		1.000.000	Consulting and Certification Services for
Jasa Pembuatan Akta Notaris		7.692.308	ISO 9001: 2015 and SMKP
Jasa Konsultasi Desain	13.200.000	199.980.000	OHS Services Monitoring and
Jasa Konsultan			Measurement of the Environment
Pengembangan Aplikasi	2.051.282	18.461.538	Technical Assistant Services
Jasa Kantor Akuntan Publik	143.906.720	48.109.041	Notary Deed Services
Jumlah dipindahkan	1.141.889.643	649.214.307	Application Development
			Consultant Services
			Public Accountant Services
			Amount transferred

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
(lanjutan)

	2021	2020	
Beban Jasa			
Profesional (lanjutan)			<i>Professional Service Expenses (continued)</i>
Jumlah pindahan	1.141.889.643	649.214.307	Amount of transfers
Jasa Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan	344.398.958	88.834.871	Environmental Measurement and Monitoring Services
Jasa Central Data Clearing System	57.124.998	56.250.000	Central Data Clearing System Service
Jumlah	<u>1.543.413.599</u>	<u>794.299.178</u>	Total

24. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

24. OTHER INCOME (EXPENSES)

	2021	2020	
Pendapatan Lain-lain			<i>Other Revenues</i>
Bunga Deposito	2.325.866.051	2.908.311.422	Deposit Interest
Jasa Giro	201.392.602	51.190.082	Current Account Service
Lainnya	4.206.716.030	71.309.091	Other
Sub Jumlah	<u>6.733.974.683</u>	<u>3.030.810.595</u>	Sub Total
Beban Lain-lain			<i>Other Expenses</i>
Pajak Bunga Deposito	(254.333.204)	(379.437.811)	Deposit Interest Tax
Administrasi Bank	(25.561.795)	(11.309.506)	Bank Administration
PPH Final	(80.722.047)	(88.703.210)	Final Income Tax
PPH Non Final	(104.559.416)	(12.021.160)	Non-Final Income Tax
Lainnya	(3.712.003.895)	(2.773.701)	Other
Sub Jumlah	<u>(4.177.180.357)</u>	<u>(494.245.388)</u>	Sub Total
Jumlah	<u>2.556.794.326</u>	<u>2.536.565.207</u>	Total

25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

25. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

a. Sifat Hubungan dan Transaksi

a. *Nature of Relationships and Transactions*

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Sifat Transaksi/ Nature of Transaction
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	Entitas Induk/ Parent Entity	Piutang Usaha, Utang Usaha/ Account Receivables, Account Payables
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	Pemegang Saham/ Shareholders	Piutang Usaha/ Account Receivables

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Saldo Akhir Yang Timbul Dari Transaksi Pihak Berelasi

	2021	2020	
Piutang Usaha			Account Receivables
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	11.121.429.493	-	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	2.675.200.000	1.672.000.000	PT Jakarta Infrastruktur Propertindo
Jumlah	13.796.629.493	1.672.000.000	Total
Percentase Terhadap Total Aset	4,32%	0,52%	Percentage to Total Assets
Utang Usaha			Account Payables
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	-	13.398.257.574	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
Jumlah	-	13.398.257.574	Total
Percentase Terhadap Total Liabilitas	0%	42%	Percentage to Total Liabilities

26. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

a. PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

Pada tanggal 16 Juli 2021, Perusahaan dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Perihal Pemberian Subsidi untuk Pengoperasian dan Perawatan Sarana dan Prasarana Lintas Raya Terpadu Periode 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021.

Jangka waktu pemberian subsidi berlaku dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pada akhir tahun berjalan, selisih kekurangan atau kelebihan pencairan Subsidi Sarana dan Subsidi Prasarana berdasarkan hasil perhitungan kembali maupun akibat adanya penundaan pencairan Subsidi Sarana dan Subsidi Prasarana pada tahun berjalan akan diperhitungkan di tahun berikutnya dengan ketentuan yang berlaku dan telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

Hak dan kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian tersebut antara lain:

i. Perusahaan berhak untuk:

- a. Menerima pencairan subsidi sarana dan subsdi prasarana sebagaimana ketentuan perjanjian ini;

25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (continued)

b. *The Ending Balance Arising From Related Party Transactions*

	2021	2020	
Account Receivables			
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	-	-	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	13.398.257.574	13.398.257.574	Total
Account Payables			
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	-	-	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
Total	13.398.257.574	13.398.257.574	Total
Percentage to Total Assets	42%	42%	Percentage to Total Liabilities

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND ENGAGEMENTS

a. *PT Jakarta Propertindo (Perseroda)*

On July 16, 2021, the Company and PT Jakarta Propertindo (Perseroda) signed a Cooperation Agreement Regarding the Provision of Subsidies for the Operation and Maintenance of Integrated Crossroad Facilities and Infrastructure for the Period 1 January 2021 - 31 December 2021.

The period for granting subsidies is from January 1, 2021 to December 31, 2021.

At the end of the current year, the difference in the shortage or excess of the disbursement of the Facilities Subsidy and Infrastructure Subsidy based on the results of the recalculation as well as the delay in the disbursement of the Facilities Subsidy and Infrastructure Subsidy in the current year will be calculated in the following year with the applicable provisions and has been agreed in the Cooperation Agreement.

The rights and obligations of the Company based on the Agreement include:

i. The company has the right to:

- a. Receive the disbursement of facilities subsidies and infrastructure subsidies as stipulated in this agreement;

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

26. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

a. **PT Jakarta Propertindo (Persero)**

- b. Menerima salinan Berita Acara Pencapaian SPM dan salinan Berita Acara Verifikasi Subsidi dari PT Jakarta Propertindo apabila telah menerimanya dari Dinas Perhubungan.

ii. Perusahaan berkewajiban untuk:

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Subsidi kepada PT Jakarta Propertindo;
- b. menyampaikan dokumen administrasi untuk keperluan pencairan subsidi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu terhadap pasal 18 bahwa Pertanggungjawaban Badan Usaha Penyelenggara Lintas Raya Terpadu secara formal dan material atas penggunaan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian yang diterima dan target kinerjanya sebagai obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

b. **PT Jakarta Infrastruktur Propertindo**

Pada tanggal 27 September 2019, Perusahaan dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo menandatangani Perjanjian Kerja Sama layanan penyediaan advertising sarana LRT Jakarta. Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 27 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2024.

Sehubungan dengan pelaksanaan jasa advertising, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo wajib memberikan bagi hasil kepada Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Tahun ke 1 (27 Sept 2019 s/d 27 Sept 2020)
 - Nilai bagi hasil 19% dari total nilai penjualan (purchase order). Minimal nilai bagi hasil sebesar Rp1.520.000.000.
- ii. Tahun ke 2 s/d tahun ke 5 (28 Sept 2020 s/d 28 Sept 2024)
 - Nilai bagi hasil 30,4% dari total nilai penjualan (purchase order). Minimal nilai bagi hasil sebesar Rp2.432.000.000.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND ENGAGEMENTS
(continued)

a. **PT Jakarta Propertindo (Persero)**

- b. Receive a copy of the Minutes of Achievement of SPM and a copy of the Minutes of Subsidy Verification from PT Jakarta Propertindo if they have received them from the Department of Transportation.

ii. The company is obliged to:

- a. Submit Subsidy Implementation Report to PT Jakarta Propertindo;
- b. Submit administrative documents for subsidy disbursement purposes.

Based on the Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta No. 107 of 2019 concerning Integrated Highway and Integrated Highway Subsidies to article 18 that the responsibility of the Integrated Highway Organizing Business Entity is formally and materially for the use of Railway Infrastructure Subsidies and Railway Facilities Subsidies received and their performance targets as objects of examination by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia.

b. **PT Jakarta Infrastruktur Propertindo**

On September 27, 2019, the Company and PT Jakarta Infrastruktur Propertindo signed a Cooperation Agreement to provide advertising services for the Jakarta LRT facility. This agreement is valid for 5 (five) years from September 27, 2019 to September 27, 2024.

In connection with the implementation of advertising services, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo is obliged to provide profit sharing to the Company with the following conditions:

- i. 1st (Sept 27, 2019 to Sept 28, 2020)

Value sharing 19% of the total value of sales (purchase orders). The minimum profit sharing value is Rp1.520.000.000.

- ii. 2nd year to 5th year (28 Sept 2020 to 28 Sept 2024)

Profit sharing value of 30,4% of the total value of sales (purchase order). The minimum profit sharing value is Rp2.432.000.000.

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

26. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND ENGAGEMENTS
(continued)

c. PT Fintek Karya Nusantara

Pada tanggal 23 Juli 2020, Perusahaan dan PT Fintek Karya Nusantara menandatangani Perjanjian Kerja Sama Perihal Penggunaan Layanan Aplikasi LinkAja pada Gate Electronic Ticketing LRT Jakarta. Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara pengoperasian Aplikasi Layanan QR Code LinkAja atau sampai dengan tahun 2023.

Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama, PT Fintek Karya Nusantara sepakat untuk membayar *joining fee* kepada Perusahaan dengan nilai sebagai berikut:

i. Tahun ke-1 (satu)

Sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) belum termasuk pajak. Pembayaran dilakukan setelah tanggal Perjanjian ini, jangka waktu pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perusahaan mengajukan tagihan.

ii. Tahun ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga)

Sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) belum termasuk pajak. Pembayaran dilakukan setiap tahunnya setelah bulan Agustus, jangka waktu pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perusahaan mengajukan tagihan.

Nilai joining fee akan berubah jika ada mekanisme payment QR Code pada gate electronic ticketing Perusahaan dari pihak ketiga yang menggunakan Perangkat lain, maka nilai yang akan dibayarkan di tahun ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) akan dikurangi 30% (tiga puluh persen) dari nilai joining fee yang dibayarkan pihak ketiga tersebut untuk menggunakan Perangkat di 26 (dua puluh enam) gate. Apabila jumlah Perangkat pada gate yang digunakan oleh pihak ketiga kurang dari 26 (dua puluh enam), maka pengurang atas *joining fee* akan dihitung secara proporsional.

d. PT Indosat Tbk (Indosat)

Pada tanggal 10 September 2020, Perusahaan dan Indosat menandatangani Perjanjian Kerja Sama Perihal Sewa Menyewa Untuk Penempatan Antenna Microcell. Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023.

Penempatan antena microcell berlokasi di 3 Stasiun LRTJ, yaitu di Stasiun Pulomas, Stasiun Boulevard Utara, dan Stasiun Boulevard Selatan. Dengan rincian harga sewa yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

c. PT Fintek Karya Nusantara

On July 23, 2020, the Company and PT Fintek Karya Nusantara signed a Cooperation Agreement Regarding the Use of the LinkAja Application Service at the Jakarta LRT Electronic Ticketing Gate. The term of this Agreement is valid for 3 (three) years from the date of signing the minutes of operation of the LinkAja QR Code Service Application or until 2023.

In connection with the Cooperation Agreement, PT Fintek Karya Nusantara agreed to pay a joining fee to the Company with the following value:

i. 1st year (one)

Rp500.000.000 (five hundred million Rupiah) excluding tax. Payment is made after the date of this Agreement, the payment period is no later than 1 (one) month after the Company submits the invoice.

ii. 2nd (second) and 3rd (third) year

Rp1.500.000.000 (one billion five hundred million Rupiah) excluding tax. Payment is made annually after August, the payment period is no later than 1 (one) month after the Company submits the invoice.

The value of the joining fee will change if there is a QR Code payment mechanism at the company's electronic ticketing gate from a third party using another device, then the value to be paid in the 2nd (two) and 3rd (third) year will be reduced by 30% (three) twenty percent of the value of the joining fee paid by the third party to use the Device at 26 (twenty six) gates. If the number of Devices at the gate used by a third party is less than 26 (twenty six), then the deduction from the joining fee will be calculated proportionally.

d. PT Indosat Tbk (Indosat)

On September 10, 2020, the Company and Indosat signed a Cooperation Agreement Regarding Lease for Microcell Antenna Placement. The term of this agreement is valid for 3 (three) years from June 1, 2020 until May 31, 2023.

Microcell antenna placements are located at 3 LRTJ stations, namely Pulomas Station, North Boulevard Station, and South Boulevard Station. The details of the agreed rental rates are as follows:

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2021
and for the year ended 31 December 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

26. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

d. PT Indosat Tbk (Indosat) (lanjutan)

- i. Stasiun Pulomas (JL. Kayu Putih Raya, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur)
Sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta Rupiah) per tahun atau sebesar Rp126.000.000 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) selama 3 (tiga) tahun belum termasuk PPN, dengan area sewa seluas +/- 2 m² (dua meter persegi).
- ii. Stasiun Boulevard Utara (JL. Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara)
Sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta Rupiah) per tahun atau sebesar Rp126.000.000 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) selama 3 (tiga) tahun belum termasuk PPN, dengan area sewa seluas +/- 2 m² (dua meter persegi).
- iii. Stasiun Boulevard Selatan (JL. Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara)
Sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta Rupiah) per tahun atau sebesar Rp126.000.000 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) selama 3 (tiga) tahun belum termasuk PPN, dengan area sewa seluas +/- 2 m² (dua meter persegi).

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, pembayaran akan dibayar dimuka sebesar tagihan untuk 3 (tiga) tahun sekaligus setelah tanggal Perjanjian ini, jangka waktu pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perusahaan mengajukan tagihan. Selain itu PT Indosat wajib menyerahkan uang jaminan sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta Rupiah).

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND ENGAGEMENTS
(continued)

d. PT Indosat Tbk (Indosat) (continued)

- i. Pulomas Station (JL. Kayu Putih Raya, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta)
Rp42.000.000 (forty two million Rupiah) per year or Rp126.000.000 (one hundred twenty six million Rupiah) for 3 (three) years excluding VAT, with a rental area of +/- 2 m² (two square meters).
- ii. North Boulevard Station (JL. Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, North Jakarta)
Rp42.000.000 (forty two million Rupiah) per year or Rp126.000.000 (one hundred twenty six million Rupiah) for 3 (three) years excluding VAT, with a rental area of +/- 2 m² (two square meters).
- iii. South Boulevard Station (JL. Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, North Jakarta)
Rp42.000.000 (forty two million Rupiah) per year or Rp126.000.000 (one hundred twenty six million Rupiah) for 3 (three) years excluding VAT, with a rental area of +/- 2 m² (two square meters).

Based on the Cooperation Agreement, payment will be paid in advance of the invoice for 3 (three) years at a time after the date of this Agreement, the payment period is no later than 1 (one) month after the Company submits the invoice. In addition, PT Indosat is required to submit a security deposit of Rp42.000.000 (forty two million Rupiah).

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko dalam perusahaan terhubung erat dengan praktik Good Corporate Governance (GCG) dalam menciptakan nilai perusahaan secara kesinambungan melalui pola pertumbuhan yang sehat dalam jangka panjang. Komitmen perusahaan dalam menerapkan GCG diwujudkan melalui penetapan *Code of Corporate Governance* yang mengatur organ-organ Perusahaan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi serta *Code of Conduct* PT LRT Jakarta yang mengatur perilaku karyawan dalam menciptakan etika bisnis & etika kerja yang baik dalam pemenuhan GCG. Disamping pemenuhan komitmen yang kuat dalam mendorong terlaksananya pengelolaan perusahaan dengan berupaya merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, termasuk juga dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan agar ketiga komponen tersebut, baik *Governance, Risk Management & Compliance (GRC)* dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan baik.

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenali faktor-faktor risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan PT LRT Jakarta, menyebabkan kerugian atau bahkan merusak reputasi Perusahaan. Identifikasi risiko secara menyeluruh yang ada di dalam PT LRT Jakarta akan menghasilkan suatu daftar risiko (*risk register*). Seluruh risiko yang telah teridentifikasi kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu seperti risiko strategis, risiko gangguan operasional, risiko finansial, risiko reputasi, risiko kepegawaian dan lain-lain. Aktivitas identifikasi risiko merupakan tanggung jawab masing-masing risk owner untuk proses dan unit terkait.

Manajemen Kepatuhan

Manajemen Kepatuhan diimplementasikan dan dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tercapainya visi dan misi Perusahaan yang berlandaskan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan internal Perusahaan yang berlaku.
2. Mewujudkan serta membudayakan Kepatuhan pada semua lini bisnis dan kegiatan usaha Perusahaan.
3. Mengoptimalkan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan tetap melaksanakan Good Corporate Governance
4. Peningkatan kesadaran dan disiplin insan Perusahaan terhadap aturan main (rule of the game) dalam seluruh kegiatan usaha Perusahaan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
5. Mengelola risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Risk Management

Risk Management in the company is closely connected with the practice of Good Corporate Governance (GCG) in creating sustainable corporate value through a healthy growth pattern in the long term. The company's commitment to implementing GCG is realized through the establishment of a Code of Corporate Governance that regulates the Company's organs, such as the General Meeting of Shareholders (GMS), Commissioners and Directors as well as the PT LRTJ Code of Conduct which regulates employee behavior in creating good business ethics & work ethics. In fulfilling GCG. In addition to fulfilling a strong commitment to encourage the implementation of corporate management by trying to formulate and apply the principles of good corporate management, including risk management and compliance so that the three components, namely Governance, Risk Management & Compliance (GRC) can go hand in hand and be integrated well.

Risk identification is carried out with the aim of identifying risk factors that can hinder the achievement of PT LRT Jakarta's goals, cause losses or even damage the Company's reputation. Overall risk identification in PT LRT Jakarta will produce a risk register. All identified risks are then grouped into certain categories such as strategic risk, operational disruption risk, financial risk, reputation risk, personnel risk and others. Risk identification activities are the responsibility of each risk owner for related processes and units.

Compliance Management

Compliance Management is implemented and developed with the following objectives:

1. Achievement of the Company's vision and mission based on compliance with laws and regulations and applicable internal company regulations.
2. Realizing and cultivating Compliance in all business lines and business activities of the Company.
3. Optimizing profits and benefits for interested parties (stakeholders) while continuing to implement Good Corporate Governance
4. Increasing awareness and discipline of the Company's personnel towards the rule of the game in all of the Company's business activities based on the precautionary principle.
5. Manage the Compliance risk faced by the Company.

28. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Tidak ada peristiwa/kejadian penting setelah tanggal laporan posisi keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

29. TANGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang diselesaikan dan setuju untuk terbit pada tanggal 25 Februari 2022.

28. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

There are no significant events after the date of the statement of financial position that have a significant effect on the financial statements.

29. MANAGEMENT RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management is responsible for the presentation and disclosure of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2021 which were completed and agreed to be published on February 25, 2022.



LRT JAKARTA

2021
Laporan Tahunan
Annual Report

MENGEJAR PERTUMBUHAN INKLUSIF

THE PURSUIT OF INCLUSIVE GROWTH



LRT JAKARTA

PT LRT Jakarta

GEDUNG MCC - DEPO LRT JAKARTA

Jl. Raya Kelapa Nias, RW025,
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 14250
Tel. +6221 8061 7490

